

WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

dan

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Tanjungbalai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dearah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

7. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 2005-2025 selama 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjuntnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah,
21. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

23. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dan membiayai penyeleggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
24. Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kodisi riil saat perencanaan dibuat.
25. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam percanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
29. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
30. Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

31. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
32. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
33. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
34. Program pembangunan daerah adalah program program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
35. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivits pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
36. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil /dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
37. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapain kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
38. Keluaran (output) adalah Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
39. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

40. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
42. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
43. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
44. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutantelah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
TAHUN 2021-2026

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
a. visi dan misi Walikota terpilih; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
TAHUN 2021-2026

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX : PENUTUP

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Tanjungbalai.
(2) Pengendalian dan evalusi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3(tiga) tahun;
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun awal di bawah kepemimpinan Walikota terpilih hasil pemilihan umum Walikota pada periode berikutnya;

(2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada ayat 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam masa kepemimpinan Walikota terpilih;

(3) Mengingat masa jabatan Walikota adalah 2021-2024, maka sisa waktu periode RPJMD masih dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan tahunan selama masa transisi, selama sebelum adanya revisi atau penyesuaian dengan kebijakan yang baru dari Pemerintah.

(4) Selanjutnya RKPD masa transisi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas RPJMD periode berikutnya. Dan RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk Menyusun APBD pada masa transisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 September 2021

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI,

ttd

WARIS

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 September 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

NURMALINI MARPAUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021
NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026 : (1-112/2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO KOTA TANJUNGBALAI,

HERMAN GULTOM, SH.
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

Lampiran Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai
Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 10 September 2021
Tentang RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanjungbalai

Tahun 2021

PENGANTAR

Puji serta syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi Ranperda tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah proses penyempurnaan rancangan akhir RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD. Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 terdiri dari: Pendahuluan; Gambaran umum kondisi Daerah, Gambaran keuangan Daerah; Permasalahan dan isu srategis Daerah; Visi, misi, tujuan dan sasaran; Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; serta Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan penutup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai lima tahun mendatang.

Tanjungbalai, September 2021

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI

H. WARIS, S.Ag, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI i
BAB I
PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-4
1.4. Maksud dan Tujuan I-9
1.4.1. Maksud I-9
1.4.2. Tujuan I-9
1.5. Sistematika Penulisan I-9
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-7
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-10
2.1.4. Demografi II-12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-16
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-23
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-30
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-32
2.3.1. Focus Layanan Urusan Wajib II-32
2.3.1.1. Urusan Wajib Pendidikan II-32
2.3.1.2. Urusan Wajib Kesehatan II-37
2.3.1.3. Urusan Wajib PU dan Penataan Ruang II-43
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-45
2.3.1.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-47
2.3.1.6. Urusan Wajib Sosial II-49
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-51

2.3.2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja II-51
2.3.2.2. Urusan Wajib Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak II-57
2.3.2.3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan II-58
2.3.2.4. Urusan Wajib Pertanahan II-59
2.3.2.5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup II-59
2.3.2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-61
2.3.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-62
2.3.2.8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-63
2.3.2.9. Urusan Wajib Perhubungan II-67
2.3.2.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika II-70
2.3.2.11. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-71
2.3.2.12. Urusan Wajib Penanaman Modal II-71
2.3.2.13. Urusan Wajib Statistik II-72
2.3.2.14. Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan II-72
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-73
2.3.3.1. Urusan Pilihan Pariwisata II-73
2.3.3.2. Urusan Pilihan Pertanian II-74
2.3.3.3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan II-77
2.3.3.4. Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian II-79
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang II-80
2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan II-80
2.3.4.2. Keuangan II-81
2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan II-83
2.3.4.4. Pengawasan II-84
2.4. Aspek daya Saing Daerah II-84
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-84
2.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur II-86
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-87
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-89
2.5. Capaian Kinerja RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 ..... II-91
2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II-123
2.7. Kerjasama Daerah II-129
2.8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal II-132

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.2. Neraca Daerah III-27
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-34
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-34
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah III-35
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah III-36
3.3. Proporsi Penggunaan Anggaran III-37
3.4. Analis Pembiayaan III-37
3.5. Kerangka Pendanaan III-41
3.5.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 ..... III-42
3.5.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026 ..... III-44
3.5.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2026 ..... III-45
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1. Permasalahan Pokok Daerah IV-1
4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah IV-5
4.1.2.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar IV-5
4.1.2.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar IV-7
4.1.2.3. Urusan Pilihan IV-10
4.1.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan IV-12
4.2. Isu-Isu Strategis IV-13
4.2.1. Telaahan Isu Strategis Internasional IV-14
4.2.1.1. Isu Perkembangan Ekonomi Global IV-14
4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) IV-16
4.2.2. Telaahan Isu Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) IV-17
4.2.3. Telaahan Terkait Isu Nasional IV-18
4.2.3.1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi IV-18
4.2.3.2 Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital IV-19
4.2.3.3. Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan IV-20

4.2.3.4. Revolusi Mental IV-20
4.2.4. Telaahan Isu Strategi Provinsi Sumatera Utara IV-21
4.2.4.1. Ketimpangan IV-21
4.2.4.2. Kemiskinan IV-22
4.2.4.3. Pengangguran IV-22
4.2.5. Telaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV-22
4.2.6. Telaahan Terhadap RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 ..... IV-23
4.2.6.1. Rencana Struktur Ruang IV-23
4.2.6.2. Rencana Pola Ruang IV-28
4.2.6.3. Rencana Kawasan Strategis IV-33
4.2.7. Telaahan Terhadap RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 ..... IV-35
4.2.8. Telaahan Terhadap KLHS IV-37
4.2.9. Penelaahan Terhadap RPJMD Daerah Lainnya IV-78
4.2.10. Isu Strategis Kota Tanjungbalai IV-78
4.2.10.1. Reformasi Birokrasi IV-78
4.2.10.2. Revolusi Mental Dengan Pengamalan Nilai-nilai Ajaran Agama dan Kehidupan Berdemokrasi IV-79
4.2.10.3. Daya Saing Daerah dan Penanaman Modal (Investasi) IV-80
4.2.10.4. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan IV-82
4.2.10.5. Pembangunan Sumber Daya Manusia IV-83
4.2.10.6. Penyediaan Infrastruktur IV-84
4.2.10.7. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah IV-86
4.2.10.8. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan IV-86

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1. Visi V-1
5.2. Misi V-1
5.3. Tujuan Dan Sasaran V-6
5.3.1. Tujuan V-6
5.3.2. Sasaran V-7

BAB VI
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1. Strategi Pembangunan VI-1
6.1.1. Strategi Untuk Mencapai Misi Pertama VI-1

6.1.2. Strategi Untuk Mencapai Misi Kedua VI-2
6.1.3. Strategi Untuk Mencapai Misi Ketiga VI-2
6.1.4. Strategi Untuk Mencapai Misi Keempat VI-3
6.1.5. Strategi Untuk Mencapai Misi Kelima VI-4
6.1.6. Strategi Untuk Mencapai Misi Keenam VI-4
6.1.7. Strategi Untuk Mencapai Misi Ketujuh VI-5
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan VI-8
6.2.1. Fokus Pembangunan VI-10
6.2.2. Arah Kebijakan Strategi Terkait Pelaksanaan Masing-Masing Misi VI-11
6.3. Program Pembangunan Daerah VI-26
6.3.1. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Sasaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VI-26
6.3.2. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pencapaian SPM VI-52
6.3.3. Program Prioritas Kepala Daerah VI-60
6.4. Kerangka Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai VI-67

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Utama VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Daerah VIII-2

BAB IX
PENUTUP IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan IX-1
9.2. Pedoman Transisi IX-2

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2019 ..... II-3

Tabel 2.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-5

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-6

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-6

Tabel 2.5. Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-10

Tabel 2.6. Kejadian Bencana di Kota Tanjungbala, 2016-2020 ..... II-11

Tabel 2.7. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2020 ..... II-14

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2016-2020 ..... II-15

Tabel 2.9. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-16

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Milyar Rupiah) II-16

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah) II-17

Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (Persen), 2016-2020 ..... II-19

Tabel 2.13. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjunbalai, 2016-2020 ..... II-20

Tabel 2.14. PDRB ADHB Per Kapita Kota Tanjungbalai (Juta Rupiah), 2016-2020 ..... II-22

Tabel 2.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-27

Tabel 2.16. Incremetal Capital Output Ratio (ICOR) di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-29

Tabel 2.17. Pembinaan Atlet di Kota Tanjunbalai, 2020 ..... II-30

Tabel 2.18. Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tanjungbalai II-31

Tabel 2.19. Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga II-31

Tabel 2.20. Tingkat Melek Huruf 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2015-2020 ..... II-32

Tabel 2.21. Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2016-2020 ..... II-33

Tabel 2.22. Perkembangan APM Kota Tanjungbalai (%), 2016-2020 ..... II-33

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang di Tamatkan, 2016-2020 ..... II-34
Tabel 2.24. Kualifikasi Guru Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-35
Tabel 2.25. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pendidikan II-36
Tabel 2.26. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai II-39
Tabel 2.27. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-39
Tabel 2.28. Banyaknya Fasilitasi Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-40
Tabel 2.29. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-40
Tabel 2.30. Banyaknya Tenaga Dokter Menurut Kecamatan Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-41
Tabel 2.31. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-41
Tabel 2.32. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-42
Tabel 2.33. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kesehatan II-42
Tabel 2.34. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-44
Tabel 2.35. Banyaknya Pelanggan, Daya Tersambung, KWH terjual dan Nilai Listrik yang disalurkan Menurut Jenis Pemakai,2019 ..... II-45
Tabel 2.36. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2016-2020 ..... II-46
Tabel 2.37. Banyaknya Pelanggan Air Minum yang Disalurkan dan Nilai Air Minum Menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2019 ..... II-46
Tabel 2.38. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, 2016-2020 ..... II-47
Tabel 2.39. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2016-2020 ..... II-47
Tabel 2.40. Jumlah Demonstrasi di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-48
Tabel 2.41. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-48
Tabel 2.42. Sarana/Prasarana Keamanan, Ketertiban Umum dan Tanggap Bencana Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-49
Tabel 2.43. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-50
Tabel 2.44. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2016-2020 ..... II-51

Tabel 2.45. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-51
Tabel 2.46. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-54
Tabel 2.47. Penduduk 15 Tahun ke Atas Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-54
Tabel 2.48. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-55
Tabel 2.49. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-56
Tabel 2.50. Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Tenaga Kerja II-56
Tabel 2.51. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak II-57
Tabel 2.52. Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Ketahanan Pangan II-58
Tabel 2.53. Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pertanahan II-59
Tabel 2.54. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup II-59
Tabel 2.55. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-61
Tabel 2.56. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-62
Tabel 2.57. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Keatas yang Berstatus Pernah Kawin Kota Tanjungbalai, 2019 ..... II-64
Tabel 2.58. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-64
Tabel 2.59. Persentase Wanita Berusia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara yang sedang digunakan KB di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-64
Tabel 2.60. Kinerja Pemerintah Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-66
Tabel 2.61. Prasarana dan Sarana Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-67
Tabel 2.62. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perhubungan II-68
Tabel 2.63. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika II-70
Tabel 2.64. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-71
Tabel 2.65. Lama Proses Perizinan di Kota Tanjungbalai II-71
Tabel 2.66. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan II-72

Tabel 2.67. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pariwisata II-73
Tabel 2.68. Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 (Kw/Ha) II-74
Tabel 2.69. Banyaknya Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak Kota Tanjungbalai, 2017-2019 ..... II-75
Tabel 2.70. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pertanian II-75
Tabel 2.71. Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Ton) II-77
Tabel 2.72. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kelautan dan Perikanan II-78
Tabel 2.73. Bobot dan Nilai Ekspor/Impor dari Pelabauhan Tanjungbalai-Asahan 2014-2019 ..... II-79
Tabel 2.74. Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Menurut Kecamatan, 2020 ..... II-79
Tabel 2.75. Perkembangan Industri Kecil dan Jasa di Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2017 dan 2019 ..... II-80
Tabel 2.76. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perdagangan dan Perindustrian II-80
Tabel 2.77. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perencanaan Pembangunan II-80
Tabel 2.78. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Keuangan II-81
Tabel 2.79. Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II-83
Tabel 2.80 Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengawasan II-84
Tabel 2.81. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2.82. Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan, 2020 ..... II-87
Tabel 2.83. Banyaknya Kejahatan/Pelanggaran Menurut Jenisnya di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-87
Tabel 2.84. Jumlah Demontrasi di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-88
Tabel 2.85. Lama Proses Perizinan di Kota Tanjunbalai II-89
Tabel 2.86. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi di Kota Tanjungbalai, 2017-2020 ..... II-89
Tabel 2.87. Rasio Lulusan S1/S2/S3, 2016-2020 ..... II-90
Tabel 2.88. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai II-92
Tabel 2.89. Capaian TPB Kota Tanjungbalai II-126
Tabel 2.90. Indikator TPB Yang Memiliki Keterkaitan Dengan DDDTLH II-127
Tabel 2.91. Analisis Data Tabular DDDTLH II-129

Tabel 2.92. Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-130

Tabel 2.93. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dalam RPJMD yang mendukung Pelaksanaan SPM (Standard Pelayanan Minimal) Kota Tanjungbalai II-132

BAB III

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar) III-2

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar) III-3

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tanjungbalai Taun, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-4

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-4

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-5

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-6

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan (DP) Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-7

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-8

Tabel 3.9. Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-9

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-9

Tabel 3.11. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-10

Tabel 3.12. Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar) III-11

Tabel 3.13. Targer dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-12

Tabel 3.14. Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-13

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, 2015-2019 (Rp. Milyar) III-16

Tabel 3.16. Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Kota Tanjungbalai, 2015-2019 (Rp. Milyar) III-16

Tabel 3.17. Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (BTL) Kota Tanjungbalai, 2015-2019 (Rp. Milyar) III-17
Tabel 3.18. Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Langsung (BL) Kota Tanjungbalai, 2015-2019 (Rp. Milyar) III-18
Tabel 3.19. Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Milyar) III-19
Tabel 3.20. Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Milyar) III-20
Tabel 3.21. Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Milyar) III-20
Tabel 3.22. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-21
Tabel 3.23. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-22
Tabel 3.24. Target dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-23
Tabel 3.25. Target dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Kota Tanjungbalai, 2015-2019 (Rp. Milyar) III-24
Tabel 3.26. Target dan Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar) III-24
Tabel 3.27. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Rp. Milyar) III-25
Tabel 3.28. Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 (Rp. Milyar) III-26
Tabel 3.29. Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar) III-26
Tabel 3.30. Target dan Realisasi Pembiayaan berasal dari APBN, Tahun 2016–2020 (Rp) III-27
Tabel 3.31. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Tanjungbalai, Tahun 2016–2020 ..... III-28
Tabel 3.32. Analisis Rasio Keuangan Kota Tanjungbalai,Tahun 2016–2020 ..... III-33
Tabel 3.33. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 ..... III-37
Tabel 3.34. Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai (Dalam Miliar Rupiah) III-38
Tabel 3.35. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai (Dalam Juta Rupiah) III-38
Tabel 3.36. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Dalam Juta Rupiah) III-39

Tabel 3.37. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Dalam Miliar Rupiah) III-40
Tabel 3.38. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Tanjungbalai, Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah) III-41
Tabel 3.39. Proyeksi Pendapatan Kota Tanjungbalai, Tahun 2022-2026 ..... III-43
Tabel 3.40. Proyeksi Belanja Kota Tanjungbalai, Tahun 2022-2026 ..... III-45
Tabel 3.41. Proyeksi Pembiayaan Kota Tanjungbalai, Tahun 2022-2026 ..... III-47

BAB IV

Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
Tabel 4.2. Hasil Telaahan Struktur Ruang Kota Tanjungbalai IV-24
Tabel 4.3. Hasil Telaahan Pola Ruang Kota Tanjungbalai IV-29
Tabel 4.4. Hasil Telaahan Kawasan Strategis Kota Tanjungbalai IV-34
Tabel 4.5. Capaian Sasaran Pokok RPJPD Kota Tanjungbalai Tahap III (2015- 2020) IV-35
Tabel 4.6. Matrix Penelahaan Integrasi KLHS dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... IV-38
Tabel 4.7. Identifikasi RPJMD Daerah Lainnya IV-78
Tabel 4.8. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Perbulan di Kota Tanjungbalai, 2015-2019 ..... IV-81
Tabel 4.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 ..... IV-81

BAB V

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... V-8

BAB VI

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VI-5
Tabel 6.2. Tema/Fokus Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VI-10
Tabel 6.3. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama VI-12
Tabel 6.4. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua VI-15
Tabel 6.5. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga VI-17
Tabel 6.6. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat VI-19

Tabel 6.7. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima VI-22
Tabel 6.8. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam VI-24
Tabel 6.9. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh VI-25
Tabel 6.10. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VI-27
Tabel 6.11. Capaian dan Target SPM Kota Tanjungbalai 2021-2026 ..... VI-63
Tabel 6.12. Program Prioritas Daerah Tahun 2021-2026 ..... VI-71

BAB VII

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VII-2
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VII-4

BAB VIII

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VIII-1
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelengggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... VIII-3

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1. RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan I-5

Gambar 1.2. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah I-6

Gambar 1.3. Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah I-7

Gambar 1.4. Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah I-7

BAB II

Gambar 2.1. Luas Kota Tanjungbalai Berdasarkan Kecamatan (ha) II-1

Gambar 2.2. Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai II-2

Gambar 2.3. Peta Wilayah Kota Tanjungbalai Berdasarkan Geologi II-4

Gambar 2.4. Peta Wilayah Kota Tanjungbalai Berdasarkan Rawan Banjir II-12

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-13

Gambar 2.6. Persentase Penduduk Berdasarkan Generasi di Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-14

Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-15

Gambar 2.8. Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010, 2016-2020 ..... II-19

Grafik 2.9. Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar , Provinsi Sumatera Utara dan Nasioanal , 2016-2020 ..... II-22

Grafik 2.10. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota , 2020 ..... II-23

Grafik 2.11. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, SUMUT dan Nasional, 2016-2020 ..... II-23

Grafik 2.12. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota, SUMUT dan Nasonal, 2020 ..... II-24

Grafik 2.13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-25

Grafik 2.14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-25

Gambar 2.15. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-26

Gambar 2.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-26

Gambar 2.17. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-27

Gambar 2.18. Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 ..... II-28
Gambar 2.19. Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Nasional, 2020 ..... II-29
Gambar 2.20. Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta, 2020 ..... II-34
Gambar 2.21. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-35
Gambar 2.22. Angka Kematian Bayi dan Balita Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-37
Gambar 2.23. Angka Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-38
Gambar 2.24. Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-38
Gambar 2.25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-52
Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-52
Gambar 2.27. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, 2020 ..... II-53
Gambar 2.28. Rasio Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-53
Gambar 2.29. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin dan Komponen Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Kerja/Pengurangan Jam Kerja, 2020 ..... II-55
Gambar 2.30. Banyaknya Kegiatan Pengurusan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, 2020 ..... II-61
Gambar 2.31. Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera di Kota Tanjungbalai, 2018 ..... II-65
Gambar 2.32. Nilai Tukar Petani Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-85
Gambar 2.33. Produktivitas Total Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-86
Gambar 2.34. Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Tanjungbalai, 2016-2020 ..... II-91
Gambar 2.35. TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target II-123
Gambar 2.36. TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target II-124
Gambar 2.37. TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target II-125
Gambar 2.38. TPB Yang Dieliminasi II-125

BAB III

Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016–2020 (Persen) III-13
Gambar 3.2. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 (Persen) III-15
Gambar 3.3. Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Persen) III-21
Gambar 3.4. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah III-42

Gambar 3.5. Analisis Proyeksi Belanja Daerah III-44
Gambar 3.6. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah III-46

BAB IV

Gambar 4.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid 19 ..... IV-15

BAB V

Gambar 5.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara ASEAN Tahun 2020-2026 ..... V-13
Gambar 5.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 – 2026 ..... V-14
Gambar 5.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjung Balai 2021 – 2026 ..... V-15
Gambar 5.4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 ..... V-16
Gambar 5.5. Proyeksi Pendapatan Perkapita ADHB Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 ..... V-16
Gambar 5.6. Proyeksi Perkembangan Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 ..... V-17
Gambar 5.7. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 ..... V-18
Gambar 5.8. Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 ..... V-19
Gambar 5.9. Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ..... V-20

BAB VI

Gambar 6.1. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 1 ..... VI-78
Gambar 6.2. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 2 ..... VI-79
Gambar 6.3. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 3 ..... VI-80
Gambar 6.4. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 4 ..... VI-81
Gambar 6.5. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 5 ..... VI-82
Gambar 6.6. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 6 ..... VI-83
Gambar 6.7. Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 7 ..... VI-84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2020 menetapkan bahwa pasangan M. Syahrial, SH, MH dan H. Waris, S.Ag, MM sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:131.12-359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan amanat Undang-Undang diatas, maka kepada daerah melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dan strategis karena merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 05 Tahun 2009. RPJMD tahap ini menjadi penentu dan akan sangat mempengaruhi pencapaian arah pembangunan jangka panjang dimana target skala prioritas sebagai agenda pada periodesasi RPJMD IV (2021-2025) adalah mewujudkan masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju, mandiri dan madani melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing serta berbudaya dan religius.

Selain itu, penyusunan RPJMD harus dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan memperhatikan analisis gambaran aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan daerah baik aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan jangka menengah ke depan dapat menjawab permasalahan tantangan global terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai. Berkelanjutan dimaksud adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa penyusunan dokumen RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik dan merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya disusun rancangan RPJMD sebagai proses penyempurnaan rancangan awal berdasarkan rancangan Renstra Perangkat daerah yang telah diverifikasi dan dimusrenbangkan bersama para pemangku kepentingan untuk memperoleh kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Kemudian berlanjut dengan penyusunan rancangan akhir yang merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.

Rancangan akhir RPJMD menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan diperdakan 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kot akecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

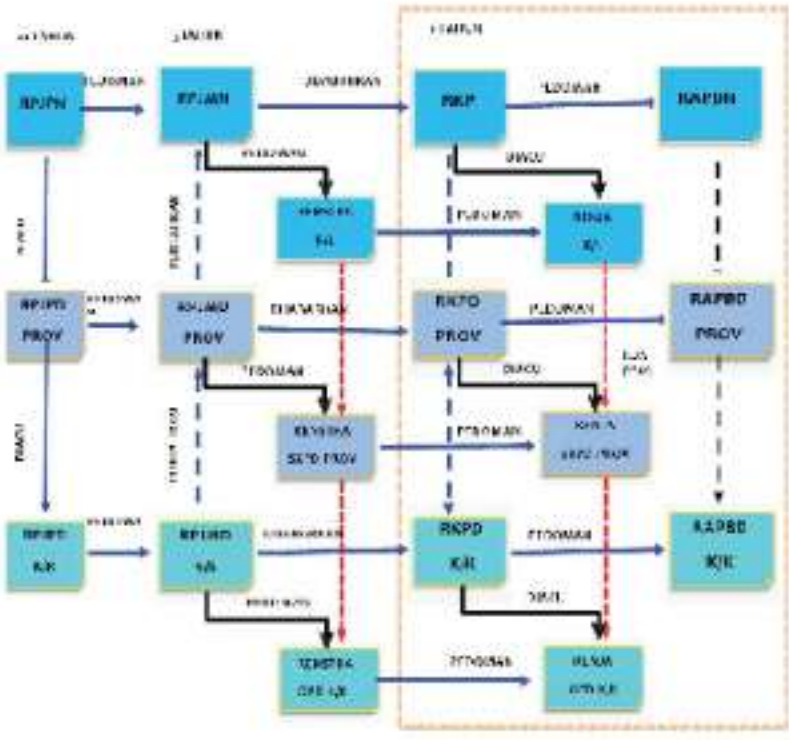
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klaisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025, RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 disamping harus menelaah RPJMD daerah lain (daerah tetangga). RPJMD disusun harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada diagram alur berikut ini:



Gambar 1.1.
RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 dan memperhatikan keselarasannya dengan RPJMN serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kota Tanjungbalai dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yakni dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah.
Penjabaran keterkaitan antar dokumen rencana lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. **RPJMD Kota Tanjungbalai dengan RPJPD Kota Tanjungbalai**

   Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 mempedomani *tahapan keempat* pelaksanaan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yang menekankan keberlanjutan RPJMD Tahun ketiga yakni mewujudkan masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju, mandiri dan madani melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas, berdaya saing serta berbudaya dan religious.

Mempedomani RPJPD dimaksudkan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Sasaran pokok sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD Kota Tanjungbalai tahun 2005-2025 dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan capaian sasaran pokok RPJPD dan guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.



Gambar 1.2.
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah

2. RPJMD Kota Tanjungbalai dengan Renstra SKPD

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Selanjutnya perumusan rancangan RPJMD disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah. Artinya bahwa rangkaian proses kegiatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian penyusunan RPJMD.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan pada Renstra Perangkat Daerah harus mempedomani program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

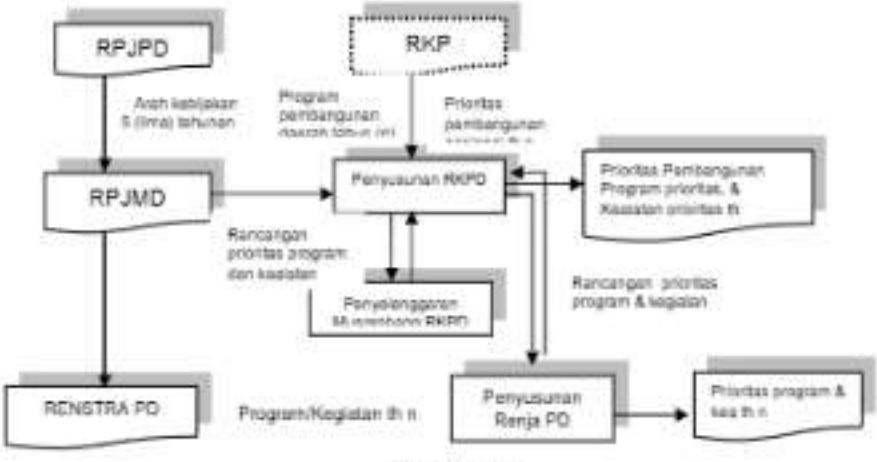


Gambar 1.3
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

3. RPJMD Kota Tanjungbalai dengan RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja yang disertai dengan kebutuhan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain berpedoman kepada RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman kepada RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional juga pedoman penyusunan RKPD.

Berpedoman pada RPJMD dimaksud yakni penetapan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah harus selaras dengan sasaran, arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Arah kebijakan pembangunan pada RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar 1.4.
Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

4. **RPJMD Kota Tanjungbalai dengan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)**

Diketahui bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu dokumen RPJMD yang disusun harus dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menegah daerah suatu wilayah ke dalam tatanan arah kebijakan dan Program.

5. **RPJMD Kota Tanjungbalai dengan dokumen perencanaan lainnya**

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 memerlukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sumatera Utara dan dokumen rencana terkait Kabupaten/Kota di sekitar Kota Tanjungbalai, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten Asahan;
7. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral);

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW sehingga diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya dengan cara: Menelaah rencana struktur ruang; Menelaah rencana pola ruang dan menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai berpedoman pada RTRW Kota Tanjungbalai yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang di Kota Tanjungbalai. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi

lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya sinergitas dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya mutlak dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan informasi tentang analisis yang komprehensif mengenai rencana pembangunan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;
b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
c. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
d. Merumuskan alternatif strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan yang dapat digunakan untuk mencapai kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kota Tanjungbalai.
e. Menetapkan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan beserta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026;
f. Menetapkan kinerja pembangunan daerah dengan merumuskan Indikator kinerja Daerah sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah daerah periode 2021-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan akhir RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**
Menjelaskan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**
Menjelaskan penyajian secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang selaras untuk mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III **Gambaran Keuangan Daerah**
Menjelaskan penyajian gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi analisis kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan rencana kerangka pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**
Menjelaskan tentang butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang yang meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
Menjelaskan tentang visi, misi daerah lima tahun ke depan yang dinukil dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang dilanjutkan menguraikan rumusan tujuan dan sasaran.

BAB VI **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**
Menjelaskan uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih juga menguraikan program pembangunan yang dirumuskan dari masing - masing strategi.

BAB VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**
Menjelaskan tentang muatan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja yang disertai target pagu indikatif.

BAB VIII **Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**
Menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX **Penutup**

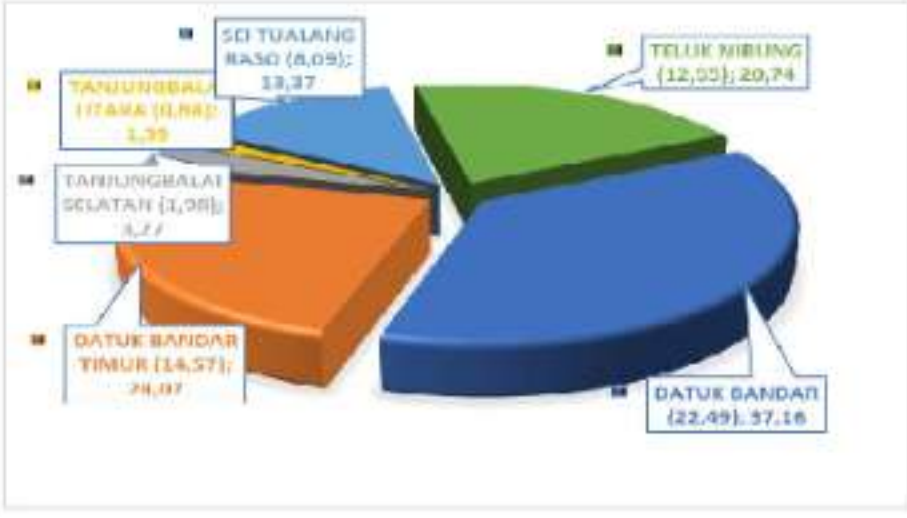
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

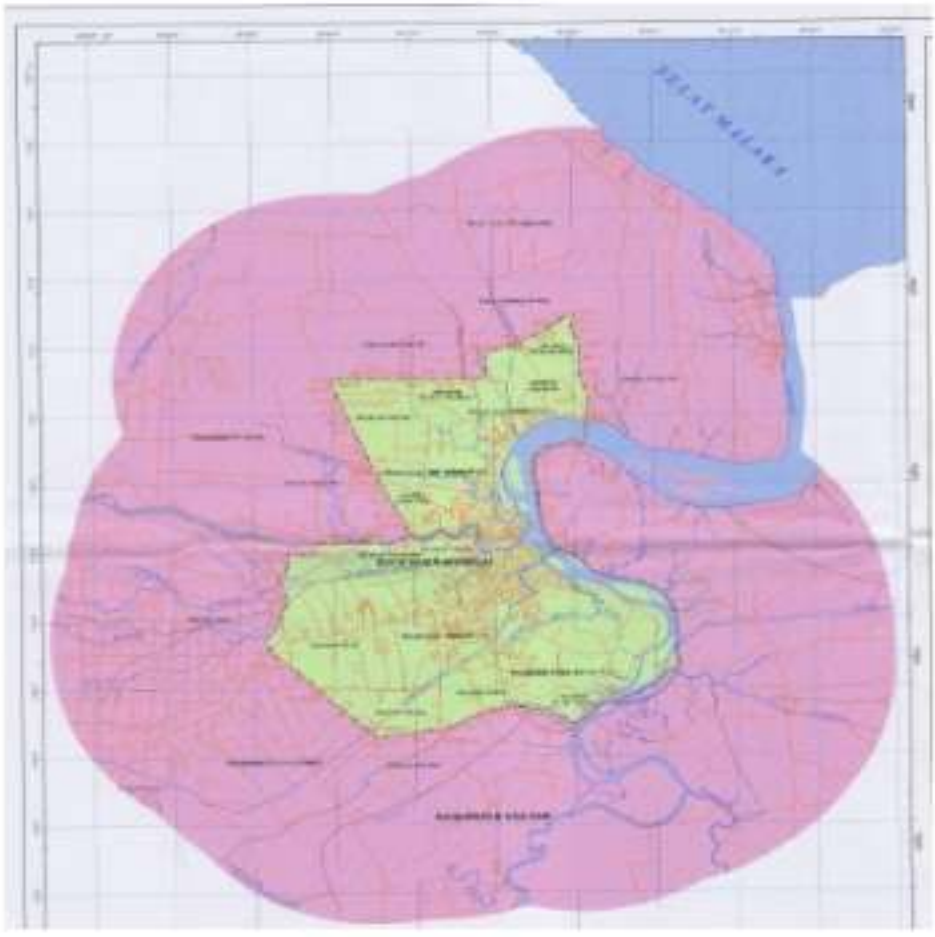
Luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 6.052 Ha atau 60,52 km^2 dan menjadi wilayah terkecil di Sumatera Utara selain Kota Sibolga dan Kota Tebing Tinggi. Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 37,16 Ha atau sekitar 37,16 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai, sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 84 ha atau hanya sekitar 1,39 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.1.
Luas Kota Tanjungbalai Berdasarkan Kecamatan (ha)
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Batas wilayah Kota Tanjungbalai secara rinci adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
Sebelah selatan	: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelah barat	: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelah timur	: Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan



Gambar 2.2.
Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai
Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kota Tanjungbalai terletak di antara 2°58'15"- 3°01'32" Lintang Utara dan 99°48'00"-99°50'16" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, memiliki akses yang sangat mudah menuju tempat wisata internasional yakni kawasan Danau Toba. Oleh karenanya kini Kota Tanjungbalai memiliki sebutan baru yakni "***Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba***".

b. Posisi Geostrategis

Kota Tanjungbalai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi, Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir Timur Pulau Sumatera.

c. Kondisi/Kawasan

Kota Tanjungbalai berada di wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara tepatnya berada di tepi Sungai Asahan yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera Utara.

3. Topografi

a. Ketinggian Lahan

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

Tabel 2.1.
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2020

No	Kecamatan	Tinggi (m)
1	Datuk Bandar	3
2	Datuk Bandar Timur	2
3	Tanjungbalai Selatan	2
4	Tanjungbalai Utara	2
5	Sei Tualang Raso	1,5
6	Teluk Nibung	0-1

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

b. Kemiringan Lahan

Data kemiringan suatu wilayah berkaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, antara lain: data morfologi dan kemiringan lereng. Ditinjau dari kondisinya, Kota Tanjungbalai memiliki kemiringan lahan 0-2% menjadikan permukaan tanah di seluruh wilayah merupakan dataran yang hampir rata.

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, jenis batuan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, meliputi alluvium muda yang terdapat di seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, alluvium tua (kerikil, pasir, lempung) yang tersebar di Kecamatan Datuk Bandar, dan aneka terobosan yang menyebar di sebagian Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Sei Tualang Raso.

b. Potensi

Potensi sumber daya alam bila ditinjau dari sisi geologi adalah Galian golongan C berupa pasir yang tersebar di sepanjang Sungai Silau dan sebagian Sungai Asahan.



Gambar 2.3
Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Geologi
Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

5. Hidrologi

a. Sungai

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut diantaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Kondisi air sungai saat ini telah mengalami pencemaran. Hal tersebut disebabkan oleh limbah perkotaan dan pembuangan sampah ke sungai. Penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pencucian pasir-pasir maupun akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir bebas ke badan-badan air. Diketahui bahwa jika vegetasi tidak ada, maka air hujan langsung jadi *overland flow* dan biasanya membawa material-material yang dapat mengurangi kualitas air sungai.

Tabel 2.2.
Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai, 2020

Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)
Sungai Bandar Jaksa	8,20	10,00
Sungai Bandar Jepang	5,10	6,1 s/d 5,6
Sungai Bandar Sipoyong	6,00	6,00
Sungai Kanal Sultan	4,00	10,15
Sungai Giam I	6,50	6,00
Sungai Aek Noto	1,75	20,00
Sungai Parit Kangkung	1,50	20,00
Sungai Sei Giam II	2,35	6,00
Sungai Pantai Burung	4,25	25,00
Sungai Kapias	4,20	35,00
Sungai Tanjung Medan	6,00	30,00
Sungai Sarap	2,10	25,00
Sungai Daun Besar	1,50	25,00
Sungai Merbau	4,50	25,00
Sungai Rintis	2,00	25,00
Sungai Mata Halasan	1,20	3,00
Sungai Silau	7,00	125,00
Sungai Asahan	7,50	700,00

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

6. Klimatologi

a. Suhu dan Kelembaban

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 24^{0}C-32^{0}C setiap tahunnya. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem Koppen-Geiger dengan kelembaban suhu udara rata-rata 77 persen hingga 98 persen dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm.

b. Curah hujan

Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 terdapat 163 hari hujan. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 24,1 mm dengan hari hujan sebanyak 11 hari, sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Maret sebanyak 3,0 mm dengan hari hujan 1 hari.

Tabel 2.3.
Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan
di Kota Tanjungbalai, 2020

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
Januari	13,9	9
Februari	12,3	8
Maret	3,0	1
April	11,6	10
M e i	18,6	19
J u n i	24,1	11
J u l i	15,4	20
Agustus	14,5	15
September	14,4	17
Oktober	9,3	16
November	19,4	22
Desember	20,7	15
2019		**163**

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2021

7. Penggunaan lahan

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, Kota Tanjungbalai mempunyai status daya dukung lahan yang defisit terhadap penduduk yang tinggal di Kota Tanjungbalai. Artinya, kebutuhan akan lahan lebih besar dari ketersediaan lahan. Penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, luas lahan yang semakin berkurang, persentase jumlah petani dan luas lahan yang diperlukan untuk hidup layak, dan jenis komoditas yang ada di wilayah setempat.

Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
I	**Lahan Pertanian**	**2.382**	**2.345**	**1.951**	**1.921**	**1.921**
1	***Lahan Sawah***	***288***	***156***	***101***	***72***	***73***
	a. Irigasi	164	92	64	60	61
	b. Tadah Hujan	49	15	17	12	12
	c. Rawa Pasang Surut	75	49	20	0	0
	d. Rawa lebak	0	0	0	0	0
2	***Lahan Pertanian Bukan Sawah***	***2.094***	***2.189***	***1.850***	***1.849***	***1.848***
	a. Tegal/Kebun	1.662	1.722	1.380	1.374	1.374
	b. Ladang/huma	329	364	338	348	347
	c. Perkebunan	0	0	0	0	0
	d. Hutan Rakyat	19	19	19	14	14
	e. PadangPenggembalaan/padang rumput	0	0	0	0	0
	f. Hutan Negara	0	0	29	29	29
	g. Sementara tidak diusahakan	5	5	5	5	5

No	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	79	79	79	79	79
II	**Lahan Bukan Pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)**	**3.670**	**3.707**	**4.101**	**4.131**	**4.131**
III	**T O T A L (I + II)**	**6.052**	**6.052**	**6.052**	**6.052**	**6.052**

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai

Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari penggunaan lahan yang telah terbangun pada tahun 2019 sebesar 68,26 persen dan lahan yang belum terbangun sebanyak 31,74 persen. Jenis lahan terbangun yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan rakyat, kebun campuran dan lain-lain.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir luas lahan pertanian terus mengalami penurunan dari 2.395 ha pada tahun 2015 menjadi 1.921 ha pada tahun 2019. Lahan pertanian banyak dialihfungsikan menjadi permukiman penduduk. Diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah dan masyarakat agar lahan pertanian tidak beralih fungsi karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan setiap tahun pertumbuhan populasi semakin bertambah sehingga kebutuhan memenuhi persediaan makanan serta energi juga semakin meningkat.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik fisik, sosial ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam mengakibatkan potensi wilayah yang berbeda. Pembangunan suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan karakteristik dan potensi utama suatu wilayah agar Berikut ini merupakan rencana pola ruang pengembangan kawasan Kota Tanjungbalai:

1. Pengembangan Kawasan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan dikembangkan dengan tujuan untuk pemerataan distribusi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai. Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang dan permukiman kepadatan rendah.

a. Permukiman kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 91 ha dikembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat pelayanan kota di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
b. Permukiman kepadatan sedang direncanakan seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung;
c. Perumahan kepadatan rendah di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 1.309 yang terletak di Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Beting Kuala Kapias, Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau, Gading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

2. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Peruntukan kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 160 Ha diarahkan untuk pengembangan sektor industri dan jasa dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang tertib dan teratur, kawasan ini meliputi antara lain:

a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 Ha dikembangkan di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.
b. Kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 Ha dikembangkan di Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.
c. Kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 Ha dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

3. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta dengan luas 69 Ha terdiri dari :

a. Kawasan perkantoran pemerintahan di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.
b. Kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kelurahan Sei Raja kecamatan Sei Tualang Raso.

4. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan ini dikembangkan untuk mendukung sektor industri dan membatasi dampak negatif industri terhadap kawasan sekitarnya dengan rencana seluas ± 348 ha yang diarahkan pada:

a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro seluas ± 6,15 ha terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;
b. Kawasan peruntukan industri menengah seluas ± 342,08 hektar terdapat di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

5. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan ini diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam dengan lahan seluas ± 157 meliputi kawasan pariwisata alam di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

6. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya politik dengan lahan seluas kurang lebih 7,25 ha meliputi :

a. Kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas ± 1,39 ha di Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;
b. Lapangan upacara seluas ± 2 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi ± 3,86 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan
d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas ± 0,7 ha di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk Bandar.

7. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana merupakan upaya untuk menyediakan ruang evakuasi darurat bagi warga kota sebagai tempat berlindung dan tempat penyaluran bantuan sosial. Adapun di dalam Kota Tanjungbalai diarahkan ruang evakuasi bencana sebagai berikut: Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

8. Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian dengan lahan seluas ± 1.591 ha meliputi:
a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan ± 359 ha meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas ± 361 ha ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
b. Kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

9. Pengembangan Kawasan Sektor Informal

Kawasan ini diperuntukkan untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti penjualan jajanan dan makanan serta pedagang asongan. Peruntukan bagi sektor informal ini direncanakan menempati lokasi Tanjungbalai Food Court Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan) sekitar pusat perdagangan dan jasa (water front city) pada Kelurahan Indra Sakti dan Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur disekitar pasar tradisional, dan di sepanjang kedua sisi jaringan jalan di pusat perdagangan kecuali pada jalan-jalan utama.

10. Pengembangan Kawasan Perikanan

Pengembangan budidaya perikanan dengan luas 3 ha diperuntukkan pengelolaan perikanan darat dan produksi perikanan dengan arahan wilayah untuk pengelolaan perikanan darat pada wilayah Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai Johor, Pahang dan Pasar Baru sedangkan untuk budidaya pembibitan benih ikan (ikan lele dumbo, ikan nila, ikan gurame, ikan mas dan udang galah) di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kota Tanjungbalai dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi. Area Kota Tanjungbalai yang relatif beradadi dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap genangan-genangan air, baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai.

Wilayah rawan bencana alam di Kota Tanjungbalai merupakan wilayah banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan rawan banjir/genangan berada disebagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor dan Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung. Kawasan rawan banjir tersebut dilakukan suatu rencana arahan ruang sebagai antisipasi penanggulangan melalui :

a. Normalisasi dan pengerukan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Bandar Jepang dan Sungai Bandar Sipoyong.
b. Melaksanakan penanaman di daerah sempada sungai Asahan dan Sungai Silau.
c. Membangun benteng alam sebagai penyangga.

Tabel 2.5.
Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Datuk Bandar	Pahang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Gading	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sijambi	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pantai Johor	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sirantau	Banjir Kiriman, Banjir Rob
2	Datuk Bandar Timur	Bunga Tanjung	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Lancang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Tanjung Medan	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pulau Simardan	Banjir Rob
		Semula Jadi	Banjir Rob
3	Tanjungbalai Utara	TB Kota III	Banjir Rob
		TB Kota IV	Banjir Rob
		Kuala Silo Bestari	Banjir Rob
		Matahalasan	Banjir Rob
4	Sei Tualang Raso	Sumber Sari	Banjir Rob
		Pasar Baru	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng

		Muara Sentosa	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Keramat Kubah	Banjir Rob
5	Teluk Nibung	Pematang Pasir	Banjir Rob
		Beting Kuala Kapias	Banjir Rob
		Kapias Pulau Buaya	Banjir Rob
		Sei Merbau	Banjir Rob
		Perjuangan	Banjir Rob
6	Tanjungbalai Selatan	Pantai Burung	Banjir Rob
		Indra Sakti	Banjir Rob

Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai, 2021

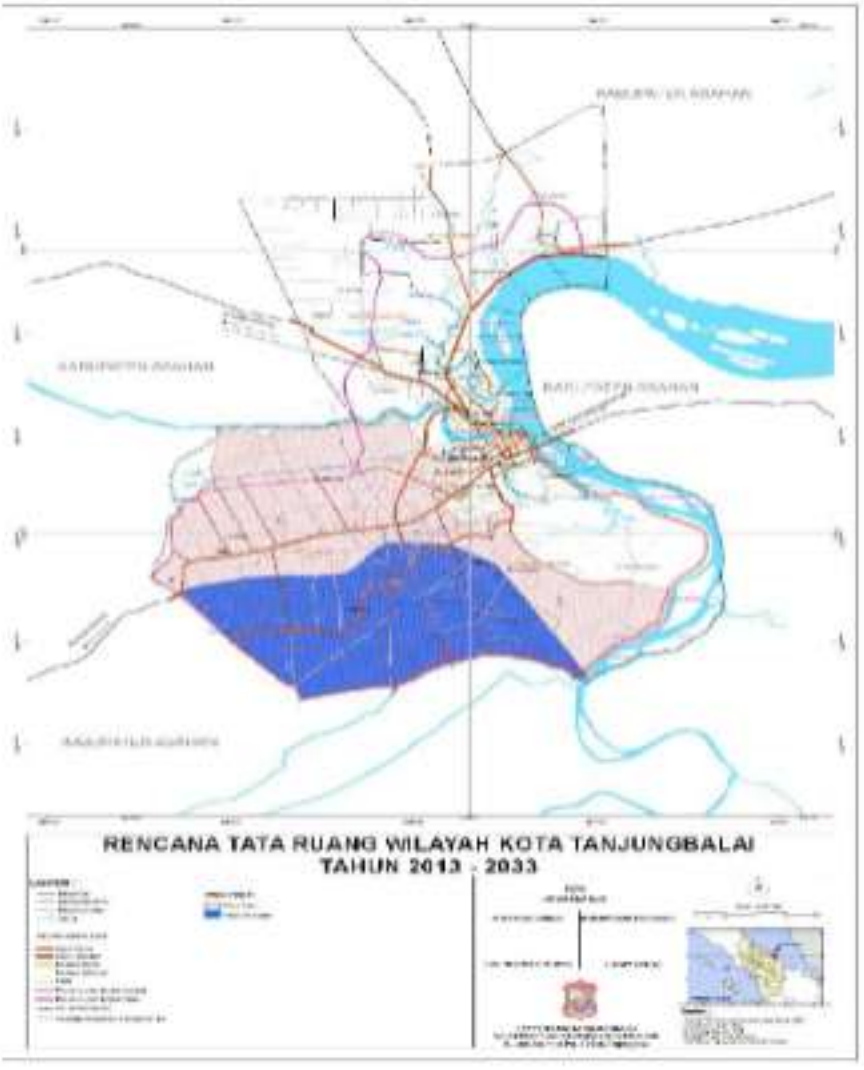
Kejadian bencana lain yang terjadi di Kota Tanjungbalai selain banjir adalah bencana kebakaran. Kota Tanjungbalai memiliki luas wilayah hanya sebesar 6.052 Ha atau 60,52 km^2 dengan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kepadatan penduduk tinggi terutama wilayah Kecamatan Tanjung Balai Utara dan Kecamatan Teluk Nibung sehingga memperbesar resiko kebakaran terjadi. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan kejadian bencana di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.6.
Kejadian Bencana di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

TAHUN	BENCANA	LOKASI KEJADIAN	KETERANGAN
2016	Kebakaran	Kelurahan Sei Merbau, Tanjungbalai Kota IV, Tanjungbalai Kota III, Kuala Silau Bestari, Tanjungbalai Kota I,Perwira, Karya, Indra Sakti, Pantai Burung, Beting Kuala Kapias, Pematang Pasir, Pantai johor, Matahalasan, Muara Sentosa, Pulau Simardan, TB Kota II, Keramat Kubah, Perjuangan, Selat Lancang	36 kasus
2017	Kebakaran	Kelurahan Perjuangan, Semula Jadi, Sijambi, Perwira, Pantai Burung, TB Kota III	8 kasus
	Banjir	Kelurahan Sijambi, Gading, Pahang, Pantai Johor, Sirantau, Bunga Tanjung, Selat Tanjung Medan, Selat Lancang	
	Angin Kencang	Jl. Sei. Tentena Kelurahan Keramat Kubah	
2018	Kebakaran	Perjuangan, Pahang, Gading, Sijambi, Kecamatan Sei Tualang Raso	7 kasus
	Banjir	Pahang, Gading, Sijambi	
2019	Kebakaran	Kelurahan Pantai Burung, Beting Kuala Kapias, Sei Raja, Selat Tanjung Medan, Pasar Baru, Matahalasan, Keramat Kubah	8 kasus
2020	Kebakaran	Kelurahan Semula Jadi, Perjuangan, Perwira, Sei Merbau, Pematang Pasir	5 kasus

	Banjir	Kelurahan Sijambi, Pahang, Gading, Sirantau, Pantai Johor, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan	

Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai, 2021



Gambar 2.4.
Peta Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rawan Banjir
Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

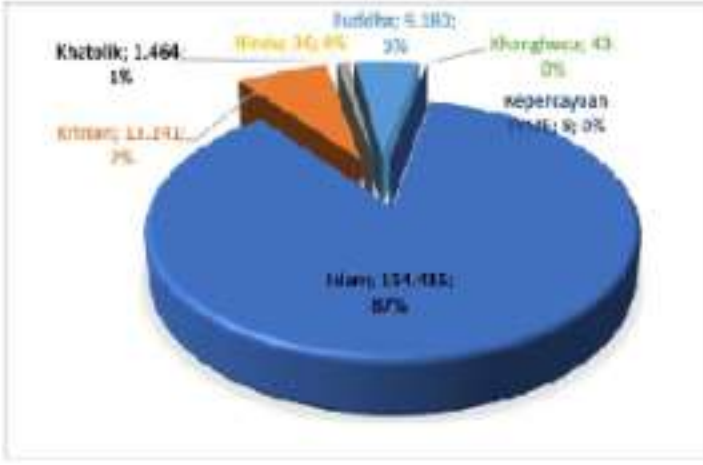
2.1.4. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, pengintegrasian penduduk menjadi suatu hal yang teramat penting mengingat penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek pembangunan. Ketika peran sebagai "subyek" pembangunan maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas. Selanjutnya Konsep *people centered development* merupakan konsep yang mewadahi prinsip pembangunan yang berwawasan kependudukan yang meliputi beberapa komponen yakni: pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; penataan persebaran dan mobilitas penduduk; pembangunan keluarga sejahtera serta manajemen database & informasi kependudukan. Untuk itu sasaran serta program prioritas pembangunan jangka menengah ke depan untuk urusan pengendalian penduduk harus mengacu pada prinsip dan konsep tersebut.

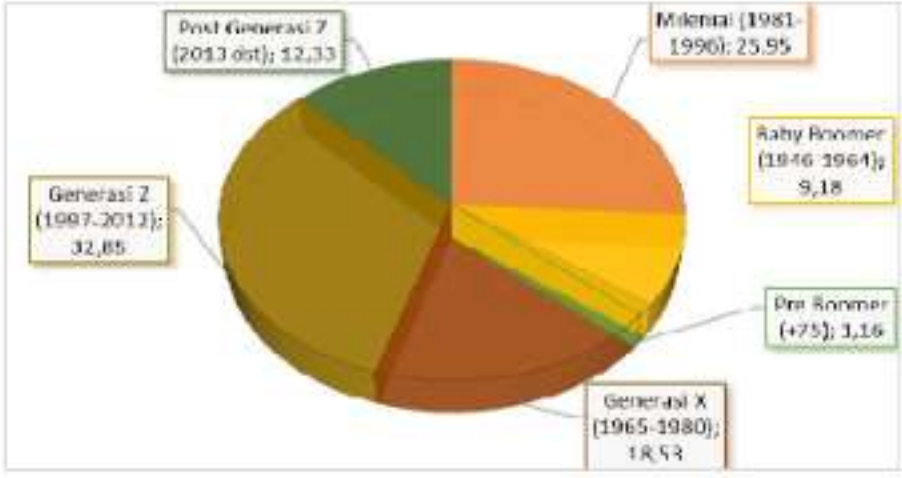
Kondisi penduduk Kota Tanjungbalai mengalami berbagai dinamika yang relatif menantang untuk diatasi. Sebelum berpisah dari Kabupaten Asahan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1956, dengan luas hanya 199 ha Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan kepadatan sekitar 20.000 jiwa/km2.

Hingga periode 2020, Kota Tanjungbalai dihuni oleh beragam suku diantaranya; Suku Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pakpak, dan Karo), Jawa, Melayu, Minang, Aceh, dan suku lainnya. Berdasarkan dari sisi agama yang dianut, sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai beragama Islam dengan jumlah 87 persen dari seluruh populasi.



Gambar 2.5.
Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Tanjungbalai, 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pada tahun 2020, Kota Tanjungbalai berada dalam masa bonus demografi karena jumlah penduduk produktif lebih dari 50 persen. Berdasarkan gambar diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Tanjungbalai didominasi oleh Generasi Z dan Milenial. Generasi Milenial merupakan penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dan diperkirakan saat ini berusia 24-39 tahun (kelompok usia produktif), sementara Generasi Z saat ini diperkirakan berusia 8-23 tahun. Kurang lebih 7 tahun kedepan maka seluruh Generasi Z berada pada kelompok umur produktif, yang nantinya generasi ini akan menentukan pembangunan Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.6.
Persentase Penduduk Berdasarkan Generasi di Kota Tanjungbalai, 2020
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 sebanyak 90.100 jiwa atau sebesar 50,51 persen dari penduduk Kota Tanjungbalai, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 88.287 jiwa atau sebesar 49,49 persen dari penduduk Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun rasio jenis kelamin mengalami penurunan dari sebesar 103,22 pada tahun 2016 menjadi sebesar 102,05 pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kota Tanjungbalai terdapat 102 hingga 103 penduduk laki-laki.

Tabel 2.7
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	85.361	86.139	88.120	89.441	90.100
Perempuan	82.691	83.467	85.970	87.494	88.287
Rasio Jenis Kelamin	103,22	103,2	102,5	102,23	102,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

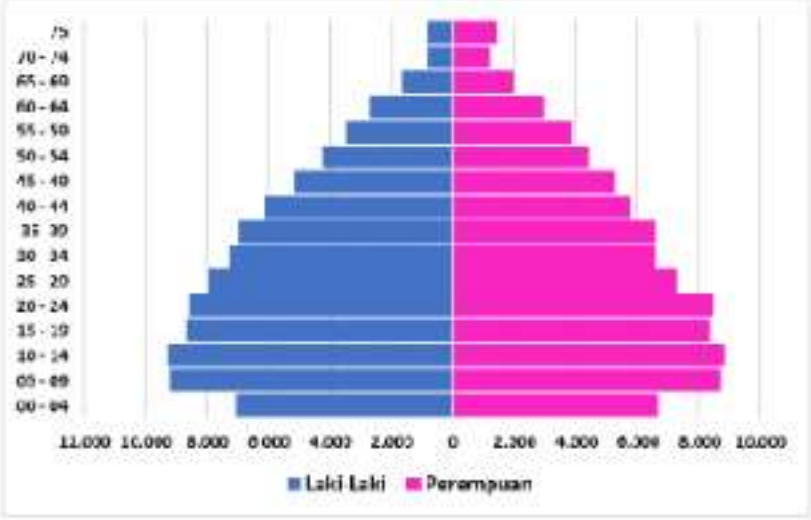
Bila dilihat berdasarkan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Tanjungbalai maka diketahui bahwa Kecamatan Teluk Nibung merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak yaitu pada Tahun 2020 mencapai 41.360 jiwa, disusul oleh Kecamatan Datuk Bandar dengan jumlah penduduk sebanyak 40.034 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 17.906 jiwa. Untuk melihat persebaran penduduk pada setiap kecamatan, maka diketahui bahwa Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan wilayah dengan penduduk terpadat sebanyak 21.316 jiwa per kilometer. Tingkat kepadatan pada Kota Tanjungbalai memang tidak merata, dibuktikan dengan kepadatan Kecamatan Datuk Bandar hanya mencapai 1.780 jiwa per kilometer. Kepadatan yang tidak merata ini dapat menimbulkan permasalahan kependudukan seperti: penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, keamanan dan kesempatan kerja.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Kepadatan 2020 (jiwa/km)
Datuk Bandar	35.685	36.564	38.104	39.232	40.034	1.780
Datuk Bandar Timur	28.875	29.365	30.165	30.958	31.201	2.141
Tanjungbalai Selatan	21.487	20.881	21.025	20.853	20.709	10.459
Tanjungbalai Utara	17.986	17.925	17.965	17.933	17.906	21.316
Sei Tualang Raso	25.765	26.035	26.688	26.976	27.177	3.359
Teluk Nibung	38.254	38.836	40.143	40.983	41.360	3.295

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catpil, 2021

Dominasi usia penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelas usia, jika piramida penduduk tebal di bawah berarti lebih banyak penduduk usia muda, namun jika tebal diatas maka lebih banyak penduduk usia tua. Berdasarkan tabel diketahui bahwa penduduk Kota Tanjungbalai didominasi oleh penduduk usia muda. Sampai dengan periode 2020 diketahui penduduk usia 10-14 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya yang mencapai 18.097 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.264 jiwa dan perempuan sebanyak 8.833 jiwa. Hal tersebut menjelaskan bahwa saat ini Kota Tanjungbalai sedang dapat menikmati bonus demografi jika disertai dengan angka pengangguran yang rendah. Pada grafik juga terlihat bahwa jumlah penduduk usia 70–75 sangat kecil menunjukkan bahwa angka harapan hidup pada Kota Tanjungbalai masih relatif rendah.



Gambar 2.7.
Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catpil (diolah), 2021

Penduduk sebagai modal utama pembangunan Kota Tanjungbalai selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tanjungbalai sebanyak 168.052 jiwa meningkat menjadi 178.387 jiwa pada Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 6,14 persen. Pertambahan penduduk otomatis menambah kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai, pada Tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 2.777 jiwa per km meningkat menjadi 2.948 jiwa per km.

Tabel 2.9.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020

	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
2016	168.052		2.777
2017	169.606	0,92	2.802
2018	174.090	2,64	2.877
2019	176.935	1,63	2.924
2020	178.387	0,82	2.948

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catpil, 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita penduduk dan (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Tabel 2.10.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2016–2020 (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.157,30	1.286,13	1.401,49	1.471,72	1.476,57
B. Pertambangan & Penggalian	138,61	142,26	152,94	166,23	166,87
C. Industri Pengolahan	1.239,97	1.417,66	1.567,75	1.678,81	1.798,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,90	53,52	56,69	80,08	62,31

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	11,60	13,10	13,97	14,83	15,06
F. Konstruksi	1.053,58	1.180,19	1.298,37	1.441,99	1.428,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.438,88	1.569,15	1.772,04	2.014,74	2.071,00
H. Transportasi & Pergudangan	411,08	440,41	469,55	509,48	522,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	150,74	162,17	174,86	192,93	192,65
J. Informasi dan Komunikasi	56,87	61,47	66,33	75,03	80,14
K. Jasa Keuangan & Asuransi	129,02	138,61	146,77	153,65	154,71
L. Real Estate	218,33	236,21	257,15	287,50	295,36
M,N. Jasa Perusahaan	20,01	22,11	23,58	26,74	27,20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	433,56	459,57	506,08	557,48	579,72
P. Jasa Pendidikan	94,23	101,05	110,91	124,34	129,91
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	54,20	59,33	66,30	74,53	77,19
R,S,T,U. Jasa Lainnya	73,70	82,01	90,93	101,39	102,67
Total	**6.722,59**	**7.424,96**	**8.175,69**	**8.951,45**	**9.180,54**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, dan bertujuan untuk melihat sebaran struktur perekonomian. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lapangan usaha pembentuk PDRB terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda sebesar Rp. 2.071.000,58 kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp. 1.798.543,78.

Tabel 2.11.
Produk Domestik Regional Bruto Kota TanjungbalaiAtas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	847,50	902,01	947,00	955,68	946,42

B. Pertambangan & Penggalian	102,96	109,04	116,11	125,32	123,97
C. Industri Pengolahan	932,37	982,39	1.043,10	1.098,31	1.120,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	29,79	35,06	36,98	38,93	40,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	8,96	9,43	9,85	10,34	10,44
F. Konstruksi	730,09	773,99	817,18	878,25	839,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.060,78	1.118,32	1.189,44	1.277,51	1.275,23
H. Transportasi & Pergudangan	303,48	320,37	335,52	354,28	352,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114,53	120,76	128,27	140,73	139,98
J. Informasi dan Komunikasi	54,60	57,64	61,16	67,10	71,24
K. Jasa Keuangan & Asuransi	95,73	96,85	99,92	103,72	102,78
L. Real Estate	159,70	167,49	175,90	187,44	188,51
M,N. Jasa Perusahaan	15,70	16,47	17,33	18,50	18,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	284,00	290,12	308,95	334,28	333,22
P. Jasa Pendidikan	76,52	81,21	86,69	93,29	94,71
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	38,32	40,67	43,40	45,50	44,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	49,52	53,01	56,82	61,19	60,48
Total	**4.904,54**	**5.174,85**	**5.473,63**	**5.790,37**	**5.763,21**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sama halnya seperti PDRB atas dasar harga berlaku maka lapangan usaha pembentuk PDRB terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda sebesar Rp.1.275.232,07 kemudian disusul oleh Industri Pengolahan sebesar Rp. 1.120.943,16.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik

Pertumbuhan perekonomian Kota Tanjungbalai pada Tahun 2019 sebesar 5,81 persen mengalami peningkatan dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,77 persen dan masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yaitu 5,22 persen dan nasional sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2020 perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk Kota Tanjungbalai mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), artinya menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menghambat kegiatan produksi dan distribusi barang. Perekonomian Kota Tanjungbalai tumbuh negatif sebesar 0,47 persen, sama halnya dengan yang dialami oleh provinsi dan nasional tumbuh sebesar minus 1,07 persen dan 2,07 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.8.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010, 2016-2020
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Pada tahun 2020 banyak lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan yang paling tinggi berada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,17 persen dan disusul lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 3,38 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah berada pada lapangan usaha konstruksi dan jasa perusahaan sebesar minus 4,63 persen dan 1,71 minus persen. Laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada PDRB di Kota Tanjungbalai dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2016 – 2020

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,43	6,46	4,96	0,92	-0,76

B. Pertambangan & Penggalian	5,83	5,91	6,48	7,93	-1,08
C. Industri Pengolahan	6,28	5,47	6,20	5,33	1,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,09	17,69	5,49	5,28	3,38
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,68	5,23	4,52	4,95	1,00
F. Konstruksi	6,74	6,01	5,58	7,47	-4,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	5,64	5,33	6,46	7,39	-0,18
H. Transportasi & Pergudangan	5,02	5,57	4,73	5,59	-0,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,25	5,44	6,21	9,71	-0,53
J. Informasi dan Komunikasi	6,54	5,56	6,11	9,72	6,17
K. Jasa Keuangan & Asuransi	4,56	0,84	2,02	3,49	0,84
L. Real Estate	4,70	4,88	5,02	6,56	0,57
M,N. Jasa Perusahaan	4,61	4,91	5,22	6,74	-1,71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	1,99	2,15	6,49	8,20	-0,32
P. Jasa Pendidikan	5,85	6,14	6,75	7,61	1,52
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,11	6,13	6,70	4,84	-1,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,09	7,04	7,19	7,69	-1,17
PDRB Kota Tanjungbalai	5,76	5,51	5,77	5,81	-0,47

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Struktur ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2020 sebagian besar dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan disusul oleh lapangan usaha kontruksi. Sementara peranan lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha jasa perusahaan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB merupakan konstribusi terkecil, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI TAHUN				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	17,22	17,32	17,14	16,44	16,08
B. Pertambangan & Penggalian	2,06	1,92	1,87	1,86	1,82

C. Industri Pengolahan	18,44	19,11	19,18	18,75	19,59
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	0,72	0,69	0,67	0,68
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,17	0,18	0,17	0,17	0,16
F. Konstruksi	15,67	16,03	15,88	16,11	15,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	21,46	21,13	21,67	22,51	22,56
H. Transportasi & Pergudangan	6,11	5,93	5,74	5,69	5,69
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	2,18	2,14	2,16	2,10
J. Informasi dan Komunikasi	0,85	0,83	0,81	0,84	0,87
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,92	1,85	1,80	1,72	1,69
L. Real Estate	3,25	3,18	3,15	3,21	3,22
M,N. Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,46	6,19	6,19	6,23	6,31
P. Jasa Pendidikan	1,40	1,36	1,36	1,39	1,42
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,81	0,80	0,81	0,83	0,84
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,10	1,10	1,11	1,13	1,12
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

3. Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar. Sehingga gambaran inflasi Kota Pematangsiantar dianggap dapat mewakili inflasi di Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar berfluktuasi. Pada tahun 2016, nilai inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 4,76 persen menjadi 2,78 persen pada tahun 2020 atau menurun sebesar 41,60 persen. Nilai inflasi Kota Pematangsiantar relatif berada di atas provinsi dan nasional.



Grafik 2.9.
Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, 2016—2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

4. PDRB Per kapita

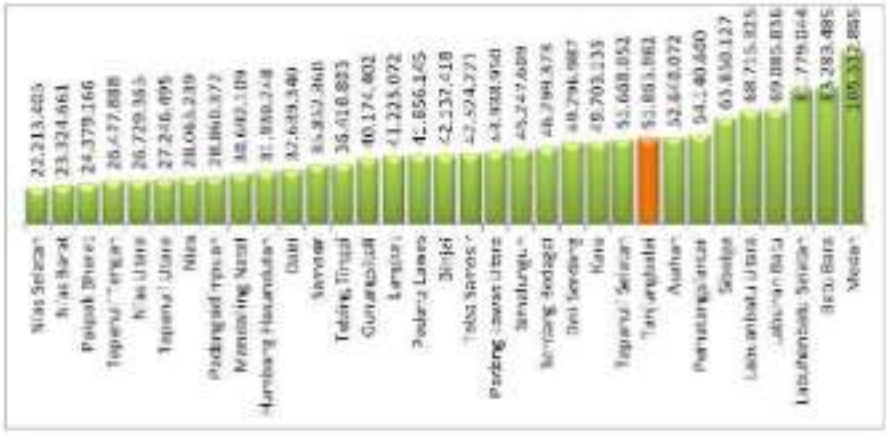
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Perkembangan PDRB per kapita tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
PDRB ADHB Per Kapita Kota Tanjungbalai (Juta Rupiah), 2016-2020

No	Deskripisi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Penduduk (jiwa)	169.094	171.187	173.302	175.223	176.027
2	PDRB ADHB (juta rupiah)	6.722.588,96	7.424.964,63	8.175.687,25	8.951.450,97	9.180.538,15
3	PDRB perkapita ADHB (juta rupiah)	39,76	43,37	47,18	51,09	52,15

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Berdasarkan PDRB per kapita Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku (tanpa menghilangkan pengaruh harga dan inflasi) maka diperoleh bahwa pada tahun 2016 sebesar Rp. 39,76 juta meningkat menjadi Rp.52,15 juta pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 31,18 persen.



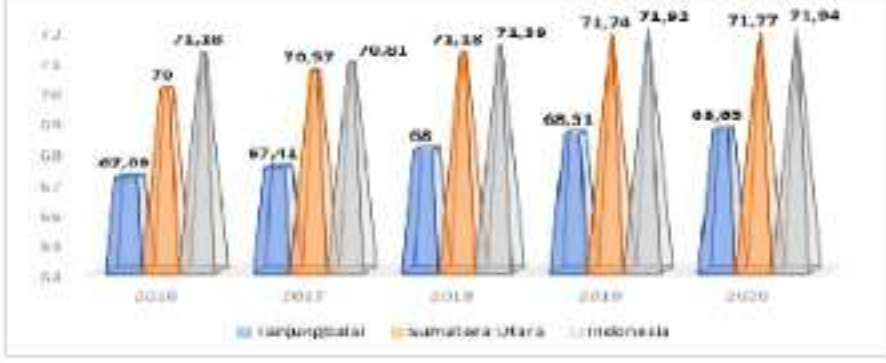
Grafik 2.10.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota, 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Pendapatan perkapita Kota Medan sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Terjadi gap pendapatan yang tinggi akibat pusat pertumbuhan ekonomi di Sumut dengan kabupaten/kota lainnya di Sumut. Pendapatan perkapita Kota Tanjungbalai masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumut, disebabkan jumlah penduduk Kota Tanjungbalai yang cukup padat, disamping itu tingkat kemiskinan yang relatif tinggi menjadi permasalahan bagi pemerataan pendapatan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

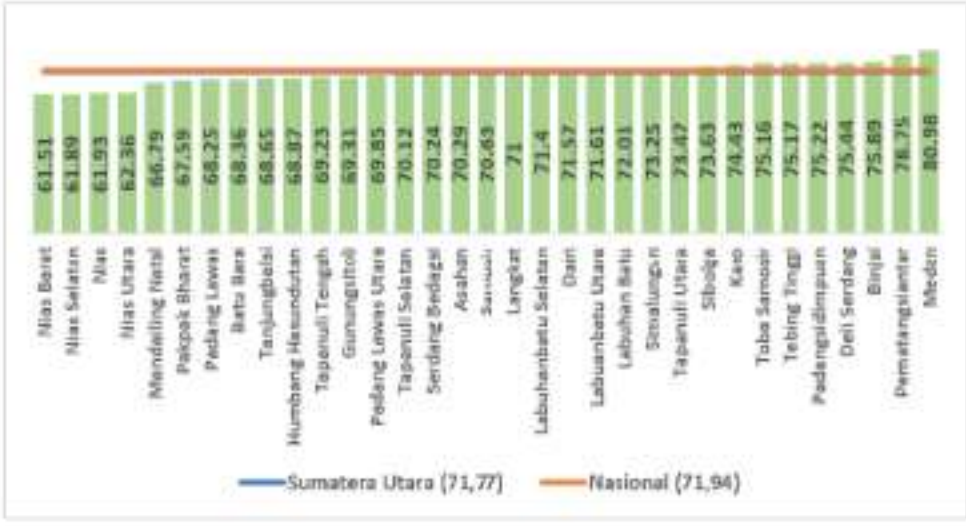
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM juga merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan dan Standar hidup layak.



Grafik 2.11.
Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumut dan Nasional, 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

IPM Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mencapai 67,09 meningkat menjadi 68,65 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut belum bisa seutuhnya mendapat apresiasi karena angka IPM Kota Tanjungbalai masih berada di bawah rata-rata angka provinsi dan nasional. Pada tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai angka 71,77 bahkan nasional mencapai 71,94. Hal tersebut mengindikasi bahwa capaian pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai masih rendah.



Grafik 2.12.
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota, Sumut dan Nasional, 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa posisi relatif IPM Kota Tanjungbalai berada pada peringkat kesembilan terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Komponen IPM penyebab rendahnya angka IPM Kota Tanjungbalai dibandingkan daerah lain berasal dari rendahnya Angka Harapan Hidup sebesar 63,27 tahun.

2. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kota Tanjungbalai, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan. Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 12,41 pada tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2020 hingga mencapai

12,50 persen. Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 13,23 persen dan secara nasional mencapai 12,98 persen.



Grafik 2.13.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2016—2020
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 9,13 tahun dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 menjadi 9,44 tahun. Sementara angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 9,54 tahun dan secara nasional mencapai 8,48 tahun.



Grafik 2.14.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

4. Angka Harapan Hidup

Perkembangan angka harapan hidup penduduk kota tanjungbalai mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Jika pada 2016 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 62,09 tahun, maka pada periode

2020 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai meningkat menjadi 63,27 tahun. Sementara usia harapan hidup untuk provinsi sumatera utara pada tahun 2020 mencapai 64,02 tahun dan secara nasional mencapai 71,47 tahun.



Gambar 2.15.
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

5. Tingkat Kemiskinan

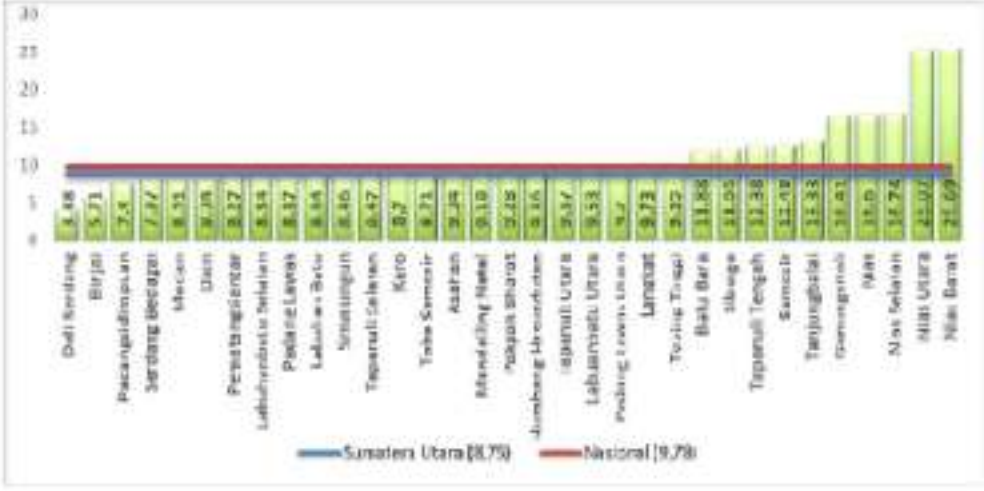
Berdasarkan data pada grafik menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 24,42 ribu jiwa atau sebesar 14,49 persen. Selama dua tahun ke depan, indikator ini terus mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 24,54 ribu jiwa atau menurun sebesar 14,04 persen. Pada Tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 23,54 ribu jiwa atau menurun sebesar 13,33 persen. Artinya dalam setahun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 1.000 jiwa.



Gambar 2.16.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Posisi tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 masih berada di atas rata-rata provinsi dan kabupaten/kota. Posisi Kota Tanjungbalai terus merosot bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provnsi Sumatera Utara, dijelaskan

dengan keberadaan Kota Tanjungbalai pada posisi keenam tertinggi setelah kabupaten/kota di Kepulauan Nias.



Gambar 2.17.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama tahun 2019 dan 2020 diduga berkaitan dengan hal berikut:

a. Inflasi di Sumatera Utara selama tahun 2020 relatif terkendali yaitu sebesar 0,72 persen pada Februari 2020;
b. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara cukup stabil meskipun sedikit melambat, dari 5,21 persen pada Triwulan IV 2019 menjadi 4,65 persen pada Triwulan I 2020;
c. Pemberian bantuan perlindungan sosial seperti BPNT, PKH dan beras madanii terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif.

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indikator lainnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.15.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,17	1,98	2,25	1,69	1,69

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,99	0,49	0,49	0,28	0,32
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	345 900	374 442	397 647	421 671	444 125

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2021

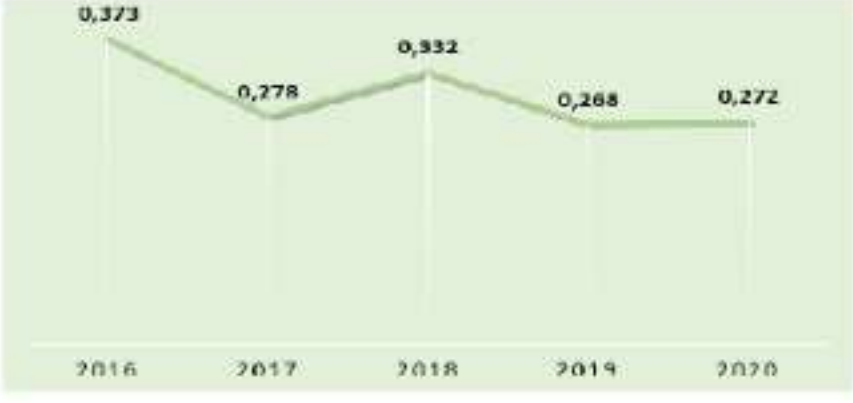
Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mencapai 3,17 turun menjadi 1,69, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan atau menunjukkan ekonomi penduduk miskin semakin jauh dari terpuruk. Berdasarkan indeks keparahan kemiskinan, diketahui bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang karena setiap tahun selama lima tahun terakhir P2 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mencapai angka 0,99 menurun menjadi 0,32 pada Tahun 2020.

7. Gini Rasio

Gini rasio adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Besar gini rasio dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 1. Jika gini rasio sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan). Jika gini rasio sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna. Untuk lebih jelasnya, standar penilaian gini rasio dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria (*Heri Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995*) sebagai berikut:

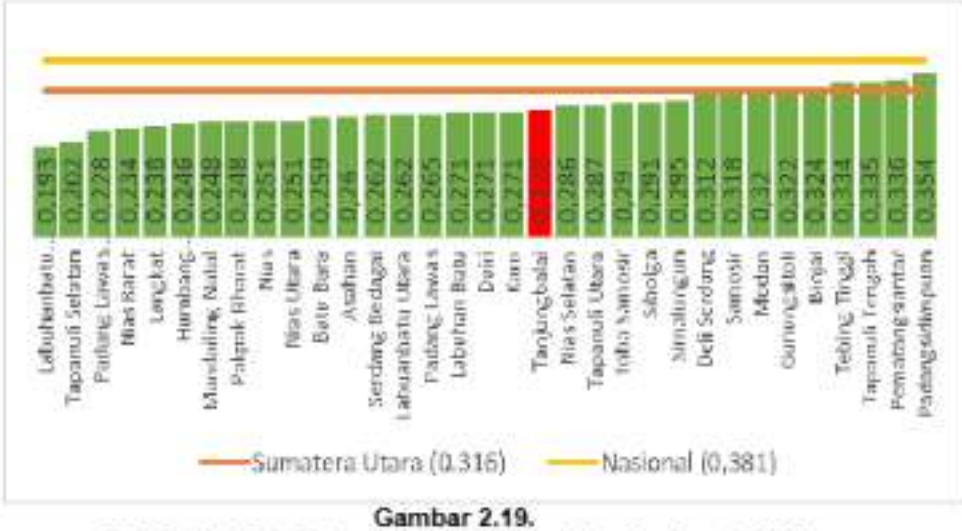
- GR < 0,4 : ketimpangan rendah
- 0,4 < GR < 0,5 : ketimpangan sedang
- GR > 0,5 : ketimpangan tinggi

Bila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kota Tanjungbalai cukup merata yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini (gini ratio) Kota Tanjungbalai dari tahun 2016—2020 berada dibawah 0,4, artinya tingkat ketimpangan rendah yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 2.18.
Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Posisi gini rasio Kota Tanjungbalai tidak terlalu tinggi bila dibandingkan kabupaten/kota lain. Posisi ketimpangan tertinggi adalah Kota Padangsidempuan sebesar 0,354 dan terendah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 0,193, sedangkan Kota Tanjungbalai sebesar 0,272. Posisi gini rasio Kota Tanjungbalai juga masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.



Gambar 2.19.
Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Provinsi dan Nasional, 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

8. ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

Menurut BPS, ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Selama Tahun 2016-2020 nilai ICOR mengalami fluktuasi. Nilai ICOR yang tinggi pada sektor tersebut disebabkan oleh modal besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output yang diinginkan. Semakin tinggi nilai ICOR mengindikasikan bahwa produksi di daerah tersebut semakin tidak efisien, karena dibutuhkan semakin banyak investasi untuk bisa menghasilkan satu unit tambahan output. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai ICOR secara signifikan, menunjukkan penanaman modal (investasi) semakin sangat tidak efisien.

Tabel 2.16.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Tanjungbalai, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
ICOR	6,68	7,02	6,73	6,91	79,25

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kota Tanjungbalai dikenal dengan julukan sebagai "Kota Kerang", hal ini dikarenakan dulu Kota Tanjungbalai pernah menghasilkan kerang dalam jumlah yang besar, tetapi belakangan ini produksi kerang jauh menurun karena ekosistem yang tidak mendukung. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tanjungbalai, maka setiap tahun akan diadakan pesta kerang yang menggelar pekan budaya melayu dengan tujuan kegiatan tersebut dapat melestarikan kebudayaan asli Kota Tanjungbalai. Kegiatan pesta kerang tersebut diisi dengan acara pameran kerajinan masyarakat Kota Tanjungbalai, tari-tarian melayu, dan perlombaan.

2. Pemuda dan Olahraga

Berbagai upaya pembinaan bidang kepemudaan & olahraga kerap dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai baik pembinaan terhadap atlet, pemuda dan anak-anak sekolah, yang salah satu diantaranya adalah membina pemuda dengan kegiatan olahraga. Selanjutnya selain pembinaan pendidikan formal dalam kelas, masih terdapat kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk pembinaan yang dapat melatih keterampilan siswa/pemuda di bidang tertentu, misalnya pramuka, olah raga, kegiatan keagamaan dan musik. Sementara itu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah dilakukan pembinaan terhadap atlit yang masih bersekolah untuk berbagai cabang olahraga sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Pembinaan Atlet di Kota Tanjungbalai, 2020

No	Nama Cabang Olahraga	Keterangan
1	Cabang olahraga Gulat	Klub olahraga Gulat Datuk bandar, Jl. Anwar Idris Kel. Gading Kec. Datuk Bandar
2	Cabang Olahraga Pencaksilat	Pencak Silat Bapopsi
3	Cabang Olahraga Bola Vooley	Olahraga Bola volley Bapopsi
4	Cabang Olahraga Atletik	
5	Cabang Olahraga Tenis Meja	
6	Cabang Olahraga Badminton	
7	Cabang Olahraga Renang	
8	Cabang Olahraga Sepakbola	

Sumber: Dispora & Budpar Kota Tanjungbalai, 2021

Olahraga unggulan seperti pencak silat, gulat, atletik dan futsal Kota Tanjungbalai pernah diunggulkan. Tetapi sayang fasilitas berupa sarana dan prasarana olahraga belum mendukung peningkatan di cabang olah raga tersebut. Semenjak berdirinya Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota Tanjungbalai pada tahun 2009, pengembangan keolahragaan akan terus dilaksanakan.

Tabel 2.18.
Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tanjungbalai

No	Jenis Olah Raga	Keterangan
1	Sepak Bola	- Lapangan Sepak Bola Stadion Asahan Sakti
		- Lapangan Sepak Bola Teluk Nibung
		- Lapangan Sepak Bola Sei Tualang Raso
2	Bola Volley	- Lapangan Bola Volley Gedung Serbaguna
		- Lapangan Bola Volley lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah
		- Lapangan Bola Volley Taman Stadion Asahan Sakti
3	Badminton	Sebanyak 4 (empat) gelanggang di gedung serbaguna
4	Sepaktakraw	Sebanyak 2 (dua) lapangan di gedung serbaguna
5	Olah Raga Tembak	Lapangan tembak perbakin di Gedung serbaguna
6	Bola Basket	Lapangan Bola Basket di Gedungserbaguna
7	Tennis	Sarana Tenis Lapangan di Jl. Pengadilan Kota Tanjungbalai

Sumber: Dispora & Budpar Kota Tanjungbalai, 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.19.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100	100	100	100	100
2	Cakupan pembinaan olahraga	33	29	29	29	27
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	74	74	74	74	74
4	Cakupan pembinaan atlet muda	76	76	76	76	76
5	Jumlah atlet berprestasi	16	14	29	36	
6	Jumlah prestasi olahraga	6	4	9	6	
7	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	8	8	8	8	8
8	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	12	12	12	12	12

Sumber: Dispora & Budpar Kota Tanjungbalai, 2021

1. Organisasi pemuda merupakan wadah yang menampung kreatifitas, bakat serta ide-ide para pemuda untuk direalisasikan menjadi kegiatan yang positif. Selama lima tahun terakhir persentase organisasi pemuda yang aktif sudah mencapai 100 persen.
2. Pembinaan olahraga bertujuan untuk mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis. Selama lima tahun terakhir indikator ini mengalami penurunan dari 33 persen pada tahun 2016 menjadi 27 persen pada tahun 2020.

3. Para pelatih yang memegang cabang olahraga wajib memiliki lisensi. Sertifikat merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pelatih agar menghasilkan atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Cakupan pelatih yang bersertifikat selama lima tahun sebesar 74 persen.
4. Pembinaan terhadap atlet muda mutlak harus dilakukan agar prestasi yang diinginkan bisa terwujud. Indikator ini selama lima tahun masih stagnan, mencapai sebesar 76 persen.
5. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan terus memberikan perhatian kepada para atlet berprestasi. Pada tahun 2016 jumlah atlet berprestasi hanya sebanyak 16 orang meningkat secara signifikan menjadi 36 orang pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 125 persen.
6. Jumlah prestasi olahraga di Kota Tanjungbalai sangat minim di berbagai ajang perlombaan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah olahraga yang memiliki prestasi sebanyak 6 cabang olahraga.
7. Indikator jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 8 meliputi cabang olahraga bola volli, sepakbola, futsal, bulu tangkis, tennis meja, tennis, dan lain-lain.
8. Sarana dan prasarana olahraga adalah sumberdaya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan kegiatan olahraga meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapan. Jumlah gedung olahraga yang terdapat di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir berjumlah 12 dan 3 buah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Gedung Serbaguba, Gedung Olahraga Mini dan Stadion Asahan Sakti.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai. Berikut ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang pendidikan di Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu lima tahun.

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Angka melek huruf untuk Kota Tanjungbalai selama lima tahun menunjukkan peningkatan, bahkan jenis kelamin laki-laki sudah mencapai 100 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.20.
Tingkat Melek Huruf 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	100	100	99,91	99,91	100	
Perempuan	99,50	99,24	98,89	99,21	99,49	
Laki-laki + Perempuan	99,75	99,62	99,40	99,57	99,74	99,77

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2020

2. Angka Partisipasi Kasar

APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut ini diuraikan perkembangan APK Kota Tanjungbalai selama tahun 2016-2020.

Tabel 2.21.
Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	107,97	107,05	114,35	107,93	106,35
2.	SMP/MTs	89,62	82,48	80,23	82,86	84,68
3.	SMA/MA	91,22	93,96	72,37	87,74	88,32
4.	PT	14,15	11,15	8,13	13,87	14,46

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

3. Angka Partisipasi Murni

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan sesuai dengan usia sekolah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Menurut data BPS Kota Tanjungbalai, pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) selama lima tahun terakhir relatif tinggi artinya masyarakat sudah sadar akan menyekolahkan anak pada tingkat SD/MI sesuai umur yang ditentukan, sedangkan jenjang pendidikan menengah untuk (SMP/MTs) dan (SMA/MA) masih memerlukan perbaikan. Seperti terlihat pada tabel bahwa APM untuk jenjang SD/MI pada tahun 2020 sebesar 98,50 persen dan APM untuk jenjang SMP/MTs sebesar 81,49 persen, sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA sebesar 71,22 persen. Untuk jenjang PT terlihat masih sangat rendah, hanya mencapai 9,50 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daya saing SDM masyarakat Kota Tanjungbalai khususnya pencari kerja masih sangat rendah.

Tabel 2.22.
Perkembangan APM Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	97,44	98,63	98,82	98,38	98,50
2	SMP/MTs	81,47	78,03	80,23	81,82	81,49
3	SMA/MA	72,90	72,48	71,44	71,75	71,22
4	PT	13,60	10,01	8,13	10,04	9,50

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Persentase penduduk Kota Tanjungbalai yang memiliki ijazah/STTB menurut seluruh tingkat pendidikan masih sangat rendah. Selama Tahun 2016-2020 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan, hal tersebut menandakan tingginya angka putus sekolah, bahkan pada tingkat pendidikan dasar.

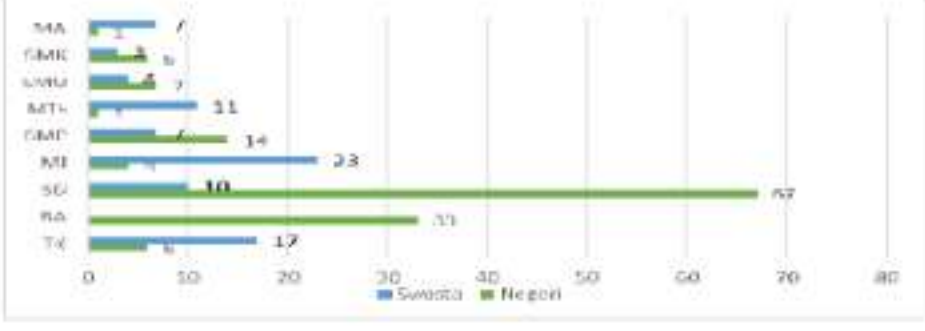
Tabel 2.23.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2016-2020

TINGKAT	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	31,39	23,99	22,98	26,10	22,54
SMP/MTs	11,35	20,14	18,37	19,84	21,26
SMA/MA	27,3	30,09	28,27	30,04	31,00
Perguruan Tertinggi (D IV/S1)	5,52	4,10	6,88	5,13	5,08

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

5. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sampai dengan periode 2020, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 221 sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) 23 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 33 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 77 sekolah, Madrasah Iblidaiyah (MI) 23 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 11 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9 sekolah, dan Madrasah Aliyah (MA) 7 sekolah.



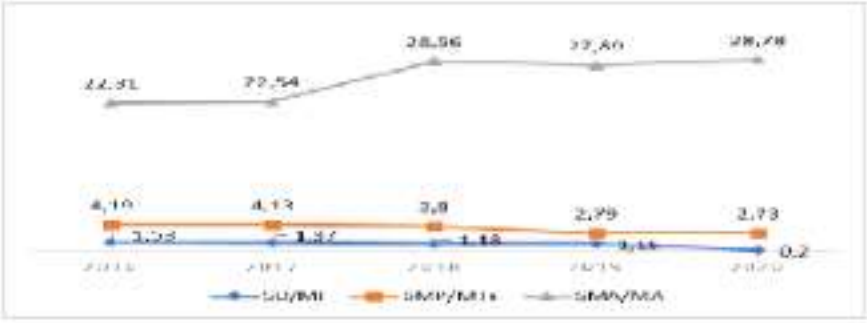
Gambar 2.20.
Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta, 2020

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka, 2021

6. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI selama rentang waktu lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2016 sebanyak 1,53 persen, maka pada tahun 2020 menjadi 0,20 persen. Angka putus sekolah paling rendah terdapat pada tingkat SD/MI dibandingkan tingkat pendidikan lain.

Angka Putus Sekolah SMP/MTS selama rentang waktu lima tahun terakhir juga mengalami penurunan dari angka 4,19 persen pada tahun 2016 menjadi 2,79 persen pada tahun 2020. Pada tingkat SMA/SMK/MA, Angka Putus Sekolah selama periode 2010-2014 mengalami tren naik turun. Pada tahun 2019 mencapai angka 27,89 persen. Angka tersebut merupakan tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan yang lain.



Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Tanjungbalai, 2016-2020

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka, 2021

Faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Kota Tanjungbalai, diantaranya disebabkan oleh kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal. Selain itu disebabkan oleh anak itu sendiri, karena merasa malas untuk belajar dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

7. Kualifikasi Guru

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kualifikasi guru diperjelas dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa guru pada SD/MI dan SMP/MTs harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1).

Tabel 2.24.
Kualifikasi Guru Kota Tanjungbalai, 2020

	SD/MI	SMP/MTs
SLTA	42	22
D.I	2	3
D.II	44	8
D.III	8	12
D.IV/S.1	586	697
S.2	9	10
TOTAL	691	752

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahu bahwa kualifikasi guru pada tingkat pendidikan SD/MI dengan kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV mencapai 586 orang dengan persentase sebesar 86,11 persen. Kualifikasi guru pada tingkat pendidikan SMP/MTs dengan kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV mencapai 697 orang dengan persentase sebesar 92,69 persen.

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pendidikan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.25.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pendidikan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partisipasi Pra Sekolah (%)	19,45	19,48	18,31	19,55	14,60
2	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar					
	- SD/MI	1:215	1:223	1:216	1:214	1:211
	- SMP/MTs	1:367	1:379	1:351	1:351	1:317
	- SMA/SMK/MA		1:420	1:399	1:399	1:407
3	Rasio Guru terhadap Murid					
	- SD/MI	1:19	1:19	1:18	1:17	1:17
	- SMP/MTs	1:15	1:16	1:15	1:14	1:14
	- SMA/SMK/MA		1:7	1:16	1:15	1:16
4	Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik					
	- SD/MI	100	100	86	97	97
	- SMP/MTs	100	100	90	96	96
	- SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2021

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. PAUD penting karena memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Partisipasi pra sekolah di Kota Tanjungbalai masih sangat rendah, pada tahun 2016 partisipasi PAUD mencapai 19,45 persen menurun menjadi 14,60 persen pada tahun 2020 atau menurun sebesar 24,94 persen. Penurunan dan rendahnya partisipasi pra sekolah umumnya disebabkan oleh faktor keberadaan orang tua, artinya faktor ekonomi dan persepsi atau minat orang tua yang masih rendah terhadap PAUD
2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk mengindikasikan kemampuan untuk menampung jumlah semua penduduk usia pendidikan dasar. Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MK sudah cukup memadai, karena data tahun 2020 menunjukkan rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat SD/MI mencapai 1:211, tingkat SMP/MTs mencapai 1:317, dan tingkat SMA/SMK/MK mencapai 1:407.
3. Rasio guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru. Hal yang sama terjadi pada rasio guru terhadap murid, yang menunjukkan tercukupinya ketersediaan guru. Pada tahun 2020 menunjukkan rasio guru terhadap murid pada tingkat SD/MI mencapai 1:17, ditingkat SMP/MTs mencapai 1:14, dan tingkat SMA/SMK/MK mencapai 1:16.

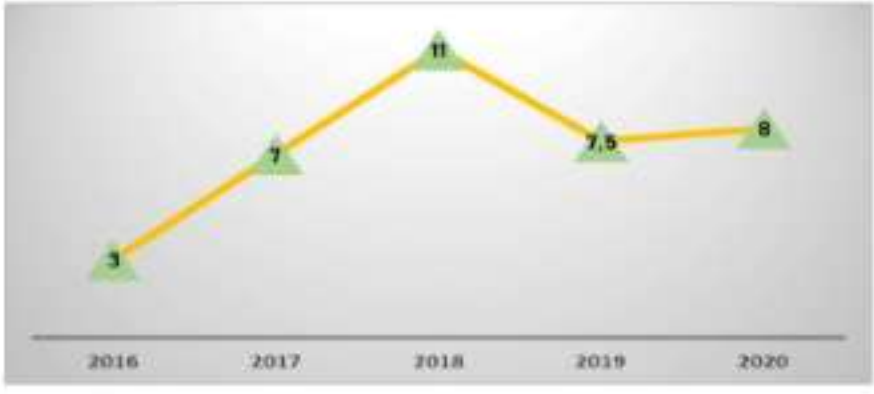
4. Bangunan sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kondisi bangunan baik juga terjadi di Kota Tanjungbalai, baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan tingkat SMA/SMK/MK.

2.3.1.2. Urusan Wajib Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat harus dikedepankan seiring pembangunan aspek lainnya.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

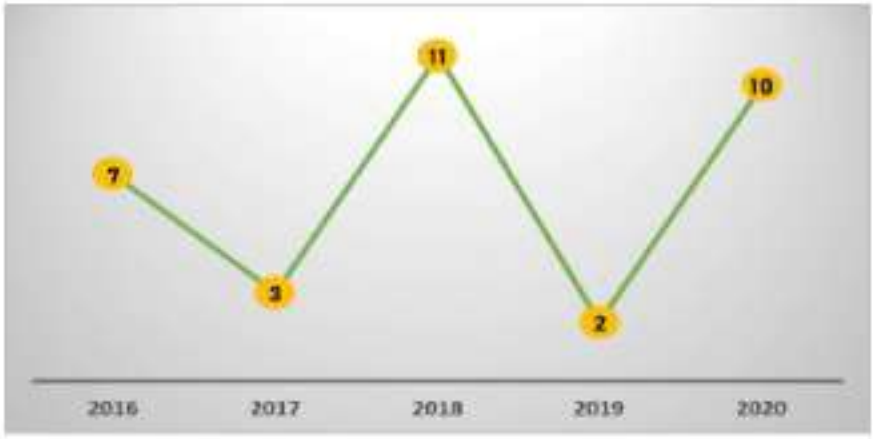
Angka kematian bayi Kota Tanjungbalai belum menunjukkan perbaikan, pada tahun 2020 sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,5 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi sejak dalam kandungan hingga dilahirkan menjadi fokus perhatian yang harus lebih ditingkatkan ke depan. Tiga penyebab utama kematian bayi adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi perinatal dan diare.



Gambar 2.22.
Angka Kematian Bayi dan Balita Kota Tanjungbalai, 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2021

2. Angka Kematian Balita (AKABA)

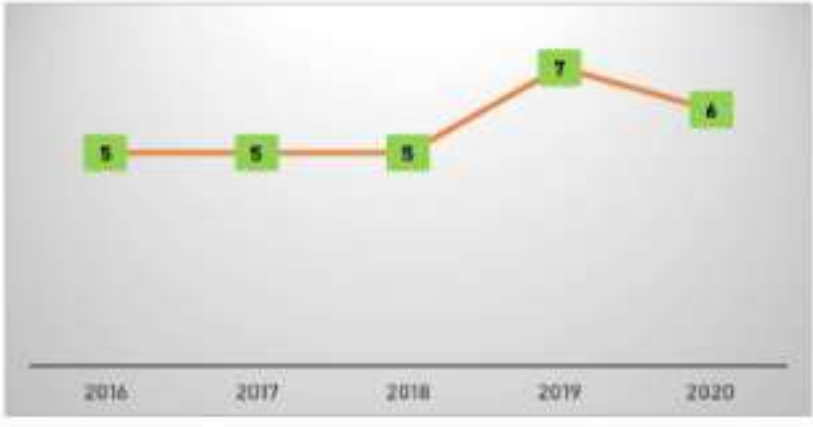
Sama halnya dengan AKB, upaya untuk menurunkan angka kematian balita belum menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2019 AKABA mencapai 2 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat secara signifikan sebesar 400 persen. Penyebab utama kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare, penyakit syaraf dan penyakit saluran pernafasan.



Gambar 2.23.
Angka Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2021

3. Jumlah Kematian Ibu

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kematian ibu terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kasus kematian ibu di Kota Tanjungbalai yang terdaftar pada dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir relatif stagnan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 7 jiwa menurun menjadi 6 jiwa pada tahun 2020. Beberapa faktor risiko yang paling sering menyebabkan kematian ibu, antara lain hipertensi dan pendarahan.



Gambar 2.24.
Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2021

4. Persentase Penolong Kelahiran

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kelangsungan hidup bayi adalah persentase penolong kelahiran. Persentase penolong kelahiran di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi pada berbagai jenis penolong. Dari kedua jenis penolong yang diklasifikasikan, tenaga kesehatan menjadi penolong kelahiran

dengan nilai persentase yang lebih tinggi dari penolong kelahiran lainnya. Pada tahun 2016-2020, persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan sudah mencapai angka 100 persen.

Tabel 2.26.
Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2015-2020

No	Penolong Kelahiran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100
2	Non Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

5. Bayi Gizi Buruk

Angka kelahiran bayi di Kota Tanjungbalai selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah bayi yang lahir di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 2.723 jiwa.

Di sisi lain, bayi dengan gizi buruk di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 3 (tiga) faktor penyebabnya, adalah: kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian gizi yang baik serta faktor penyakit bawaan pada anak seperti jantung, TBC, HIV, AIDS dan diare. Pada tahun 2018, terdapat 55 bayi gizi buruk. Setahun berikutnya, jumlah bayi gizi buruk menurun menjadi 45 jiwa.

Tabel 2.27.
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Kategori	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bayi lahir	3.609	3.679	3.832	2.980	2.723
2.	Jumlah BBLR	14	13	20	49	
3.	Gizi Buruk	27	43	55	45	34

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

6. Fasilitas kesehatan

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai relatif tidak banyak mengalami perubahan. Sampai dengan 2020 Kota Tanjungbalai tidak memiliki rumah bersalin, sedangkan Posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 118 posyandu. Tujuan mengadakan posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita, serta diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup rata-rata. Posyandu yang ideal adalah jika 1 (satu) posyandu dapat melayani 100 balita/700 kepala keluarga, maka dilihat dari kondisi tersebut Kota Tanjungbalai sudah memenuhi syarat.

Tabel 2.28.
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2016–2020

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah sakit	2	2	2	2	2
2	Rumah bersalin	0	0	0	0	0
3	Puskesmas	8	8	8	8	8
4	Posyandu	118	118	118	118	118
5	Klinik/Balai Kesehatan	5	5	5	5	5
6	Polindes	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2020

7. Tenaga Kesehatan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Tanjungbalai masuk kategori cukup. Sampai dengan 2020, perawat menjadi tenaga kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 330 orang, berikutnya bidan dan dokter dengan jumlah 230 orang dan 78 orang.

Tabel 2.29.
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kota Tanjungbalai, 2020

No	Unit Kerja	Tenaga Medis				Tenaga Non Medis		
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Sanitasi	Kesmas
1	Datuk Bandar	6	37	36	1	2	1	2
2	Semula Jadi	3	37	28	2	2	1	3
3	MU Damanik	3	32	27	2	3	0	2
4	Kp. Baru	2	17	14	0	2	1	1
5	Kp. Persatuan	4	16	16	1	3	1	2
6	ST Raso	4	33	33	1	2	1	4
7	Teluk Nibung	4	29	22	0	1	1	1
8	Sipori-pori	3	32	24	2	2	2	1
9	Instalasi Farmasi	0	0	0	4	0	0	0
10	Dinkes	0	0	0	0	0	0	0
11	Rumah Sakit	49	97	30	7	6	1	3

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2020

Jumlah tenaga dokter pada setiap kecamatan di Kota Tanjungbalai sudah merata, sedangkan untuk dokter gigi masih ada kecamatan belum memilikinya, antara lain: Kecamatan Sei Tualang Raso dan Teluk Nibung. Dilihat dari keberadaan

dokter ahli juga sangat tidak merata karena hanya terdapat pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Meski demikian, hal tersebut tidak menghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan karena jarak antarkecamatan yang relatif dekat. Sementara kebutuhan tenaga dokter di RSUD Tengku Mansyur sebanyak 25 orang sudah tercukupi.

Tabel 2.30.
Banyaknya Tenaga Dokter Menurut Kecamatan Kota Tanjungbalai, 2020

No	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Ahli
1	Datuk Bandar	5	1	0
2	Datuk Bandar Timur	3	0	0
3	Tanjungbalai Selatan	27	4	21
4	Tanjungbalai Utara	2	2	0
5	Sei Tualang Raso	7	1	0
6	Teluk Nibung	6	1	0
Tanjungbalai		**50**	**5**	**21**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

8. Temuan penyakit

Penyakit infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas menjadi penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk Kota Tanjungbalai. Kebakaran lahan yang banyak terjadi di wilayah Sumatera diduga menjadi penyebab utama banyaknya penderita penyakit tersebut. Sampai dengan 2019, sebanyak 30.375 penduduk terkena penyakit Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas.

Sementara itu infeksi penyakit usus yang lain, hipertensi dan penyakit pada sistem otot dan penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat menjadi penyakit terbanyak berikutnya. Masing-masing jumlah kasus yang penyakit tersebut adalah 5.357, 4.535, dan 4.280. Berikut ini jumlah temuan penyakit terbanyak di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.31.
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kota Tanjungbalai, 2020

No	Jenis Penyakit	Banyaknya
1	Penyakit lain pada ISPA	30.375
2	Infeksi Penyakit Usus yang lain	5.357
3	Hipertensi	31.513
4	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	4.280
5	Diare	3.188
6	Infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas	1.770
7	Karies	1.444
8	Diabetes Melitus	1.282
9	TBC	500

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2020 menurun menjadi 12 kasus dibandingkan tahun 2019 yang terdapat 17 kasus. Setiap tahunnya jumlah kasus terbanyak terdapat pada jenis penyakit diare. Angka tersebut mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2019 menjadi 1.684 dibandingkan tahun 2020 terdapat 3.188 kasus.

Tabel 2.32.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	HIV/AIDS	0	0		17	12
2	IMS	0	0		2	
3	DBD	76	82		145	145
4	DIARE	4.104	3.664		3.188	1.684
5	TB	174	197		318	449
6	MALARIA	0	0		0	0

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Kesehatan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.33.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kesehatan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	4	5	7	12	4
2	Rasio posyandu per satuan balita	0.001	0.630	0.630	0.600	0.600
3	Rasio puskesmas, polikdinik, pustu per satuan penduduk	0	0.63	0.63	0.59	14.0
4	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
5	Rasio dokter per satuan penduduk		0,26	0,23	0,28	0,28
6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,26	0,23	0,28	0,28
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93.55%	83.87%	90.32%	74.2	
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	0	89.89%	100%	91.8%	16,40%

12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	94.86	307	460	449	
14	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS			19.25%	11.4%	
15	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			42.25%	25.1%	
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	96.51%	100%	100%	100%
17	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%	71.61%	100%
18	Angka kejadian Malaria			184.60	0	
19	Tingkat kematian akibat malaria	0%	0%	0%	0%	0%
20	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0.0008	0.0007	0.0002	0,0003
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
22	Cakupan kunjungan bayi			70.96%	86%	
23	Cakupan puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%
24	Cakupan pembantu puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%
25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	79.95%	67.90%	84.2%	74.5%	82.76%
26	Cakupan pelayanan nifas	71.53%	47.43%	67.9%	100%	100%
27	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75.17%		89.6%	100%	100%
28	Cakupan pelayanan anak balita		67%	78.53%	70%	91,30%
29	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
30	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat			99.05%	35.4%	
31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
32	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
33	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2021

2.3.1.3. Urusan Wajib PU dan Penataan Ruang

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.34.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	79,70	83,35	85,65	76,76	69,70
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	2,09	1,74	2,07	1,19	1,19
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,10	0,11	0,11	0,19	0,20
4	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	15,01	15,00	15,00	14,99	14,99
5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	98,35	98,35	98,35	98,35	98,35
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	99,34	96,69	92,86	91,25	86,96
7	luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (ha)	2378,40	2378,40	2378,40	2378,40	2378,40
8	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (ha)	2344,94	2344,94	2344,94	2344,94	2344,94
9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	56,30	58,10	63,50	65	

Sumber: Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, 2021

1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik dapat diketahui melalui panjang (km) kualitas jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam. Pada tahun 2019 terjadi penurunan terhadap capaian indikator ini. Pada tahun 2019 mencapai 76,76 persen menurun menjadi 69,70 persen pada tahun 2020. Kondisi ini tentunya dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan secara tidak langsung dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dapat menghambat lancarnya arus barang dan jasa.
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengacu pada kepadatan penduduk di wilayah yang bersangkutan. semakin tinggi kepadatan suatu komunitas penduduk, maka kebutuhan perjalanan per orangnya akan bertambah dan oleh karena itu kebutuhan akan jaringan jalan juga akan bertambah. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 178.387 jiwa dengan kepadatan penduduk tergolong tinggi sebesar 2.948, sehingga indeks aksesibilitas > 1,5. Menurut data di atas rasio panjang jalan hanya mencapai 0,001, artinya tidak memenuhi jumlah panjang jalan untuk memenuhi SPM.
3. Keberadaan drainase sangat penting untuk memastikan air hujan tidak menggenang di badan jalan dan keberadaan trotoar untuk pejalan kaki agar dapat terus aman dan nyaman sewaktu melintas. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada tahun 2020 sebesar 0,20 persen. Capaian yang masih rendah ini dapat memicu terjadinya genangan dalam skala besar.
4. Persentase sempadan jalan yang digunakan oleh pedagang kaki lima dan bangunan liar mencapai 14,99 persen. Banyak pedagang yang melakukan

aktivitasnya di sempadan jalan karena berpendapat bahwa area tersebut merupakan teritori publik sehingga bisa digunakan siapa saja dan menganggap bahwa berdagang di tempat tersebut tidak mengganggu pejalan kaki.

5. Persentase sempadan sungai yang dipakai untuk bangunan liar mencapai 98,35 persen. Tingginya capaian indikator tersebut mengakibatkan penurunan kualitas air sungai, peningkatan gerusan tepian sungai dan mengurangi jumlah debit air
6. Secara umum struktur drainase di Kota Tanjungbalai adalah cerocok kayu dan pasangan batu padas, namun jika pemeliharaannya kurang baik mengakibatkan sampah yang menumpuk dan dapat menyebabkan genangan. Menurut data di atas kondisi drainase Kota Tanjungbalai dalam kondisi baik meningkat setiap tahunnya, meskipun data menunjukkan masih perlunya perbaikan dan perawatan terhadap drainase untuk mencegah terjadinya banjir.
7. Kota Tanjungbalai berada pada ketinggian 0-3 m di atas permukaan laut, hal tersebut mengakibatkan Kota Tanjungbalai menjadi wilayah rawan banjir dan genangan. Wilayah Kota Tanjungbalai yang rawan banjir dan genangan seluas 2378,4 ha atau 39,30 persen dari luas seluruhnya.
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada suatu kota harus memenuhi syarat minimal yaitu sebesar 20 persen. RTH Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir seluas 2344,94 ha atau 38,75 persen dari luar seluruhnya, artinya sudah memenuhi syarat penyediaan RTH.
9. Bertujuan untuk menjaga kestabilan tanah atau bantaran sungai tidak longsor maka dibangun turap. Pada tahun 2019, pembangunan turap di Kota Tanjungbalai sudah mencapai 65 persen.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Pengguna Listrik

Pemakai listrik pada jenis rumah tangga menjadi jumlah terbesar di Kota Tanjungbalai pada 2019 dengan jumlah 33.272 pelanggan. Daya yang tersambung pada jenis pemakai rumah tangga sebanyak 25.102.500 VA dan jumlah KWH terjual 62.705.556 KWH.

Tabel 2.35.
Banyaknya Pelanggan, Daya Tersambung, KWH Terjual dan Nilai Listrik yang Disalurkan Menurut Jenis Pemakai, 2019

No	Jenis Pemakai	Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	KWH Terjual (KWH)	Nilai (Juta Rp)
1	Rumah Tangga	33.272	25.102.500	62.705.556	52.963.400.817
2	Bisnis	1.118	7.448.000	13.449.256	17.327.373.724
3	Industri	52	12.662.700	27.781.703	31.196.513.232
4	Sosial	780	1.896.600	4.166.389	2.817.449.490
5	Instansi Pemerintah	259	4.365.476	10.959.841	15.718.567.323
Jumlah		**35.481**	**51.475.276**	**119.062.745**	**120.023.304.586**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2020

Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan setiap tahunnya, sedangkan daya listrik yang

tersambung masih terbatas tergantung pada gardu induk yang terdapat di Kota Rantau Parapat.

Tabel 2.36.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2016-2020

Tahun	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
2016	98,27	0,98	0,75
2017	99,22	0,39	0,39
2018	100	0	0
2019	99,85	0,15	0
2020	99,12	0,57	0,31

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai,2021

2. Pengguna Air Minum

Terhitung sampai 2019, jumlah pelanggan air minum di Kota Tanjungbalai didominasi oleh rumah tempat tinggal dengan jumlah pelanggan sebanyak 19.028 dan nilai Rp 15.548.170.382,-.

Tabel 2.37.
Banyaknya Pelanggan Air Minum yang Disalurkan dan Nilai Air Minum Menurut Jenis Pemakai di Kota Tanjungbalai, 2019

No	Jenis Pemakai	Pelanggan	Banyaknya (m3)	Nilai (Rp)
1	Rumah Tempat Tinggal	19.028	5.494.872	**15.548.170.382**
2	Hotel/Objek Wisata/Pertokoan dan Industri	2.605	870.678	**4.629.576.110**
3	Sosial	285	233.047	**524.225.585**
4	Umum	85	38.132	**59.677.943**
5	Instansi Pemerintah	134	97.230	**482.634.485**
Jumlah		**22.137**	**6.733.959**	**21.244.284.865**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2020

Selama lima tahun terakhir, rumah tangga pengguna air minum layak mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh perhitungan BPS yang menggunakan metode baru. Pada Tahun 2016 terdapat sekitar 39,17 persen rumah tangga yang mendapatkan air minum layak. Angka tersebut tersebut masih tergolong rendah karena hanya setengah dari seluruh RT yang ada di Kota Tanjungbalai yang menikmati air bersih, hal tersebut disebabkan peralatan *Water Treatment Plant (WTP)* atau instalasi pengolahan air yang masih kurang memadai, saat ini masih berjumlah 4 buah, sedangkan kebutuhan seharusnya 5 buah, selain itu daya yang dibutuhan untuk menggerakan WTP tersebut belum maksimal karena daya listrik yang terbatas. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang menggunakan air minum layak sudah mencapai 83,20 persen.

Tabel 2.38.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2016-2020

Tahun	Layak	Tidak Layak
2016	39,17	60,83
2017	73,96	26,04
2018	67,58	32,42
2019	86,18	13,82
2020	83,20	16,80

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.39.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)		6,78	16,59		23,62
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	98,27	99,22	100	99,85	99,12
3	Rumah tangga ber sanitasi layak (%)	81,31	80,67	84,04	89,55	86,32
4	Rasio Rumah layak huni (%)					0,14

Sumber: Dinas Perkim & BPS Kota Tanjungbalai, 2021

2.3.1.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Keamanan dan Ketertiban

a. Angka kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Tanjungbalai tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kota Tanjungbalai. Bersumber data perangkat daerah diperoleh ada 570 kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan 5 kasus kejadian kebakaran di Kota Tanjungbalai selama tahun 2020.

b. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tertentu atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan politik atau kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi dihitung berdasarkan jumlah aksi demo selama satu tahun.

Tabel 2.40.
Jumah Demostrasi di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Uraian Jenis Demo/ Unjuk Rasa	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	73	88	118	58	38
2	Ekonomi	0	0	0	0	3
3	Kasus Pemogokan kerja	0	0	0	0	0
4	Bidang Agama	0	0	0	0	0
5	Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah Demonstrasi/unjuk Rasa		**73**	**88**	**118**	**58**	**41**

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai, 2021

Aksi demo yang terjadi di Tanjungbalai pada tahun 2020 berjumlah 41 unjuk rasa. Aksi demo yang terjadi biasanya berkisar pada masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.41
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	N/A	77,11	74,03	73,88	66,00
2	Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	75	72,4	66
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
5	Persentase LSM Aktif (%)	0	0	0	0	0
6	Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah	1	4	3	2	2

Sumber: Satpol PP Kota Tanjungbalai, 2021

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaian dalam waktu 24 jam. Selama lima tahun terakhir, capaian indikator ini mengalami penurunan karena pada tahun 2017 mencapai 77,11 persen turun menjadi 66 persen pada tahun 2020. Hal tersebut tercapai karena Dinas terkait belum mengoptimalkan pelaksanaan patroli K3 serta meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan.

2. Pada prinsipnya penegakan perda merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk memastikan perda tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Efektivitas penegakan perda pada tahun 2019 mencapai 72,4 persen menurun menjadi 66 persen pada tahun 2020.
3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota merupakan sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran. Capaian indikator ini selama lima tahun terakhir sudah mencapai 100 persen.
4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) artinya rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri. Selama tiga tahun terakhir indikator ini sudah mencapai target karena kebakan sudah tertangani dalam waktu 5 menit.
5. LSM dapat dikatakan aktif dilihat dari laporan kegiatan lembaga sesuai bidang masing-masing. Namun kenyataannya mayoritas organisasi itu hanya mendaftar dan tidak pernah menyampaikan kegiatan keorganisasian atau kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka capaian indikator adalah nol.
6. Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai 1 kegiatan meningkat menjadi 2 kegiatan pada tahun 2020.

Tabel 2.42.
Sarana/Prasarana Keamanan, Ketertiban Umum dan Tanggap Bencana
Kota Tanjungbalai, 2020

Sarana/Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah	Sarana/Prasarana Tanggap Bencana	Jumlah
Aparat Pamong Praja (orang)	64	Transportasi :	
Aparat Linmas (orang)	8	- Kendaraan Roda 2	5 unit
Aparat Petugas Patroli Satpol PP	10 orang	- Kendaraan Roda 4	3 unit
Kendaraan Operasional Roda 2	4 unit	- Kendaraan Roda > 4	0
Kendaraan Operasional Roda 4	2 unit	Peralatan Komunikasi (Hand Talky)	6 unit
		Peralatan Kesehatan :	
Kebakaran :		- Mobil Ambulance	1 unit
- Mobil Pemadam Kebakaran	7 unit	- Tandu	1 unit
- Pos Pemadam Kebakaran	1 unit	- Tabung Oksigen	1 unit
		- Peralatan Kesehatan Lainnya	5 unit
		Peralatan Hunian Sementara :	
		- Tenda	18 unit
		- Dapur Umum	12 unit
		- Generator	3 unit

Sumber: E- Database Kota Tanjungbalai, 2021

2.3.1.6. Urusan Wajib Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang

serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Pada Tahun 2020, jumlah jenis PMKS yang terbanyak adalah fakir miskin sebanyak 12.107 keluarga.

Tabel 2.43.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	196	5	-	-	-
2	Anak Terlantar	196	248	24	9	9
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	8	3	1	-	-
4	Anak Jalanan	58	13	5	1	1
5	Anak dengan Kedisbilitasan	151	37	29	187	185
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	11	1	1	2	-
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	31	24	10	3	2
8	Lanjut Usia Terlantar	1.783	311	379	957	1,139
9	Penyandang Disabilitas	274	117	163	110	548
10	Tuna Susila	26	9	9	1	1
11	Gelandangan	5	5	1	-	-
12	Pengemis	16	10	6	1	1
13	Pemulung	56	47	38	25	23
14	Kelompok Minoritas	3	3	2	1	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	157	48	77	20	19
16	Orang dengan HIV AIDS (ODH)	-	-	-	1	1
17	Korban Penyalahgunaan	258	84	26	20	16
18	Korban Trafficking	-	-	1	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	7	7	3	-	-
20	Pekerja Migran bermasalah sosial	293	16	16	3	3
21	Korban Bencana Alam	33	15	17	4	4
22	Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2,634	1,224	1,066	964	930
24	Fakir Miskin	15,04	10,625	8,628	7,533	12,107
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	67	34	29	14	11
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	1	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Sosial dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.44.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	23,79	24,70	83,90	55,38	23,51
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	23,99	25,32	84,58	56,05	23,79
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial (%)	23,79	24,70	83,90	55,38	23,51
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	0,16	0,30	0,20	0,21	0,90

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Dilihat berdasarkan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai bekerja di sektor jasa yakni sebanyak 46.925 orang atau sebesar 65,91 persen disusul sektor pertanian sebanyak 18.106 orang atau sebesar 25,43 persen dan sektor industri sebanyak 4.759 orang atau 6,68 persen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin maka yang mendominasi jumlah tenaga kerja adalah laki-laki sebesar 50.065 orang, sedangkan perempuan sebesar 27.131 orang.

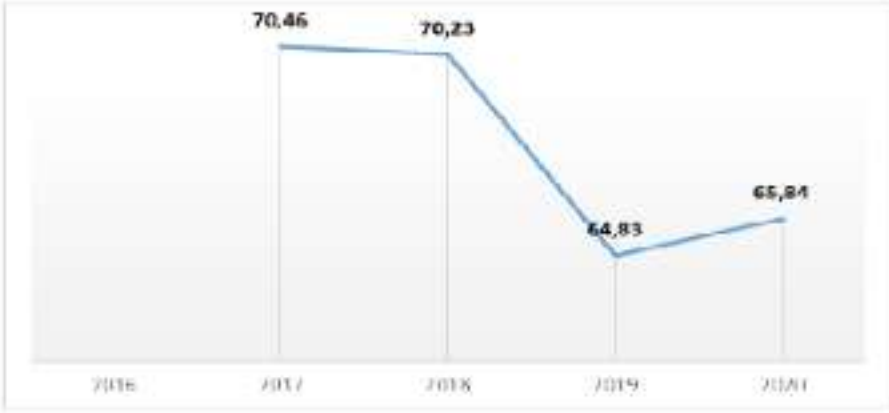
Tabel 2.45
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	17.790	316	**18.106**
2.	Industri	7.406	4.759	**12.165**
3.	Jasa-jasa	24.869	22.056	**46.925**
	Jumlah	**50.065**	**27.131**	**71.196**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.



Gambar 2.25.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2021

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa TPAK Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 sebesar 70,46 persen menurun menjadi 65,84 persen pada tahun 2020. TPAK sebesar 65,84 artinya bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 66 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

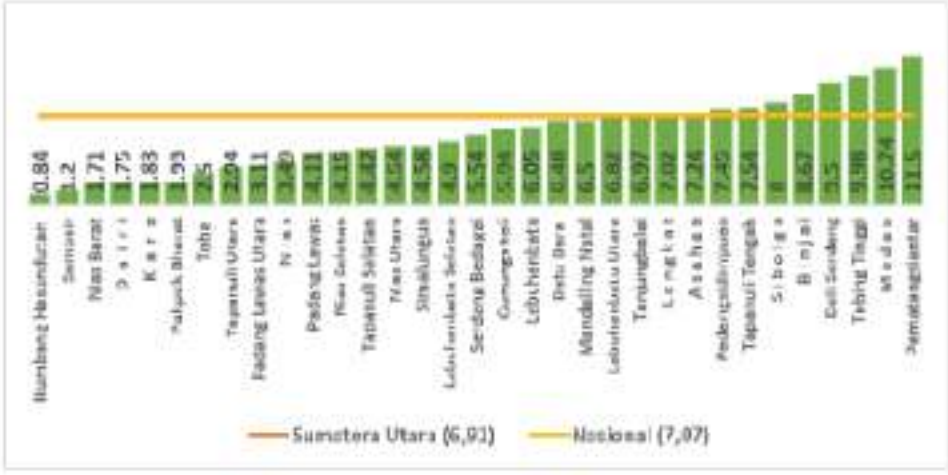
Tingkat pengangguran terbuka merupakan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran dapat diatasi dengan mengadakan program pekerjaan padat karya, pelatihan keterampilan dan memberikan bantuan usaha.



Gambar 2.26.
Tingkat Pengangguran Di Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Berdasarkan gambar diketahui bahwa pengangguran terbuka menunjukan tren meningkat. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran Kota Tanjungbalai sebesar 5,5 persen meningkat menjadi 6,97 persen pada tahun 2020. Peningkatan jumlah

pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan pekerjaan terbatas diperparah dengan pandemi covid-19.

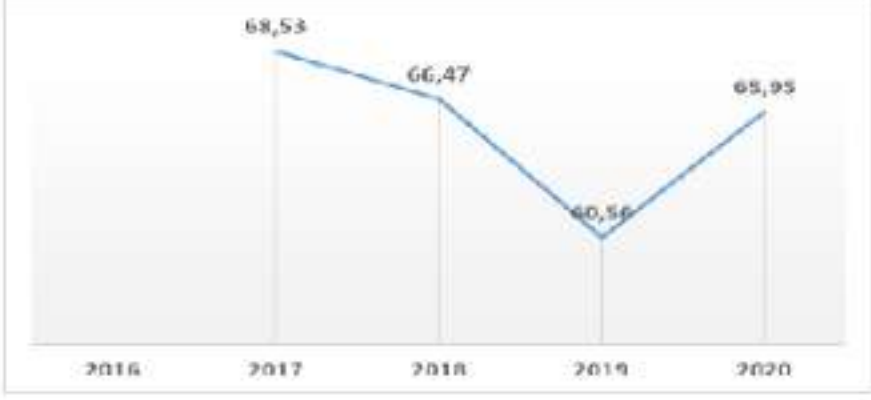


Gambar 2.27.
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, 2020
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tanjungbalai relatif tinggi karena berada pada posisi kesebelas tertinggi dan berada di atas rata-rata provinsi, tetapi posisi TPT Kota Tanjungbalai masih berada di bawah rata-rata nasional.

3. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir rasio kesempatan kerja Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai angka sebesar 60,56 persen meningkat menjadi 65,95 persen pada tahun 2020. Tren ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesempatan kerja di Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.28.
Rasio Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2021, (diolah)

4. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2017, jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai hanya sebanyak 114.485 orang meningkat menjadi 126.022 orang pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 10,08 persen.

Tabel 2.46.
Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama
Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Angkatan Kerja	N/A	80.671	81.626	76.490	82.977
	1. Bekerja	N/A	76.233	77.073	71.272	77.196
	2.Mencari Pekerjaan	N/A	4.438	4.553	5.218	5.781
B	Bukan Angkatan Kerja	N/A	33.814	34.593	41.496	43.045
	Tanaga Kerja (A+B)	N/A	114.485	116.219	117.986	126.022

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pendidikan yang ditamatkan pada Tahun 2019 masih didominasi tingkat pendidikan sekolah dasar (SMA/SMK) yakni mencapai angka 23.210 orang. Jumlah terbesar penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja adalah tamatan SMP ke bawah sebesar 38.468 orang. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas/mutu yang dimiliki tenaga kerja di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.47.
Penduduk 15 Tahun ke Atas Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja				
	Tidak Sekolah/SD	SMP	SMA/SMK	PT	Total
2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	28.129	15.597	26.343	10.102	80.171
2018	28.321	14.436	28.184	10.685	81.626
2019	23.155	14.220	29.893	9.272	76.540
2020	24.170	14.298	29720	9.008	77.196

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya pembangunan SDM harus diarahkan kepada penciptaan SDM yang produktif, inovatif dan profesional disamping mampu memanfaatkan, mengembangan dan menguasai IPTEK sehingga mampu bersaing di dunia global. Selanjutnya kualitas SDM juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja yang ada.

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang diserap. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kemungkinan

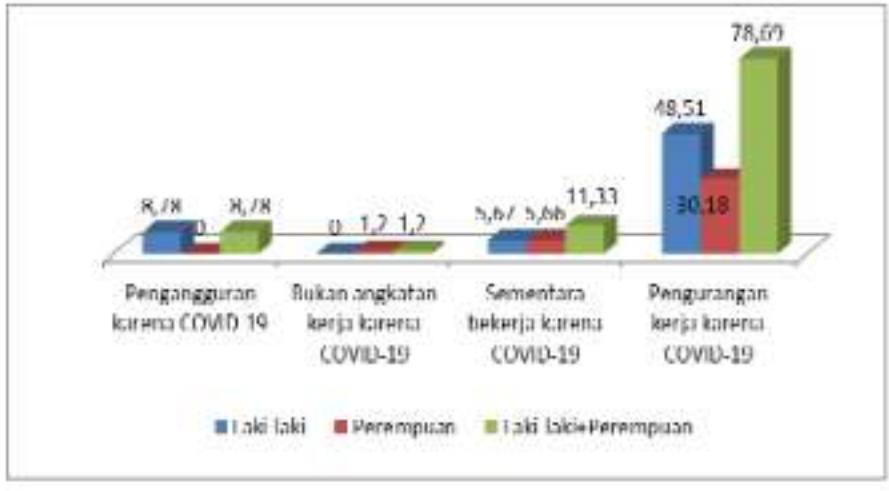
orang tersebut memperoleh pekerjaan. Tingkat pendidikan para pekerja di Kota Tanjungbalai tergolong relatif rendah. Hal tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran Terbuka
Tidak/belum pernah sekolah; Tidak/belum tamat Sekolah Dasar	24.170	1.064
Sekolah Menengah Pertama	14.298	433
Sekolah Menengah Tingkat Atas	22.480	3.077
Sekolah Menengah Kejuruan	7.240	807
Program Diploma I/II/III	1.555	276
Akademi/ Universitas	7.453	124
Jumlah	71.196	5.781

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2021, (diolah)

Penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja dilihat berdasarkan status pekerjaan utama didominasi pada buruh/karyawan/pegawai dengan total keseluruhan sebesar 46.098 orang, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri dengan jumlah 14.890 orang. Status pekerjaan utama didominasi oleh perempuan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.



Gambar 2.29.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Komponen Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Kerja/Pengurangan Jam Kerja, 2020

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Pada Maret Tahun 2019, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan gangguan sosia-ekonomi global, pembatasan perjalanan dan ketakutan akan penularan virus korona, termasuk juga pelarangan terhadap wisata domestik dan internasional. Hasilnya sebesar 8,78 persen penduduk Kota Tanjungbalai menjadi pengangguran.

Tabel. 2.49.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Berusaha Sendiri	9.796	5.094	14.890
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	2.029	2.841	4.870
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.223	736	2.959
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.347	13.751	46.098
Pekerja Bebas Pertanian	1.515	133	1.648
Pekerja Bebas Non Pertanian	614	867	1.481
Pekerja Keluarga/tak dibayar	1.541	3.709	5.250
Jumlah	**50.065**	**27.131**	**77.196**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Tenaga Kerja dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.50.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Tenaga Kerja

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Angka Sengketa pengusaha pekerja per tahun (kasus)	8	12	13	6	8
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	2	10	7	2	4
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	37,50	24	23	33	20
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (%)	71	72	78	80	81
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	71	87	67	83	72
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	71	87	67	83	72
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	71	87	67	83	76

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai, 2021

2.3.2.2 Urusan Wajib Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.51.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender)	30%	50%	70%	80%	50%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	59,62	59,35	59,78	63,28
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	88,94	89,37	89,51	89,69
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	16%	16%	16%	20%	20%
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0	7 kasus	4 kasus	7 kasus	6 kasus
6	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	0	0,4%	0,3%	0,3%	0,7%
7	Jumlah kekerasan terhadap Anak	0	10 kasus	7 kasus	12 kasus	
8	Indikator layak anak					Pratama

Sumber: Dinas P3A & PMK Kota Tanjungbalai, 2021

1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana OPD menerapkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-lak dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Selama tahun 2016-2018 terjadi peningkatan signifikan terhadap indikator ini, namun terjadi penurunan signifikan dari 80 persen pada tahun 2019 menjadi 50 persen pada tahun 2020.
2. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan IDG menjadi 63,28, keberhasilan capaian ini disebabkan peningkatan jumlah perempuan yang duduk di parlemen dan peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan.
3. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Perkembangan IPG Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya ketimpangan pembangunan gender semakin rendah.

4. Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tahun 2016-2018 indikator ini mencapai 16 persen. Pada pemilihan anggota DPRD pada tahun 2019, indikator ini mencapai angka 20 persen.
5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu merupakan indikator untuk mengetahui persentase tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat. Pada tahun 2020 terdapat 6 kasus kekerasan yang diselesaikan petugas terlatih.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Pada tahun 2019 rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,3 persen menjadi 0,7 persen pada tahun 2020. Dalam hal ini bantuan yang diberikan oleh Dinas P3A adalah memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 7 kasus menjadi 12 kasus.

2.3.2.3 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Ketahanan Pangan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.52.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00
2	Ketersediaan Pangan Utama	23,501.78	23,675.00	23,885.00	24,067.00	18,959.17

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tanjungbalai, 2021

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Menurut data di atas capaian indikator ini pada tahun 2019 sudah mencapai perbaikan dibandingkan tahun 2015, artinya konsumsi pangan di Kota Tanjungbalai sudah semakin beragam dan bergizi seimbang.
2. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Berdasarkan data di atas, indikator ini juga

mengalami peningkatan setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pertanahan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.53.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pertanahan

No	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase luas lahan bersertifikat	491.433 m^2	1.686.355 m^2	1.489.899 m^2	4.498.674 m^2	1.522.828 m^2
2	Penyelesaian kasus tanah negara	5 kasus	4 kasus	6 kasus	5 kasus	6 kasus

Sumber: BPN Kota Tanjungbalai, 2021

1. Undang–Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengharuskan bagi warga negara untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada hak nya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pada tahun 2016 luas lahan bersertifikat mencapai 491.433 m^2 menjadi seluas 1.522.828 m^2 atau meningkat seluas 209,88 persen.
2. Sengketa tanah dapat diselesaikan secara langsung dengan jalan musyawarah atau Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana. Selama lima tahun penyelesaian kasus tanah negara relatif banyak 6 kasus.

2.3.2.5 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.54.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,50	53,87	54,98	55,82	58,23
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,50	53,87	54,98	57,85	55,87

3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,45	79,50	80,00	80,60	90,78
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
5	Timbulan sampah yang ditangani (%)	54,74	55,10	55,82	56,17	60,37
6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)			3,33	4,96	2,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, 2021

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2016 nilai IKLH sebesar 52,50 meningkat menjadi 58,23 pada tahun 2020. Kisaran nilai 50≤IKLH≤60 artinya Kota Tanjungbalai berada pada predikat kurang baik.
2. Kriteria yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan BOD pada 6 (enam) sungai berikut:

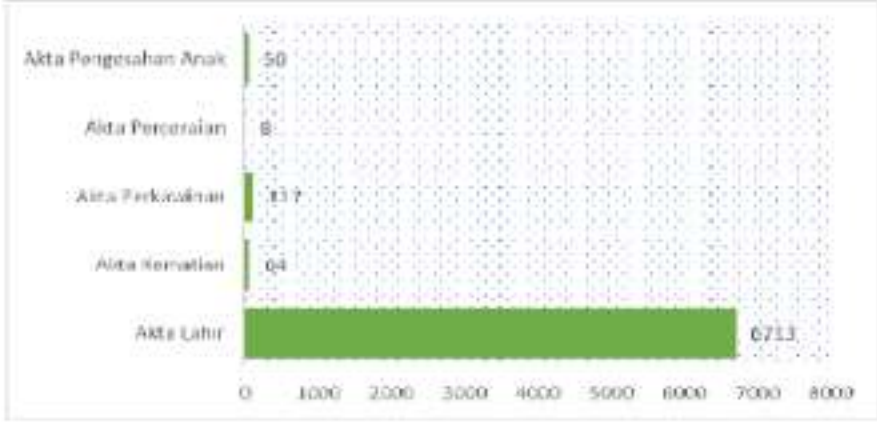
NO	Titik Sampling	Status Mutu Air
1	Sungai Merbau (2 titik)	Kelas C (Cemar Sedang)
2	Sungai Bandar Jopang (2 titik)	Kelas C (Cemar Sedang)
3	Sungai Bandar Jepang (1 titik)	Kelas C (Cemar Sedang)
4	Sungai Asahan (3 titik)	Kelas C (Cemar Sedang)
5	Sungai Kapias (1 titik)	Kelas C (Cemar Sedang)
6	Sungai Bandar Jaksa (2 titik)	Kelas C (Cemar Sedang)

   Pada tahun 2016 nilai IKA sebesar 52,50 dan meningkat menjadi 55,87 pada tahun 2020. Kisaran nilai 50≤IKA≤60 artinya indeks kualitas air Kota Tanjungbalai berada pada predikat kurang baik.
3. Perhitungan indeks kualitas udara (IKU) hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Pada tahun 2016 nilai IKU sebesar 79,45 meningkat menjadi 90,78 pada tahun 2020. Kisaran nilai 75-100 artinya indeks kualitas udara Kota Tanjungbalai berada pada angka yang tinggi menandakan udara tercemar.
4. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Kemudian dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman keanekaragaman hayati. IKTL kota Tanjungbalai berdasarkan kondisi eksisting tutupan lahannya adalah 12 persen sehingga Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah 35,71.
5. Pengelolaan pengangkutan sampah menjadi masalah bila tidak ditangani dengan baik dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya timbunan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Penanganan timbunan sampah di Kota Tanjungbalai masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 60,37 persen.

6. Pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai mengadopsi konsep 3R, yaitu reduce (mereduksi timbulan sampah), reuse (pemanfaatan kembali), dan recycle (daur ulang). Dengan konsep ini mendorong masyarakat untuk dapat memilah sampah dengan benar ke dalam tiga tempat yaitu sampah plastik, sampah kertas dan sampah organik. Dalam pelaksanaan konsep tersebut ditemukan adanya kendala yaitu terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Pada tahun 2020 pelaksanaan konsep penanganan sampah dengan 3R hanya mencapai 2,84 persen.

2.3.2.6 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aktivitas penduduk Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan catatan sipil didominasi dengan mengurus dokumen kelahiran. Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan akte kelahiran sebanyak 6.713 dokumen. Akte kematian ada sebanyak 64 dokumen, akte perkawinan sebanyak 117 dokumen dan untuk kegiatan pengurusan akte perceraian sebanyak 8 dokumen.



Gambar 2.30.
Banyaknya Kegiatan Pengurusan di Kantor Catatan Sipil
Kota Tanjungbalai, 2020

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.55.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	85,17	87,39	92,59	97,33	99,26

2	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	94,80	92,38	95,74	97,82	99,53
3	Rasio pasangan berakte nikah	41	42,7	45,53	51,30	56,63
4	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, 2021

1. Indikator ini meliputi penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standard pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP. Berdasarkan data di atas cakupan indikator ini mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2016 hanya mencapai 85,17 persen meningkat menjadi 99,26 persen pada tahun 2020. Artinya 99,26 persen dari jumlah penduduk di Kota Tanjungbalai memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK
2. Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah adalah peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Indikator ini juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 mencapai angka 94,80 persen, meningkat menjadi 99,53 persen pada tahun 2020. Dalam upaya peningkatan indikator tersebut, Dinas Disduk Catpil berencana untuk bekerjasama dengan tenaga kesehatan, rumah sakit dan puskesmas untuk dapat membantu menerbitkan dokumen akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.
3. Pasangan yang memiliki akte perkawinan di Kota Tanjungbalai masih relatif rendah. Pada tahun 2020 masih hanya mencapai 56,63 persen pasangan menikah mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Disduk Catpil. Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan agar dinas terkait melakukan sosialisasi atau kegiatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akta perkawinan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, terutama akta perkawinan.
4. Database kependudukan sangat diperlukan sebagai data/bahan/masukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum. Sejak tahun 2016-2020 Kota Tanjungbalai telah mewujudkan ketersediaan database kependudukan.
5. KTP berbasis NIK merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Disduk & Catpil telah menerapkan KTP berbasis NIK.

2.3.2.7 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.56.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	100	100	100	100	100

2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	6	7	8	9	10
3	Persentase LPM berprestasi	30	35	40	45	50
4	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
5	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	65	80	85	90	95

Sumber: Dinas P3A dan PMK, 2021

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2019 sampai dengan 2020 indikator ini sudah mencapai target yaitu sebesar 100 persen.
2. Kelompok binaan LPM pada tahun 2020 mencapai 10 kelompok. Tujuan indikator ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam berusaha juga dapat memperluas lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam usahamencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kaitannya dengan upaya untuk membina dan mengembangkan potensi keluarga yang dimiliki, dapat dilakukan melalui berbagai alternatif kegiatan, diantaranya berupa pelatihan kerajinan kulit kerang, payet dan eceng gondok.
3. LPM berprestasi merupakan salah satu bentuk program penyelenggaraan pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Capaian Kota Tanjungbalai untuk indikator ini adalah 50 persen.
4. Peran PKK sangat diperlukan dalam mendukung program pembangunan untuk mengembangkan potensi keluarga dan masyarakat. Persentase PKK aktif di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir sudah mencapai 100 persen.
5. Indikator capaian Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat sudah relatif baik, ditunjukkan dengan capaian pada Tahun 2020 sebesar 95 persen. Swadaya masyarakat dimaksud bisa dalam bentuk gotong royong maupu partisipasi perusahaan dalam bentuk CSR.

2.3.2.8 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Fertilitas dan KB

Usia perkawinan pertama seorang wanita sangat berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga serta kesehatan ibu, dan anak yang dilahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan. Kondisi ini disebabkan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau belum siapnya mental menghadapi proses kehamilan. Sebaliknya semakin tinggi usia perkawinan yang melampaui batas yang dianjurkan juga sangat beresiko pada masa kehamilan dan melahirkan. Batasan usia perkawinan dibawah umur adalah dibawah 17 tahun. Persentase wanita berusia 10 tahun keatas yang berstatus pernah kawin di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.57.
Persentase wanita berusia 10 tahun keatas
yang berstatus pernah kawin Kota Tanjungbalai, 2019

Umur Perkawinan Pertama (Tahun)					Jumlah	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama
10-16	17-18	19-24	25-34	35+		
8,29	16,07	55,86	18,98	0,79	100	21,35

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2019

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan program Keluarga Berencana (KB). Pada Tahun 2020 di Kota Tanjungbalai, persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah (sedang dan tidak menggunakan lagi) menggunakan alat/cara KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin
Menurut Status Penggunaan Alat KB Kota Tanjungbalai, 2020

Penggunaan Alat KB			
Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan	Jumlah
38,73	17,19	44,08	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, 2020

Untuk alat/cara KB yang paling banyak dipilih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin
Menurut Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan
Di Kota Tanjungbalai, 2020

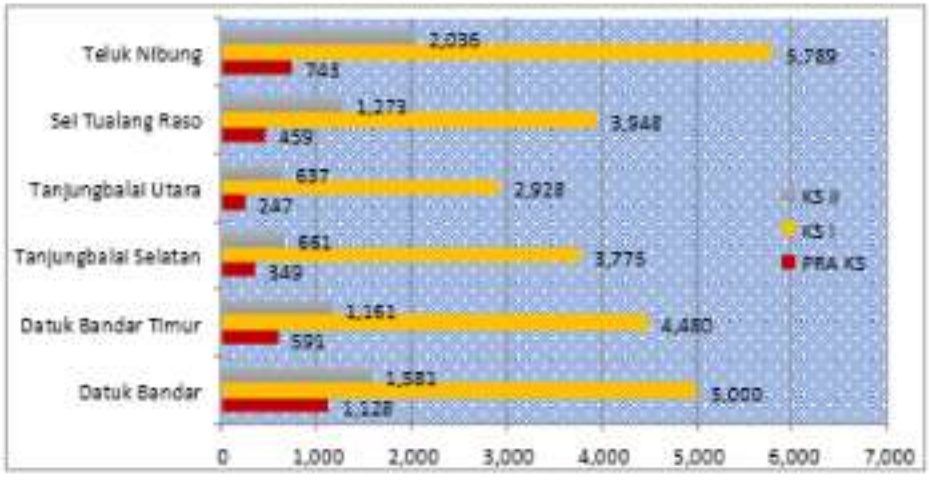
Alat/ Cara KB Yang Sedang Digunakan	Persentase
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	7,64
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00
IUD/AKDR/spiral	2,68
Suntikan	47,46
Susuk KB/Implan	6,65
Pil KB	33,74
Kondom Pria/ Karet KB	0,29
Intravag/kondom wanita/diafragma	0,00
Metode menyusui alami	0,00
Pantang berkala/kalender	0,00
Lainnya	1,53
Jumlah	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, 2020

B. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Pengertian dari keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga Sejahtera I seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan

kesehatan. Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja,sekolah dan bepergian; bagian yang terluas darilantai rumah bukan dari tanah; bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan. Sementara keluarga sejahtera II adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur; minimal sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk; seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun; lantai rumah minimal delapan meter persegi tiap penghuni rumah; seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat; minimal satuorang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap; seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin; seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini; bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi kecuali sedang hamil. Untuk kondisi keluarga pra sejahtera dan kelaurga sejahtera di Kota Tanjungbalai sampai pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.31.
Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera di Kota Tanjungbalai, 2018
Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2019

Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah dengan jumlah keluarga pra keluarga sejahtera terbanyak di Kota Tanjungbalai, sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi daerah dengan jumlah keluarga pra keluarga sejahtera terkecil dengan jumlah 247 keluarga. Di sisi lain, Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah dengan jumlah keluarga sejahtera terbanyak di Kota Tanjungbalai.

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.60.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	3,00	2,96	2,96	2,96	2,96
2	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	18	18	18	18	18
3	Jumlah kebijakan (peraturan daerah / peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendali penduduk (%)	59	59	59	59	59
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	74,28	34,28	34,28	34,28	34,28
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, informal yang melakukan pendidikan kependudukan	6	6	6	6	6
7	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	48,75	46,70	44,24	55,89	96,72
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	12	12	12	12	12
9	Rata - rata jumlah anak per keluarga	3,98	3,18	3,18	3,18	3,16
10	Ratio Akseptor KB	67,23	68,16	69,33	64,15	66,63
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	68,70	68,16	69,32	64,04	65,13
12	Rata - rata usia kawin pertama wanita	20	21	21	22	21
13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	2,30	2,29	1,91	3,06	1,20
14	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	4,32	4,14	4,02	3,98	3,86
15	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	16,91	16,84	15,67	20,00	18,56
16	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	75	75	75	75	84,24
17	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100
18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	32,82	32,07	33,12	33,12	97,53

19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	39	45	52	54	55
20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	85	85	85	90	87
21	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,4	22,54	23,28	24,41	24,78
22	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang berkerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	71,4	71,4	85,7	82,85	82,85
23	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	85,50	85,75	86,00	86,20	77,43
24	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85,50	85,75	86,00	86,20	77,43
25	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	85,50	85,75	86,00	86,20	77,43
26	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	91,07	91,10	91,20	91,25	91,30
27	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	55,27	51,62	61,26	57	53,50
28	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100
29	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	74	76	72	70	80

2.3.2.9. Urusan Wajib Perhubungan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan prasarana dan fasiltas perhubungan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2020.

Tabel 2.61.
Prasarana dan Sarana Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Moda Angkutan Barang :	
	- Truk barang umum	143 unit
	- Mobil box	32 unit
	- Mobil tangki	38 unit
2.	Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan :	
	- Ferry	6 unit
	- Kapal komersil	1 unit
3.	Moda Angkutan Umum :	
	- Bus	172 unit
	- Angkutan Kota	110 unit
	- Becak	700 unit
4.	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum (swasta)	14 perusahaan

No.	Uraian	Jumlah
5.	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	0 unit
6.	Jumlah Terminal :	
	- Terminal Tipe B	1 unit
	- Terminal Tipe C	5 unit
	- Jumlah penumpang masuk melalui terminal tipe B	7.619 orang
	- Jumlah penumpang keluar melalui terminal tipe B	7.619 orang
7.	Jumlah stasiun kereta api	1 unit
8.	Jumlah barang menggunakan angkutan kereta api	5 ton
9.	Jumlah penumpang kereta api	83.520 orang
10.	Jumlah kapal penumpang regional	5 unit
11.	Jumlah pelabuhan penumpang	1 unit
12.	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (milik swasta)	2 perusahaan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2021

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perhubungan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.62.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perhubungan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi (%)	50	50	50	50	N/A
2	Revitalisasi Terminal Penumpang dan Fasilitas Pendukung (%)	50	50	0	0	0
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	590.702
4	Rasio ijin trayek	1:1600	1:1600	1:1600	1:1600	1:1600
5	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	363	0	0	0	0
6	Pemasangan Rambu rambu (%)	80	60	66	66	66
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					
	- penumpang (orang)	523.467	550.467	578.467	608.913	590.702
	- barang (ton)	69.761	73.249	76.911	80.757	106.879
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun					
	- kereta api	2014.199	214.409	225.129	236.368	649.772
	- pelabuhan	194.744	204.481	214.705	225.440	106.879
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (v/c)	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, 2021

1. Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi (%) selama lima tahun terakhir hanya mencapai 50 persen. Fasilitas keselamatan lalu lintas diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, aman, lancar dan terkendali. Fasilitas perlengkapan jalan yang dimaksud adalah: rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light dan warning light*, penerangan jalan umum dan area *traffic control system*.
2. Revitalisasi Terminal Penumpang dan Fasilitas Pendukung diperlukan untuk penyegaran dan peningkatan fasilitas terminal. Kondisi yang lebih baik akan membuat terminal menjadi nyaman untuk digunakan bagi penumpang yang akan berpergian. Selama dua tahun terakhir tidak ada kegiatan revitalisasi terminal karena anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terbatas.
3. Pada tahun 2020 jumlah arus penumpang angkutan umum mencapai 590.702 orang. Moda angkutan umum yang beroperasi yaitu mulai Bus AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi), Minibus, angkutan perkotaan (angkot) dan becak dengan jumlah moda angkutan umum sekitar 982 unit.
4. Dalam rangka melegalilasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan adanya ijin trayek. Pada tahun 2020 rasio izin trayek adalah 1:1600, artinya 1 angkutan umum untuk 1.600 orang. Rendahnya jumlah angkutan umum karena luas wilayah Kota Tanjungbalai relatif kecil dan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat) tinggi.
5. Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selama tiga tahun terakhir tidak ada pelaksanaan Uji KIR oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai karena tidak memadainya peralatan untuk melaksanakan pengujian dimaksud.
6. Indikator pemasangan rambu-rambu pada tahun 2016 sebanyak 80 persen menurun menjadi 66 persen pada tahun 2020. Pemasangan rambu-rambu tersebut merupakan prioritas keselamatan berkendara sehingga meminimalisir kecelakaan di jalan raya.
7. Jumlah barang yang terangkut oleh angkutan umum pada tahun 2016 sebanyak 69.761 ton, meningkat menjadi 106.879 ton pada tahun 2020, sedangkan jumlah penumpang yang diangkut pada tahun 2016 sebesar 523.467 orang meningkat menjadi 590.720 orang.
8. Kereta api dipilih karena kemampuannya mengangkut muatan dalam jumlah besar melalui jarak yang jauh, mengangkut penumpang dalam jumlah besar untuk jarak sedang. Kereta api bukan hanya alternatif pilihan transportasi rakyat yang murah, tetapi juga bebas dari kemacetan jalan. Jumlah penumpang kereta api 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, sedangkan jumlah penumpang Pelabuhan Teluk Nibung pada Tahun 2020 sebanyak 106.879 orang.
9. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan. Pada tahun 2020 indikator ini sebesar 0,45, artinya 1 km jalan melayani 0,45 kendaraan.

2.3.2.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.63.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (%)	N/A	30	40	60	85
2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	N/A	N/A	N/A	20.34	N/A
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP (%)	62,88	77,28	82,20	88,02	89,96
4	Proporsi RT dengan akses internet	31,70	31,15	39,87	46,29	52,01
5	Proporsi pengguna komputer	52,81	23,10	26,15	20,26	17,47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

1. Humas Pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Informasi ini meliputi laporan keuangan dari badan publik. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit). Untuk informasi yang tidak boleh dibuka kepada publik, antara lain meliputi informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan apabila dibuka dapat menghambat proses penegakaan hukum. Cakupan pengelolaan komunikasi dan informasi publik selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 30 persen meningkat menjadi 85 persen pada tahun 2020.
2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya adalah mempercepat penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi pemerintah. Tujuan pelayanan berbasis online adalah mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2019 capaian rasio sistem pelayanan berbasis online hanya mencapai 20,34 persen.
3. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2020 mencapai 89,96 persen.
4. Pertumbuhan penggunaan telepon selular ini diikuti pula oleh peningkatan RT terhadap akses internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 52,01 persen.
5. Jumlah pengguna komputer selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 52,81 persen pengguna menurun menjadi 17,47 persen pada tahun 2020. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pengguna komputer untuk laki-laki dan perempuan hampir sama, Pengguna komputer laki-laki sebanyak 17,78 persen dan perempuan sebanyak 17,16 persen.

2.3.2.11. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.64.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Koperasi Aktif	45,68	44,58	44,22	45,24	45,67
2	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607

Sumber: Dinas UKM&KMK Kota Tanjungbalai, 2021

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Indikator Persentase Koperasi Aktif menggambarkan kinerja koperasi dan waktu ke waktu. Selama lima tahun terakhir terlihat bahwa kualitas koperasi di Kota Tanjungbalai masih cukup rendah dibuktikan dengan keberadaan koperasi aktif lebih sedikit dari koperasi tidak aktif.
2. Usaha mikro dan kecil mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tanjungbalai.. Pada tahun 2020 terdapat 5.607 unit Jumlah Usaha mikro dan kecil.

2.3.2.12. Urusan Wajib Penanaman Modal

1. Kemudahan Perizinan

Tabel 2.65.
Lama Proses Perijinan Di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persayaratan (dokumen)	Biaya resmi (Rp.)
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	1-3 hari	5-7	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1-3 hari	4-6	-
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	1-3 hari	6	-
4	Tandan Daftar Industri (TDI)	1-3 hari	6	-
5	Ijin Mendirikan Bangunan	15 hari	4	Rp.37,5/m–Rp.24.300/m
6	Ijin Gangguan (HO)	7-15 hari	7	Rp.15.000-Rp.250.000

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tanjungbalai

Daya saing suatu daerah tidak terjadi secara serta merta. Ia berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudahan perijinan yang diberikan oleh suatu pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan meliputi kemudahan kepengurusan, rata-rata waktu yang dibutuhkan dan rata-rata biaya yang dikeluarkan.

2. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi

Perda yang mendukung iklim usaha biasanya dibatasi yakni perda yang terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa serta perda yang tekait dengan ketenagakerjaan. Sampai tahun 2019 belum ada perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung iklim investasi.

2.3.2.13 Urusan Wajib Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai setiap tahunnya selalu menerbitkan buku Tanjungbalai Dalam Angka. Dalam buku tersebut dimuat data-data mengenai Kota Tanjungbalai yang berhubungan dengan keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi, keuangan, pengeluaran penduduk, pendapatan regional dan kemiskinan. Untuk buku PDRB Kota Tanjungbalai, selama Tahun 2015-2019 selalu diterbitkan oleh BPS Kota Tanjungbalai. Data-data yang diterbitkan oleh BPS menjadi rujukan bagi penyusun kebijakan di masa yang akan datang.

2.3.2.14 Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.66.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Perpustakaan	185	186	188	188	188
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	68.743	42.322	46.018	44.450	13.731
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	42.460	43.936	44.756	45.223	48.808
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	12.020	12.497	13.606	13.724	14.101
5	Persentase perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku (%)		70	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai, 2021

1. Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa jadi tujuan perpustakaan adalah untuk membantu

masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar masyarakat dapat mendidik dirinya sendiri, tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif. Jumlah perpustakaan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 terdapat 188 buah meliputi perpustakaan daerah, sekolah kecuali tingkat SMU dan instansi pemerintah.

2. Salah satu parameter menunjukkan berhasilnya layanan perpustakaan adalah dengan melihat intensitas kunjungan dan frekuensi peminjaman koleksi perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 68.743 pengunjung menurun menjadi 13.731 pengunjung pada tahun 2020, artinya menurun sebesar 80 persen.
3. Bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap. Tiap-tiap perpustakaan pasti berbeda-beda dalam hal koleksi ini karena disesuaikan dengan fungsi dan tujuan masing-masing namun satu hal yang sama yaitu hendaknya semua perpustakaan lengkap koleksinya. Pada tahun 2016 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah sebanyak 42.460 buku, meningkat menjadi 48.808 buku pada tahun 2020, artinya terjadi peningkatan jumlah koleksi buku sebesar 14,95 persen.
4. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 terdapat 12.020 judul buku meningkat menjadi 14.101 judul buku pada tahun 2020. Penambahan koleksi judul buku diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.
5. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menandakan bahwa seluruh OPD telah berhasil menyelamatkan arsip masing-masing karena telah menata arsip sesuai standar kearsipan.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pariwisata dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.67.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pariwisata

No	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Kunjungan wisata	71.233	37.526	28.959	28,817	8.221

Sumber: Dispora & Budpar Kota Tanjungbalai, 2021

Jumlah kunjungan wisata ke Kota selama lima tahun terakhir mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai 71.233 orang menurun menjadi 8.221 orang pada tahun 2020. Penurunan wisatawan ini disebabkan Pandemi Covid-19 berdampak pada tindakan *physical* dan *social* distancing. Tempat wisata yang dapat dikunjungi antara lain: lapangan Sultan Abdul Jalil, Jembatan Tabayang, Pulau Besusen, Vihara Tri Ratna dan Kelenteng Dewi Samudera. Untuk mendukung peningkatan kunjungban wisata diperlukan

ketersediaan infrastruktur pendukung, keberadaan obyek wisata dan atraksi wisata yang didukung dengan sistem promosi dan pemasaran yang baik.

2.3.3.2. Urusan Pilihan Pertanian

Kota Tanjungbalai sebagai daerah perkotaan bukan merupakan daerah yang potensi pertanian. Namun sektor pertanian masih berperan penting dalam perekonomian Kota Tanjungbalai karena sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian setelah sektor jasa.

1. Tanaman Pangan dan Palawija

Kota Tanjungbalai sebagai daerah perkotaan bukan merupakan daerah yang potensi pertanian. Tanaman pangan yang di tanam yaitu padi sawah dengan irigasi setengah teknis. Lahan sawah yang ada di Kota Tanjungbalai terdapat pada Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, dan Sei Tualang Raso.
Produksi padi sawah pada Tahun 2019 mencapai 62 Ton dengan luas panen 10 Ha. Panen padi di Kota Tanjungbalai terjadi pada bulan Februari sampai Mei dan Agustus sampai Oktober.

Tabel 2.68.
Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 (Kw/Ha)

Jenis Tanaman	2015	2016	2017	2018	2019
Padi sawah	47,03	44,33	44,14	60	62
Ubi kayu	269,87	210,79	213	175	10
Jagung	60	51,34	27,93	73	10
Ubi jalar				57	
Kacang panjang	72,92	139,86	140,25	410	29,21
Terong	90,71	106,56	291,61	392,94	25,33
Bayam	62	113,1	658,13	785,38	68,89
Cabai	165,83	26,12	219,17	219,77	22,76
Sawi	165,83	232,39	903,33	903,33	52,00
Kangkung	54,29	44,67	512,73	512,73	60,53
Ketimun	**112,94**	**194,87**	**352,26**	**352,26**	**30,79**

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai dan BPS

Untuk sub kategori tanaman sayur-sayuran, berdasarkan Badan Pusat Statistik, persentase distribusi produksi tanaman sayur-sayuran yang paling dominan di Kota Tanjungbalai tahun 2019 adalah komoditi kacang panjang sebesar 125,6 ton, terong 108,9 ton, ketimun sebesar 104,7 ton, cabai 93,3 ton, kangkung 90,8 ton, sawi 88,4 ton dan bayam 62 ton.

Untuk sub kategori tanaman buah-buahan di Kota Tanjungbalai tahun 2019 mencakup komoditi mangga, pisang, pepaya, sawo, jambu biji, jambu air, nenas, dan nangka. Pada tahun 2019, produksi tanaman buah-buahan di Kota Tanjungbalai masing-masing adalah mangga sebesar 1.665 ton, pisang sebesar 1.767 ton, nangka sebesar 487 ton, sawo sebesar 333 ton, jambu biji 391 ton, nenas 29 ton dan pepaya sebesar 222 ton serta jambu air sebesar 325 ton.

2. Peternakan

Tabel 2.69
Banyaknya Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak Kota Tanjungbalai, Tahun 2017-2019

No	Ternak/Unggas	2017	2018	2019
1.	**Ternak Besar**	**650**	**581**	**158**
	Sapi	645	574	156
	Kerbau	5	7	2
2.	**Ternak Kecil**	**4.228**	**3.569**	**3.342**
	Kambing	1.368	1.216	223
	Domba			111
	Babi	2.860	2.353	3.008
3.	**Unggas**	**54.626**	**57.951**	**287.709**
	Ayam Kampung			82.623
	Ayam Ras	53.639	47.539	189.000
	Itik	987	10.412	7.676
	Burung Puyuh			8.410

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai dan BPS

Populasi jenis ternak besar dan ternak kecil di Kota Tanjungbalai terus mengalami penurunan. Sementara populasi jenis unggas secara umum mengalami peningkatan.

Untuk melihat kerberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pertanian dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.70.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pertanian

No	Indikator	Capaian Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	70.0	76.0	80.0	85.0	85.0
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) % Tahun	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	Cakupan Bina Kelompok Petani	20	20	25	25	25
4	**Produksi Daging (ton)**	**86,944.00**	**18,173.00**	**18,060.00**	**78,910.00**	**88,810.00**
	Sapi	63,100	9,823.00	9,870.00	2,830.00	2,750.00
	Kerbau	750.00	420.00	475.00	240.00	210.00
	Kambing	13,460.00	3,885.00	3,500.00	430.00	360.00
	Domba	7,400.00	2,260.00	2,650.00	210.00	190.00

	Babi	2,234.00	1,785.00	1,565.00	75,200.00	85,300.00
5	**Produksi Telur (ton)**	**382,055,925.00**	**2,751,862.15**	**3,158,700.00**	**153,800.00**	**164,000.00**
	Ayam Kampung	381,120,100.00	2,751,300.00	2,675,000.00	153,800.00	164,000.00
	Itik Manila	935,825.000	562.150	483,700.00	-	-
6	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan**	**824.0**	**1,009.8**	**894.80**	**914.200**	**1,239.000**
	1. Padi (ton GKG)	768	928.8	841.80	843.20	781.20
	2. Jagung (ton pipilan kering)	56.0	81.0	53.00	71.00	457.80
	3. Kedele (ton)	1	1	2	1	-
7	**Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura**	**653.700**	**6,421.000**	**6,744.000**	**3,960.300**	**4,024.200**
	1. Bawang Merah (ton)	-	-	41.00	-	-
	2. Cabe (ton)	65.00	945.0	2,943.00	93.30	99.20
	3. Kentang (ton)	-	-	-	-	-
	4. Buah-buahan (ton)	588.7	5,476.000	3,760.000	3,867.000	3,925.000
8	**Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura**	**162.500**	**219.770**	**25.860**	**22.760**	**76.000**
	1. Bawang Merah (ton)	-	-	-	-	-
	2. Cabe (ton)	162.50	219.770	25.86	22.76	76.00
	3. Kentang (ton)	-	-	-	-	-
9	**Produksi**					
	1. K. Sawit (ton)	13,848	8,245.0	8,245.0	8,567.0	8,221.5
	2. Kelapa (ton)	1,502.6	1,703.1	1,703.1	1,801.0	585.0
	3. Komoditi Perkebunan Lainnya (ton)	2.9	9.9	12.3	15.0	12.0
10	**Produktivitas sektor perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao)**					
	1. K. Sawit (kg/Ha/Tahun)	1,384.800	824.500	824.500	856.700	822.150
	2. Kelapa (kg/Ha/Tahun)	150.260	170.310	170.310	180.100	58.500
	3. Komoditi Perkebunan Lainnya (kg/Ha/Tahun)	0.290	0.990	1.230	1.500	1.200
11	**Luas Areal**					
	1. K. Sawit (Ha)	486.0	697.5	697.5	721.0	645.0

	2. Kelapa (Ha)	407.0	648.5	648.5	689.0	520.0
	3. Komoditi Perkebunan Lainnya (Ha)	2.0	3.5	3.5	4.0	3.0

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2021

1. Keamanan pangan dalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan. Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mencapai 70 persen meningkat menjadi 85 persen pada tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 21,43 persen. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan pusat kepada daerah melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi.
2. Perkembangan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) selama lima tahun terakhir cenderung stagnan. Pada tahun 2016 hingga 2020 mencapai 3 persen. Pada umumnya tanaman perkebunan rakyat yang terdapat di Kota Tanjungbalai adalah perkebunan kelapa dan kelapa sawit.
3. Indikator ini untuk melihat cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan baik materi/bantuan, penyuluhan dan pendampingan. Pada tahun 2020 capaian indikator ini masih rendah yaitu sebesar 25 persen, artinya Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pertanian masih perlu untuk meningkatkan pelayanan kepada para petani.

2.3.3.3 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi ikan menurut asal tangkapan di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya ini seperti bantuan pembinaan oleh Pemerintah Kota Tanjugbalai, baik dalam bentuk pembinaan kelompok masyarakat pesisir, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat tangkap kepada nelayan.

Tabel 2.71.
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai, Tahun 2016-2020 (Ton)

No	Tahun	Laut	Perairan Umum	Budidaya	Produksi
1	2016	33.873	17,23	183,56	**34.073,79**
2	2017	34.644	16,97	107,20	**34.767,87**
3	2018	40.673	19,20	305,30	**40.997,50**
4	2019	39.734	17,80	307,90	**40.060,30**
5	**2020**	**32.617**	**18,30**	**220,00**	**32.855,30**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2021

Sampai pada tahun 2018 jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 877 unit, masing- masing perahu tanpa motor sebanyak 143 unit dan kapal motor sebanyak 633 unit serta perahu motor tempel sebanyak 101 unit. Selain penanganan aspek produktivitas perikanan, kebijakan lain yang juga menjadi prioritas adalah pengawasan sumberdaya laut terdiri dari penanganan dan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran, seperti kasus penangkapan ikan tanpa menggunakan izin

penangkapan, penangkapan ikan di luar areal penangkapan ikan dan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan aliran listrik (strum).

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.72.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	41,70	42,60	43,28	43,85	44,30
2	Produksi Perikanan (ton)	34.056,56	32.765,20	40.978,30	40.042,50	32.837,00
3	Jumlah bina kelompok nelayan	15	15	15	15	15
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	127,3	135	174	178	182
5	Nilai Tukar Nelayan	98	98	99	103	103

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai, 2021

1. Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Hal ini penting karena dapat membangkitkan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari segi kesehatan, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi masyarakat karena ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 41,70 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 44,30 kg/kapita/tahun. Data tersebut merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kota Tanjungbalai selama satu tahun yang dikonversi setara ikan utuh segar.
2. Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai 34.056 ton menjadi 32.837 ton atau menurun sebesar 3,6 persen.
3. Jumlah bina kelompok digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Selama lima tahun terakhir terdapat 15 kelompok yang perlu mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah.
4. Produksi perikanan kelompok nelayan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mencapai 127 ton meningkat menjadi 182 ton.
5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Pada tahun 2016 NTN Kota Tanjungbalai sebesar 98,00 tumbuh sebesar 5,10 persen menjadi 103 pada tahun 2020, artinya harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, dengan kata lain pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

2.3.3.4. Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian

1. Bidang Perdagangan

Kegiatan perdagangan ekspor impor di Kota Tanjungbalai terjadi melalui pelabuhan Teluk Nibung sebagai tempat perantaraan barang dari luar negeri terutama Malaysia. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2014-2019.

Tabel 2.73.
Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, Tahun 2014-2019

No	Tahun	Volume (Ton)		Nilai (US$ 000000)	
		Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1	2014	14.623,76	27.469,30	13,26	**11,76**
2	2015	15.950,58	20.135,20	11,44	7,68
3	2016	15.691,94	18.587,0	8,98	**7,45**
4	2017	14.426,96	10.936,8	8,39	**6,12**
5	2018	17.161,98		15,33	
6	**2019**	**21.997,15**		**16,22**	

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2020

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Sedangkan Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga (Kotler, 2001), contoh pasar modern adalah Minimarket, alfamart, alfamidi, indomart dan sebagainya.

Tabel 2.74.
Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Pasar Tradisional	Pasar Modern
Datuk Bandar		4
Datuk Bandar Timur		2
Tanjungbalai Selatan	5	8
Tanjungbalai Utara	3	1
Sei Tualang Raso		5
Teluk Nibung		3
Jumlah	**8**	**23**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

2. Bidang Perindustrian

Perindustrian di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu sektor ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat. Pada tahun 2017, sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 19,11 persen terhadap pembentuka PDRB Kota Tanjungbalai. Selama periode tahun 2013-2017 jumlah industri kecil dan jasa yang beroperasi di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian jumlah tenaga kerja yang terserap serta nilai produksi dan investasinya.

Tabel 2.75.
Perkembangan Industri Kecil dan Jasa Di Kota Tanjungbalai
Tahun 2015-2017 Dan 2019

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (000Rp)	Nilai Produksi (000Rp)
2015	288	1.296	18.418.875	26.920.000
2016	317	1.464	21.484.150	29.857.500
2017	391	1.899	35.003.200	80.090.340
2019	252	1.189	34.971.000	-

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2018, E-Database 2019

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perindustrian dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.76.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perdagangan dan Perindustrian

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah bina kelompok pedagang/usaha informal	1	1	1	1	1
2	Jumlah bina kelompok pengrajin	4	4	4	4	6

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai, 2021

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perencanaan Pembangunan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.77.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	70%	70%	75%	75%	80%

Sumber: Bappeda Kota Tanjungbalai, 2021

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran, Bappeda memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan dokumen perencanaan antara lain; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selama lima tahun terakhir Bappeda selalu menyediakan dan menyusun dokumen dimaksud. Salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan.

2.3.4.2. Keuangan

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perencanaan Pembangunan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.78.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Keuangan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	Disclaimer	WDP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD (persen)	5,76	5,17	5,26	0,37	1,03
3	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung (%)	54 : 46	54 : 46	62 : 38	58 : 42	41 : 59
4	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	0,42% 1,26%	0,82% 2,00%	2,56% 6,67%	2,55% 7,94%	1,55% 3,10%
5	Persentase Belanja Pendidikan	26,53	21,83	20,07	20,61	23,29
6	Persentase Belanja Kesehatan	15,77	17,25	35,75	37,57	21,63

7	Persentase Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6,92	6,31	5,15	8,10	5,85
8	Penetapan APBD	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: BPKAD Kota Tanjungbalai, 2021

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
   Selama lima tahun terakhir kecuali Tahun 2018, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Pada Tahun 2018 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai adalah Disclaimer artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
2. Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang biasa disingkat SiLPA. Selama tahun terakhir SILPA Kota Tanjungbalai mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan.
3. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah belanja langsung masih lebih lebih besar dari belanja tidak langsung. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase pada belanja langsung.
4. Persentase program yang tidak terlaksana pada tahun 2019 sebesar 2,55 persen menurun menjadi 1,55 persen pada tahun 2020, sama halnya dengan kegiatan yang tidak terlaksana juga mengalami penurunan dari 7,94 persen menjadi 3,10 persen.
5. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah berhasil mengalokasikan dana untuk belanja pendidikan sebesar 23,29 persen.
6. Kebijakan pemerintah untuk pengeluaran belanja kesehatan di daerah sebesar 10 persen dari dari APBD. Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 21,63 persen.
7. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH pajak dan DBH bukan pajak. Pada tahun 2020 DBH Kota Tanjungbalai menurun dari 8,10 persen pada tahun 2019 menjadi 5,85 persen.
8. Penetapan APBD Kota Tanjungbalai selama dua tahun terakhir sudah tepat waktu yaitu paling lambat akhir Desember.

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Perencanaan Pembangunan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.79.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rata-rata lama pegawai Mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 JP	118 JP	31 JP	31 JP	40 JP
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15,77%	15,98%	17,09%	18,18%	19,46%
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	27 org	33 org	31 org	28 org	26 org
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	136 org	128 org	128 org	129 org	121 org
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.305 org	1.291 org	1.221 org	1.172 org	1.141 org
6	Jumlah jabatan Pengawas pada instansi pemerintah	452 org	481 org	510 org	504 org	509 org

Sumber: BKD Kota Tanjungbalai, 2021

1. Pendidikan dan pelatihan adalah hal penting karena merupakan suatu usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi berkisar antara 30-40 JP;
2. Agar para ASN yang memiliki jabatan menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan dengan baik dan berhasil maka diberikan diklat struktural ASN. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih tergolong rendah mencapai 19,46 persen pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut pelaksanaan diklat struktural ASN masih sangat perlu ditingkatkan karena sebagian besar ASN belum pernah memperoleh diklat tersebut;
3. Jabatan pimpinan tinggi ASN merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, yang berfungsi untuk memimpin dan meotivasi pagawai ASN pada instansi pemerintah. Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah Kota Tanjungbalai sebanyak 26 jabatan. Hal penting dalam pengisian jabatan ini adalah harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan ASN dengan memperhaikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak jabatan serta persyaratan lain yang dibutuhkan;
4. Jabatan administrasi ASN adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jumlah ASN yang menduduki jabatan ini pada tahun 2020 mencapai 121 orang;
5. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keterampilan dan keahlian tertentu. Jumlah ASN yang menduduki jabatan ini pada tahun 2020 mencapai 1.141 orang;

6. Jabatan pengawas ASN merupakan jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana. Jumlah ASN yang menduduki jabatan ini pada tahun 2020 mencapai 509 orang.

2.3.4.4. Pengawasan

Untuk melihat keberhasilan Kota Tanjungbalai dalam pembangunan pada Urusan Pengawasan dapat diketahui dari capaian indikator berikut.

Tabel 2.80.
Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Pengawasan

No.	INDIKATOR	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	76,01	74,35	77,07	75,92	79,45
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	031	0,24		0,03	0,03
3	Jumlah temuan BPK	231	252	252	271	304

Sumber: Inspektorat Kota Tanjungbalai, 2021

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Persentase indikator ini mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada indikator ini yaitu menjadi 79,45 persen dari tahun 2019 sebesar 75,92 persen. Penurunan ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman ASN tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Seorang PNS yang tidak memenuhi aturan yang ditentukan maka akan terkena hukuman disiplin PNS. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang yang mendapat hukuman disiplin atau sebesar 0,03 persen.
3. Setiap tahun BPK akan melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Jumlah temuan BPK selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 indikator ini berjumlah 231 temuan meningkat menjadi 304 temuan pada tahun 2020.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multifilier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kota Tanjungbalai terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi Kota Tanjungbalai terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Bila dilihat dari segi pengeluaran masyarakat Kota Tanjungbalai maka dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2016 rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan mencapai Rp. 890.206 menjadi Rp. 1.030.183 pada Tahun 2020 atau meningkat sebesar 15,72 persen.

Tabel 2.81.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2016-2020

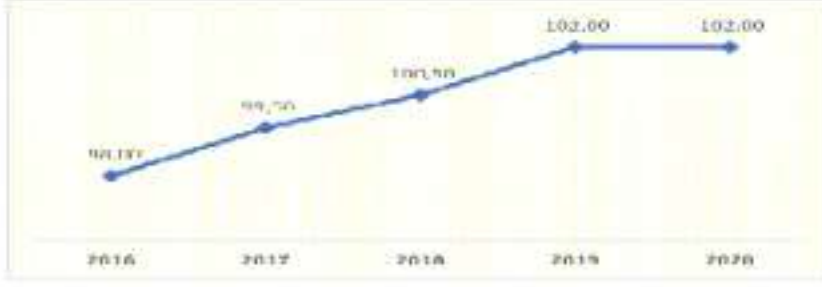
Pengeluaran	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Konsumsi	890.206		799.658		969.702		943.512		1.030.183	
- Makanan	510.607	57,36	505.875	62,88	567.788	58,55	571.837	60,61	614.446	59,64
- Non Makanan	379.599	42,64	293.793	37,12	401.914	41,45	371.675	39,39	415.737	40,36

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2021

Selama periode 2016-2020 konsumsi makanan memiliki proporsi yang lebih besar dari non makanan. Pada Tahun 2020 pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 614.446 (59,64 persen), sedangkan untuk non makanan sebesar Rp. 415.737 (40,36 persen). Terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat semakin dominan alokasi belanjanya untuk pangan.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Orientasi pembangunan saat ini yang berfokus pada industri dan modal cenderung mengesampingkan pembangunan pertanian pedesaan, sehingga indikator nilai tukar petani tidak masuk ke dalam tujuan pembangunan. Berikut ini gambar yang menunjukkan perkembangan nilai tukar petani pada tahun 2016-2020.

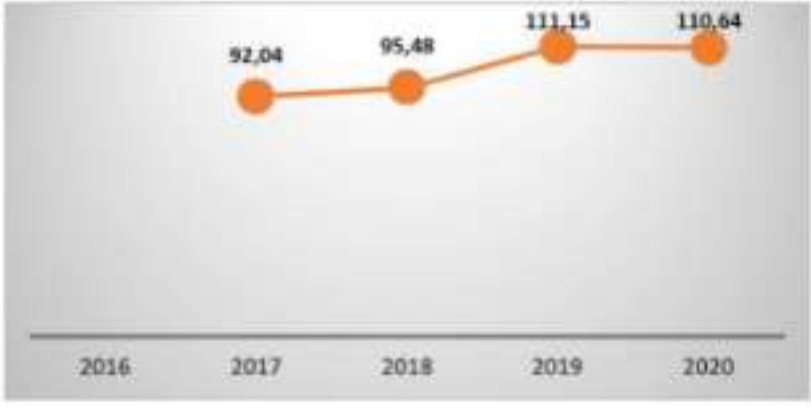


Gambar 2.32.
Nilai Tukar Petani Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2021

Pada tahun 2016 Nilai tukar petani Kota Tanjungbalai sebesar 98,00, artinya petani mengalami defisit karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Pada tahun 2020 Nilai tukar petani mengalami peningkatan menjadi 102, artinya petani mengalami surplus karena harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas adalah tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan modal. Pengukuran ini didapat dari membagi PDRB dengan pendekatan nilai tambah (biasanya dibagi per sektor), dengan jumlah pekerja atau jam kerja total di sektor tersebut. Perkembangan produktivitas total Kota Tanjungbalai dapat diketahui melalui gambar berikut.



Gambar 2.33.
Produktivitas Total Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2021

Berdasarkan gambar diketahui bahwa tingkat produktivitas Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhan indikator tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 produktivitas Kota Tanjungbalai sebesar 110,6 artinya setiap 1 juta angkatan kerja menghasilkan output senilai1 110 juta.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

Panjang seluruh jalan yang ada di Kota Tanjungbalai adalah 350,826 meter, dilihat dari jenis permukaan jalan maka jalan hotmix yang terpanjang adalah jalan kota sepanjang 140.296 meter. Jumlah jalan yang masih membutuhkan pembangunan karena masih tanah adalah sepanjang 6.835 meter. Bila dilihat dari Kondisi jalan, maka terdapat 151.609 meter dalam kondisi yang baik, sedangkan yang rusak dan rusak berat di Kota Tanjungbalai adalah sepanjang 110.309 meter.

Tabel 2.82.
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan, 2020

No	Keadaan	Jalan Negara (km)	Jalan Kota (km)	Jalan Provinsi (km)
1	**Menurut Jenis Permukaan**			
	- Diaspal	12.360	174.344	8.710
	- Beton	-	90.731	-
	- Batu	-	7.950	-
	- Kerikil	-	63.405	-
	- Tanah	-	4.293	-
2	**Menurut Kondisi**			
	- Baik	-	278.527	-
	- Sedang	12.360	15,15	8.710
	- Rusak	-	27.638	-
	- Rusak Berat	-	17.150	-

Sumber : Laporan Keterialan E-Databasae, 2020

2.4.3. Fokus iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Tanjungbalai tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kota Tanjungbalai.

Sampai dengan 2020, jumlah kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai sebanyak 570 kasus. Jika dilihat lebih detail pada jenis kejahatan/pelanggaran yang terjadi, penggelapan menjadi jenis kejahatan/pelanggaran yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Jenis kejahatan/pelanggaran yang perlu diwaspadai adalah narkotika karena kejahatan dalam jumlah terbesar. Jenis kejahatan/pelanggaran yang belum pernah terjadi atau tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwenang adalah kejahatan jenis penadahan.

Tabel 2.83.
Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya
di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembakaran	10	-	-	1	-
2	Kebakaran	6	3	6	4	3
3	Pemalsuan Meterai, Merek dan Surat	0	-	1	1	5
4	Melanggar Kesopanan	0	-	-	-	-
5	Perkosaan	0	-	-	-	2
6	Perjudian	9	11	6	3	14
7	Penganiayaan Berat	0	59	-	-	-
8	Penganiayaan Ringan	84	-	1	-	92
9	Pencurian Biasa	0	109	77	5	20

10	Pencurian dengan kekerasan	9	3	2	5	108
11	Pemerasan	0	4	1	-	3
12	Kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	14
13	Kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	3
14	Penggelapan	39	31	30	-	14
15	Penipuan	-	8	14	16	9
16	Merusak Barang Orang Lain	-	6	3	6	6
17	Penadahan	-	-	-	-	-
18	Pembunuhan	-	-	-	-	1
19	Pencabulan	-	-	-	-	8
20	Pencurian Kendaraan Bermotor	-	56	29	38	44
21	Penculikan	-	-	-	-	-
22	Penghinaan	-	4	2	-	13
23	Menyebarkan konten asusila	-	-	-	-	1
24	Penyelundupan	-	4	2	-	-
25	Narkotika	-	280	-	-	148
26	Pengeroyokan	-	-	31	33	46
	Jumlah				**136**	**570**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2021

b. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tertentu atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan politik atau kepentingan kelompok. Jumlah deminstrasi dihitung berdasarkan jumlah aksi demo selama satu tahun.

Aksi demo yang terjadi di Tanjungbalai berfluktuasi setiap tahun. Aksi demo yang terjadi biasanya berkisar pada masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diantaranya tentang politik dan masalah ekonomi.

Tabel 2.84.
Jumlah Demonstrasi di Kota Tanjungbalai, 2016-2020

No	Uraian Jenis Demo	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	73	88	118	58	38
2	Ekonomi	-	-	-	-	3
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
	Jumlah Demonstrasi	**73**	**88**	**118**	**58**	**41**

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai, 2021

c. Kemudahan Perijinan

Daya saing suatu daerah tidak terjadi secara serta merta. Ia berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudahan perijinan yang diberikan oleh suatu pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan meliputi kemudahan rata-rata waktu yang dibutuhkan dan rata-rata biaya yang dikeluarkan.

Tabel 2.85.
Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persayaratan (dokumen)	Biaya resmi (Rp.)
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 - 3 hari	5-7	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 - 3 hari	4-6	-
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	1 - 3 hari	6	-
4	Tandan Daftar Industri (TDI)	1 - 3 hari	6	-
5	Ijin Mendirikan Bangunan	15 hari	4	Rp.37,5/m – Rp.24.300/m
6	Ijin Gangguan (HO)	7-15 hari	7	Rp.15.000 – Rp.250.000

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tanjungbalai

d. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retrubusi Daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Tabel 2.86.
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi di Kota Tanjungbalai, 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pajak daerah yang dikeluarkan	11	11	11	11
2	Jumlah retribusi daerah yang dikeluarkan	32	28	12	25

Sumber: DPPKA Kota Tanjungbalai

e. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi

Perda yang mendukung iklim usaha biasanya dibatasi yakni perda yang terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa serta perda yang tekait dengan ketenagakerjaan. Sampai tahun 2020 belum perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung iklim investasi.

2.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan mengembangkan

serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja didalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2.87.
Rasio Lulusan S1/S2/S3, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lulusan S1/S2/S3	N/A	7.800	8.546	6.666	8.351
Jumlah Penduduk	168.052	169.606	174.090	176.935	178.387
Rasio Lulusan S1/S2/S3	N/A	459,89	490,90	376,75	468,14

Sumber: Disdukcatpil dan BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2021

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah lulusan sarjana di Kota Tanjungbalai masih relatif rendah. Pada tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 468,14.

2. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Gambar 2.34.
RasioKetergantungan Penduduk di Kota Tanjungbalai, 2016-2020
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai angka 58,32 kemudian menjadi 58,09 pada tahun 2020 atau turun sebesar 1,24 persen. Rasio ketergantungan adalah sebesar 58,09 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 59 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.5 Capaian Kinerja RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020

Tabel 2.88.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai

NO.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1	Pertumbuhan PDRB	5.67	5.76	5.76	5.51	5.85	5.77	5.90	5.81	5.95	-0,47	Belum Tercapai
1.2	PDRB per kapita	39,992	39,74	44,22	43,40	48,99	47,20	54,34	51,07	60,30	52,15	Belum Tercapai
1.3	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	12,99	14,49	12,52	14,46	11,74	14,44	11,16	14,04	10,68	13,53	Belum Tercapai
1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,35	67,09	68	67,81	68,65	68	69,3	68,51	69,95	68,65	Belum Tercapai
1.5	Angka melek huruf	98,80	98,85	98,85	98,4	99,87	99,55	99,9	99,59	99,95	99,74	Belum Tercapai
1.6	Angka rata-rata lama sekolah	8,68	9,13	10,23	9,14	10,8	9,24	11,37	9,26	12	9,44	Belum Tercapai
1.7	Angka usia harapan hidup	62,55	62,09	63,58	62,29	64,6	62,5	64,63	63,02	64,65	63,27	Belum Tercapai
1.8	Persentase balita gizi buruk	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.9	Prevalensi balita kurang gizi	0.10	0.15	0.1	0.14	0.1	0.23	0.1	0.29	0.1		Belum Tercapai
1.10	Tingkat pengangguran terbuka	8.07		8.06	8.5	8.1	8.08	7.64	6.82	7.22	6,96	Tercapai
1.11	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	8.43		42.50%		41.75%		41.50%		40%		
1.12	Indeks Kepuasan Masyarakat		73,44	63	82.89	65	82.53	70	76.96	75	76.25	Tercapai
1.13	Presentase PAD terhadap pendapatan	13.09		13.04		23.07		25.92		26.6		
1.14	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	DISCLAIMER	WTP	WDP	WTP	WDP	Belum Tercapai
1.15	Penanganan daerah rawan pangan	28		21		15		10		5		
1.16	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	16.84	17.22	16.89	17.31	16.56	17.13	16.44	16.44	16.33	16.5	Tercapai
1.17	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	16.84	17.22	16.89	17.31	16.56	17.13	16.44	16.44	16.33	16.5	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.18	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1.88	2.09	1.82	1.91	1.76	1.87	1.7	1.86	1.64	1.76	Tercapai
1.19	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	16.84	17.22	16.68	17.31	16.56	17.13	16.44	16.84	16.33	16.5	Tercapai
1.20	Kontribusi sektor Pertanggangan terhadap PDRB	22.51	21.46	22.52	21.12	22.51	21.06	23.15	22.51	23.40	22.43	Tercapai
1.21	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	18.59	18.45	18.45	19.09	18.49	19.19	18.53	18.79	18.59	19.12	Tercapai
1.22	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	6.26		6.215		6.24		6.29d		6.265		
1.23	Pertumbuhan Industri	1.176,00		1219		1262		1308		1353		
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**											
2.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.96	30.8	8.48	30.93	9	30.29	9.52	30.6	10	62.04	Tercapai
2.2	Angka partisipasi kasar	94.21	114.02	96.41	109.85	98.59	103.38	97.59	99.84	98	101.12	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.3	Angka pendidikan yang ditamatkan		4.48		5.46		5.53		5.2		5.11	
2.4	Angka Partisipasi Murni	87.3	71.67	88.06	70.33	90.67	90.32	91.65	80.47	92.91	75.65	Belum Tercapai
2.5	Angka partisipasi sekolah	87.3	71.67	88.06	75.33	90.67	90.32	91.65	80.47	92.91	75.65	Tercapai
2.6	Angka Putus Sekolah	5.63		5.42		5.23		5.05		4.55		
2.7	Angka Kelulusan	99.5	103.97	100	101.66	100	126.05	100	99.61	100	97.9	Tercapai
2.8	Angka Melanjutkan (AM)	91	83.49	92	100.36	93	77.49	94	95.5	95	84.62	Tercapai
2.9	Fasilitas Pendidikan	87.5	91.185	77	99.05	84.5	25.35	94.5	28.59	100		
2.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0.51	0.34	0.52	0.5	0.52	0.31	0.52	0.31	0.52	0.34	Tercapai
2.11	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	6.25%	6.00%	6.25%	6.25%	6.25%	5.00%	6.25%	6.66%	6.11%		
2.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	2.54%	2.54%	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	3.57%	2.54%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	2.88%	2.88%	2.94%	1.71%	2.94%	2.94%	2.94%	2.94%	3.13%	3.13%	Tercapai
2.14	Guru yang memenuhi kualifikasi D1 / DIV	85.00%	85.00%	90.00%	90.00%	93.5	87.77	97	87.01	100	95.69	Tercapai
2.15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	33	29	28	26	23	3	18	22	13	23	Belum Tercapai
2.16	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	48	46	43	28	38	35	33	2	28	5	Tercapai
2.17	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	4	5	5	5	2	5	2	7	1	6	Belum Tercapai
2.18	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.19	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.20	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93,50%	93,68%	99%	83,87%	95%	90,32%	100%	74,20%	100%	100%	Tercapai
2.21	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	75	319	80	307	85	402	90	449	95		
2.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	90,51%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.24	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,81%	100%	100%	Tercapai
2.25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dan kota populasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.27	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70%	79%	75%	83%	80%	87%	85%	85%	90%	77%	Belum Tercapai
2.28	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1.873	2.001	2101.000	2.001	2047.000	1.810	1650	1.080	1134	1.080	Belum Tercapai
2.29	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM /jam)	70%	78.78%	75%	82.81%	80%	84.76%	85%	74.20%	90%	89.35%	Tercapai
2.30	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	31%	27%	30%	25%	29%	24%	28%	23%	27%	22%	Belum Tercapai
2.31	Persentase sambungan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	22%	15%	21%	18%	20%	17%	19%	16%	18%	15%	Belum Tercapai
2.32	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	72%	70%	71%	69%	70%	68%	69%	67%	68%	65%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.33	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air/ air tidak tersumbat	65%	64.57%	70%	64.75%	75%	65%	80%	65.22%	85%	65.22%	Belum Tercapai
2.34	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	92%	100%	92%	Belum Tercapai
2.35	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	60%	41.54%	65%	41.54%	70%	65%	75%	65%	80%	65%	Belum Tercapai
2.36	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	1230.40	Tercapai
2.37	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kebidahan	100	77	100	77	100	74	100	74	100	66.25	Belum Tercapai
2.38	Cakupan penyanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	11.03	100	11.41	100	11.93	100	29.43	100	36.47	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.39	Tingkat waktu tanggap (response time rata-rata daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	98	100	95	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.40	Persentase Peregelan PERDA	100	77	100	77	100	74	100	72	100	66	Belum Tercapai
2.41	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90	99.12	90	85.33	90	102.64	90	102.64	90	29.09	Belum Tercapai
2.42	Persentase PMKS yang terlayani	100	99.91	100	85.80	100	102.87	100	102.87	100	28.10	Belum Tercapai
2.43	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90	94.92	90	84.06	90	102.09	90	102.09	90	28.35	Belum Tercapai
2.44	Persentase penyandang cacat sosial dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	90	4.30	90	3.00	90	3.15	90	3.15	90	5.70	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.45	Angka kepatuhan pengusaha-pekerja per tahun		82.47		116.50		119.27		48.39		58.74	
2.46	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	25.00	100	83.33	100	53.85	100	33.33	100	55.00	Belum Tercapai
2.47	Besaran jaminan kerja yang terdaftar yang diimplikasi	30	25.00	43	23.47	45	23.03	50	32.99	60	20.34	Belum Tercapai
2.48	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	70	73.03	77	72.45	80	77.55	85	70.75	90	81.46	Tercapai
2.49	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70	75.00	80	87.00	85	87.00	87	83.43	90	72.00	Belum Tercapai
2.00	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	83.33	80	87.00	83	87.00	87	83.43	90	72.00	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.51	Besaran lembaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75	66.67	80	87.00	85	67.00	87	83.43	90	76.19	Belum Tercapai
2.52	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8	8	8.5	8.5	9	9.47	9.5	9.56	10	9.82	Belum Tercapai
2.53	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	100%	16%	100%	16%	100%	16%	100%	12%	0	0	
2.54	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	3.2	2.5	3.2	3.12	3.5	3.15	4	3.17	3.62	3.05	Tercapai
2.55	Rasio KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.57	Partisipasi angkatan kerja perempuan	100%	85%	100%	78%	100%	78%	100%	85%	100%	85%	Belum Tercapai
2.58	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.59	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melaksanakan KIPIA dan PPT-PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.60	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.61	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.62	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.63	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100%	97%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	Belum Tercapai
2.64	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	100%	82%	100%	78%	100%	80%	100%	82%	100%	82%	Belum Tercapai
2.65	Rasio APM perempuan /laki-laki di SMA	100%	73%	100%	72%	100%	71%	100%	73%	100%	73%	Belum Tercapai
2.66	Rasio APM perempuan /laki-laki di Perguruan Tinggi	100%	14%	100%	10%	100%	8%	100%	10%	100%	10%	Belum Tercapai
2.67	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.68	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air								57.85		55.87	
2.69	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara								80.0		90.76	
2.70	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan								36.71		36.71	

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.71	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	4	5	4	4	4	4	5	2	5	0	
2.72	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	25	25	30	35	35	35	40	35	40	0	
2.73	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat.					3	2	3	1	3	0	
2.74	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup.	2	3	2	2	2	2	2	3	4	0	
2.75	Pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan, isi PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/Kota, sesuai yang ada dampaknya di Daerah kabupaten/kota					3	3	3	3	3	3	Tercapai
2.76	Timbulan sampah yang ditangani	51.25	54.74	55.7	55.1	60.51	59.82	70.1	56.17	74.7	60.37	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.77	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	5		10		15	0.88	20	0.99	25	0.83	Belum Tercapai
2.78	Persentase jumlah sampah yang tertangani	69	73.64	78	73.22	86	73.27	91	72.52	96	77.56	Belum Tercapai
2.79	Operasionalisasi TPA/TPST/3PS di kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai
2.80	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%	85.17%	100%	84.14%	100%	92.56%	100%	97.33%	100%	99.26%	Belum Tercapai
2.81	Rasio bayi berakta kelahiran	100%	94.80%	100%	92.38%	100%	95.74%	100%	97.82%	100%	99.03%	Belum Tercapai
2.82	Rasio pelanggan berakta nikah	100%	41%	100%	42.7%	100%	45.53%	100%	51.3%	100%	56.63%	Belum Tercapai
2.83	Keberadaan database kependudukan skala provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.84	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.85	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	85.17%	100%	84.14%	100%	92.56%	100%	97.33%	100%	99.26%	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.86	Cakupan pemerintah akta kelahiran	100%	94.80%	100%	92.38%	100%	95.74%	100%	97.82%	100%	99.59%	Belum Tercapai
2.87	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.88	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.89	Persentase LPM Berprestasi	100%	30%	100%	33%	100%	40%	100%	40%	100%	50%	Belum Tercapai
2.90	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.91	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.92	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan	100%	60%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	Belum Tercapai
2.93	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0.62	1.24	0.62	1.24	0.62	1.24	0.62	1.24	0.62	1.41	Belum Tercapai
2.94	Total Fertility Rate (TFR)	2.36	3	2.33	2.56	2.31	2.56	2.28	2.56	2.26	2.56	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.05	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	15	8	15	8	15	8	15	8	15	8	Belum Tercapai
2.06	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Kantor) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	24	18	24	18	24	18	24	18	24	18	Belum Tercapai
2.07	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.98	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100	94.28	100	94.28	100	94.28	100	94.28	100	94.28	Belum Tercapai
2.99	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Tercapai
2.100	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.58	3.58	2.55	3.18	2.55	3.18	2.87	3.18	2.85	3.18	Tercapai
2.101	Rate Assector KB	61.45	67.23	62.5	68.16	62.75	69.33	62.99	64.15	63	66.63	Belum Tercapai
2.102	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur (PUS)	75	68.7	75.1	68.16	75.35	69.33	75.3	64.04	75.35	65.13	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.105	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0.4	2.5	0.42	2.25	0.4	1.91	0.38	3.06	0.38	1.2	Belum Tercapai
2.106	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isinya dibawah 20 tahun	0.87	4.32	0.85	4.14	0.8	4.02	0.75	3.98	0.7	3.84	Tercapai
2.107	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	17.6	16.91	17.5	16.84	16.95	15.67	16.8	20	16.6	16.66	Tercapai
2.108	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21.42	21.4	22.54	22.5	23.27	23.3	24.21	24.2	24.2	24.21	Tercapai
2.107	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.	50.5	48.75	51	48.7	52	44.24	53	55.89	60	55.89	Belum Tercapai
2.109	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	95.5	95.5	95.75	95.75	96	96	96.2	96.2	96.5	77.43	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.109	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85.5	85.5	85.75	85.75	86	89	86.2	86.2	86.5	77.43	Belum Tercapai
2.110	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	85.5	85.5	85.75	85.75	86	86	86.2	86.2	86.5	77.43	Belum Tercapai
2.111	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	91.07	91.07	91.1	91.1	91.2	91.2	91.25	91.25	91.25	91.25	Tercapai
2.112	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	1500	885	1500	852	1500	809	1500	505	1500	955	Tercapai
2.113	Cakupan PKB/PLKB yang dilengkapkan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	31	22	31	22	31	20	31	16	31	16	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.114	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	91.07	75	91.1	75	91.2	75	91.2	75	91.2	84.24	Tercapai
2.115	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	70.083	100	70.096	100	70.13	100	70.16	100	70.16	Tercapai
2.116	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	32.619	32.619	32.069	32.069	33.119	33.119	33.69	33.69	57.53	57.53	Tercapai
2.117	Pemantauan Fasilkes dan ajalingkva (disetiap tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan	80	71.4	80	71.4	80	85.7	80	82.85	80	82.85	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	standarisasi pelayanan											
2.118	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	68.7	100	68.19	100	69.32	100	64.04	100	65.13	Tercapai
2.119	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pemberdayaan keluarga melalui fungsi keluarga	65	35	65	45	65	52	50	54	50	55	Tercapai
2.120	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85	85	85	85	85	85	90	90	87	87	Tercapai
2.121	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	20	20	21	20	21	20	21	20	21	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.122	Persentase Pembinaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui PPKBD	100	55,27	100	51,62	100	61,28	100	57	100	59,5	Tercapai
2.123	Jumlah arus penumpang angkutan umum	100.000	88.320	110.000	92.163	120.000	88.000	130.000	101.843	140.000	99.564	Tercapai
2.124	Rasio ijin trayek	0.0020	0.0010	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	Tercapai
2.125	Jumlah uji kir angkutan umum	400	363	400	-	400	-	400	-	400	-	
2.126	Persentase layanan angkutan darat	40%	20%	50%	33%	60%	30%	50%	40%	70%	30%	Belum Tercapai
2.127	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
2.128	Pemasangan Rambu-rambu	315	172.00	47	28	56	24	29	-	30	-	
2.129	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.6	0.50	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.45	0.6	0.45	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.130	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	600.000	523.467	650.000	550.467	700.000	576.467	750.000	606.515	750.000	484.718	Belum Tercapai
2.131	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	450.000	398.943	500.000	418.890	550.000	439.834	600.000	461.826	650.000	415.643	Belum Tercapai
2.132	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0%	0%	30%	30%	50%	40%	80%	80%	100%	80%	Tercapai
2.133	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	70%	62.88%	70%	77.28%	65%	84.28%	95%	88.02%	100%	92.10%	Tercapai
2.134	Proporsi rumah tangga dengan akses internet, dari wifi	50%	51.70%	60%	61.19%	60%	66.67%	80%	49.29%	100%	62.20%	Tercapai
2.135	Persentase kopersai aset	44.06	43.67	44.45	44.45	44.5	44.5	45.71	45.23	46.12	45.65	Tercapai
2.136	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	5620	56.30	5079	56.30	5720	56.55	5770	56.56	5820	56.56	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.137	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70	48	75	48	80	48	85	48	90	48	Tercapai
2.138	Persentase wirausaha muda	60	5	65	5	70	6	75	7	80	7	Belum Tercapai
2.139	Cakupan pemberdayaan olahraga	70	33	60	23	75	23	75	23	60	27	Belum Tercapai
2.140	Cakupan Perpustakaan yang terakreditasi	60	74	62	74	63	74	64	74	65	74	Tercapai
2.141	Cakupan pembinaan obat muda	70	68	70	72	75	76	75	76	80	76	Tercapai
2.142	Jumlah atlet berprestasi	75	16	80	14	85	29	90	36	95	0	
2.143	Jumlah prestasi olahraga	70	6	60	4	65	9	90	6	95	0	
2.144	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	2	5		6		7	40	8		
2.145	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	1	2		3		4	0	5	0	
2.146	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	200.202	66.743	200.400	42.322	200.600	46.018	200.800	44.450	200.900	13.731	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.147	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	41.218	42.460	42.091	43.556	42.548	44.709	43.529	45.225	44.915	46.808	Tercapai
2.148	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0	50.552		50.552		50.552		50.552		43.053	
2.150	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10.175	12.030	10.275	12.887	10.375	13.404	10.475	13.724	10.575	14.101	Tercapai
2.151	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	11	0	51	70	29	100	19	100	19	100	Tercapai
2.152	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	
2.153	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	893.01	924	450.86	1006.8	896.4	894.8	913.38	914.2	932.52	1.236	Tercapai
2.154	Cakupan desa kelompok petani	12	20	20	20	10	29	10	29	10	29	Tercapai
2.155	Ekspor Beras Pertanggungan	38.000.000		40.000.000	11.254.499		12.215.531	45.000.000	31.179.999	47.000.000		

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.156	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	Belum Tercapai
2.157	Perindustrian, meliputi Cakupan bina kelompok pengrajin			10	4	10	4	10	4	10	6	Belum Tercapai
2.158	Produksi perikanan	34000	34036.56	34777.5	34750.5	35479.0	40978.5	36194.5	40042.5	36925.4	32837	Belum Tercapai
2.159	Konsumsi ikan	42	42.5	43.96	43.26	44.74	43.83	45.63	44.3	46.54	03.75	Tercapai
2.160	Cakupan bina kelompok nelayan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Tercapai
2.161	Produksi perikanan kelompok nelayan	120	127.3	130	130	160	174	170	178	180	182	Tercapai
2.162	Nilai tukar nelayan	100	99	101	99	102	99	103	103	104	103	Belum Tercapai
2.163	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditelaahkan dengan PERDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.164	Tersedianya Dokuman Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai
2.165	Tersedianya Dokuman Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tercapai
2.166	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai
2.167	Peningkatan Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90%	83,51%	95%	92,15%	95%	95,15%	95%	95,20%	95%	97,20%	Tercapai
2.168	Peningkatan Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%	94,63%	95%	91,25%	95%	92,25%	95%	92,35%	95%	93,35%	Tercapai
2.169	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	90%	90,25%	95%	92,11%	95%	93,15%	95%	93,17%	95%	94,17%	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.170	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	Disclaimer	WTP	WDP	WTP		Belum Tercapai
2.171	Persentase SILPA	5.83	5.76	5.9	5.17	5.09	5.26	5.01	0.37	5.39	1.63	Tercapai
2.172	Persentase SILPA terhadap APBD	5.83	5.76	5.9	5.17	5.09	5.26	5.01	0.37	5.39	1.63	Tercapai
2.173	Persentase program yang tidak terlaksana		0.42		0.83		2.56		22.55		1.65	
2.174	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana		1.26		2.00		5.07		7.04		3.10	
2.175	Persentase belanja pendidikan (20%)	20	26.33	20	21.83	20	20.07	20	20.61	20	23.29	Tercapai
2.176	Persentase belanja kesehatan (10%)	10	15.77	10	17.25	10	30.75	10	37.57	10	21.63	Tercapai
2.177	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	54.46	54.46	55.45	54.46	58.42	62.56	41.55	58.42	60.40	41.55	Tercapai
2.178	Rasio hasil kebudayaan kota dan desa	4.74	4.74	5.48	4.04	5.09	5.19	5.30	4.40	7.82	2.93	Belum Tercapai
2.179	Penetapan APBD	tepat waktu	tidak tepat waktu	tepat waktu	tidak tepat waktu	tepat waktu	tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.180	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20	30	23	25	25	31	20	31	20	31	Tercapai
2.181	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8%	12.66%	16%	16.85%	20%	21.67%	22%	24.60%	24%	33.52%	Tercapai
2.182	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8.48%	9.31%	12.80%	11.36%	16.70%	13.31%	18.59%	13.64%	22.22%	22.18%	Tercapai
2.183	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	31	34	33	34	31	34	26	34	26	Belum Tercapai
2.184	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	136	136	130	126	130	126	130	125	130	120	Belum Tercapai
2.185	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	-	1628	1,574	1291	1,539	1231	1,539	1172	1,539	1139	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program										Interpretasi
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.186	Persentase tindak lanjut temuan	78%	78,01%	78%	74,35%	85%	77,07%	90%	73,92%	95%	79,45%	Belum Tercapai
2.187	Persentase penanggulan pegawai	0,35%	0,31%	0,30%	0,24%	0,25	0,00%	0,20%	0,03%	0,15%	0,03%	Tercapai
2.188	Jumlah temuan BPK	250	251	252	252	239	252	244	271	249	304	Belum Tercapai
2.189	Nilai evaluasi AKIP Kota Tanjungbalai	B	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	Tercapai
2.190	Nilai Evaluasi LPPD	10	24	8	15	6	7	4	15	3		Tercapai
2.191	Maturitas SPIP											
2.192	Hasil evaluasi pelayanan public	0	114, 47 %	50	71, 42 %	60	137, 55 %	70	108%	70	155, 56 %	Tercapai
3	**ASPEK DAYA SAING**											
3.1	Nilai tukar petani	100.800	99.000	101.200	99.000	101.600	100.000	102.00	102.00	102.00	102.00	Tercapai
3.2	Angka kriminalitas yang tertangani	400	402	405	405	265	265	220	136	266	266	Tercapai
3.3	Demonstrasi berakhir Rusuh	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Tercapai

2.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, disingkat SDGs atau *Global Goals*) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. TPB di Indonesia memiliki 319 indikator yang dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, antara lain:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

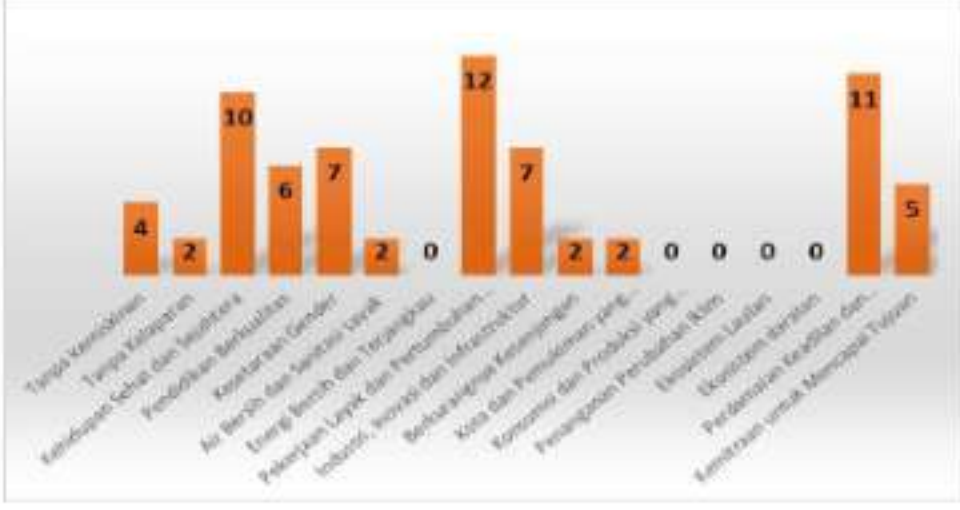
Pencapaian Kota Tanjungbalai terhadap pelaksanaan TPB/SDGs dapat dilihat melalui penilaian dan analisis terhadap indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB;
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB.

Dari 222 indikator TPB untuk Pemerintah Kota, berdasarkan analisa Pokja KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2020, yang disepakati dalam *Kick off Meeting* hari Rabu 20 Oktober 2020, bahwa Kota Tanjungbalai memiliki 210 indikator dengan 16 Tujuan TPB. Tujuan TPB 14 (*Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan*) tidak dibahas berhubung wilayah Kota Tanjungbalai tidak memiliki kawasan dan kewenangan di laut. Kemudian terdapat 12 Indikator yang dieliminasi, karena indikator tidak relevan atau bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Adapun uraian dari masing-masing pencapaian pada tiap pilar adalah sebagai berikut:

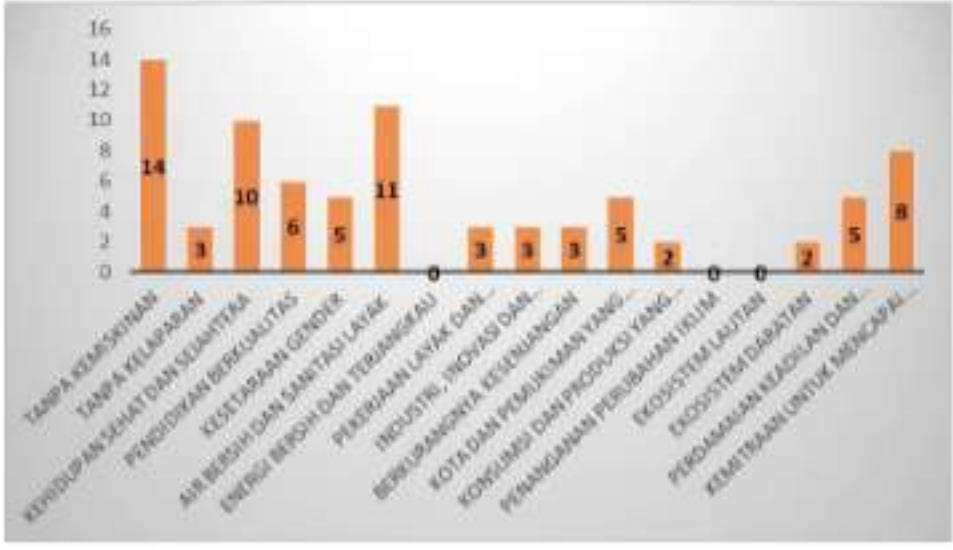
1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target/SS



Gambar 2.35.
TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target
Sumber: KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai, 2021-2026

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa dari 17 Tujuan TPB dan 222 indikator terdapat 12 tujuan dan 70 indikator yang terlaksana dan mencapai target. Pencapaian Indikator terbesar berasal dari Tujuan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak dengan capaian sebesar 12 indikator kemudian disusul pencapaian Tujuan Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dengan capaian sebesar 11 indikator.

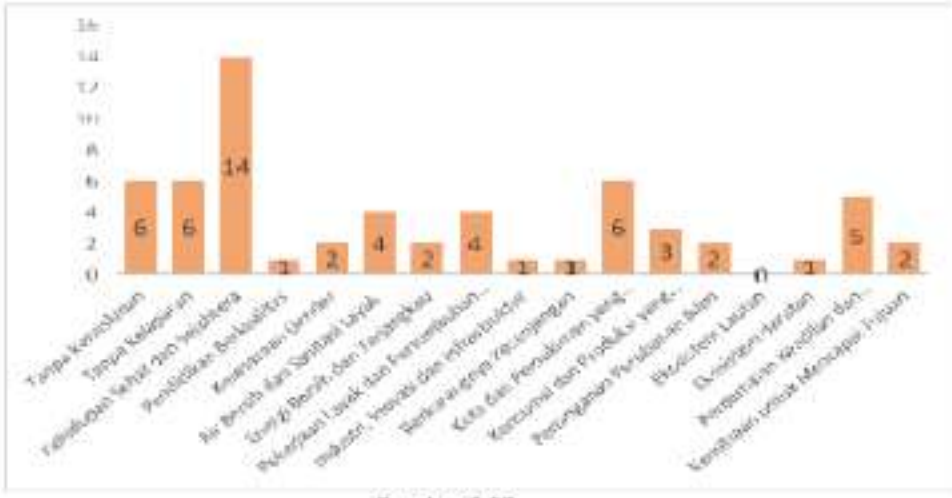
2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target/SB



Gambar 2.36.
TPB yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target
Sumber: KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai, 2021-2026

Berdasarkan analisis terhadap tujuan dan indikator TPB di Kota Tanjungbalai dapat diidentifikasi bahwa jumlah Tujuan TPB yang terlaksana tetapi belum mencapai target adalah sebanyak 14 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 80 indikator. Indikator terbesar yang dilaksanakan tetapi belum mencapai target berasal dari Tujuan Tanpa kemiskinan dengan 14 indikator.

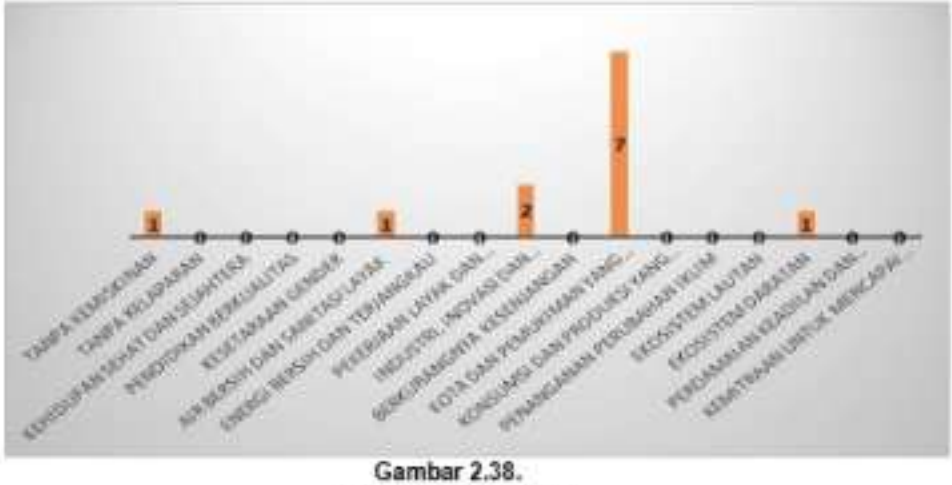
3. Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target/BB



Gambar 2.37.
TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target
Sumber: KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai, 2021-2026

Berdasarkan analisis terhadap tujuan dan indikator TPB di Kota Tanjungbalai dapat diidentifikasi bahwa jumlah Tujuan dan indikator TPB yang terimin tetapi belum mencapai target adalah sebanyak 14 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 80 indikator. Indikator terbesar yang dilaksanakan tetapi belum mencapai target berasal dari Tujuan Tanpa kemiskinan dengan 14 indikator.

4. Indikator TPB yang Dieliminasi



Gambar 2.38.
TPB yang Dieliminasi
Sumber: KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai, 2021-2026

Berdasarkan analisis terhadap tujuan dan indikator TPB di Kota Tanjungbalai dapat diidentifikasi bahwa jumlah Tujuan TPB yang tereliminasi adalah Tujuan TPB 14 (*Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara*

berkelanjutan) dikarenakan Kota Tanjungbalai tidak memiliki kawasan dan kewenangan di laut sehingga terdapat 12 Indikator di dalamnya yang dieliminasi.

Dilihat secara keseluruhan terhadap analisis Tujuan dan Indikator TPB maka dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2.89
Capaian TPB Kota Tanjungbalai

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Total	Capaian Indikator			
			SS	SB	TD	ELI
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Tujuan 1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	25	4	14	6	1
Tujuan 2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian	11	2	3	6	0
Tujuan 3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	34	10	10	14	0
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.	13	6	6	1	0
Tujuan 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	7	5	2	0
Tujuan 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	2	11	4	1
Tujuan 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	2	0
Tujuan 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	12	3	4	0
Tujuan 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	7	3	1	2
Tujuan 10	Mengurangi Kesenjangan Intradan Antar-negara	6	2	3	1	0
Tujuan 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	20	2	5	6	7
Tujuan 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	0	2	3	0
Tujuan 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	2	0
Tujuan 14	Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	0	0	0	0	0

Tujuan 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	0	2	1	1
Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	11	5	5	0
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	15	5	8	2	0
JUMLAH		**222**	**70**	**80**	**60**	**12**
				210		

Sumber : Analisis Pokja KLHS RPJMD Kota Tanjungbalai, 2020

5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai (DDDTLH) terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Mengkaji Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan DDDTLH

Capaian Indikator TPB Kota Tanjungbalai yang dapat dianalisis berdasarkan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) aspek utama, yaitu Aspek Kebencanaan, Aspek Pangan, Aspek Air Minum dan Aspek Lingkungan Hidup.

Hasil Analisis Indikator TPB setiap Aspek diatas dikaitkan dengan kondissi DDDTLH dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90.
Indikator TPB yang Memiliki Keterkaitan dengan DDDTLH

No	No TPB	Uraian TPB	Indikator TPB yang memiliki Keterkaitan dengan DDDTLH	
			Kode	Rincian
1	1	Tanpa Kemiskinan	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah
			1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
			13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

2	2	Tanpa Kelaparan	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan
			2.1.1'	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)
			2.1.2'	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan
3	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
			6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
			6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
			6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
4	11	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani
5	12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
			12.5.1 (a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang
			12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

Sumber: KLHS RPJMD 2021-2026 (diolah)

b. Analisis Data Tabular DDDTLH

Analisis dilakukan dengan memperhatikan persentase jasa ekosistem dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Berdasarkan persentase tersebut dilakukan pemberian bobot sesuai dengan area yang akan terdampak dengan ketentuan sebagai berikut :

1) 5 (Sangat Besar), Jika area yg akan terdampak > 80%
2) 4 (Besar), Jika area yg akan terdampak 60 - 80%
3) 3 (cukup), Jika area yg akan terdampak 40 - 60%
4) 2 (kecil), Jika area yg akan terdampak 20 - 40%
5) 1 (Sangat kecil), Jika area yg akan terdampak <20%

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.91
Analisis Data Tabular DDDTLH

No	Nama Jasa Ekosistem Penyediaan	Sangat Tinggi dan Tinggi (%)	Bobot Jasa Ekosistem
	JASA PENYEDIAAN		
1	Pangan (P1)	74	4 (besar)
2	Air Bersih (P2)	24	2 (kecil)
3	Serat (P3)	62	4 (besar)
4	Bahan Bakar (P4)	65	4 (besar)
5	SD Genetik (P5)	13	1 (sangat kecil)
	JASA PENGATURAN		
6	Iklim (R1)	71	4 (besar)
7	Tata Aliran Air dan Banjir (R2)	11	1 (sangat kecil)
8	Perlindungan Bencana (R3)	12	1 (sangat kecil)
9	Pemurnian Air (R4)	12	1 (sangat kecil)
10	Penguraian Limbah (R5)	15	1 (sangat kecil)
11	Kualitas Udara (R6)	58	3 (cukup)
12	Penyerbukan Alami (R7)	64	4 (besar)
13	Pengendaliaan Hama (R8)	6	1 (sangat kecil)
	JASA BUDAYA		
14	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1)	22	2 (kecil)
15	Rekreasi dan Ekotorisme (C2)	79	4 (besar)
16	Estetika (Alam) (C3)	32	2 (kecil)
	JASA PENDUKUNG		
17	Pembentukan Tanah (S1)	15	2 (kecil)
18	Siklus Hara (S2)	50	3 (cukup)
19	Produksi Primer (S3)	16	2 (kecil)
20	Biodiversitas (S4)	13	2 (kecil)

Sumber: KLHS RPJMD 2021-2026 (diolah)

2.7 Kerjasama Daerah

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, sebagaimana pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan "bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan".

Mengacu pada Undang-Undang tersebut di atas dan cakupan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai meliputi:

kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Perkembangan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai, 2016-2020

NO	Bidang/Program Kerja	Jangka Waktu Kerjasama Daerah		Obyek/Ruang Lingkup
		Mulai	Berakhir	
1	Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Kota Surabaya	28 September 2016	28 September 2017	Kerjasama bidang tekologi informasi dan komunikasi melalui penerapan e-Government
2	Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Kota Bandung	8 Maret 2017	8 Maret 2018	Kerjasama dalam bidang: - Pengembangan smart city dan e-government - Pengembangan ekonomi kreatif - Pengembangan kepariwisataan - Pengembangan industri, perdagangan dan investasi - Penataan ruang/wilayah dan infrastruktur perkotaan
3	Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Kota Medan	15 Mei 2017	15 Mei 2018	Kerjasama Teknologi Informasi
	Kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan LPP RRI Medan	2018	2018	terdesiminisasinya informasi melalui radio FM 99,7 MHz kepada masyarakat Tanjungbalai dan sekitarnya
4	Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan BPJS	2018	2018	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
5	Kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pusat kajian Selat Malaka Universitas Sumatera Utara	2018	2018	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
6	Kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Perum Bulog Sub.Divre Kisaran	2018	2018	Penyaluran Beras Miskin/Madani kepada masyarakat

7	Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan	2019	2019	a. Pemberian Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; b. Pemberian Pertimbangan Hukum terhadap permasalahan hokum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; c. Tindakan Hukum lain yang dipandang perlu terhadap permasalahan hokum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
8	Kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Lembaga Bantuan Hukum Trisila	2019	2019	Pemberian Bantuan Hukum Legitimasi dan Non Legitimasi
9	Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan BPJS	2019	2019	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
10	Kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Perum Bulog Sub Divre Kisaran	2019	2019	Penyaluran Beras Miskin/Madani kepada masyarakat
11	Kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	2019	2019	Pelaksanaan kegiatan Assesment Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbala
12	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara	2019	2019	Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah
13	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Islam Sumatera Utara	2019	2019	kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah islamiyah serta pengembangan di bidang lain
14	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Panca Budi	2019	2019	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat
15	Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan BPJS	2020	2020	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

16	Kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Lembaga Bantuan Hukum Trisila	2020	2020	Pemberian Bantuan Hukum Legitimasi dan Non Legitimasi

2.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 18, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk mencapai target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut.Dalam rangka memenuhi urusan wajib daerah terkait pelayanan dasar, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai menerapkan 6 (enam) bidang urusan antara lain:

Tabel 2.93.
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan dalam RPJMD yang mendukung Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kota Tanjungbalai

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
A	Pendidikan	Menata sistem manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring			
1	Pendidikan PAUD		Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	Persen	51,85
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)		Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / SD / MI , SMP / MTs	Persen	86,54
3	Pendidikan Kesetaraan		Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun	Persen	0,65

			yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		
B	Kesehatan	Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil		Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	Persen	82,76
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin		Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	69,00
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir		Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00
4	Pelayanan Kesehatan balita		Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	51,62
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar		Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Persen	9,60
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Persen	26,90
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut		Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Persen	67,90
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi		Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Persen	95,60
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus		Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Persen	41,69

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa		Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Persen	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB		Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	Persen	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV		Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana serta infrastruktur perkotaan			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari		Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	55,92
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		Persentase Warga Negara yang berhak memperolehlayanan pengolahan air limbah domestik	Persen	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;		Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang	Persen	

	relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.		
D	Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	66,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	65,97
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80,46
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	81,39
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	91,82
E	Sosial	Peningkatan kesejahteraan keluarga		Persen	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	40.82
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	33,33
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang	Persen	17.56

	panti		memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/ kota		Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi kapasitas dan kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Untuk itu, melalui analisis keuangan daerah yang tepat diharapkan akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya. Terkait hal tersebut, analisis keuangan daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam mengawal dan mengontrol pelaksanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati gambaran umum keuangan daerah melalui kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Pada bab ini akan menyajikan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi capaian kinerja pendapatan, realisasi belanja baik berupa belanja tidak langsung (BTL) maupun belanja langsung (BL) serta capaian pembiayaan Pemerintah Kota Tanjungbalai selama 5 (lima) tahun terakhir. Analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam kerangka penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah.

Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga gambaran pengelolaan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan dan belanja daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai untuk periode 5 tahun kedepan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Untuk aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP),

dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan untuk aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) serta aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut ini adalah kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016 – 2020 berdasarkan aspek pendapatan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	676,54	649,68	10.83	13,28	96,03
2017	634,09	593,03	-6.27	-8,72	93,52
2018	671,34	630,78	5.87	6,37	93,96
2019	739,20	647,69	10.11	2,68	87,62
2020	637,28	613,38	-13.79	-5,30	96,25
		Rata-Rata	**1,35**	**1,66**	**93,48**

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel 3.1 di atas memperlihatkan realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 649,68 miliar, menurun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.593,03 miliar. Kembali meningkat di tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masimg besaran yakni Rp630,78 miliar dan Rp.647,69 miliar dan kembali menurun menjadi sebesar Rp. 613,38 miliar pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,66 persen. Namun realisasi pendapatan ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Untuk kurun waktu 2016–2020, realisasi capaian kinerja pendapatan Kota Tanjungbalai secara rata-rata sebesar 93,48 persen dengan capaian kinerja tertinggi

pada tahun 2020 sebesar 96,25 persen dan terendah pada tahun 2019 yang hanya mencapai 87,62 persen dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam perspektif perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pendapatan Kota Tanjungbalai relatif sudah menerapkan target yang optimis.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	64,48	56,19	15.62	-1,58	87,14
2017	73,79	52,91	14.44	-5,84	71,70
2018	92,62	69,68	25.52	31,70	75,23
2019	106,50	63,73	14.99	-8,54	59,84
2020	89,85	69,22	-15.63	8,61	59,84
		Rata-Rata	**10,99**	**4,87**	**70.75**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungbalai tahun 2016 sebesar Rp. 56,19 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 52,91 miliar. Tetapi pada tahun 2018, realisasi PAD Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 69,68 miliar atau naik sebesar 31,70 persen dan tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 63,73 miliar atau menurun sebesar 8,54 persen dan meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 69,22 persen pada tahun 2020. Namun secara rata-rata selama kurun waktu 2016–2020, realisasi PAD Kota Tanjungbalai mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,87 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 70,75 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi PAD menunjukkan target PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni sekitar 10,99 persen dari realisasi PAD yang rata-rata tumbuh sebesar 4,87 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan PAD cenderung menggunakan target yang optimis.

Terkait dengan realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD), berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016-2020 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	10,66	10,50	24.24	1.16	98.50
2017	11,66	13,30	9.38	26.67	114.07
2018	13,46	16,01	15.44	20.38	118.95
2019	16,32	16,16	21.25	0.94	99.02
2020	14,99	14,46	-8.14	-10.53	96.47
		Rata-Rata	**12.43**	**7.72**	**105.4**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Untuk penerimaan pajak daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020, realisasi penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dari Rp. 10,50 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 14,46 miliar pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 7,72 persen. Target penerimaan pajak daerah yang direncanakan tumbuh lebih tinggi dari realisasinya dengan rata-rata sebesar 12,43 persen setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penetapan proyeksi target pertumbuhan penerimaan pajak daerah cenderung menggunakan target yang optimistis.

Sementara itu, dilihat dari realisasi capaian kinerja penerimaan pajak daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi rata-rata penerimaan pajak daerah Kota Tanjungbalai yang telah melebihi target yang direncanakan, yakni sebesar 105,4 persen. Untuk realisasi capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 118,95 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 96,47 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungbalai yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjungbalai adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2016–2020 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020
(Rp. Miliar)

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	25,60	25,51	12.28	15.64	99.65
2017	33,18	25,59	29.61	0.31	77.12
2018	27,90	20,17	-15.91	-21.18	72.29
2019	22,80	22,13	75.16	9.72	45.26
2020	14,99	14,46	-22.17	-23.63	44.43
		Rata-Rata	**15.79**	**-3.83**	**67.75**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Dari tabel di atas memperlihatkan realisasi retribusi daerah Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 25,51 miliar dan meningkat hingga Rp. 25,59 miliar pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018, realisasi retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 20,17 miliar atau turun sebesar 21,18 persen dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 22,13 miliar atau naik sebesar 9,72 persen dari tahun sebelumnya, lalu kembali mengalami penurunan signifikan menjadi Rp. 14,46 miliar. Rata-rata realisasi pertumbuhan retribusi per tahun Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 sebesar minus 3,83 persen.

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk retribusi daerah Kota Tanjungbalai cenderung menurun dari 99,65 persen pada tahun 2016 menjadi 77,12 persen tahun 2017. Namun pada tahun 2017–2020, realisasi capaian retribusi daerah Kota Tanjungbalai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 77,12 persen pada tahun 2017 menjadi 44,43 persen pada tahun 2020. Dengan demikian, secara rata-rata realisasi capaian kinerja untuk retribusi daerah Kota Tanjungbalai sebesar 67,75 persen dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungbalai yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Tanjungbalai adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target HPKD	Realisasi HPKD	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	5,40	6,44	0.00	4.55	119.26
2017	6,00	4,59	11.11	-28.73	76.50
2018	6,00	3,30	0.00	-28.10	55.00
2019	7,00	7,21	16.67	118.48	103.00
2020	3,50	4,93	-50.00	-31.64	140.75
		Rata-Rata	**-4,44**	**6.91**	**98.90**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Tanjungbalai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020. Untuk tahun 2016, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6,44 miliar dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 3,30 miliar. Namun pada tahun 2019, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Tanjungbalai kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 7,21 miliar atau naik sebesar 118,48 persen dan kembali menurun menjadi Rp. 4,93 miliar pada tahun 2020. Dengan demikian, secara rata-rata pertumbuhan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Tanjungbalai tumbuh sebesar 6,91 persen

dan realisasi ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata proyeksi target yang hanya sebesar minus 4,44 persen per tahun.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 98,90 persen selama kurun waktu 2016–2020. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 119,26 persen dan realisasi capaian kinerja ini telah melampui target yang direncanakan. Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2018, yakni sebesar 55,00 persen dari target yang telah ditetapkan.

Untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Tanjungbalai adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Lain-Lain PAD	Realisasi Lain-Lain PAD	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	22,82	13,75	20.17	-25.64	60.25
2017	22,30	21,64	-2.27	57.38	94.29
2018	24,95	38,25	11.88	76.76	65.22
2019	34,32	18,23	-24.19	-39.64	53.12
2020	33,32	32,93	-2.88	80.6	98.81
		Rata-Rata	**16.02**	**71.58**	**70,67**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Untuk realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota Tanjungbalai memperlihatkan perkembangan yang cukup fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 71,58 persen. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 13,75 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 21,64 miliar. Pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi Rp. 38,25 miliar atau naik sebesar 76,75 persen. Akan tetapi pada tahun 2019, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kota Tanjungbalai kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 18,23 miliar atau turun sebesar 52,33 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan menjadi Rp. 32,93 miliar atau meningkat sebesar 98,81 persen.

Sementara itu, dilihat dari realisasi capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dengan rata-rata capaian sebesar 70,67 persen selama kurun waktu 2016–2020. Untuk capaian kinerja tertinggi pada penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 98,81 persen, sedangkan untuk capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat capaian sebesar 53,12 persen dari target proyeksi yang telah ditetapkan.

1.b. Pendapatan Transfer

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari SDA serta dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Dana Perimbangan (DP) Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Dana Perimbangan	Realisasi Dana Perimbangan	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	563,27	549,81	19.37	24.84	97.61
2017	560,31	534,13	-0.53	-2.85	95.33
2018	530,19	524,83	-5.38	-1.74	98.99
2019	575,16	547,45	8.48	4.31	95.18
2020	493,76	487,06	-14.15	-11.03	98.64
		Rata-Rata	**1.56**	**2.71**	**97.15**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan realisasi dana perimbangan Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 97,15 persen. Untuk tahun 2016, realisasi dana perimbangan Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 549,81 miliar menurun menjadi Rp. 534,13 miliar pada tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 0,53 persen. Pada tahun 2019, dana perimbangan Kota Tanjungbalai kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 547,45 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 8,48 persen dan menurun menjadi Rp. 487,06 pada tahun 2020 atau menurun sebesar 11,03 persen.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja dana perimbangan Kota Tanjungbalai mencapai 97,15 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018, yakni sebesar 98,99 persen. Untuk realisasi capaian kinerja terendah untuk dana perimbangan Kota Tanjungbalai terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat capaian sebesar 95,18 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus serta kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target DBH Pajak	Realisasi DBH Pajak	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	16,34	15,88	-1,33	27,24	97,18
2017	46,21	41,57	182,80	161,78	89,96
2018	16,26	15,32	-64,81	-63,15	94,22
2019	32,12	18,62	97,54	21,54	57,97
2020	12,99	11,67	-59,56	-37,27	89,90
		Rata-Rata	**30,93**	**22,03**	**85,85**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak di Kota Tanjungbalai secara rata-rata mencapai 89,90 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,18 persen dan diikuti tahun 2018 dengan capaian kinerjanya sebesar 94,22 persen. Pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak di Kota Tanjungbalai, yakni sebesar 89,90 persen dari proyeksi target yang ditetapkan.

Dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,03 persen. Namun rata-rata pertumbuhan untuk realisasi dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak ini masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan targetnya sebesar 30,93 persen. Untuk realisasi dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak Kota Tanjungbalai yang pertumbuhannya cukup tinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 161,78 persen atau mengalami peningkatan dari Rp. 15,88 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 41,57 miliar pada tahun 2017. Realisasi dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang mengalami penurunan cukup tajam terjadi pada tahun 2018 sebesar 63,15 persen atau terjadi penurunan dari Rp. 41,57 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 15,32 miliar tahun 2018.

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kota Tanjungbalai adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target DAU	Realisasi DAU	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	418,17	418,17	4.96	4.96	100
2017	415,17	415,17	-0.72	-0.72	100
2018	418,67	418,67	0.84	0.84	100
2019	446,82	446,82	6.72	6.72	100
2020	412,46	410,58	-7.69	-8.11	99.54
		Rata-Rata	**0.82**	**0.74**	**99.91**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Untuk realisasi capaian kinerja dana alokasi umum (DAU) Kota Tanjungbalai menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2016–2020. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 99,91 persen yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) relatif sudah sesuai dengan proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah cukup baik walaupun untuk realisasi pertumbuhan dana alokasi umum (DAU) masih mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata tumbuh sebesar 0,74 persen selama kurun waktu 2016–2020.

Sementara itu, komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah dana alokasi khusus (DAK). Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana alokasi khusus yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target DAK	Realisasi DAK	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	128,76	115,76	126.25	292.01	89.9
2017	98,93	77,39	-23.17	-33.15	78.23
2018	95,26	90,84	-3.71	17.38	95.36
2019	96,21	82,01	1	-9.72	85.24
2020	68,30	64,80	-29	-20.98	94.88
		Rata-Rata	**14.27**	**49.11**	**88.72**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2016–2020, realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 49,11 persen per tahun. Tingginya pertumbuhan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai dikarenakan terjadinya peningkatan realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar 292,01 persen.

Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini dikarenakan realisasi capaian kinerja yang hanya mencapai 88,72 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 95,36 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2019 menjadi capaian kinerja terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan tingkat capaian sebesar 85,24 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya.

Terkait dengan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berikut ini adalah rincian perkembangan dari masing-masing komponen penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Tanjungbalai yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya yang sah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target DBH Pajak Provinsi	Realisasi DBH Pajak Provinsi	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	35,57	39,81	38,95	-37,09	111,92
2017	-	-	-	-	-
2018	26,52	22,54	-	-	84,99
2019	38,25	36,52	44,23	62,02	95,48
2020	32,23	36,83	-15,73	0,87	114,26
		Rata-Rata	**22,48**	**8,6**	**101,66**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata realisasi capaian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang mencapai 101,66 persen selama kurun waktu 2016–2020. Hasil capaian ini didukung oleh tingginya kinerja realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya pada tahun 2016 sebesar 111,92 persen dan tahun 2016 sebesar 114,26 persen dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian pada tahun 2017, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menerima dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Sementara itu, dilihat dari realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di Kota Tanjungbalai cenderung meningkat karena pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 22,54 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 36,52 miliar atau

meningkat sebesar 62,02 persen, dan kembali meningkat sebesar 0,87 persen pada tahun 2020 menjadi Rp. 36,83 miliar.

Selanjutnya, untuk komponen lain yang masih menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer di Kota Tanjungbalai adalah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya walaupun tidak setiap tahunnya menerima bantuan yang telah dianggarkan. Adapun besarnya target dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kota Tanjungbalai Tahun 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Bantuan Keuangan Prov	Realisasi Bantuan Keuangan Prov	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	4,00	3,86	-70,28	-	96,50
2017	-	-	-	-	-
2018	22,00	13,73	-	-	62,41
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
		Rata-Rata	**-70,28**	-	**79,45**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2018. Untuk tahun 2016, besarnya realisasi bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 3,86 miliar dari target yang direncanakan sebesar Rp. 4,00 miliar atau terealisasi sebesar 96,50 persen. Sedangkan tahun 2018, besarnya realisasi bantuan keuangan yang diterima Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 13,73 miliar dari target yang direncanakan sebesar Rp. 22,00 miliar atau terealisasi hanya sebesar 62,41 persen.

Sementara itu, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mentargetkan penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 4,00 miliar, tetapi tidak terealisasi pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menganggarkan penerimaan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sehingga pada tahun 2019 dan 2020 tidak menerima bantuan keuangan yang berasal dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi dana bagi hasil pajak dari propinsi dan penerimaan lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah

Kota Tanjungbalai untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Lain-Lain PD	Realisasi Lain-Lain PD	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	48,80	43,67	-41,06	-42,53	89,49
2017	-	5,99	-	-86,28	-
2018	48,52	36,27	-	505,51	74,75
2019	57,54	36,52	18,59	0,69	63,47
2020	21,43	20,26	-62,75	-44,51	94,53
		Rata-Rata	**-28,41**	**66,58**	**80,56**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 80,56 persen. Tingginya rata-rata realisasi pertumbuhan ini dikarenakan terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2018 yang mencapai 505,51 persen atau mengalami peningkatan realisasi dari Rp. 5,99 miliar tahun 2017 menjadi Rp. 36,27 miliar pada tahun 2018.

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Tanjungbalai menunjukkan kinerja yang belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang rata-rata hanya mencapai 80,56 persen dari proyeksi target yang ditetapkan. Adapun realisasi capaian kinerja yang cukup baik terjadi pada tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 94,53 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 63,47 persen dari proyeksi target yang ditetapkan.

Komponen lain untuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Tanjungbalai adalah pendapatan hibah. Untuk pendapatan hibah, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menganggarkannya selama kurun waktu 2017–2019, kecuali pada tahun 2016 yang memproyeksikan dan mentargetkan sebesar Rp. 9,23 miliar tetapi tidak terealisasi. Sebaliknya pada tahun 2020, Pemerintah Kota Tanjungbalai menargetkan Rp. 21,43 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 20,26 miliar dengan capaian kinerja sebesar 94,53 persen.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Tanjungbalai, 2016–2020
(Rp. Miliar)

Tahun	Target Pendapatan Hibah	Realisasi Pendapatan Hibah	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	9,23	-	-	-	-
2017	-	0,32	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	21,43	20,26	-	-	94,53
		Rata-Rata	-	-	-

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Selanjutnya, jika dilihat dari tren persentase untuk masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Tanjungbalai, maka sumber pendapatan terbesar adalah berasal dari pendapatan transfer. Untuk pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai, tren kontribusinya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 91,35 persen menjadi 90,07 persen pada tahun 2017 dan menurun lagi menjadi sebesar 85,42 persen tahun 2020. Dilihat secara rata-rata, kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai sebesar 89,19 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2016–2020.



Gambar 3.1
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Persen)

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah)

Dilihat dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuatif dari 8,65 persen pada tahun 2016 menjadi 8,92 persen tahun 2017 dan 11,05 persen pada tahun 2018. Untuk tahun 2019, kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 9,84 persen dan meningkat kembali kontribusinya pada tahun 2020 menjadi 11,28 persen. Dengan demikian, besarnya

rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai sebesar 9,95 persen selama kurun waktu 2016–2020.

Sementara itu, selama kurun waktu 2016–2020 besarnya kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai relatif tidak ada dan jika ada menunjukkan kontribusi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada kontribusi dari penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan Kota Tanjungbalai. Kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ada pada tahun 2017 sebesar 1.01 persen meningkat menjadi 3,3 persen pada tahun 2020. Dengan demikian, secara rata-rata besarnya kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Tanjungbalai sebesar 0,86 persen selama kurun waktu 2016–2020.

Disamping itu, untuk melihat suatu daerah mampu berotonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah. Analisis derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

Berdasarkan gambar di bawah memperlihatkan bahwa derajat kemandirian Kota Tanjungbalai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata derajat kemandirian sebesar 9,95 persen. Untuk tahun 2016, besarnya derajat kemandirian Kota Tanjungbalai sebesar 8,65 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,92 persen. Walaupun tahun 2018 derajat kemandirian Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 11,05 persen, tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali derajat kemandirian Kota Tanjungbalai menjadi sebesar 9,84 persen dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 11,28 persen.



Gambar 3.2
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Persen)

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah)

Sejalan dengan besarnya derajat kemandirian Kota Tanjungbalai maka besarnya rasio ketergantungan Kota Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang relatif menurun selama kurun waktu 2016–2020 dari 91,35 persen pada tahun 2016 menjadi 85,42 persen pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Tanjungbalai dalam berotonomi selama kurun waktu 2016–2020 masuk dalam kategori sangat kurang (<10persen). Hal ini dikarenakan besarnya derajat kemandirian Kota Tanjungbalai secara rata-rata hanya sebesar 9,84 persen selama kurun waktu 2016–2020. Dilihat dari rasio ketergantungan Kota Tanjungbalai terhadap bantuan pihak eksternal cenderung relatif masih sangat tinggi selama kurun waktu 2016–2020 dengan rata-rata mencapai 89,19 persen setiap tahunnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat menjadi pendorong atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah dan memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung (BTL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2015–2019 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2015–2019 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2015	702,49	585,92	-	-	83,41
2016	749,89	658,57	6,75	12,40	87,82
2017	707,69	644,01	-5,63	-2,21	91,00
2018	877,04	657,77	23,93	2,14	75,00
2019	868,44	648,48	-0,98	-1,41	74,67
		Rata-Rata	**6,02**	**2,73**	**82,38**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kota Tanjungbalai cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 2,73 persen. Untuk realisasi belanja daerah yang mengalami kenaikan cukup tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan peningkatan sebesar 12,40 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja daerah yang menunjukkan penurunan terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat penurunan sebesar -2,21 persen dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 82,38 persen selama kurun waktu 2015–2019. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat capaian sebesar 91,00 persen dan tahun 2019 menjadi capaian kinerja yang paling rendah, yakni sebesar 74,67 persen dari target belanja daerah Kota Tanjungbalai yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)
Kota Tanjungbalai, 2015 – 2019 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Belanja Langsung (BL)	Belanja Total (BT)	Proporsi BTL dengan Belanja Total	Proporsi BL dengan Belanja Total
2015	262,94	322,98	585,92	44,88	55,12
2016	313,41	345,15	658,57	47,59	52,41
2017	312,56	331,45	644,01	48,53	51,47
2018	316,19	341,58	657,77	48,07	51,93
2019	330,06	318,42	648,48	50,90	49,10
		Rata-Rata		**47,99**	**52,01**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Sementara itu, jika dilihat dari proporsi terbesar penggunaan belanja daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2015–2019 terdapat pada belanja langsung dengan rata-rata proporsi belanja langsung terhadap belanja total sebesar 52,01 persen. Sedangkan untuk rata-rata proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja total hanya sekitar 47,99 persen. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah Kota Tanjungbalai sudah lebih baik dalam memprioritaskan belanja daerahnya pada belanja langsung yang diharapkan dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Tanjungbalai, terutama untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Sementara itu, untuk realisasi belanja tidak langsung (BTL) setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuatif selama kurun waktu 2015–2019 dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,12 persen setiap tahunnya. Besarnya rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung (BTL) ini didorong oleh realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan sebesar 19,19 persen dari tahun 2015 sebesar Rp. 262,94 miliar menjadi Rp. 313,41 miliar pada tahun 2016. Begitupun pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan belanja tidak langsung (BTL) dari Rp. 316,19 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 330,06 miliar pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 4,39 persen.

Tabel 3.17
Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (BTL)
Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Belanja Pegawai	231,74	293,51	283,92	293,46	302,16	7,43
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	21,89	7,24	8,45	5,35	9,39	-2,85
5	Belanja Bantuan Sosial	9,32	11,25	18,91	16,78	15,32	17,21
6	Belanja Bantuan Keuangan	-	0,59	0,62	0,59	0,57	-1,05
7	Belanja Tidak Terduga	-	0,82	0,67	-	2,63	-18,29
Belanja Tidak Langsung (BTL)		**262,94**	**313,41**	**312,56**	**316,19**	**330,06**	**6,12**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Apabila dilihat dari komponen belanja tidak langsung (BTL), realisasi bantuan sosial dan belanja pegawai Kota Tanjungbalai menunjukkan peningkatan rata-rata yang relatif besar selama kurun waktu 2015–2019. Untuk realisasi belanja bantuan sosial Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup besar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,21 persen selama kurun waktu 2015–2019. Peningkatan rata-rata yang cukup besar ini terjadi dikarenakan realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 11,25 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 18,91 miliar pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 68,09 persen. Begitupun untuk realisasi belanja pegawai Kota Tanjungbalai menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

7,43 persen. Kondisi ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan realisasi belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 26,65 persen dari Rp. 231,74 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 293,51 miliar pada tahun 2016.

Komponen belanja tidak langsung (BTL) yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif selama kurun waktu 2015–2019 adalah belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk realisasi belanja hibah Kota Tanjungbalai mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -2,85 persen selama kurun waktu 2015–2019. Penurunan ini dikarenakan realisasi belanja hibah tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp. 21,89 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 7,24 miliar pada tahun 2016 atau tumbuh negatif sebesar minus 66,93 persen. Begitupun tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 36,69 persen dari Rp. 8,45 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 5,35 miliar pada tahun 2018.

Realisasi belanja bantuan keuangan Kota Tanjungbalai mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,05 persen selama kurun waktu 2015–2019. Pertumbuhan yang negatif ini disebabkan adanya penurunan untuk realisasi belanja bantuan keuangan Kota Tanjungbalai pada tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2018, realisasi belanja bantuan keuangan Kota Tanjungbalai menurun dari Rp. 0,62 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 0,59 miliar pada tahun 2018 atau turun sebesar 4,84 persen, sedangkan untuk tahun 2019 realisasi belanja bantuan keuangan mengalami penurunan dari Rp. 0,59 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 0,57 miliar pada tahun 2019 atau turun sebesar 3,39 persen.

Sementara itu, dilihat dari realisasi belanja tidak terduga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai hanya merealisasikan belanja tidak terduga pada tahun 2016 sebesar Rp. 0,82 miliar dan sebesar Rp. 0,67 miliar pada tahun 2017 serta tahun 2019 sebesar Rp. 2,63 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2018, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga pada tahun tersebut.

Tabel 3.18
Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Langsung (BL)
Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Belanja Pegawai	30,76	37,87	26,10	32,24	13,18	-10,89
2	Belanja Barang dan Jasa	185,50	176,34	180,40	188,38	208,93	3,17
3	Belanja Modal	106,72	130,94	124,95	120,97	96,30	-1,36
Belanja Langsung (BL)		**322,98**	**345,15**	**331,45**	**341,58**	**318,42**	**-0,21**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Selanjutnya, untuk realisasi jenis belanja langsung (BL) Kota Tanjungbalai menunjukkan bahwa secara rata-rata belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan untuk belanja pegawai dan belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif selama kurun waktu 2015–2019. Untuk realisasi belanja pegawai menunjukkan kecenderungan yang menurun dengan rata-

rata penurunan sebesar 10,89 persen. Adapun tingkat penurunan terbesar untuk realisasi belanja pegawai terjadi pada tahun 2019 sebesar 59,12 persen dan diikuti tahun 2017 sebesar 31,08 persen. Begitupun untuk realisasi belanja modal yang secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,36 persen selama kurun waktu 2015–2019 dengan tingkat penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 20,39 persen.

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan perkembangan yang meningkat selama kurun waktu 2015–2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,17 persen. Kondisi ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi belanja barang dan jasa dari Rp. 188,38 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 208,93 miliar pada tahun 2019 atau terjadi pertumbuhan sebesar 10,91 persen pada tahun 2019. Begitupun pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 4,42 persen dari Rp. 180,40 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 188,38 miliar pada tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja daerah diklasifikasikan terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berikut ini gambaran capaian kinerja Belanja Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja Operasi	Target Belanja Operasi	Realisasi Belanja Operasi	Capaian Kinerja (persen)
1	Belanja Pegawai	332,70	310,85	93,43
2	Belanja Barang	184,28	162,53	88,20
3	Belanja Hibah	37,02	36,41	98,34
4	Belanja Bantuan Sosial	15,47	14,92	96,49
5	Belanja Bantuan Keuangan	0,65	0,65	100
			Rata-Rata	95,29

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel 3.20 di atas memperlihatkan kondisi belanja operasi Kota Tanjungbalai. Realisasi Belanja operasi terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp. 310,85 miliar, kemudian disusul oleh belanja barang sebesar Rp. 162,53 miliar. Realisasi belanja operasi terendah adalah belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 654 juta dan sesuai dengan target, sedangkan target jenis belanja operasi lain belum mencapai target.

Realisasi capaian kinerja belanja operasi Kota Tanjungbalai secara rata-rata sebesar 95,29 persen dengan capaian kinerja tertinggi adalah belanja bantuan keuangan sebesar 100 persen dan capaian kinerja terendah adalah belanja barang sebesar 88,20 persen dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja Modal	Target Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Capaian Kinerja (persen)
1	Belanja Tanah	0,07	0	0
2	Belanja Peralatan dan Mesin	25,87	22,80	88,13
3	Belanja Bangunan dan Gedung	9,34	9,33	99,94
4	Belanja Jaringan, Irigasi dan Jaringan	19,02	18,78	98,75
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,01	2,76	91,65
			Rata-Rata	75,69

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel 3.21 di atas memperlihatkan kondisi belanja modal Kota Tanjungbalai. Realisasi belanja modal terbesar adalah belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 22,80 miliar, kemudian disusul oleh belanja jaringan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 18,78 miliar. Realisasi belanja modal terendah adalah belanja tanah karena tidak ada terealisasi.

Realisasi capaian kinerja belanja modal Kota Tanjungbalai secara rata-rata sebesar 75,69 persen dengan capaian kinerja tertinggi adalah belanja bangunan dan gedung sebesar 99,94 persen dan capaian kinerja terendah adalah belanja tanah sebesar 0 persen dari target yang telah ditetapkan.

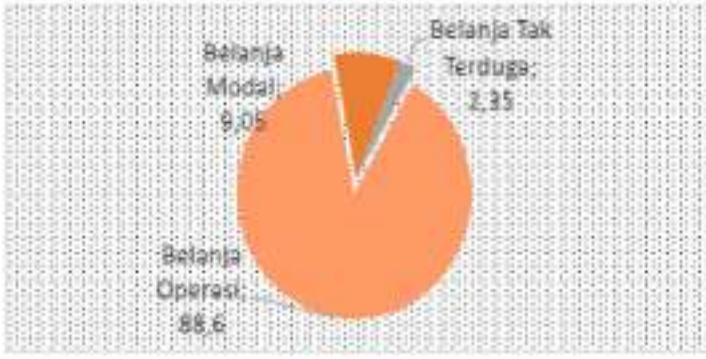
Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Tanjungbalai, 2020 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja Modal	Target Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Capaian Kinerja (persen)
1	Belanja Tak Terduga	14,70	13,90	94,60
		Rata-Rata		94.60

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel 3.22. di atas memperlihatkan kondisi belanja tak terduga Kota Tanjungbalai dengan realisasi sebesar Rp. 13,90 miliar. Realisasi capaian kinerja belanja tak terduga Kota Tanjungbalai secara rata-rata sebesar 94,60 persen.

Dilihat dari tren persentase untuk masing-masing komponen belanja daerah Kota Tanjungbalai, maka proporsi belanja terbesar adalah berasal dari belanja operasi sebesar 88,6 persen, selanjutnya adalah proporsi belanja modal sebesar 9,05 persen. Proporsi belanja terkecil berasal dari belanja tak terduga sebesar 2,35 persen.



Gambar 3.3
Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Persen)

Sumber: BPKPAD Kota Tanjungbala (diolah)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	73,35	85,44	-20.32	-13.26	116.48
2017	73,59	73,18	0.33	-14.35	99.44
2018	205,70	-3,16	179.52	-104.32	-1.54
2019	129,24	5,33	-37.17	-268.67	4.12
2020	0,95	3,30	-100.7	-161.95	345.42
		Rata-Rata	**4.33**	**-112.5**	**112.78**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Untuk realisasi pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 112,5 persen selama kurun waktu 2016–2020. Adapun penurunan terbesar untuk realisasi pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai terjadi pada tahun 2019 yang mencapai -268,67 persen dan sebesar minus 161,95 persen pada tahun 2020. Dilihat dari target pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai cenderung mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 4,33 persen selama kurun waktu 2016–2020 dengan pertumbuhan target tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 179,52 persen.

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 2016–2029, kecuali pada tahun 2018 yang tingkat capaiannya negatif sebesar -1,54 persen dan tahun 2019 yang hanya mencapai 4,12 persen dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 dan 2020, realisasi pembiayaan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 116,48 persen dan 345,42 persen, serta untuk capaian kinerja tahun 2017 sebesar 99,44 persen. Namun secara rata-rata, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai mencapai 112,78 persen selama kurun waktu 2016–2020.

Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari komponen pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai untuk target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2016–2020.

3.a. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	82,58	85,44	-17.3	-13.26	103.46
2017	76,89	76,48	-6.89	-10.49	99.47
2018	210,00	139,49	173.12	82.39	66.42
2019	133,54	8,63	-36.41	-93.81	6.46
2020	2,34	-	-98.24	-	-
		Rata-Rata	2.85	-8.79	68.95

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk penerimaan daerah Kota Tanjungbalai memperlihatkan kinerja yang belum optimal selama kurun waktu 2016–2020. Kondisi ini dikarenakan secara rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan daerah hanya mencapai 68,95 persen. Adapun realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat capaian sebesar 103,46 persen dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 menjadi realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan daerah Kota Tanjungbalai dengan tingkat capaian hanya sebesar 6,46 persen dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan tidak dapat direalisasikan.

Selanjutnya, sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020.

Tabel 3.24
Target dan Realisasi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target SiLPA	Realisasi SiLPA	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	81,58	84,81	-17,47	-13,72	103,96
2017	75,89	75,89	-6,97	-10,52	100,00
2018	79,00	84,30	4,10	11,06	106,71
2019	6,00	8,63	-92,41	-89,76	143,83
2020	2,34	-	-60,92	-	-
		Rata-Rata	**-34,73**	**-25,73**	**113,62**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai masih berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) cenderung mengalami pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata penurunan sebesar 25,73 persen. Dilihat dari capaian kinerja untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat capaian rata-rata melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 113,62 persen.

Selain sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), sumber penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai adalah penerimaan pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penerimaan pinjaman daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Penerimaan Pinjaman	Realisasi Penerimaan Pinjaman	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	130,00	-	-	-	-
2019	126,54	-	-2,66	-	-
2020	-	-	-	-	-
		Rata-Rata	**-2,66**	-	-

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Dari data di atas memperlihatkan bahwa penerimaan untuk pinjaman daerah pada tahun 2018 dan 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mentargetkan penerimaan untuk pinjaman daerah sebesar Rp. 130,0 miliar dan Rp. 126,54 miliar. Namun pada tahun 2018 dan 2019 tersebut, penerimaan untuk pinjaman daerah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak dapat direalisasikan.

Selanjutnya, sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai lainnya adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman. Berikut ini adalah besarnya target dan realisasi untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kota Tanjungbalai Tahun 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Penerimaan Kembali	Realisasi Penerimaan Kembali	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	1,00	0,63	-	221,43	63,00
2017	1,00	0,59	-	-6,35	59,00
2018	1,00	0,06	-	-89,83	6,00
2019	1,00	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
		Rata-Rata		**41,75**	**42,67**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Untuk besarnya target penerimaan kembali pemberian pinjaman yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 1,0 miliar selama kurun waktu 2016–2020. Namun realisasi capaian kinerja untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dialokasikan tersebut secara rata-rata hanya mencapai 42,67 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi terbesar untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar Rp. 0,63 miliar atau sekitar 63,0 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan

tahun 2019, besarnya target penerimaan kembali pemberian pinjaman yang telah dialokasikan sebesar Rp. 1,0 miliar tidak dapat direalisasikan.

3.b. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	9,23	-	18,33	-	-
2017	3,30	3,30	-64,25	-	100,00
2018	4,30	3,30	30,30	-	76,74
2019	4,30	3,30	-	-	76,74
2020	3,30	3,30	-23,26	0	100,00
		Rata-Rata	**-9,72**	-	**88,37**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2017–2019 masing-masing sebesar Rp. 3,0 miliar dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 84,50 persen. Untuk tahun 2017, realisasi capaian kinerja untuk pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 dan 2019, realisasi capaian kinerja untuk pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai masing-masing hanya sebesar 76,74 persen dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 target pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Tanjungbalai terealisasi sebesar 100 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai pada BUMD selama kurun waktu 2016–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kota Tanjungbalai, 2015–2019 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Penyertaan Modal	Realisasi Penyertaan Modal	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2015	3,30	-	-	-	-
2016	9,23	-	179,70	-	-
2017	3,30	3,30	-64,25	-	100,00
2018	3,30	3,30	-	-	100,00
2019	3,30	3,30	-	-	100,00
		Rata-Rata	57,72	-	100,00

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Dari data di atas terlihat bahwa pengeluaran pembiayaan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2017–2019 dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk realisasi besarnya penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing sebesar Rp. 3,30 miliar selama kurun waktu 2017–2019 atau terealisasi 100persen setiap tahunnya. Dengan demikian, selama kurun waktu 2017 – 2019, tingkat capaian kinerja untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mencapai 100persen dari target yang ditetapkan.

Selain untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD, pengeluaran pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah Kota Tanjungbalai. Adapun besarnya target pemberian pinjaman daerah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2016–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kota Tanjungbalai, 2016–2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target Pemberian Pinjaman	Realisasi Pemberian Pinjaman	Pertumbuhan Target (persen)	Pertumbuhan Realisasi (persen)	Capaian Kinerja (persen)
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	1,00	-	-	-	-
2019	1,00	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
		Rata-Rata	-	-	-

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa target anggaran untuk pemberian pinjaman daerah hanya dialokasikan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak mengalokasikan anggaran untuk pemberian pinjaman daerah. Begitupun untuk tahun 2018 dan 2019, besarnya target pemberian pinjaman yang telah dialokasikan

Pemerintah Kota Tanjungbalai masing-masing sebesar Rp. 1,0 miliar tidak terealisasi.

3.c. Pembiayaan berasal dari APBN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Pembiayaan berasal dari APBN, 2016–2020 (Rp)

Tahun	Tugas Pembantuan	
	Target	Realisasi
2016	668.578.000	209.372.000
2017	-	-
2018	355.150.000	353.924.332
2019	-	-
2020	-	-

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima dana tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 668.578.000 dengan realisasi sebesar Rp. 209.372.000 atau sebesar 31 persen. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Tenaga Kerja menerima dana tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp. 355.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 353.924.332 atau sebesar 99,65 persen.

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut PP No. 71 tahun 2010 neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca disusun untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Perkembangan neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Tanjungbalai, 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	75.200.003.774,75	24.007.003.006,78	6.000.383.510,04	2.346.171.700,03	13.270.843.271,08	0,000
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	661.807.413,00	420.981.965,00	279.354.617,00	136.878.805,00	0,00	(0,479)
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas di Bendahara PKTP			3.566.419.149,00	2.619.779.821,00	1.206.606.130,00	(0,403)
Kas di Bendahara BOS	373.502.897,32	1.024.705.015,44	130.923.832,06	388.010.500,00	503.754.462,32	1,732
Kas Lainnya	70.550.595,00	70.550.595,00		12.151.849,00	0,00	(0,997)
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	22.646.366.251,00	37.156.419.287,81	41.574.665.719,81	24.570.150.300,00	23.752.465.240,00	0,061
Piutang Lainnya	10.566.990.206,04	11.748.706.347,26	12.075.720.059,60	11.903.385.579,82	13.056.934.908,70	0,055
Penyisihan Piutang	(12.330.310.810,63)	(12.048.741.571,53)	(18.303.685.263,3)	(18.679.653.765,65)	(21.614.127.042,74)	0,183
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Persediaan	5.110.303.091,08	3.626.224.312,33	3.654.544.796,00	5.344.486.544,00	5.454.488.594,37	0,050
JUMLAH ASET	153.227.008.391,37	75.714.806.556,09	46.360.758.417,83	28.243.107.942,00	36.230.965.092,73	(0,104)

LANCAR						
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	44.147.813.467,06	46.540.643.264,37	46.227.901.160,16	47.063.160.616,39	49.840.310.680,40	0,000
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	44.147.619.407,08	46.540.645.264,37	40.227.561.165,16	47.383.160.519,39	49.045.315.699,40	0,020
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	44.147.619.407,08	46.540.645.264,37	40.227.561.165,16	47.383.160.519,39	49.045.315.699,40	0,020
ASET TETAP						
Tanah	385.839.721.854,00	543.634.456.425,00	508.683.224.009,00	528.820.371.313,00	525.338.551.074,00	(0,199)
Peralatan dan Mesin	286.733.462.310,95	288.738.569.457,71	289.415.749.238,23	294.885.103.208,23	307.377.955.204,06	0,043
Gedung dan Bangunan	469.150.086.055,85	413.716.334.982,58	427.221.713.677,00	444.442.907.108,00	401.431.253.399,51	(0,002)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	666.697.623.288,07	734.626.251.742,35	807.431.934.705,33	843.998.221.901,00	886.843.985.705,91	0,079
Aset Tetap Lainnya	60.226.028.793,16	60.853.506.579,90	44.637.029.427,94	49.201.750.776,94	52.072.601.539,53	0,067
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.740.637.865,00	16.388.955.156,00	20.169.303.936,00	28.821.695.249,00	14.796.264.640,00	0,026
Akumulasi Penyusutan	(753.516.568.134)	(689.944.552.001)	(750.416.701.144)	(1.102.656.084.675,42)	(1.099.129.528.555,23)	0,113
JUMLAH ASET TETAP	1.085.470.012.999,03	1.327.612.151.348,54	1.397.143.247.250,45	1.097.174.565.022,75	1.150.731.112.567,70	(0,244)
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	1.178.566.735,00	1.178.566.735,00	1.178.566.735,00	1.178.566.735,00	1.178.566.735,00	0,000
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aset Tidak Berwujud	3.033.874.168,00	3.247.430.848,00	3.247.430.848,00	3.326.002.280,00	3.854.978.934,00	0,048

Aset Lainnya	31.883.009.224,04	30.698.395.387,04	46.720.009.714,04	83.826.847.009,01	89.222.216.124,99	0,210
JUMLAH ASET LAINNYA	36.055.448.128,04	36.064.562.886,04	46.146.007.287,04	87.536.216.574,01	88.000.761.793,99	0,151
JUMLAH ASET	1.271.540.549.895,52	1.485.552.202.047,84	1.441.857.974.126,52	1.241.511.960.056,15	1.304.067.183.564,82	0,013
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Pembiayan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	88.153.233,00	775.653.525,00	946.380.478,00		2,280
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.294.752.726,00	10.603.309.213,00	9.007.968.843,00	9.102.363.843,00	8.600.000,00	(0,109)
Utang Kelebihan Penerimaan Retribusi	1.369.746.521,12	1.369.746.521,12	1.369.746.521,12	1.369.746.521,12	1.369.746.521,12	
Utang Belanja	472.204.859,35	472.204.859,35	472.204.859,35	472.204.859,35	472.204.859,35	
Utang Transfer	0,00	440.000.294,00	0,00	0,00	0,00	(1,000)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.136.704.106,47	13.222.422.120,47	11.715.574.152,47	11.393.695.699,47	1.850.946.380,47	(0,000)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	8.130.704.185,47	10.222.422.126,47	11.715.574.152,47	11.593.505.039,47	1.850.846.381,47	(0,085)
EKUITAS						
EKUITAS	1.263.809.642.799,05	1.472.329.779.027,17	1.430.182.300.906,00	1.229.417.604.300,68	1.302.216.317.184,20	0,014
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.271.940.348.855,52	1.482.552.202.047,64	1.441.897.874.120,52	1.241.011.060.056,15	1.304.067.163.564,62	0,013

Sumber: BPKAD Kota Tanjungpinang

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Dalam rangka menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan seperti analisis likuiditas dan solvabilitas seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.32
Analisis Rasio Keuangan Kota Tanjungbalai, 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar	12,5	5,7	4,2	2,5	19,6
2	Rasio cepat	11,9	7,3	3,9	2,1	16,6
3	Rasio kas	9,3	2,7	0,8	0,5	8,1
4	Rasio utang terhadap ekuitas	0,006	0,008	0,008	0,009	0,001
5	Rasio utang terhadap aset modal	0,007	0,009	0,009	0,010	0,02

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah)

1. Rasio Lancar menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk menutupi hutangnya, nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 :1. Selama lima tahun terakhir rasio ini mengalami peningkatan dari 12,5 pada tahun 2016 meningkat menjadi 19,6 pada tahun 2020. Nilai ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.
2. Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa rasio cepat Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari 2,1 pada tahun 2019 meningkat menjadi 16,6 pada tahun 2020, artinya adanya kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.
3. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio Kas Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 mencapai 8,1 artinya Pemerintah Kota Tanjungbalai masih mampu memenuhi utang yang harus segera dipenuhi dengan kas.
4. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang, rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (over leverage) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Tanjungbalai telah berhasil menurunkan resiko pemberian hutang karena rasio ini menurun dari 0,009 pada tahun 2019 menjadi 0,001 pada tahun 2020.
5. Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal ini yang diproksikan menjadi total aset tetap. Pada tahun 2020 rasio ini sebesar 0,02, artinya rasio ini juga masih relatif sangat kecil dan masih kategori batas aman.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016-2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2016-2021, kebijakan umum pendapatan

daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah.
c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah.
d. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
e. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
f. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
e. Kebijakan belanja meliputi :
    1) Mengalokasikan belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
    2) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah diletapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
    3) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    4) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada partai politik dan bantuan organisasi profesi.
    5) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah, demikian juga dilakukan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat atau tidak tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah

memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

3.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Berikut ini meupakan tabel yang menunjukan proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai meliputi: gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, Belanja penerimaan lainnya KDH/WKDH serta DPRD, Honorarium ASN, uang lembur, beasiswa dan pendidikan ASN, Pelatihan dan Bimtek ASN, Belanja makan minum dan belanja pakaian dinas.

Tabel 3.33
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tanjungbalai, 2016–2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun anggaran 2016	338,422,156,612	668,443,396,127	50.63
2	Tahun anggaran 2017	329,591,382,101	710,986,448,532	46.36
3	Tahun anggaran 2018	334,514,173,213	835,773,050,228	40.02
4	Tahun anggaran 2019	345,457,894,016	872,735,559,646	39.58
5	Tahun anggaran 2020	400,879,153,928	645,400,087,664	62.11

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai (diolah)

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 mencapai 40,02 persen meningkat menjadi 62,11 persen pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin kecil proporsinya dibandingkan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.4. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Selama pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD.

Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.34
Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	658,06	604,91	635,53	647,68	609,73
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	668,44	644,07	657,82	648,47	596,25
	Uraian					
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	3,30	3,30	3,30	3,30
	Defisit Riil	**(10,38)**	**(42,46)**	**(25,58)**	**(4,09)**	**10,18**

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 2016-2019 APBD Kota Tanjungbalai selalu mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah, namun pada tahun 2020 mengalami surplus, yang artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan,penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.35
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tanjungbalai
(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	85.611,37	75.891,82	34.087,90	8.557,94	5.455,39
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	663,34	592,99	126,70	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.274,71	76.484,82	34.214,61	8.557,94	5.455,39

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel diketahui bahwa selama tahun 2016 sampai dengan 2020 Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, tetapi anggaran tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2016 mencapai sekitar 86 miliar menurun menjadi sekitar 5 miliar pada tahun 2020.

Gambaran kondisi defisit riil Anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai (APBD) Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.36
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	658.060,50	604.913,16	635.532,70	647.686,42	609.734,08
2	Belanja Daerah	668.443,39	644.077,35	657.820,62	648.476,98	596.252,33
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
A	**Defisit Riil**	**(10.382,89)**	**(42.464,18)**	**(25.587,91)**	**(4.090,55)**	**10.181,74**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	85.611,37	75.891,82	34.087,90	8.557,94	5.455,39
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	663.34	592.99	126,70	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.274,71	76.484,82	34.214,61	8.557,94	5.455,39

	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	75.891,82	34.020,63	8.626,69	4.467,38	15.637,14

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel diperoleh informasi bahwa besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 mencapai 75,89 miliar menurun menjadi 4,46 miliar pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 15,63 miliar pada tahun 2020.

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Tabel 3.37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	75,89	100	34,02	100	8,62	100	4,46	100	14,98	100
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	75,89	100	34,02	100	8,62	100	4,46	100	14,98	100
5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir perolehan SiLPA berasal dari penghematan belanja atau akibat lainnya. Keberadaan SiLPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA seperti ini jarang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal.

3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp.0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp. 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Tabel 3.38
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Tanjungbalai, 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo Kas Neraca Daerah	75,89	34,02	8,62	4,46	14,98
	Dikurangi					
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	75,89	34,02	8,62	4,46	14,98

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

3.5 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah. Dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa mendatang, berikut ini adalah beberapa kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.5.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran s ebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.4
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah dimasa mendatang diarahkan pada:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten, serta POLRI.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber–sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai periode 2022 sampai dengan 2026.

Tabel 3.39
Proyeksi Pendapatan Kota Tanjungbalai, 2022-2026

No	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**	**713.742.812.426,45**	**716.855.774.872,58**	**705.588.917.574,14**	**705.072.676.253,62**	**717.327.150.250,29**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	77.360.567.727,00	78.907.779.082,00	**80.485.934.663,00**	**82.095.653.356,00**	83.737.566.424,00
1.1.1	- Pajak Daerah	15.300.000.000,00	15.606.000.000,00	15.918.120.000,00	16.236.482.400,00	16.561.212.048,00
1.1.2	- Retribusi Daerah	27.118.396.300,00	27.660.766.266,00	28.213.981.591,32	28.778.261.223,15	29.353.826.447,61
1.1.3	- Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.402.169.427,00	7.550.212.815,54	7.701.217.071,85	7.855.241.413,29	8.012.346.241,55
1.1.4	- Lain-Lain PAD yang Sah	27.540.000.000,00	28.090.800.000,00	28.652.616.000,00	29.225.668.320,00	29.810.181.686,40
1.2	**Pendapatan Transfer**	**614.519.931.095,18**	**615.648.435.915,08**	**602.357.432.237,09**	**589.776.560.801,82**	**610.525.112.459,46**
	- Transfer Pemerintah pusat	**588.509.931.095,18**	**585.118.235.915,08**	**575.296.628.237,09**	**572.174.560.801,82**	**582.371.052.017,86**
1.2.1	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan	15.590.756.876,18	10.242.571.808,68	8.697.423.244,86	8.755.371.709,75	8.916.479.143,86

	Pajak					
1.2.2	- Dana Alokasi Umum (DAU)	424.923.320.820,00	433.421.787.236,40	442.090.222.981,13	450.932.027.440,75	459.950.667.989,57
1.2.3	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	147.996.853.800,00	145.453.876.870,00	124.606.982.011,10	112.487.181.651,32	113.503.904.884,34
1.2.4	- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Antar Daerah	**26.010.000.000,00**	**26.530.200.000,00**	**27.060.804.000,00**	**27.602.000.000,00**	**28.154.060.481,60**
1.2.5	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak dari Provinsi	26.010.000.000,00	26.530.200.000,00	27.060.804.000,00	27.602.000.000,00	28.154.060.481,60
1.2.6	- Bantuan Keuangan					
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**21.862.313.604,27**	**22.299.559.876,36**	**22.745.551.073,88**	**23.200.462.095,36**	**23.664.471.337,27**
1.3.1	- Pendapatan Hibah	21.862.313.604,27	22.299.559.876,36	22.745.551.073,88	23.200.462.095,36	23.664.471.337,27
1.3.2	- Pendapatan Lainnya yang Sah					

3.5.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.5
Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi belanja Kota Tanjungbalai periode 2022 sampai dengan 2026.

Tabel 3.40
Proyeksi Belanja Kota Tanjungbalai, 2022-2026

No	Kapasitas Riil Belanja	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
2	**BELANJA**	**714.660.812.425,54**	**717.752.134.872,46**	**705.544.005.173,61**	**706.046.865.157,08**	**716.920.822.582,62**
2.1	**Belanja Operasi**	**587.010.548.638,54**	**600.014.187.241,82**	**611.970.470.986,67**	**624.165.880.406,39**	**636.605.158.014,53**
2.1.1	- Belanja Pegawai	360.659.451.169,50	367.872.640.192,89	375.230.092.996,75	382.734.694.856,68	390.389.388.753,82
2.1.2	- Belanja Barang Jasa	201.266.073.275,49	208.589.822.373,13	210.712.818.820,60	214.917.871.197,01	219.207.228.620,96
2.1.3	- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	- Belanja Hibah	13.676.756.191,96	14.124.291.315,80	14.376.777.142,12	14.634.312.884,96	14.896.998.939,66
2.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	11.206.268.000,00	11.427.433.360,00	11.850.982.027,20	11.879.001.667,74	12.111.581.701,10
2.2	**Belanja Modal**	125.406.263.786,00	115.489.067.630,64	92.238.876.586,94	79.499.634.038,69	79.886.647.201,09
2.2.1	- Belanja Modal	125.406.263.786,00	115.489.067.630,64	92.238.876.586,94	79.499.634.038,69	79.886.647.201,09
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2.244.000.000,00**	**2.288.880.000,00**	**2.334.657.600,00**	**2.381.350.752,00**	**2.428.977.767,00**
2.3.1	- Belanja Tidak Terduga	2.244.000.000,00	2.288.880.000,00	2.334.657.600,00	2.381.350.752,00	2.428.977.767,00
2.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1	- Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	- Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	- Bantuan Keuangan					

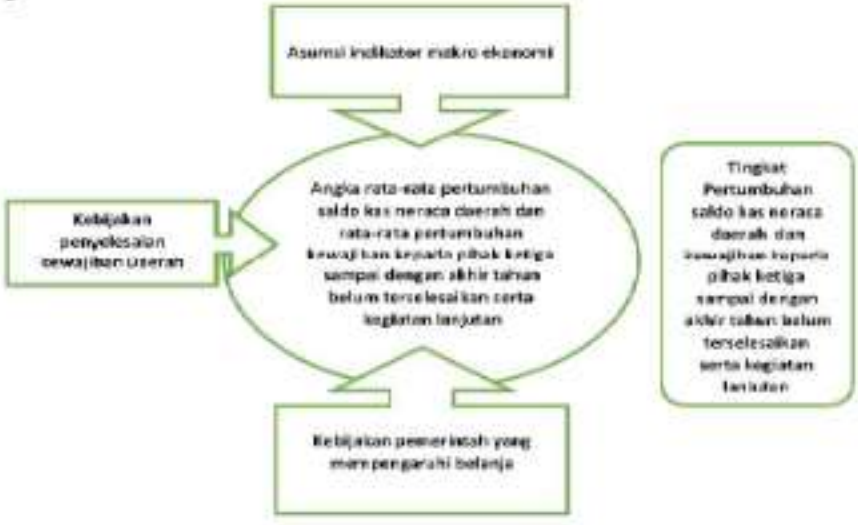
3.5.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2026

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat

mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

(1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
(2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
(3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; dan
(4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.6
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6 persen dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:
   1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
   2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Berikut ini tabel yang menunjukkan proyeksi belanja Kota Tanjungbalai periode 2022 sampai dengan 2026.

Tabel 3.41
Proyeksi Pembiayaan Kota Tanjungbalai, 2022-2026

No	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	**PEMBIAYAAN**	**4.699.999.999,50**	**4.717.999.999,49**	**4.736.359.999,48**	**4.755.087.199,47**	**4.774.188.943,46**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3.699.999.999,50	3,717,999,999,49	3.736.359.999,48	3.755.087.199,47	3.774.188.943,46
3.2	Pengeluaraan Pembiayaan	3.800.00.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
3.3	Pembiayaan Netto	899.999.999,50	917.999.999,49	936.359.999,48	955.087.199,47	974.188.943,46

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang juga terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan. Oleh karena itu dalam perumusan permasalahan dan isu strategis perlu adanya masukan dari stakeholder kabupaten/kota, provinsi dan nasional agar diperoleh konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah.

Bab ini merupakan bagian penting yang akan mendeskripsikan isu-isu strategis terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan yang tentunya penetapan tujuan, sasaran serta arah pembangunan yang dihasilkan sejalan dengan tujuan periode akhir rencana pembangunan jangka Panjang yakni: untuk mewujudkan "**TANJUNGBALAI MAJU, MADANI DAN MEMILIKI DAYA SAING**".

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

4.1.1. Permasalahan Pokok Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional/Provinsi yang bersifat mandatory. Berdasarkan analisis pemetaan permasalahan maka ditetapkan permasalahan pokok daerah Kota Tanjungbalai sebagai dasar penetapan prioritas dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertera pada tabel berkut:

Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	- Belum optimalnya pencapaian akuntabilitas kinerja birokrasi	- Belum optimalnya pelaksanaan sistem penatusahaan pengelolaan keuangan daerah
			- Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP
			- Sinergitas antara indikator kinerja pada dokumen

			perencanaan, pengangga-ran dan pelaporan belum optimal
			- Kualitas SDM aparatur masih rendah - Kegiatan pembinaan penerapan SPIP masih minim
			- Masih rendahnya capaian target pembangunan daerah
			- Inovasi layanan publik masih rendah
		- Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum kepada masyarakat.	- Belum maksimalnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemenuhan SPM
2	Belum optimalnya penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan di tengah-tengah masya-rakat	- Belum maksimalnya pelaksanaan Perda keagamaan dan penanaman nilai-nilai keagamaan di keluarga	- Minimnya sosialisasi dan kegiatan pembinaan keagamaan di tengah-tengah masyarakat
			- Terbatasnya peran dai/penyuluh/tenaga keagamaan lainnya dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan pada tataran keluarga
3	Rendahnya daya saing daerah	- Rendahnya produktivitas daerah	- Belum optimalnya kontribusi sektor-sektor produktif terhadap perekonomian daerah - Belum adanya data base terkait sektor sektor unggulan - Produktivitas UMKM masih rendah - Upaya penggalian sektor pariwisata sebagai daya ungkit perekonomian daerah belum optimal - Belum terbangunnya inovasi daerah - Rendahnya kualitas dan daya saing ketenagakerjaan
		- Minimnya investasi	- Dukungan regulasi dan Fasilitasi bagi kegiatan penanaman modal masih terbatas - Peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak sesuai dengan upah yang terus meningkat - Kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung produksi (jalan, energy) masih belum mencukupi

4	Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat	- Pendapatan masyarakat masih rendah	- Pendidikan dan keterampilan masyarakat rendah - Minimnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha - Produktivitas kerja rendah - Minimnya permodalan usaha
		- Masih tingginya angka kemiskinan	- Layanan dasar bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi) masih terbatas - Rendahnya pendidikan dan keahlian masyarakat untuk berusaha secara mandiri - Belum maksimalnya pelaksanaan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
5	Kualitas sumberdaya manusia masih rendah	- Masih rendahnya kualitas pendidikan dasar	- Kualifikasi tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar masih rendah. - Sarana dan prasarana masih membutuhkan banyak pembenahan - Distribusi guru kurang merata di setiap sekolah berdasar kompetensi. - Partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih kurang
		- Masih rendahnya kualitas derajat Kesehatan masyarakat	- Rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan - Minimnya sarana dan prasarana Kesehatan - Partisipasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan PHBS masih rendah - Masih terdapat kasus balita gizi buruk - Cakupan Jaminan Kesehatan masyarakat masih belum optimal
6	Minimnya fasilitasi infrastruktur dasar dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung daya saing daerah	- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat dan sarana prasarana publik lainnya	- Minimnya fasilitasi bagi mekanisme Kerjasama daerah dalam mengatasi keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur publik - Keterbatasan SDM pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur - Minimnya lahan untuk penyediaan infrastruktur publik

			- Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas public - Masih minimnya cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat (air minu dan sanitasi layak)
		- Belum optimalnya penataan kawasan kota	- Belum optimalnya penegakan perda RTRW terhadap bangunan liar dan pedagang kaki lima - Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan ketertiban umum
		- Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Minimnya sarana dan prasarana pengeloaan sampah dan limbah - Minimnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial dan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat	- Belum optimalnya penanganan keamanan dan ketertiban umum	- Masih adanya potensi demo yang berakhir ricuh di tengah-tengah masyarakat - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. - Belum optimalnya cakupan pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - Terbatasnya kemampuan personil Satpol PP - Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
		- Sistem pemberda-yaan masyarakat belum optimal	- Peran Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat belum optimal - Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menjadi mandiri - Belum optimalnya pelaksanaan pengarus-utamaan gender
		- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga	- Masih rendahnya cakupan PMKS yang tertangani - Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak

			- Masih belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaran urusan pemerintahan berdasarkan evaluasi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

4.1.2.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- Angka putus sekolah masih tinggi meski cenderung menurun; pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, tetapi masih terdapat 0,2 persen siswa SD dan 2,73 persen siswa SMP yang putus sekolah, bahkan angka putus sekolah jenjang SMA mencapai 28,78 persen.
- Belum meratanya akses pendidikan. (APK, APM dan angka melanjutkan sekolah)
- Masih rendahnya kualifikasi guru dilihat dari tingkat pendidikannya; berdasarkan data eksisting dari sejumlah 691 orang guru SD, masih terdapat 96 orang yang belum memenuhi kualifikasi D.IV/S.1, sedangkan dari sejumlah 752 orang guru SMP terdapat 45 orang yang belum memenuhi kualifikasi D.IV/S.1.
- Belum meratanya distribusi tenaga kependidikan; sekolah dengan jumlah peserta didik paling banyak adalah SDN 132406 sebanyak 729 orang, sedangkan jumlah peserta didik paling sedikit adalah SDN 138429 sebanyak 72 orang.
- Belum terpenuhinya guru mata pelajaran dan guru kelas untuk tingkat SD dan SMP baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Masih rendahnya kompetensi Kepala Sekolah dilihat dari kepemilikan Nomor Unik Kepala Sekolah. Saat ini jumlah kepala sekolah pada jenjang SD dan SMP sebanyak 137 orang dengan jumlah kepala sekolah yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah sebanyak 70 orang atau sebesar 51,09 persen.

b. Kesehatan

- Angka harapan hidup masih rendah; angka harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 63,27 tahun berada di bawah rata-rata usia harapan hidup provinsi mencapai 64,02 tahun dan secara nasional mencapai 71,47 tahun.
- Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum terpenuhi.
- Capaian SPM bidang Kesehatan rendah; salah satu indikator pencapai SPM bidang kesehatan adalah indikator Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar yang hanya mencapai 9,60 persen dan indikator Pelayanan Kesehatan pada usia produktif yang juga hanya mencapai 26,90 persen.
- Kasus balita gizi buruk masih tinggi; rendahnya capaian SPM dilihat dari indikator Pelayanan Kesehatan balita yang hanya mencapai 51,62 persen menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kasus balita gizi buruk mencapai 34 kasus.
- Kurang representatifnya keberadaan RSUD dalam memberikan layanan kesehatan

- Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat masih rendah; capaian indikator ini hanya mencapai 23,3 persen pada tahun 2020.
- Kompetensi petugas Kesehatan masih kurang; berdasarkan data eksisting jumlah dokter ahli di Kota Tanjungbalai hanya mencapai 6 orang.

c. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
   - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik yang mendukung daya saing daerah; panjang jalan dalam kondisi baik merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat menghambat lancarnya arus barang dan jasa, capaian jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 69,70 persen dan Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk hanya mencapai 1,19 persen.
   - Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan; ditunjukkan dengan indikator Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air masih mencapai 0,20 persen.
   - Belum terpenuhinya ketersediaan RTH; secara kebutuhan kota, luas RTH harus memenuhi kebutuhan sebesar 30 persen dari luas kota, Kondisi saat ini Kota Tanjungbalai hanya memiliki RTH sebesar ± 20 persen dari luas kota.
   - Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang; dilihat masih banyak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam tata ruang.

d. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
   - Belum optimalnya penataan kawasan kumuh perkotaan; masih terdapat lingkungan pemukiman kumuh di Kota Tanjungbalai sebesar 23,62 persen, padahal permukiman yang tertata dengan baik dapat menunjang peningkatan kualitas ekologis, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial budaya.
   - Belum maksimalnya upaya pemenuhan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah; permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia tetapi indikator Rasio Rumah layak huni hanya mencapai 0,14.
   - Belum terpenuhinya ketersediaan air bersih; sumber air utama untuk mandi dan cuci yang berasal dari leding sebesar 9,88 persen dan sumur bor sebesar 20,71 persen.

e. **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat**
   - Belum adanya pengembangan sistem pengamanan lingkungan online; sistem ini untuk membantu petugas keamanan serta warga lingkungan untuk melakukan monitoring lingkungan sekitarnya dari kemungkinan gangguan kejahatan. Sistem ini belum ada yang terbangun karena keterbatasan anggaran
   - Belum optimalnya penanganan pengendalian kenyamanan dan keamanan lingkungan serta penegakan perda; persentase penegakan perda hanya mencapai 66 persen
   - Masih terbatasnya fasilitasi untuk penanganan kebakaran; jumlah armada pada damkar hanya berjumlah 7 buah dengan kondisi kurang laik
   - Masih tingginya angka kriminalitas; berdasarkan data dari kepolisian, jumlah tindakan kriminalitas yang terjadi selama tahun 2010 sebanyak 570 kasus
   - Masih minimnya peran masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik dan semangat kebangsaan

- Masih tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba; letak posisi Kota Tanjungbalai yang strategis karena jalur pelabuhan sangat berpotensi terhadap penyaluran narkoba. Jumlah kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan aparat kepolisian selama tahun 2020 sebesar 148 kasus
- Masih tingginya jumlah unjuk rasa terkait dengan kebijakan daerah dan permasalahan ekonomi; selama tahun 2020 tekah terjadi demonstrasi berkaitan politik dan ekonomi sejumlah 41 kali
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Belum optimalnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- Belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana.
- Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.
- Terbatasnya akses evakuasi karena tingkat kepadatan permukiman penduduk dan minimnya ruang terbuka publik.

f. **Sosial**
- Masih rendahnya cakupan layanan kepada PMKS; persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial sebesar 23,51 persen
- Kurang optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi sosial berbasis individual
- Belum maksimalnya kegiatan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemberian bantuan jaminan sosial; program updating data terpadu kesejahteraan sosial telah direncanakan selama dua tahun terakhir, tetapi dibatalkan karena adanya refocusing anggaran
- Masih terbatasnya fasilitas untuk penyandang disabilitas
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung capaian indikator SPM bidang sosial yang memadai.

4.1.2.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

a. **Tenaga Kerja**
- Masih rendahnya lapangan kerja tersedia; berdasarkan data eksisting diketahui bahwa rasio daya serap tenaga kerja sebesar 8 orang tiap perusahaan.
- Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
- Masih rendahnya cakupan kepemilikan jaminan sosial; persentase RT yang memiliki jaminan sosial jenis jaminan pensiun sebesar 6,19 persen dan asuransi/PHK sebesar 5,90 persen

b. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Masih lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point) dan rendahnya pemahaman perencana dalam Menyusun PPRG
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Belum optimalnya layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- Kurang optimalnya implementasi kota layak anak.
- Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah

c. Pangan
   - Semakin menurunnya ketersediaan pangan; ketersediaan pangan mengalami penurunan produksi dan luas panen dari sejumlah 24.067 pada tahun 2019 menjadi 18.959 pda tahun 2020, sedangkan jumlah penduduk Kota Tanjungbalai setiap tahunnya mengalami peningkatan, artinya tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya
   - Ketergantungan pangan pokok beras dan masih minimnya diversifikasi pangan
   - Belum optimalnya strategi stabilisasi harga bahan pokok; perubahan harga kebutuhan pokok masih dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi pada saat hari besar dapat terjadi *volatile* (gejolak) harga kebutuhan pokok rakyat
   - Minimnya pengembangan komoditi hasil pertanian yang berorientasi ekspor.
   - Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih fungsi lahan menjadi areal permukiman.

d. Lingkungan Hidup
   - Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu; penanganan sampah di Kota Tanjungbalai masih sangat perlu perbaikan, pada tahun 2020 persentase sampah yang tertangani masih mencapai 60,37 persen
   - Masih rendahnya kesadaran masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
   - Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup; pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencapai 58,23 dengan kategori kurang baik
   - Belum berjalannya pemantauan kualitas lingkungan terutama terkait limbah yang di sungai; kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi air sungai di Kota Tanjungbalai yang memiliki indeks kualitas air sebesar 55,87 dengan kategori kurang baik

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan terutama akte nikah; persentase pasangan nikah yang memiliki akte nikah sebesar 56,63 persen
   - Masih rendahnya cakupan kerjasama lembaga dalam penggunaan data kependudukan

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR); indikator ini untuk melihat keberhasilan mengendalikan penduduk melalui program KB. TFR Kota Tanjungbalai sebesar 2,96, artinya wanita usia subur secara rata-rata memiliki 3 anak.
   - Belum adanya rumah data di kampung KB sehingga data yang diperoleh belum maksimal
   - Masih kurangnya tenaga medis yang terampil untuk pemasangan alat kontrasepsi MKJP (IUD dan implant)
   - Masih terbatasnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana.
   - Masih terbatasnya dukungan stakeholders dalam pelaksanaan kampung KB; jumlah perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam

pembangunan daerah melalui kampung KB 18 OPD atau sebesar 52,94 persen
- Belum maksimalnya fasilitasi kegiatan bagi BKB, BKR dan BKL.

g. **Perhubungan**
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana jalan; Pada tahun 2020 indikator ini sebesar 0,45, artinya 1 km jalan melayani 0,45 kendaraan
- Belum optimalnya pengaturan arus lalu lintas di jalan raya; pelayanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan masih belumm optimal karena rendahnya ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan
- Tidak optimalnya sarana dan prasarana perhubungan darat maupun sungai; setiap tahun diperlukan revitalisasi terminal penumpang dan fasilitas pendukung, tetapi selama lima tahun terakhir Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai meniadakan kegiatan tersebut karena keterbatasan anggaran

h. **Komunikasi dan Informatika**
- Belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- Belum adanya sistem respon cepat terkait aduan masyarakat terhadap permasalahan pembangunan daerah.
- Masih terbatasnya akses internet di lembaga pemerintahan dan ruang publik; berdasarkan data eksisting proporsi RT yang memiliki akses internet hanya sebesar 52,01 persen

i. **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- Belum maksimalnya pendataan dan pemetaan pelaku UMKM sebagai data base dalam upaya peningkatan kompetensi pelaku usaha UMKM.
- Belum maksimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan.
- Masih terbatasnya kemampuan UMKM dalam hal peningkatan teknologi produksi, peningkatan inovasi produk, design kemasan (design produk) yang belum memenuhi permintaan pasar, pendaftaran merek, penerapan manajemen mutu produk dan manajemen usaha.
- Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah terutama industri produk pangan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan SNI.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk meningkatkan UMKM
- Belum adanya produk UMKM yang berorientasi ekspor

j. **Penanaman Modal**
- Belum optimalnya koordinasi internal dengan OPD teknis; dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerbitkan izin bagi pelaku usaha, Dinas PZTSP berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Akibat koordinasi yang belum optimal pengurusan perizinan sering kurang tepat waktu
- Belum terintegrasinya sistem aplikasi untuk penanaman modal dan perizinan.
- Masalah daya saing daerah yang masih perlu ditingkatkan; daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Salah satu indikator daya saing daerah dapat dilihat dari

Produktivitas daerah yang mengalami penurunan dari 111,15 pada tahun 2019 menjadi 110,64 pada tahun 2020
- Masalah insentif dan disinsentif untuk investasi; sampai saat ini Kota Tanjunbalai belum memiliki Peraturan Daerah yang mendukung investasi
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terkait OSS

k. Kepemudaan dan Olahraga
- Masih minimnya prestasi dibidang olahraga; prestasi olah raga yang diperoleh Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 hanya mencapai 6 cabang olah raga dengan 36 pertandingan
- Masih minimnya prestasi di bidang pemuda;
- Masih minimnya fasilitasi pembinaan pusat kreatifitas dan sanggar seni bagi pemuda.

l. Persandian
- Masih rawannya ancaman keamanan data dan informasi.
- Belum efektifnya penanganan persandian dan keamanan informasi.

m. Kebudayaan
- Belum maksimalnya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Kota Tanjungbalai.
- Belum ada pendataan dan penetapan terhadap keberadaan cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kota Tanjungbalai
- Luntumya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat.

n. Perpustakaan
- Masih rendahnya minat baca masyarakat; Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 68.743 pengunjung menurun menjadi 13.731 pengunjung pada tahun 2020, artinya menurun sebesar 80 persen
- Masih terbatasnya pustakawan untuk operasional perpustakaan; seorang pustakawan sangat diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Keberadaan tenaga ahli tersebut belum ada di Kota Tanjungbalai
- Masih terbatasnya jumlah perpustakaan inisiatif masyarakat, keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perpustakaan dan koleksi buku sangat terbatas, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk membangun perpustakaan

o. Kearsipan
- Masih terbatasnya jumlah tenaga kearsipan; Kota Tanjungbalai tidak memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan arsip
- Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kearsipan.
- Masih rendahnya kapasitas daerah dalam upaya penguatan data base.
- Masih terbatasnya sarana penyimpanan arsip (depo arsip).

4.1.2.3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan
- Rendahnya pengelolaan dan pemasaran produk hasil-hasil perikanan dan kelautan.

- Belum optimalnya pemanfaatan sungai sungai sebagai lahan budidaya perikanan; Pada tahun 2019 indikator ini mencapai 307,90 ton turun menjadi 220,00 ton pada tahun 2020.
- Perlu regulasi khusus dari pemerintah pusat dan prov terkait usaha perikanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai

b. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun terakhir mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai 71.233 orang menurun menjadi 8.221 orang pada tahun 2020. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh:

- Masih minimnya kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata.
- Belum optimalnya pengembangan industri kreatif di bidang pariwisata.
- Masih terbatasnya pengembangan dan promosi objek-objek wisata yang ada serta upaya menciptakan destinasi wisata baru.
- Masalah kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata yang tersedia.

c. Pertanian

- Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih fungsi lahan menjadi areal permukiman.
- Semakin menurunnya produktivitas tanaman pangan; produksi padi sawah pada tahun 2019 mencapai 62 kw/ha, untuk produksi ubi kayu mengalami penurunan signifikan dari 175 kw/ha menjadi 10 kw/ha, sedangkan untuk produksi jagung menurun dari 73 kw/ha menjadi 10 kw/ha.
- Semakin rendahnya produktivitas peternakan; Populasi jenis ternak besar dan ternak kecil di Kota Tanjungbalai terus mengalami penurunan. Ternak besar mengalami penurunan dari 581 ekor menjadi 158 ekor, sedangkan ternak kecil menurun dari 3.569 ekor menjadi 3.342 ekor.
- Belum adanya pertanian yang menghasilkan komoditi berorientasi ekspor

d. Perdagangan

- Belum optimalnya pemanfaatan dan revitalisasi pasar tradisional.
- Belum maksimalnya penataan PKL dan UMKM, sepanjang jalan menuju pusat kota masih sangat banyak dijumpai PKL sehingga mengurangi keindahan dan kebersihan kota.
- Belum adanya pasar tertib ukur; pembentukan pasar tertib ukur bertujuan untuk masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuanta atas barang yang dibeli, tetapi sampai saat ini Pemerintah Kota belum melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Pelayanan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan yang belum optilmal.
- Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

e. Perindustrian

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan infrastruktur untuk pengembangan kawasan strategis industri Kota Tanjungbalai.
- Masih terbatasnya tempat dan event kreatif serta pusat-pusat industri kecil dan menengah.

- Belum adanya ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta penyediaan *co-working space*.
- Belum maksimalnya usaha untuk menumbuhkan wirausaha muda.
- Belum optimalnya usaha untuk menciptakan *city branding*.

4.1.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan
   - Masih terbatasnya personil dan kemampuan teknis aparatur perencana perangkat daerah.
   - Masih ditemukannya ketidaksesuaian (inkonsitensi) dalam penetapan indikator kinerja pada dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
   - Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

b. Keuangan
   - Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah.
   - Masih rendahnya fungsi manfaat aset sebagai sumber pendapatan daerah.
   - Belum optimalnya upaya untuk peningkatan PAD.
   - Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan; Selama lima tahun terakhir, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP), kecuali tahun 2018 mendapat predikat *disclaimer*.
   - Masih rendahnya kapasitas SDM di perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Kepegawaian
   - Masih rendahnya kualitas ASN yang ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks profesionalisme ASN tahun 2019 sebesar 51,0 dengan kategori sangat rendah.
   - Masih rendahnya cakupan ASN yang mengikuti Diklat struktural dan fungsional.
   - Terbatasnya ASN yang memenuhi standar kualifikasi memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan.
   - Belum adanya standar kompetensi dan peta kebutuhan kepegawaian secara profesional.

d. Penelitian dan Pengembangan
   - Belum adanya tenaga fungsional peneliti
   - Terbatasnya Anggaran Penelitian
   - Hasil penelitian belum dijadikan dasar kajian dalam pelaksanaan program kegiatan

e. Fungsi Penunjang Lainnya
   1. Pengawasan
   - Belum tercukupinya SDM untuk jabatan fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan pemerintahan di Daerah (P2UPD).
   - Belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada OPD.
   - Masih kurangnya kesadaran ASN dan pihak ketiga dalam menindaklajuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

2. Pemerintahan umum

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan dan di Kelurahan.
- kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik.
- Semakin memudarnya semangat gotong royong di masyarakat.
- Masih rendahnya nilai IKM terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.
- Database Informasi Kecamatan dan Kelurahan belum terupdate dan tertata rapi.
- Masih belum optimalnya pelaksanaan SAKIP.
- Masih minimnya inovasi pelayanan publik.
- Belum optimalnya cakupan pelayanan pengendalian pembangunan.
- Belum terpenuhinya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa.
- Layanan administrasi perkantoran (persuratan) masih manual.
- Belum maksimalnya fasilitasi layanan keprotokolan.
- Minimnya SDM dan sarana prasarana pendukung standarisasi pelayanan pemerintahan di kecamatan
- Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat strategis.
- Masih minimnya tindak lanjut produk hukum daerah.
- Belum optimalnya pengkoordinasian cakupan pengendalian inflasi daerah.
- Belum optimalnya fasilitasi bagi Perusahaan Daerah.
- Belum optimalnya fasilitasi bagi cakupan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian di masyarakat.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana persidangan, dan ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
- Belum optimalnya akomodir penjaringan aspirasi masyarakat.
- Belum optimalnya fasilitasi pelaporan kinerja DPRD.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal baik suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, Artinya bahwa jika suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan kota sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, sehingga dapat digambarkan beberapa isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

4.2.1. Telaahan Isu Stategis Internasional

Berbagai isu internasional yang bisa menjadi pertimbangan bagi penentuan isu strategis daerah adalah:

4.2.1.1. Isu Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai ketidakpastian. Berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi di sepanjang tahun 2019, seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses penyesuaian (*rebalancing*) ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*.

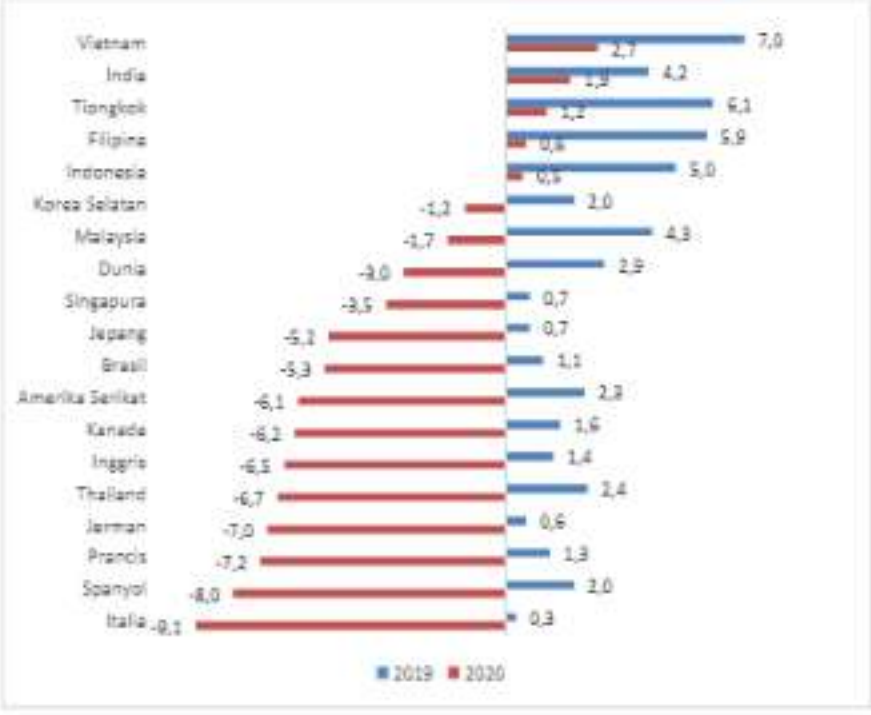
Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok menjadi pemicu dinamika perekonomian global. Selain itu, risiko geopolitik semakin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), kerusuhan yang berkepanjangan di Hongkong, Iran dan Irak turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi dunia. Kondisi global yang kurang kondusif tersebut menurunkan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2019, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%. Namun, pada tahun 2020, diperkirakan kondisi perekonomian global semakin membaik dan dapat tumbuh sekitar 3,3%.

Harapan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang lebih tinggi mulai terlihat pertengahan Desember 2019, ketika dilaporkan AS-China telah setuju untuk fase pertama damai dagang. Kondisi ini membuat IMF sedikit lebih optimis untuk 2020 dengan pertumbuhan 3,4 persen melebihi pertumbuhan ekonomi global 3,0 persen seperti di tahun 2019. Seluruh lembaga internasional melakukan proyeksi bahwa perekonomian dunia akan lebih baik yang kemudian ditandai dengan meningkatkan harga minyak dunia, batubara dan komoditas. Indonesia sebagai negara eksportir komoditas yang dibutuhkan negara-negara di dunia ikut memproyeksikan pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 5,3% tahun 2020.

Optimisme perbaikan ekonomi global di tahun 2020 mulai runtuh ketika diberitakan bahwa telah berkembangnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei, Cina. Wabah Covid-19 mulai merebak ke dunia Februari 2020. Ketika wabah ini berjangkit di hampir seluruh negara di dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya menjadi pandemi pada Bulan Maret 2020. Dampak yang dihasilkan dari virus corona tidak hanya meresahkan pada keselamatan nyawa manusia, disamping itu membawa dampak lainnya yang berimbas ke berbagai aspek yang seakan-akan saling mengikat menjadi satu kesatuan yaitu perekonomian.

Dampak Virus Covid-19 (Corona) terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Banyak negara yang sudah mengambil kebijakan menutup diri (*lockdown*) sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi ini sebagai antisipasi merebaknya virus Corona yang semakin cepat terutama di Eropa dan Amerika. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga dijangka akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan global dapat terkontraksi hingga 0,9% tahun ini atau terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008-2009. Lembaga internasional lainnya Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 sebesar -1,1%, dan The

Economic Intelligent Units memproyeksikan resesi ekonomi dunia mencapai -2,2%. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Tahun 2020, IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3%. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9%. Sejalan dengan proyeksi tersebut, Asian Development Bank (ADB) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. **Ekonomi Indonesia** diperkirakan tumbuh **2,5%** pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona. Meski Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian Indonesia, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri.



Gambar 4.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia
Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19

Sumber: IMF

Untuk pertama kalinya sejak *great depression* atau depresi besar (1929 – 1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (*emerging market*), berada dalam situasi yang sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak negara mengalami multikrisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks. Tak satu negara pun bisa terhindar dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Negara-negara yang mengandalkan pariwisata, perjalanan, dan hiburan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi akan menghadapi disrupsi besar.

Prospek perekonomian global untuk tahun 2020 masih tergantung dari penangangan dampak Covid-19 terhadap kesehatan telah tuntas. Jika wabah Covid-19 dapat dituntaskan pada kuartal II 2020, maka perekonomian dunia akan membaik dan gelombang krisis dapat dihindari, namun jika berlanjut hingga semester II, maka tidak ada satupun negara di dunia yang terhindar dari krisis ekonomi. Meski demikian, jika pandemi bisa diatasi pada semester II-2020 dan kebijakan yang dilakukan di seluruh dunia efektif mencegah kebangkrutan usaha, menjaga kehilangan pekerjaan, dan menopang sistem keuangan, maka pertumbuhan ekonomi 2021 akan berbalik positif ke arah 5,8 persen.

4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic-Security Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun Blue Print MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :

Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan

upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP).

Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.2.2. Telaahan Isu Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: Pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu: Manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1). Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2). Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3). Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Wll-being*); 4). Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5). Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); 6). Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7). Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8). Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure); 10). Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable Cities and*

Communities); 12). Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production)*; 13). Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action)*; 14). Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water); 15). Kehidupan di Darat (*Life on Land)*; 16). Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions)*; 17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Berdasarkan tujuan tersebut, Kota Tanjungbalai memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan di Kota Tanjungbalai.

4.2.3. Telaahan Terkait Isu Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai, berikut ini adalah isu-isu nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota Tanjungbalai, yaitu:

4.2.3.1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri, dan perumahan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasanana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan juga belum optimal karena masih didominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi tradisional.

Tantangan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan peraturan daerah yang terpisah. Salah satu permasalahannya berkaitan dengan belum tersedianya pedoman penyelerasasn RZWP3K dan RTRW Provinsi.

Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien. Terdapat gap yang besar antara intensitas energi primer (500 SBM/miliar Rupiah) dan energi final (325 SBM/miliar Rupiah). Selain itu, pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri belum maksimal. DMO batubara saat ini baru mencapai 23,5 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

Isu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energi lainnya yang perlu ditangani yaitu (1) kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; (2) inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi; (3) kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; dan (5) konsumsi energi yang belum efisien. Penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan potensi penghematan sekitar 30,0 persen dari penggunaan energi saat ini.

4.2.3.2. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fintech*, dan pengembangan UMKM seiring dengan berkembangnya *e-commerce*.

Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang

ditunjukkan oleh *Network Readiness Index* (NRI), Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2017 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari 63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

4.2.3.3. Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada jawa dan sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah.
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang.
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.

4.2.3.4. Revolusi Mental

Revolusi mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan Lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan

berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain,

Di era kini, revolusi mental dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem Pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Sedangkan lingkungan dan isu strategis terkait revolusi mental diantaranya meliputi: 1) Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa; 2). Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; 3) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti; 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama; 5) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan serta 6) Belum optimalnya peran keluarga rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Khusus isu tentang masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-niai ajaran agama belun terpenuhinya cakupan pelayanan kegamaan yakni belum semua kecamatan di Indonesia memiliki KUA (82,04 persen) atau 5.820 kecamatan dari 7.094 kecamatan. Perkiraan potensi zakat sebesar Rp 286 triliun baru terserap sebesar Rp. 6 triliun dan Indeks Kerukunan Ummat Beragama menurun dari sebesar 75,4 di tahun 2015 menjadi sebesar 73,8 di tahun 2019.

4.2.4. Telaahan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Adapun isu-isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang menjadi landasan dalam perumusan isu-isu strategis dan visi misi pembangunan Kota Tanjungbalai kedepan adalah :

4.2.4.1. Ketimpangan

Kondisi ketimpangan di Sumatera Utara dapat dilihat dari indikator Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2013-2017 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Untuk tahun 2013, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,354 dan terjadi penurunan nilai gini ratio pada tahun 2014 menjadi 0,321. Akan tetapi pada tahun 2015, gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,336 dan kondisi ini terjadi juga pada tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maka nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,315.

4.2.4.2. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 9,28 persen terhadap total penduduk. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

4.2.4.3. Pengangguran

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 6,74 juta jiwa yang terdiri dari 6,37 juta jiwa bekerja dan sebesar 377 ribu jiwa pengangguran. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan yaitu 37,52 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sebesar 22,16 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa Kemasyarakatan yaitu sebesar 17,26 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 9,03 persen. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan.

Pada Tahun 2017 persentase angkatan kerja di Sumatera Utara dengan pendidikan yang ditamatkan sebagian besar berpendidikan Diploma dan Sarjana. Persentase golongan ini mencapai 87,77 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masing-masing sekitar 71,46 persen dan 78,38 persen, sedangkan 78,94 persen berpendidikan SMA. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara hanya 68,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan/skill yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 4.441 orang yang mana didominasi oleh Pencari Kerja tamatan SMA sebanyak 2.889 orang dan Sarjana sebanyak 684 orang. Hal ini mengindikasikan kurangnya penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat maupun informasi terhadap pasar kerja yang belum memadai. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perlu juga terwujudnya kemudahan berbisnis dan upaya pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Sumatera Utara cukup baik pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

4.2.5. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Penelahaan terhadap RPJMN dimaksudkan untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN dimana pemerintah daerah harus menyeleraskan dengan kebijakan dimaksud. Tujuan pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Tema pembangunan yang dipilih untuk RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang secara garis besar akan diwujudkan melalui upaya peningkatan iklim investasi, peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, menurunkan ketimpangan dan memperhatikan daya dukung dan daya tamping.

Sementara isu-isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 yang harus dipedomani dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah 1) Isu Pembangunan manusia yang meliputi pelayanan dasar serta SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 2) Isu pembangunan ekonomi yang meliputi pangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital, industry; 3) Isu pembangunan kewilayahan yang meliputi sentra-sentra pertumbuhan, komoditas Unggulan daerah; 4) Isu pembangunan Infrastruktur yang meliputi: transportasi, telekomunikasi, produktifitas tenaga kerja meningkat, daya air perumahan dan pemukiman dan 5) Pembangunan politik.

Selanjutnya arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan adalah: Pembangunan Manusia yakni pembangunan manusia yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial; serta sumberdaya berkualitas dan berdaya saing; 2) Pembangunan ekonomi yakni: Pembangunan ekonomi yang dimplimentasikan melalui pembangunan sector pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, digital, industry; 3) Pembangunan kewilayahan yakni pembangunan kewilayahan diupayakan dengan membangun sentra-sentra pertumbuhan dan komoditas unggulan daerah; 4) Pembangunan Infrastruktur yakni: Pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui peningkatan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, perumahan dan permukiman serta 5) Pembangunan politik yakni pembangunan yang dilakukan dengan perbaikan dan penegakan hukum serta regulasi, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan politik yang baik dan sehat.

4.2.6. Telaahan Terhadap RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

Telah dijelaskan di awal bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan perencanaan di berbagai sektor pembangunan termasuk rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Salah satu fungsi RTRW Kota Tanjungbalai adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun dan program tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW yang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya dengan cara menelaah rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan terhadap Kawasan strategis pemanfaatan ruang.

4.2.6.1. Rencana Struktur Ruang

Telaahan terhadap struktur ruang dilakukan dengan melihat keterkaitan antara rencana struktur ruang dengan arahan pemanfaatan ruang, yang merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program.

Adapun program perwujudan rencana struktur wilayah Kota Tanjungbalai terdiri dari :

a. Indikasi program pengembangan untuk perwujudan sistem pelayanan kegiatan kota yang merupakan sebagai perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota;

b. Indikasi program pembentuk sisitem pelayanan kota terhadap pembentukan ruang, seperti dalam perwujudan pusat pelayanan kota; sub pusat pelayanan kota; dan pusat lingkungan sehingga akan mewujudkan dalam kegiatan terdiri dari rencana pembangunan RTH pada bagian-bagian tertentu jalur rel kereta api, alih fungsi pasar menjadi RTH Kota, relokasi pasar, relokasi permukiman di sepanjang bantaran Sungai Asahan, rencana pembangunan sarana olah raga terpadu, peningkatan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan,

c. Pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya yang mengindikasikan beberapa program antara lain : untuk perwujudan sistem jaringan energi; perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan infrastruktur kota lainnya.

Hasil telaahan struktur ruang dan pemanfaatannya pada periode 5 (lima) tahunan tertera pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Kota Tanjungbalai

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				lima tahun ke-1	lima tahun ke-2	lima tahun ke-3	lima tahun ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota	I.1 Pusat Pelayanan Kota					
		A Perencanaan Tata Ruang	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
		B Revitalisasi pusat - pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan kota	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 4	√			
		C Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyusunan Perda Kawasan Strategis	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
		D Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
		E Pembinaan Pembangunan Daerah	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4				
		F Pengembangan Wilayah	SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√

			Strategis dan Cepat Tumbuh					
		G	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		I.2	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)					
		A	Pembangunan infrastruktur pada sub pusat pelayan kota	SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		B	Peningkatan fungsi dan jaringan angkutan penghubung antara pusat pelayanan kota dgn sub pelayanan kota	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		C	Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyusunan Perda RDTR	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
		I.3	Pusat Lingkungan					
		A	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	SPPK 1,2,3	√	√	√	√
		B	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4				
II.	**Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kota**	II.1	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi					
		A	Peningkatan sarana dan prasarana jaringan jalan antara pusat pelayanan kota	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		B	Pembangunan dan Peningkatan	Pusat Pelayanan	√	√	√	√

		Jalan dan Jembatan Perkotaan	Kota, SPPK 1,2,3,4				
		C Pembangunan jalan dan jembatan pada sub pusat pelayanan kota sebagai peningkatan aksesibilitas penghubung hirarki pusat pelayanan kota	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,3,4	√			
		D Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Perkotaan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
		E Penyelenggaraan dan Pengelolaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 2,4	√	√	√	√
		F Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		G Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 3,4	√			
		II.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan					
		A Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		B Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		II.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan					

			Prasarana Telekomunikasi					
		A	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
		B	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		II.4	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air					
		A	Pengelolaan Sumber Daya Air	SPPK 1,2, 4	√			
		B	Penyedian dan pengelolaan air baku	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,3	√			
		C	Pengembangan /Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	SPPK 1,2,	√			
		II.5	Rencana Pengembangan Infrastruktur Kota					
		A	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		B	Peningkatan Pengendalian Air Limbah	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		C	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		D	Peningkatan dan Pengelolaan Drainase	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
		E	Pembinaan dan penataan pedagang kaki	Pusat Pelayanan Kota	√			

		lima dan asongan					
		F Pengembangan dan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki	Pusat Pelayanan Kota	√			
		G Penataan evaluasi dini dalam penanggulangan korban bencana alam	SPPK 1,3	√			
		H Pembinaan dan Penataan Lokasi Serta Jalur Evakuasi Bencana	SPPK 1,2,3	√			

Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

Keterangan:
1. Pusat Pelayanan Kota : Kec. Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara
2. SPPK 1 : Kec. Datuk Bandar
3. SPPK 2 : Kec. Datuk Bandar Timur
4. SPPK 3 : Kec. Sei Tualang Raso
5. SPPK 4 : Kec. Teluk Nibung

4.2.6.2. Rencana Pola Ruang

Telaahan Rencana Pola Ruangi dilakukan dengan melihat keterkaitan antara rencana pola ruang dengan arahan pemanfaatan ruang yang merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama.

Untuk mewujudkan pola ruang wilayah Kota Tanjungbalai yaitu berupa :

a. Program perwujudan pengelolaan kawasan lindung,
   - Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi : penataan sempadan sungai tidak bertanggul diarahkan kurang lebih 50 meter kiri dan kanan sungai; penataan sempadan sungai bertanggul diarahkan kurang lebih 25 meter kiri dan kanan sungai dan penataan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan diarahkan kurang lebih 10 meter pada kiri dan kanan sungai.
   - Indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya seperti penataan dan pelestarian bangunan bersejarah.
   - Indikasi program untuk perwujudan rawan bencana alam.
   - Indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota.

b. Program perwujudan pengelolaan kawasan budidaya,
   - Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan.
   - Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seperti pengembangan kawasan perdagangan di Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota, pengembangan pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan modern diarahkan di Pusat Pelayanan Kota dan disekitar water front di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran seperti pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di SPPK 1/Kelurahan Pahang sedangkan untuk kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu dengan kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan Kota.
- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata seperti kawasan pariwisata di Kota Tanjungbalai diarahkan di SPPK 2 yaitu di Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Pulau Bususen dengan jenis kegiatan pariwisata yaitu wisata sungai.
- Indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka non hijau.
- Indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana.
- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian seperti pengembangan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan di SPPK 1/Kecamatan Datuk Bandar serta tanaman hortikultura diarahkan di SPPK 1/Kecamatan Datuk Bandar dan di SPPK 3/Kecamatan Sei Tualang Raso.
- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang sektor informal.
- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perikanan merupakan pengembangan perikanan budidaya yang meliputi pengembangan budidaya perikanan darat diarahkan di SPPK 2/Kecamatan Datuk Bandar Timur dan budidaya pembibitan benih ikan di SPPK 4/Kecamatan Teluk Nibung.

Hasil telaahan terhadap pola ruang Kota Tanjungbalai dengan rencana pemanfaatan pentahapan pola ruang setiap periode 5 (lima) tahunan disajikan pada Tabel-Tabel berikut.

Tabel 4.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Kota Tanjungbalai

Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
	Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
			lima tahun ke-1	lima tahun ke-2	lima tahun ke-3	lima tahun ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rencana kawasan lindung	I.1 Kawasan perlindungan setempat					
	a Peningkatan ruang perlindungan setempat pada sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	b Penanganan permukiman kumuh sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 4	√	√	√	√
	c Pengendalian Banjir	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√

	d	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	I.2	Kawasan Cagar Budaya					
	a	Pengembangan Nilai Budaya	Pusat Pelayanan Kota	√	√	√	√
	b	Pengelolaan Kekayaan Daerah	Pusat Pelayanan Kota	√	√	√	√
	c	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pusat Pelayanan Kota	√	√	√	√
	1.3	Kawasan Rawan Bencana					
	a	Penanggulangan Bencana	SPPK 1, 3	√			
	b	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
	c	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
	d	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	1.4	Kawasan Terbuka Hijau					
	a	Pengembangan sarana dan prasarana ruang publik sebagai RTH	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	b	Penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh sepanjang rel kereta api	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 4	√	√	√	√
	c	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	d	Peningkatan Pengendalian Polusi	SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	e	Pengelolaan Areal Pemakaman	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis	II.1	Kawasan Perumahan					

	a	Pengembangan lingkungan sehat perumahan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	b	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	c	Peremajaan permukiman kumuh	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 2,3,4	√	√	√	√
	d	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	II.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa					
	a	Peningkatan Fasilitas Pusat Perdagangan Perkotaan	Pusat Pelayanan Kota	√			
	b	Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan di Kecamatan	SPPK 1,2,3,4	√			
	c	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 3,4	√	√	√	√
	d	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 3,4	√	√	√	√
	e	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	II.3	Kawasan Perkantoran					
	a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	SPPK 1,2	√			
	b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	II.4	Kawasan Industri					
	a.	Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Kawasan Industri	SPPK 3, 4	√			
	b.	Peningkatan Kemampuan Kawasan Teknologi Industri	SPPK 3, 4	√	√	√	√
	c.	Peningkatan dan Pengembangan Kepelabuhanan	SPPK 4	√	√	√	√

	d.	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	SPPK 4	√	√	√	√
	II.5	Kawasan Pariwisata					
	a.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	SPPK 1, 2, 4	√	√	√	√
	b.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	c.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	SPPK 1, 2, 4	√	√	√	√
	d.	Pengembangan Kemitraan	SPPK 1, 2, 4	√	√	√	√
	II.6	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau					
	a.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	b.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	II.7	Kawasan Evakuasi Bencana					
	a.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√			
	b.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	c.	Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	II.8	Kawasan Pertanian					
	a.	Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian/ perkebunan	SPPK 1, 2, 4	√			
	b.	Peningkatan Ketahanan Pangan	SPPK 1, 2, 4	√			
	II.9	Kawasan Sektor Informal					
	a.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	b.	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√

	c.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
	II.10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
	a.	Pengembangan Pertahanan dan Keamanan Masyarakat	Pusat Pelayanan Kota,	√	√	√	√
	b.	Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah	Pusat Pelayanan Kota	√	√	√	√
	II.11	Kawasan Perikanan					
	a.	Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	SPPK 2, 3, 4	√			
	b.	Pengembangan dan Peningkatan Budidaya perikanan	SPPK 2, 3, 4	√			
	c.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan lain	SPPK 2, 3, 4	√	√	√	√

Keterangan:

1. Pusat Pelayanan Kota : Kec. Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara
2. SPPK 1 : Kec. Datuk Bandar
3. SPPK 2 : Kec. Datuk Bandar Timur
4. SPPK 3 : Kec. Sei Tualang Raso
5. SPPK 4 : Kec. Teluk Nibung

4.2.6.3. Rencana Kawasan Strategis

Program perwujudan kawasan strategis kota yang diarahkan dan dikembangkan di Kota Tanjungbalai meliputi :

a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
c. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Hasil telaahan terhadap Kawasan Strategis Kota Tanjungbalai dan pola pemanfaatan ruangnya untuk periode 5(lima) tahunan tertera pada Tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Telaahan Kawasan Strategis Kota Tanjungbalai

No	Rencana Kawasan Strategis	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Kawasan Strategis sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				lima tahun ke-1	lima tahun ke-2	lima tahun ke-3	lima tahun ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi	a. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah	SPPK 3, 4	√			
		b. Pengembangan wilayah perbatasan	SPPK 3, 4	√			
		c. Peningkatan iklim investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi	SPPK 3, 4	√	√	√	√
		d. Pengembangan destinasi parawisata	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 2,4	√	√	√	√
		e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai kawasan wisata	SPPK 2	√	√	√	√
		f. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	SPPK 2	√			
		g. Pembinan dan pengawasan bidang pertambangan Galian C	SPPK 1,2,4	√	√	√	√
		h. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Pusat Pelayanan Kota, SPPK 1,2,3,4	√	√	√	√
II.	Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya	a. Pemaduserasian penatagunaan daerah perdagangan dengan daerah cagar budaya	Pusat Pelayanan Kota	√	√	√	√
		b. Pengembangan kawasan konservasi bangunan bersejarah sebagai cagarbudaya	Pusat Pelayanan Kota	√	√	√	√

III.	Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	a. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah	Pusat Pelayanan Kota	√			

Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033

Keterangan:

1. Pusat Pelayanan Kota : Kec. Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara
2. SPPK 1 : Kec. Datuk Bandar
3. SPPK 2 : Kec. Datuk Bandar Timur
4. SPPK 3 : Kec. Sei Tualang Raso
5. SPPK 4 : Kec. Teluk Nibung

4.2.7. Telaahan Terhadap RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Untuk memudahkan penelaahan RPJPD dapat menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD. Hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.5
Capaian Sasaran Pokok RPJPD
Kota Tanjungbalai Tahap III (2015- 2020)

No	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Target Kinerja s.d Periode 2020	Realisasi Kinerja s.d Periode 2015		
				Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya	1. Jumlah konflik SARA	0	√		
2.	Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	1. Opini BPK terhadap LKPD	WTP		√	
		2. Tingkat akuntabilitas kinerja	B	√		
		3. Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	95		√	
		4. Nilai peringkat LPPD	3		√	
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai	1. IPM	69,95		√	
		2. Angka kemiskinan	10,48		√	

		3. Tingkat Pengangguran Terbuka	7,22	√		
		4. Usia Harapan Hidup	64,65		√	
		5. Jumlah kematian Ibu	0		√	
		6. Jumlah kematian bayi	13		√	
		7. Jumlah kematian balita	28		√	
		8. Rata-rata lama sekolah	12,00		√	
		9. Harapan lama sekolah	15,94		√	
4	Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing	1. Pertumbuhan PDRB	6,05%	√		
		2. PDRB ADHB	6,16 T			
		3. PDRB ADHK	10,8 T			
		4. PDRB per kapita ADHB	34,40 jt		√	
5.	Terwujudnya Kota yang Bersih, Indah, dan Aman dengan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	1. Dokumen RTRW	1 dok	√		
		2. Dokumen KLHS	1 dok	√		
		3. Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	77%		√	
		4. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km /Jam)	66,35%		√	
		5. Perentse drainase dalam kondisi baik	65,22%		√	
		6. Luasan RTH publik	1.230,4	√		
		7. Persentase lingkungan permukiman kumuh	23,62		√	
		8. Rumah tangga pengguna listrik	99,12		√	
		9. Rumah tangga bersanitasi layak	86,23		√	
		10. Timbunan sampah yang tertangani	60,37		√	
		11. Indeks kualitas lingkungan hidup	58,23		√	
		12. Pemasangan rambu lalu lintas	66		√	

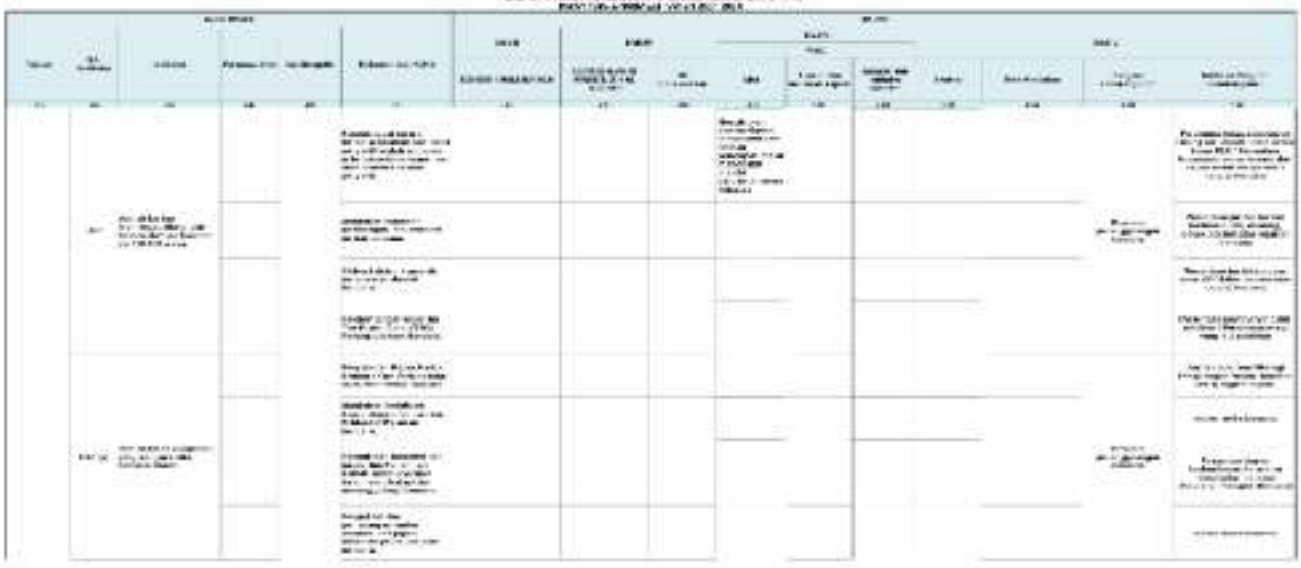
Sumber: Data olahan

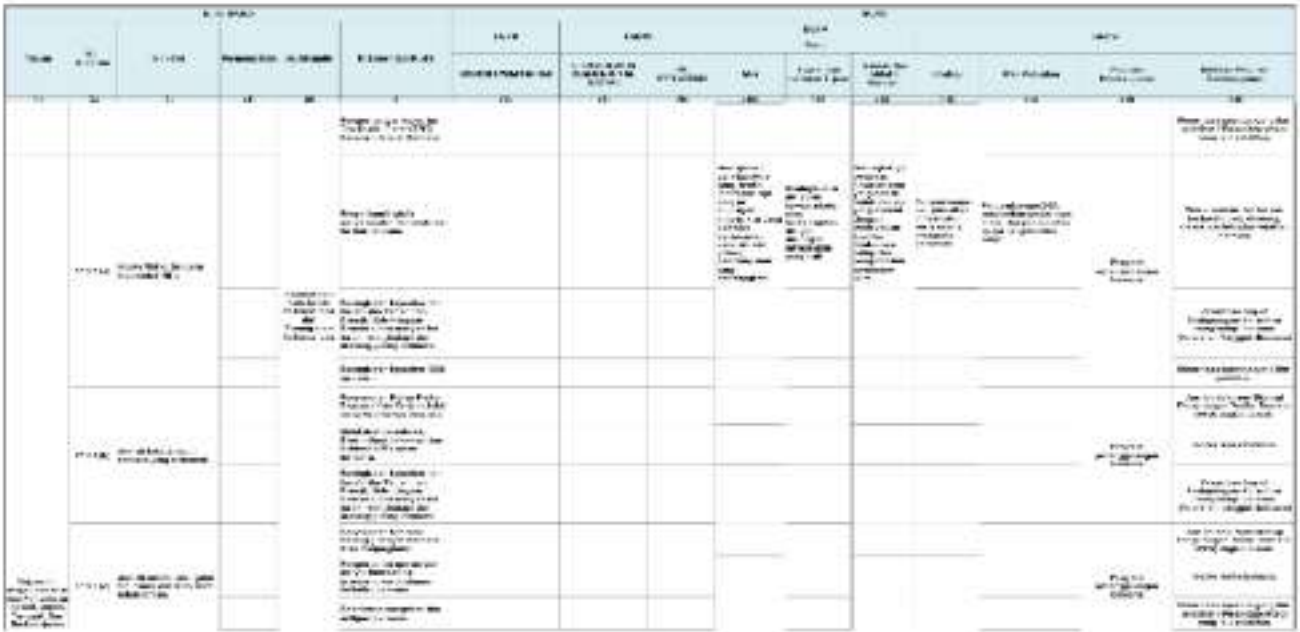
Dari hasil telaahan di atas, diketahui bahwa masih sangat banyak target-target pembangunan per sasaran pokok yang belum tercapai yang tentunya hal ini menjadi pertimbangan bagi penyusunan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya diperlukan upaya dan kerja keras dalam hal mengejar ketertinggalan mengingat bahwa periodesasi RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan periodeasi akhir dari RPJPD Tahun 2005-2025.

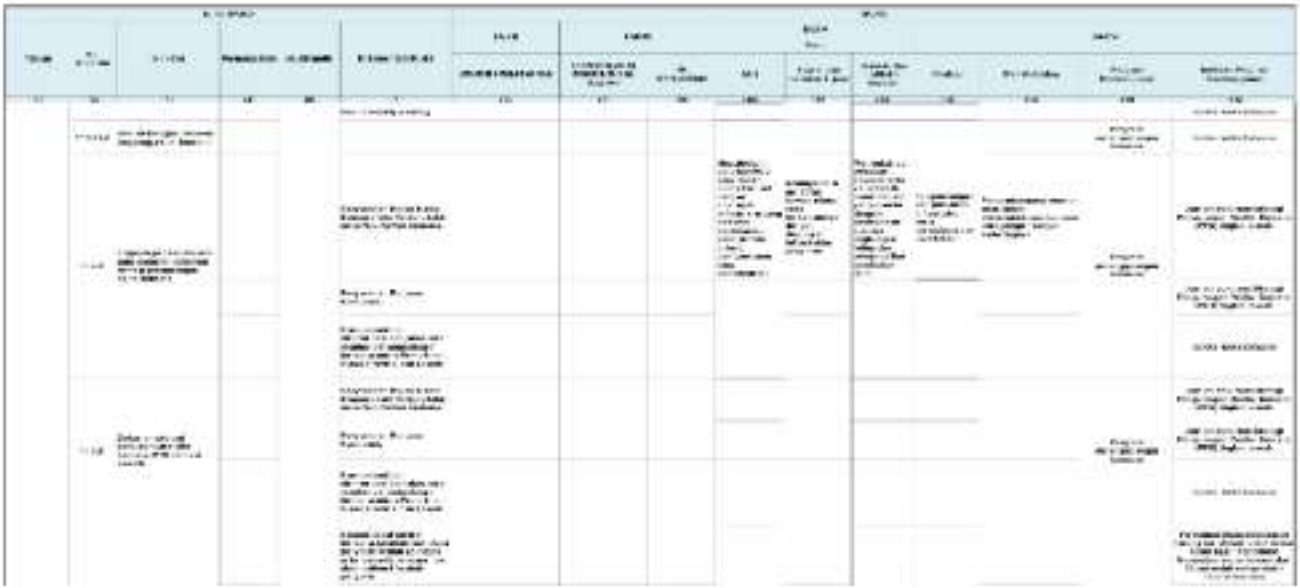
4.2.8. Telaahan Terhadap KLHS

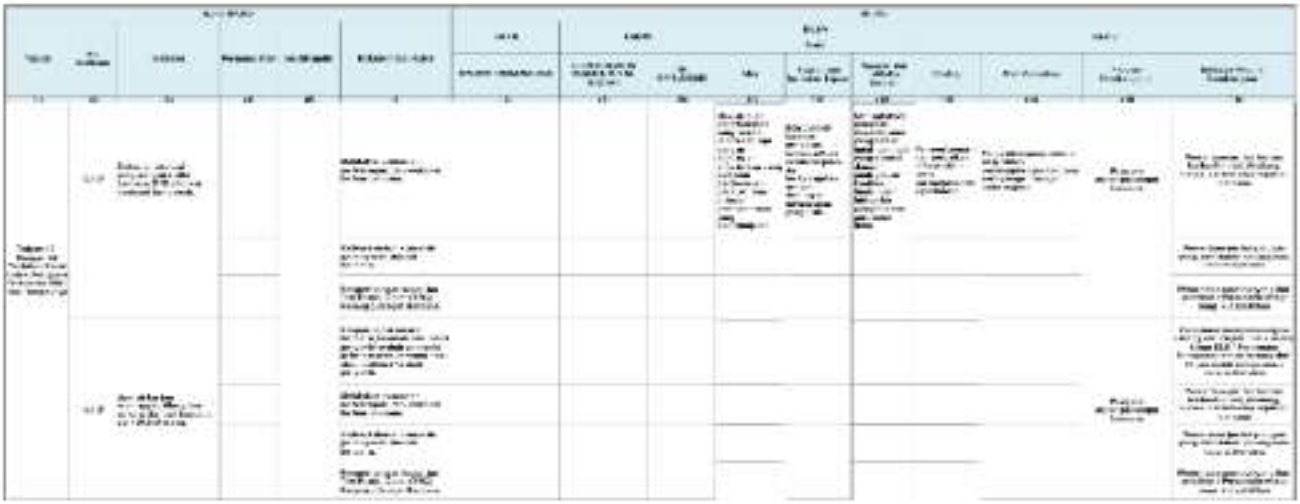
Penelaahan KLHS ke dalam dokumen RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan KLHS–RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS–RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan batasan tersebut penyusunan KLHS-RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021–2026 tidak akan lepas dari indikator dalam TPB, sehingga selain menghasilkan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021–2026, KLHS–RPJMD ini juga menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD– TPB) Provinsi sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

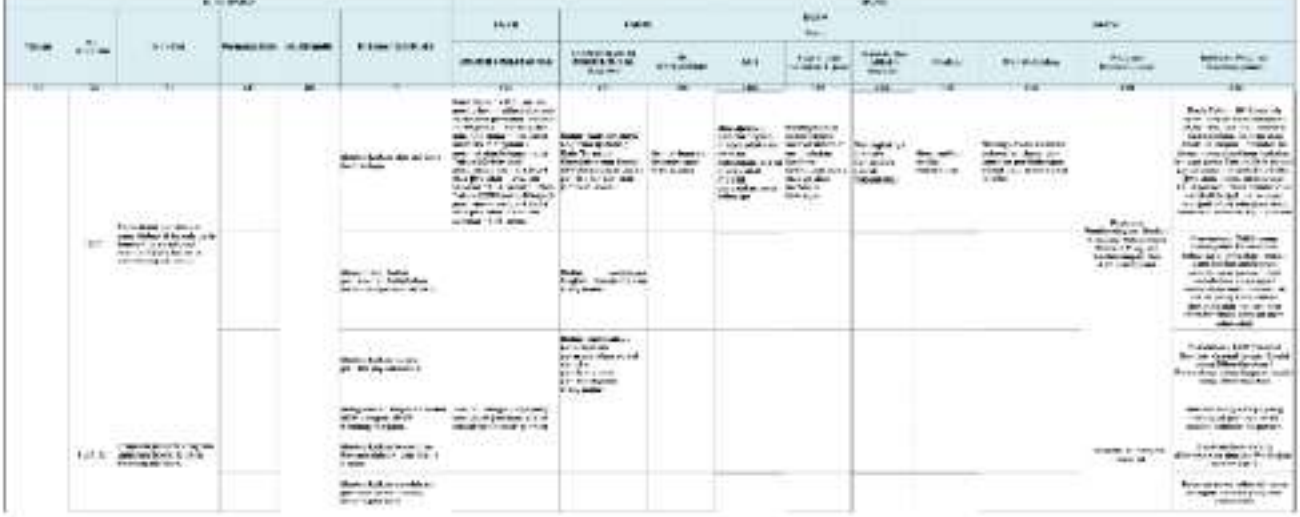
KLHS–RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, karena substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta mengarahkan pencapaiaan TPB. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Jasa Ekosistem terhadap TPB maka diharapkan sumbangan KLHS– RPJMD Kota Tanjungbalai dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam KRP dan mendukung percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) TPB.

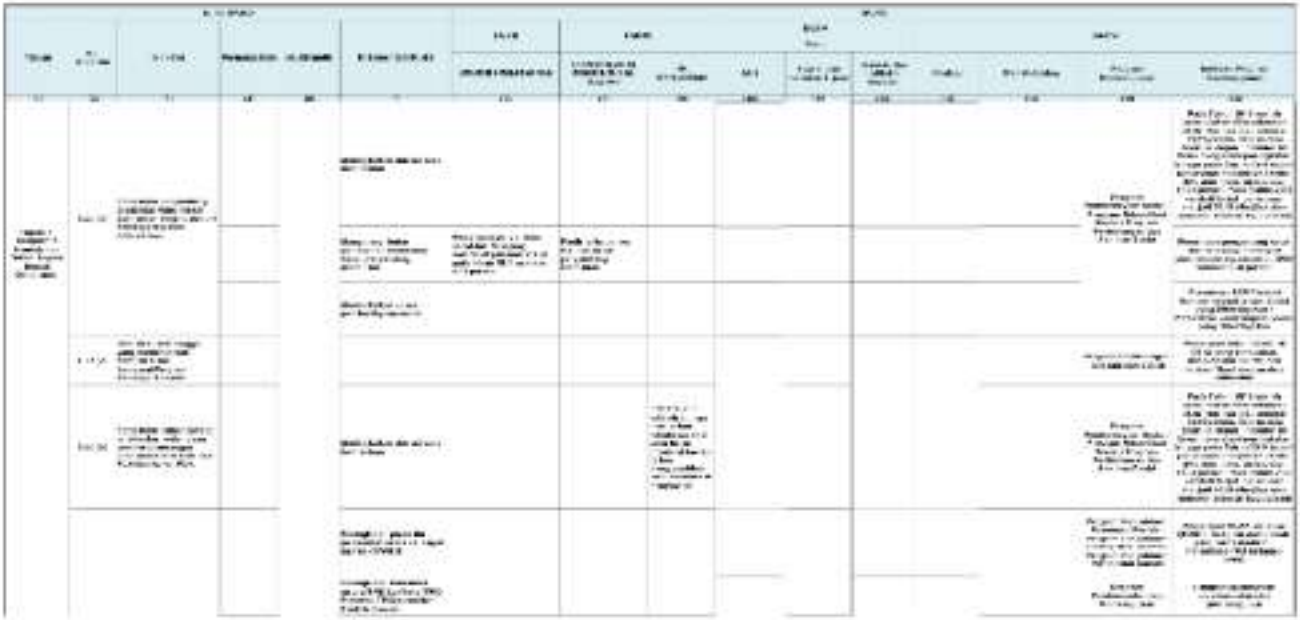


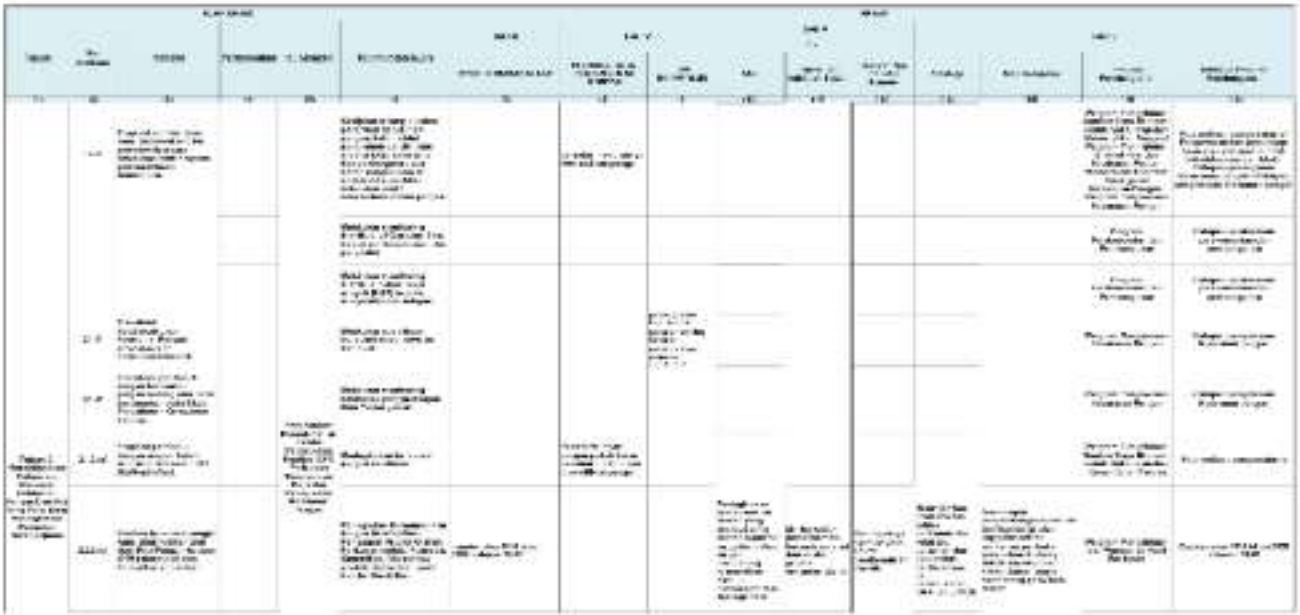


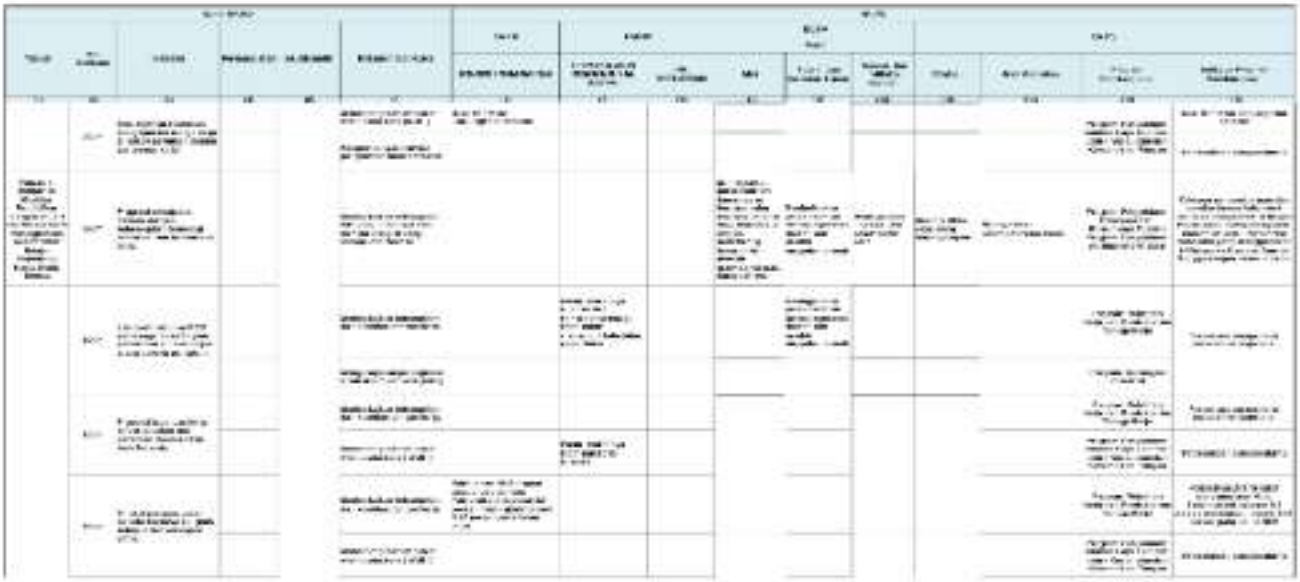


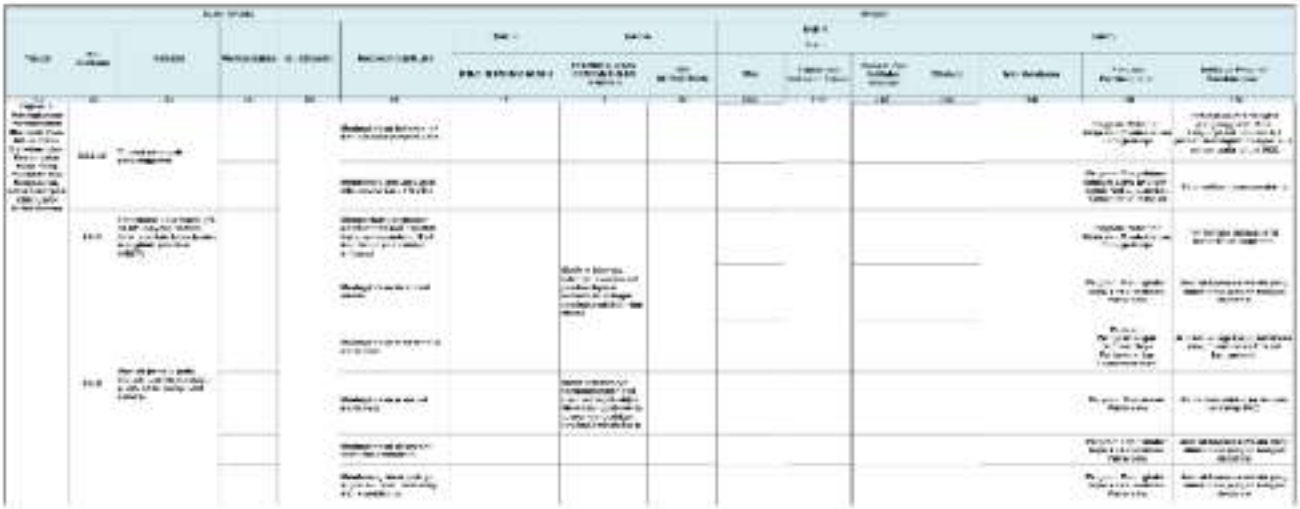


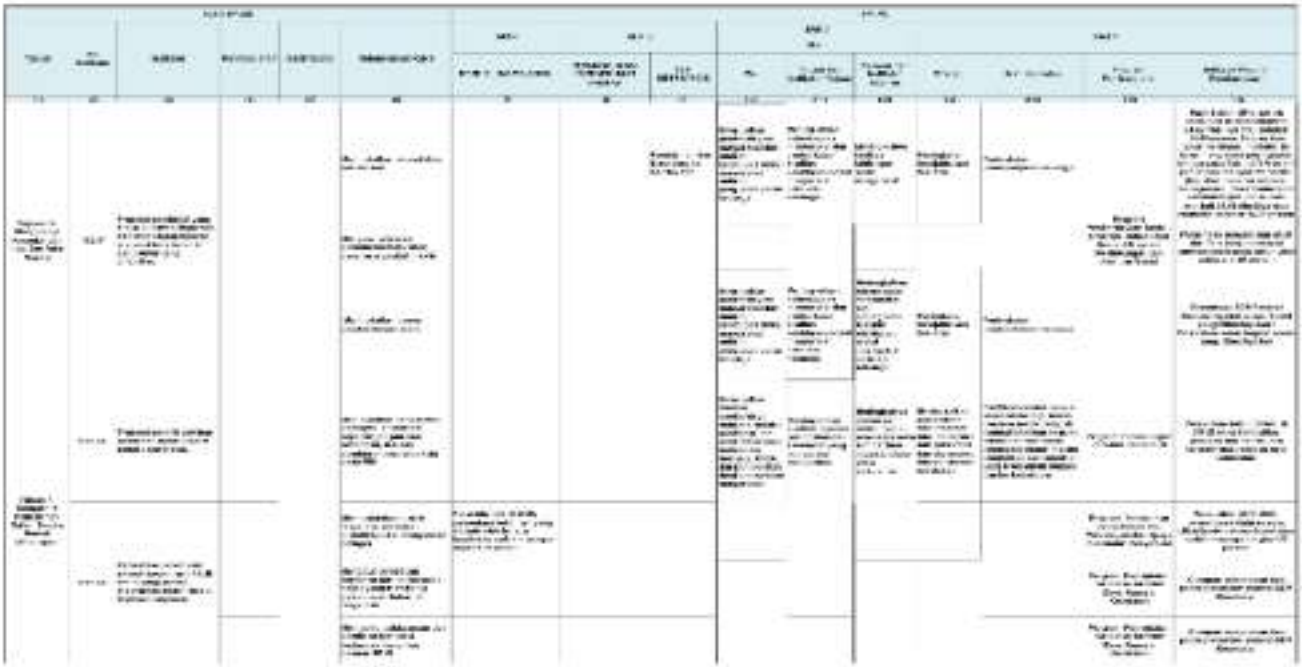


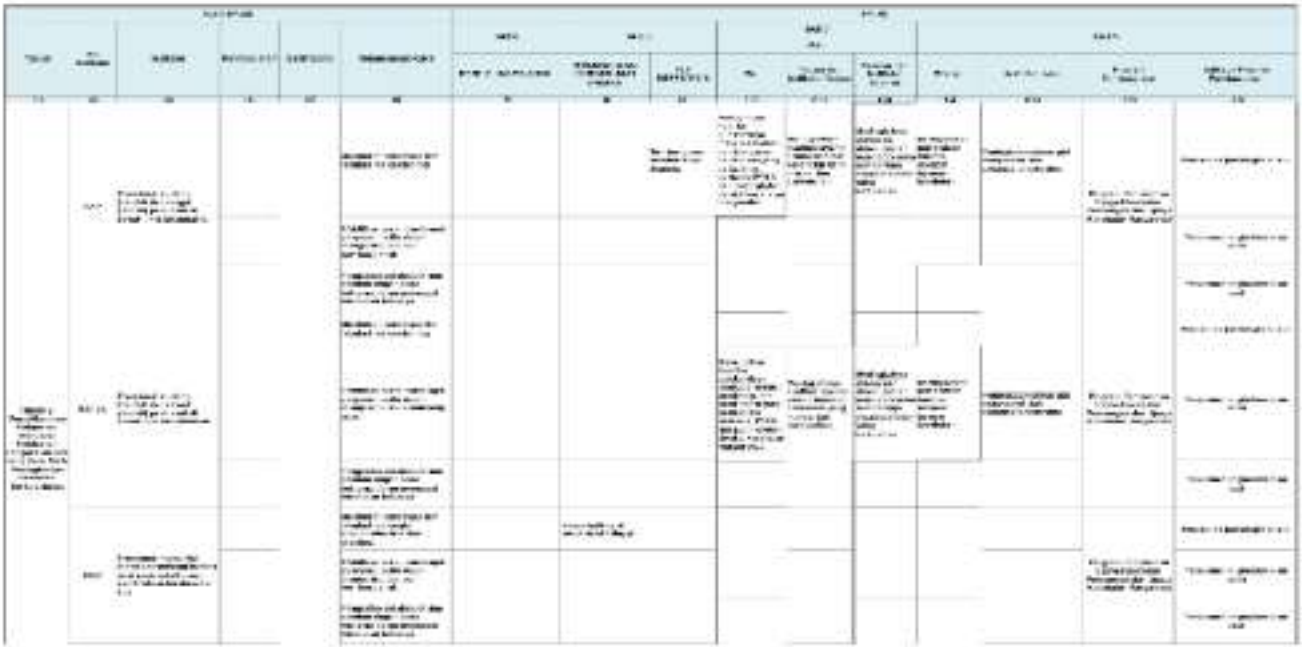




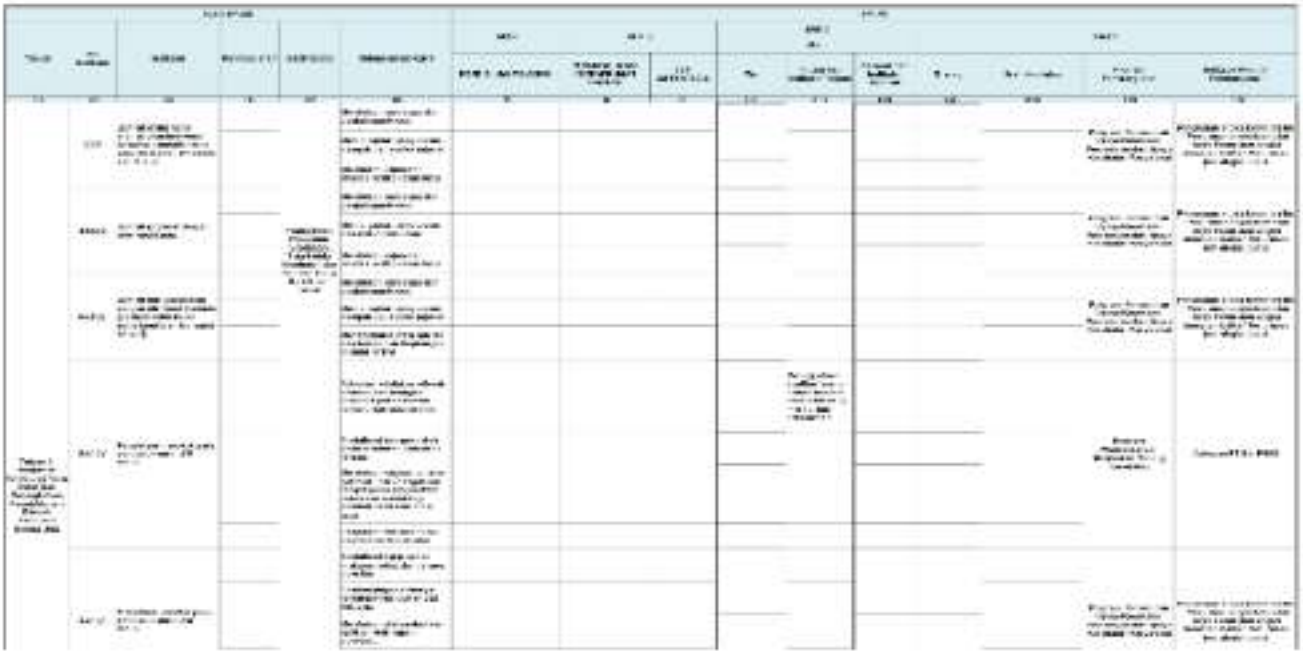




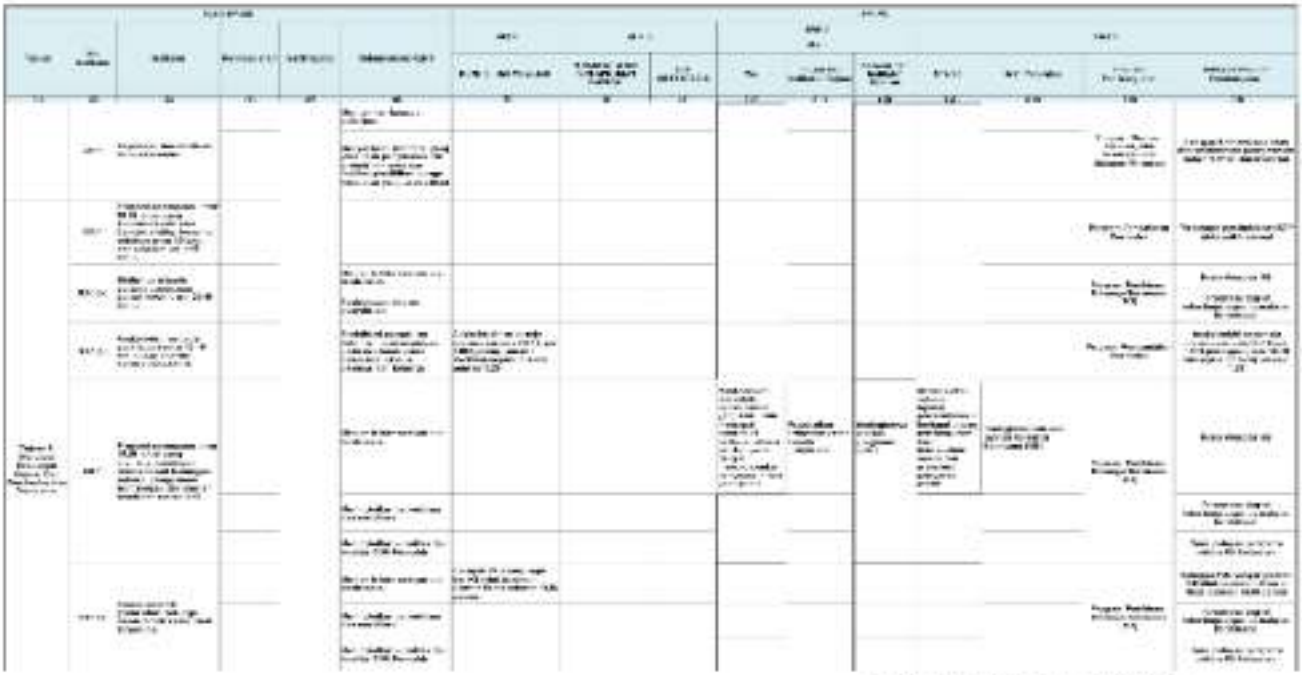


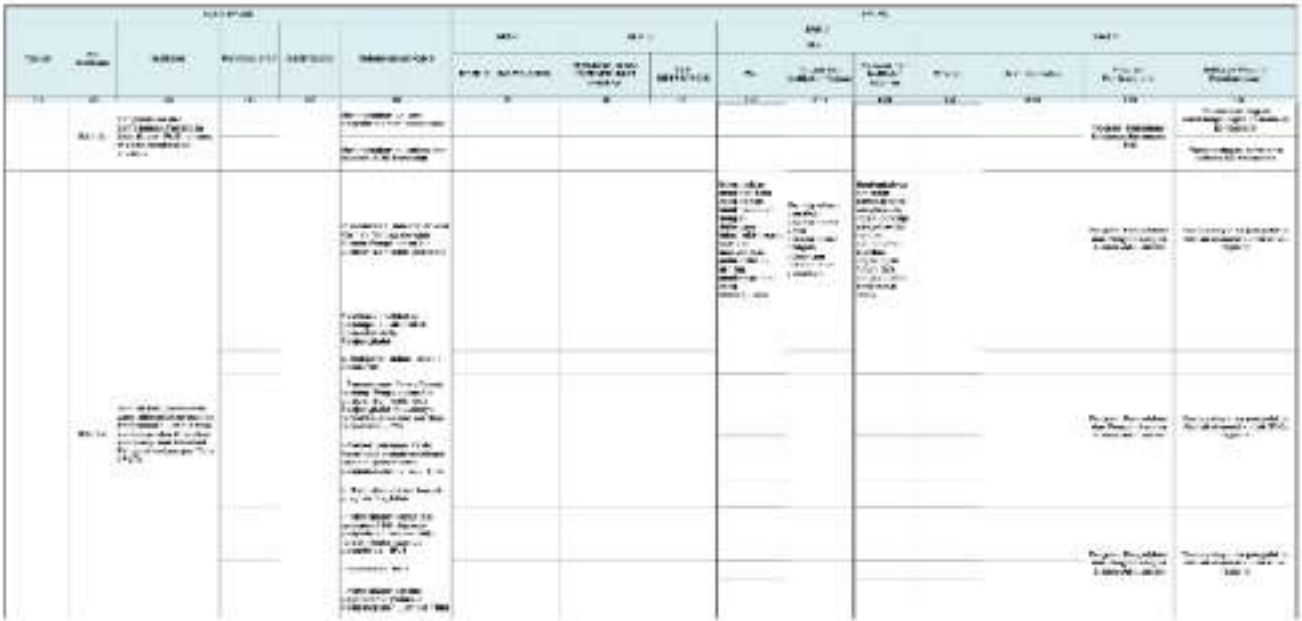


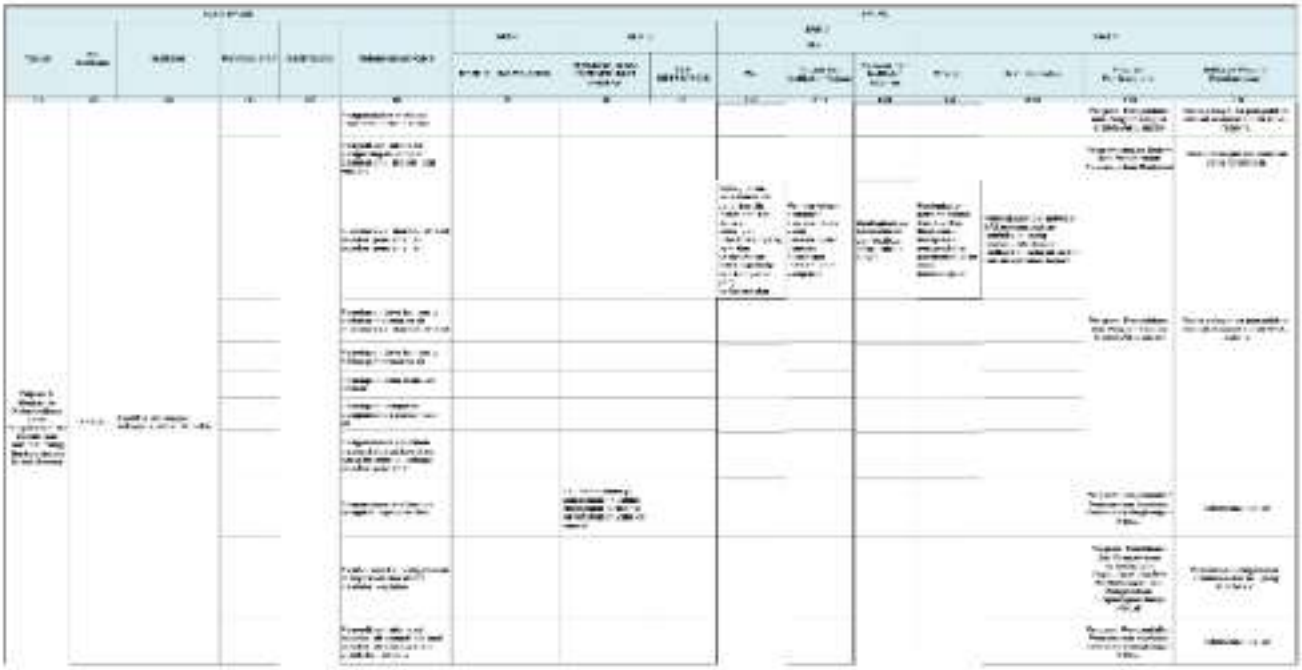


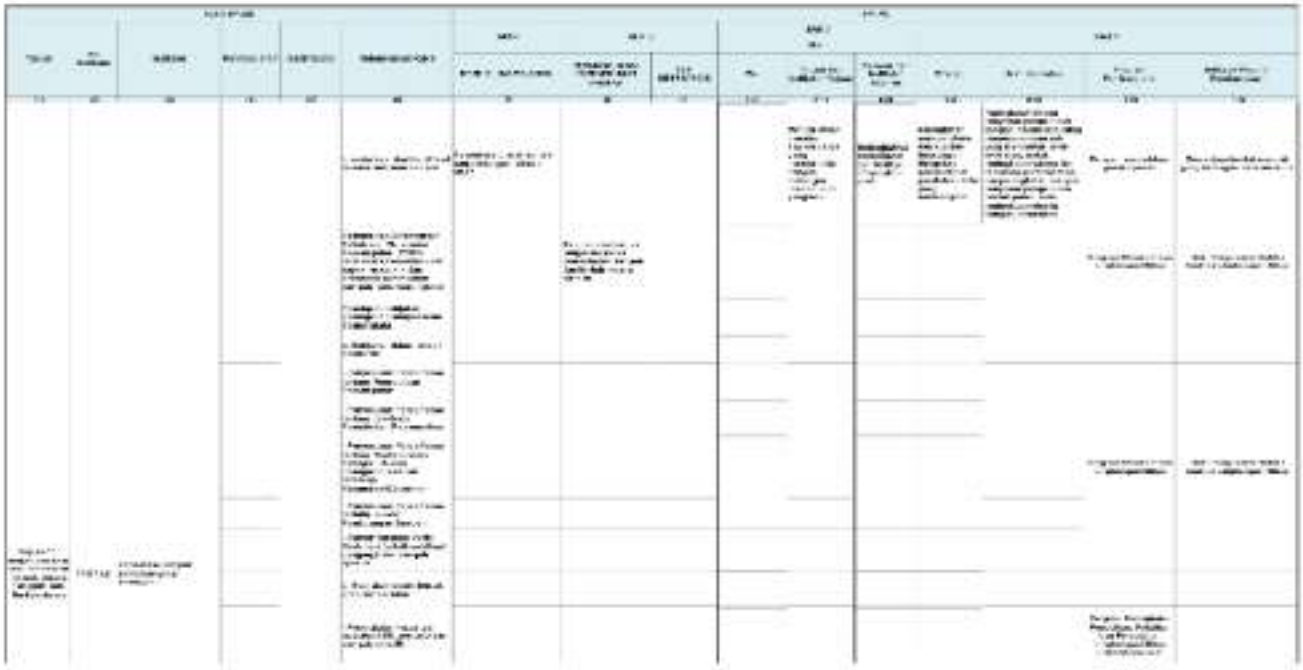


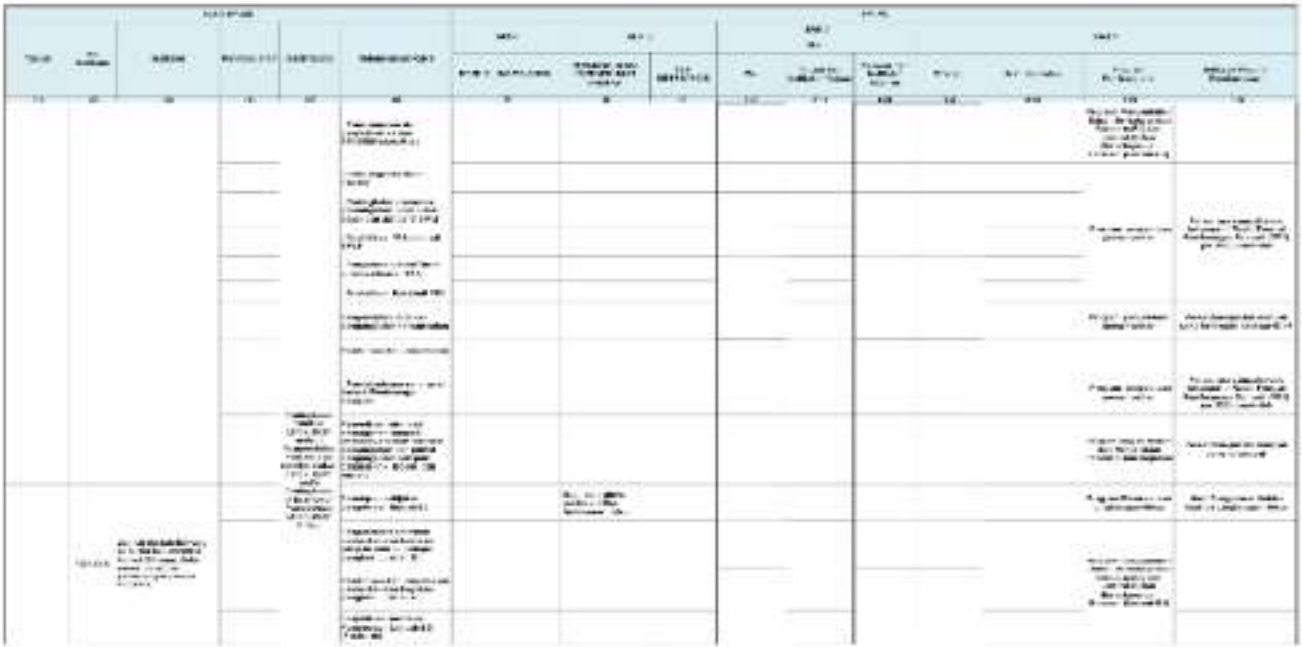


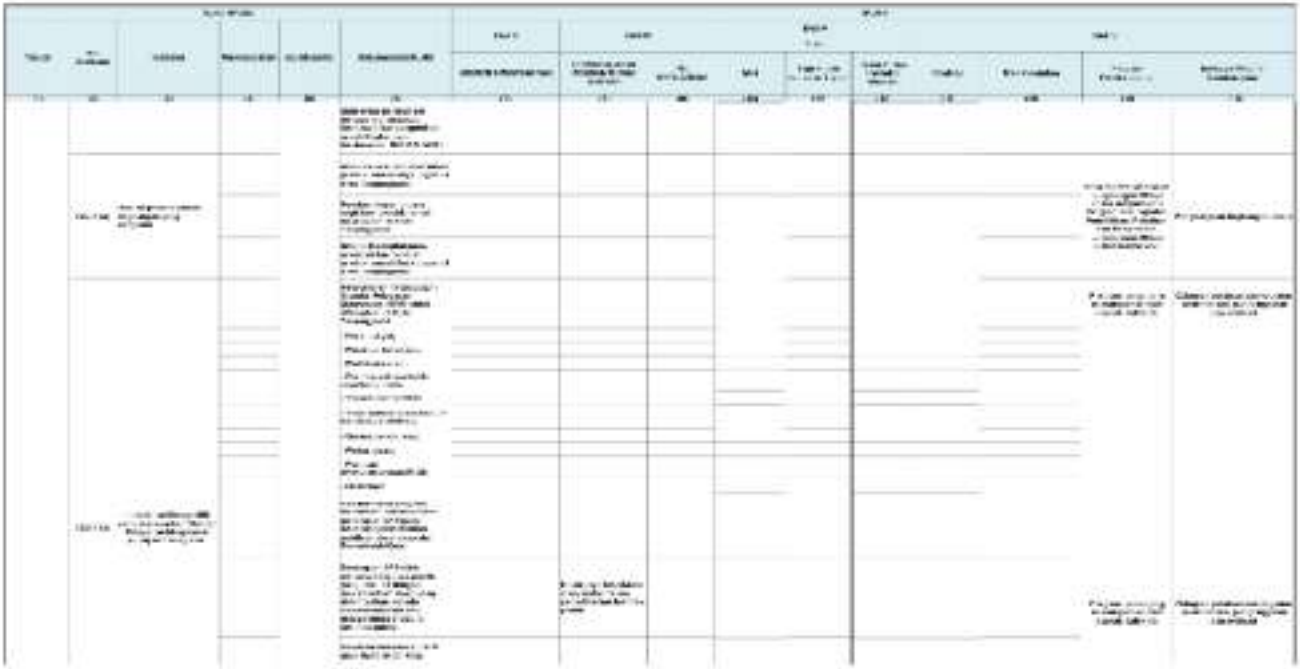


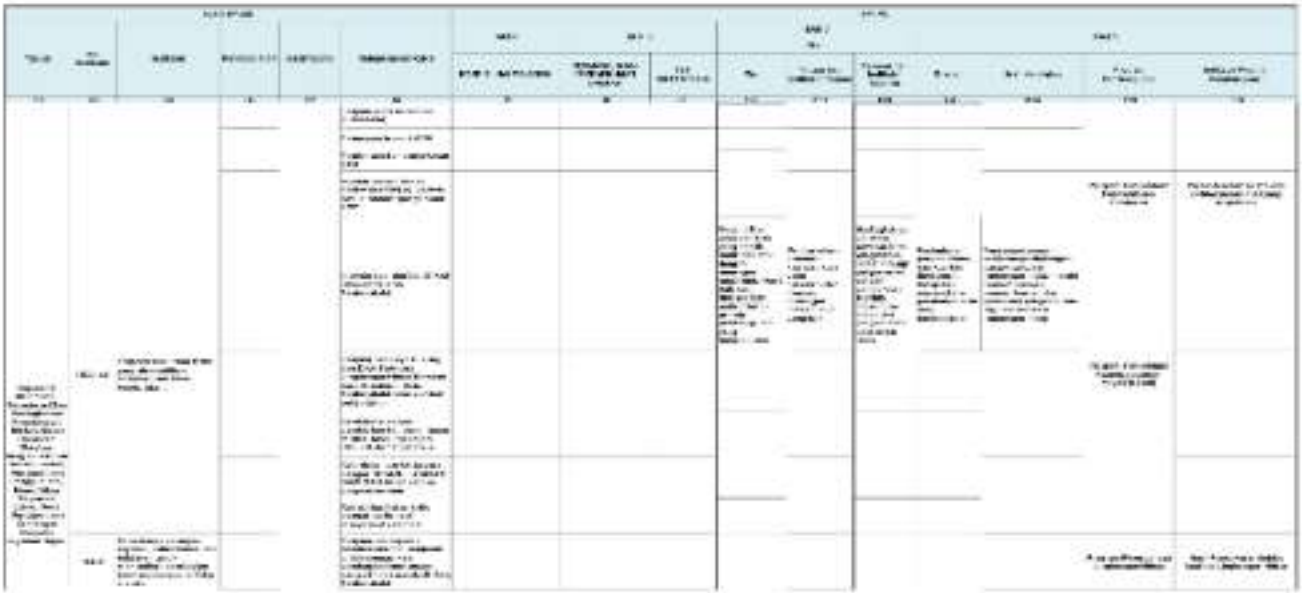


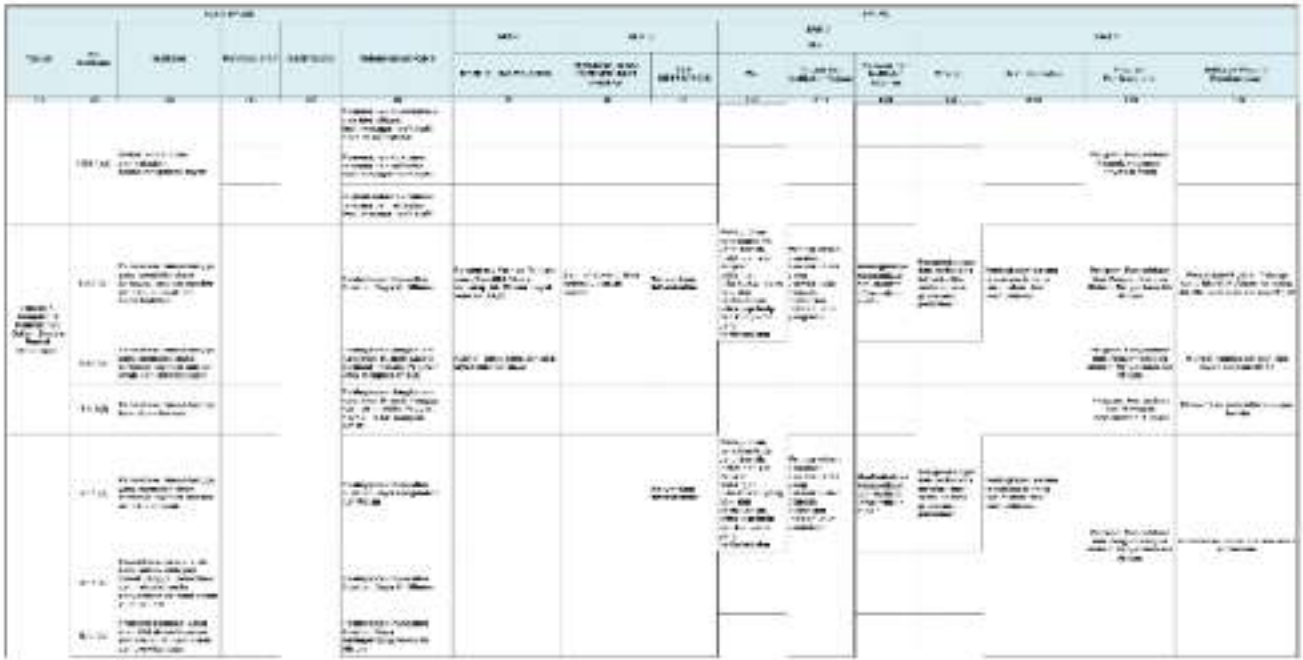




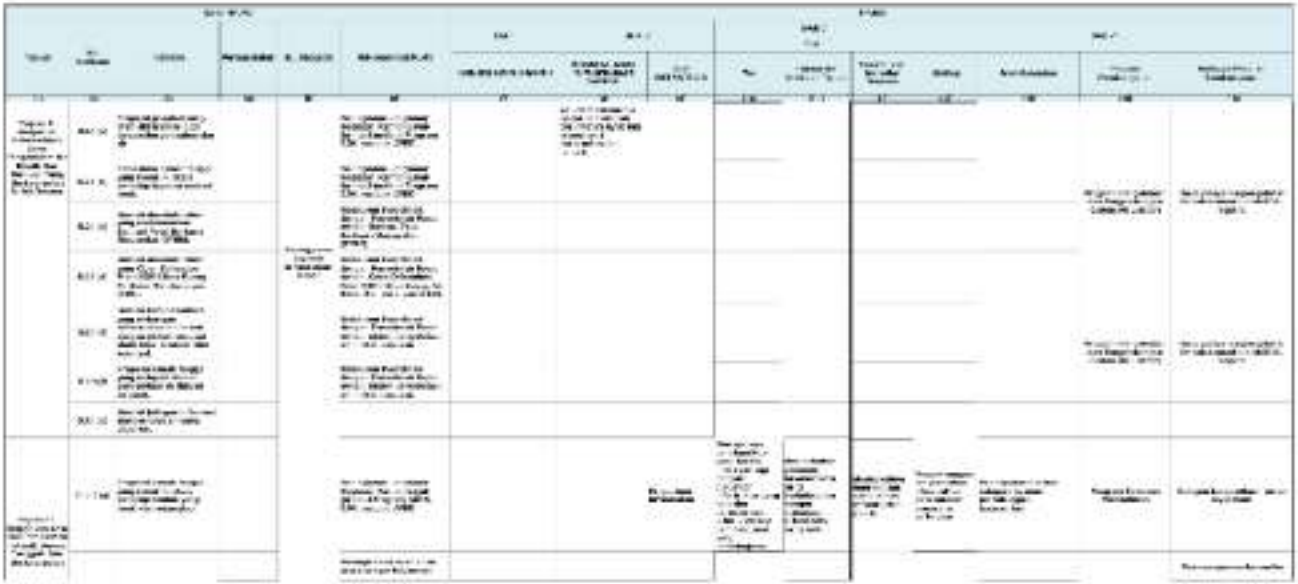


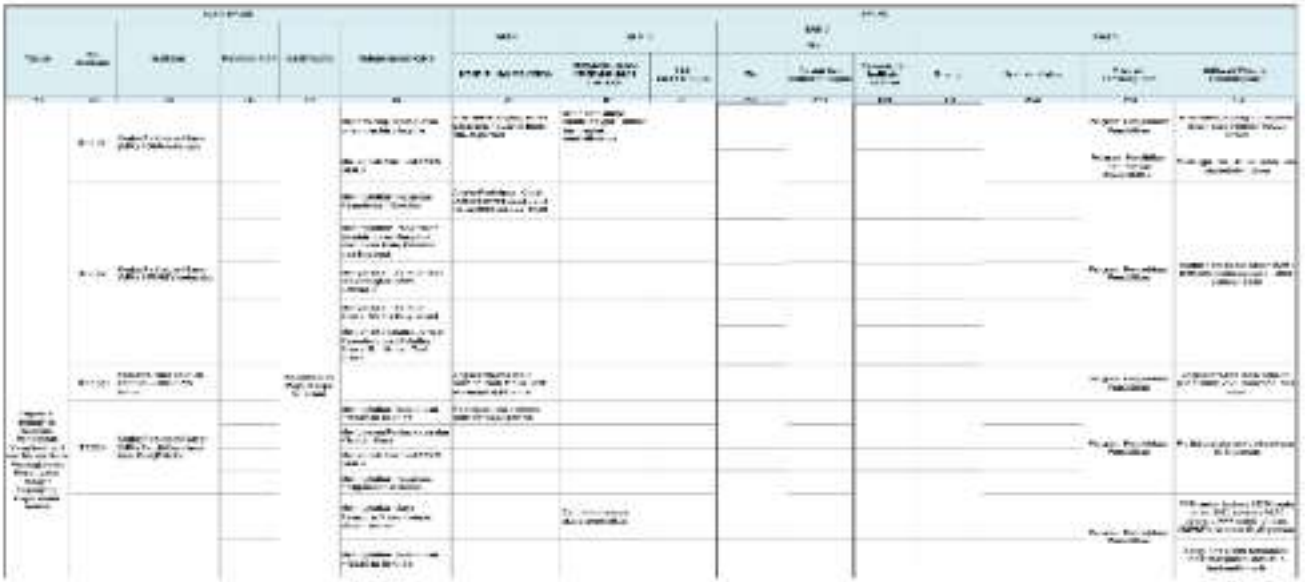


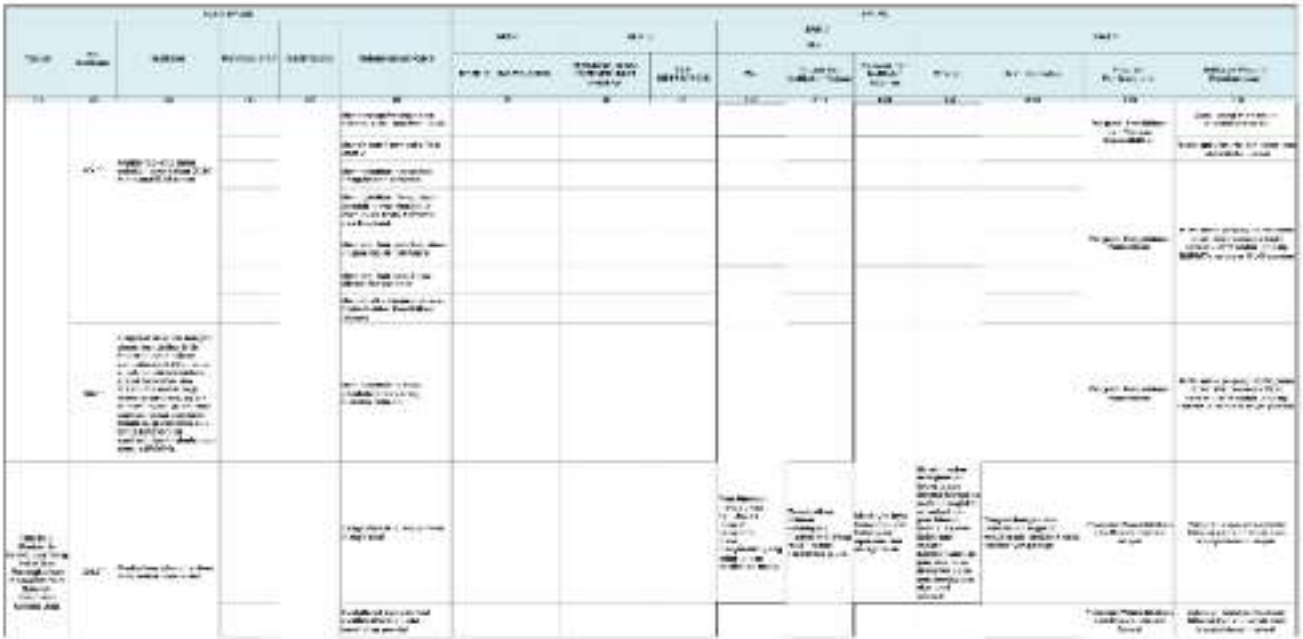


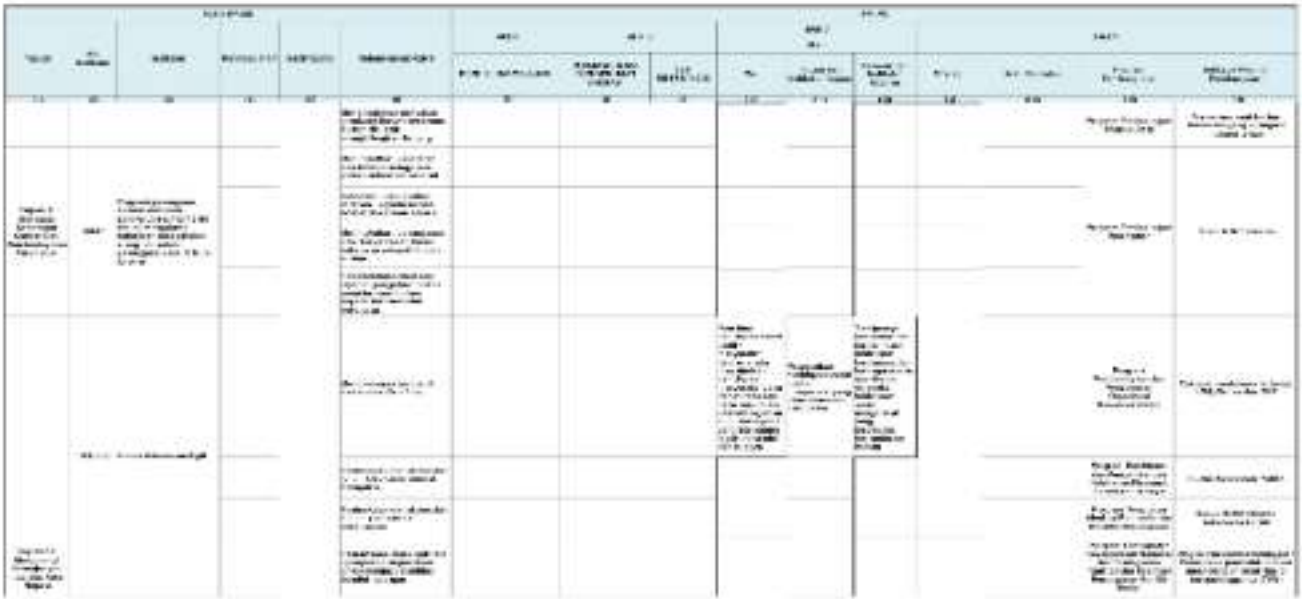


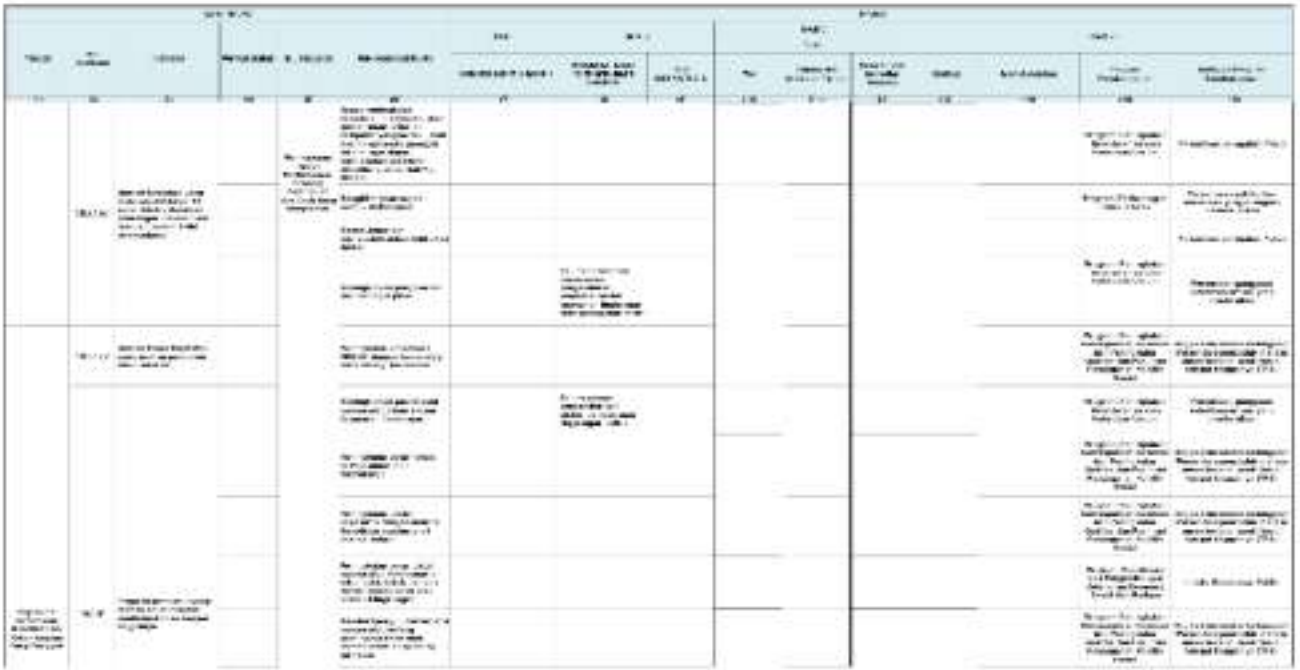


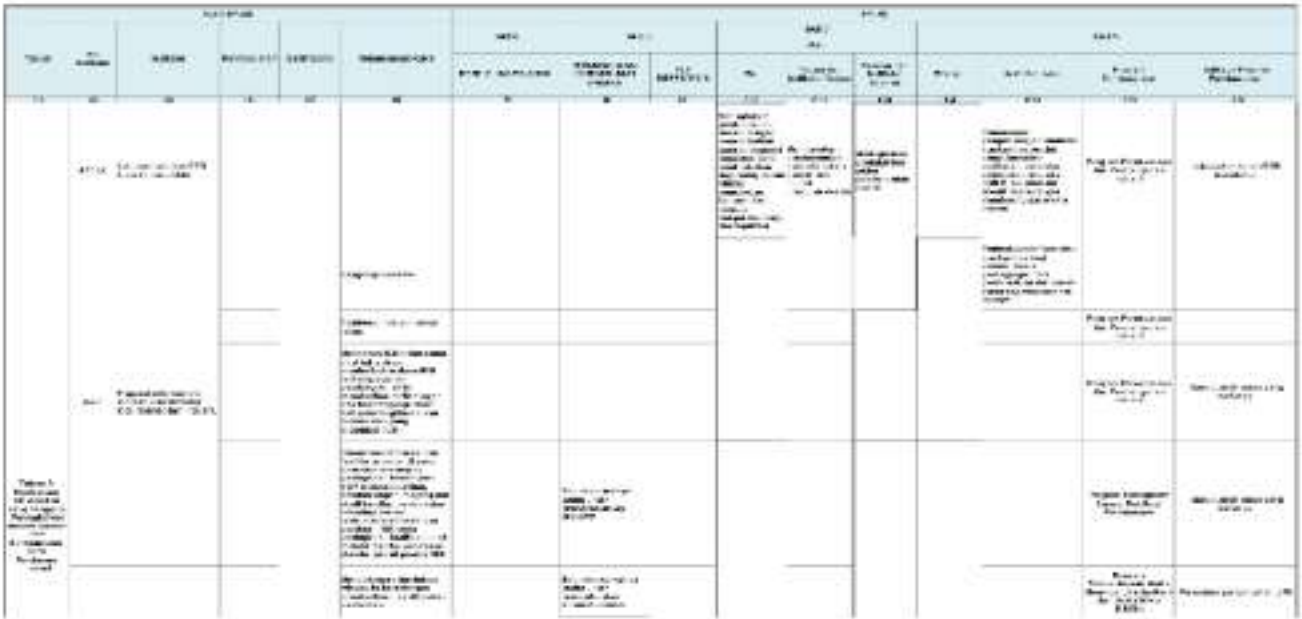


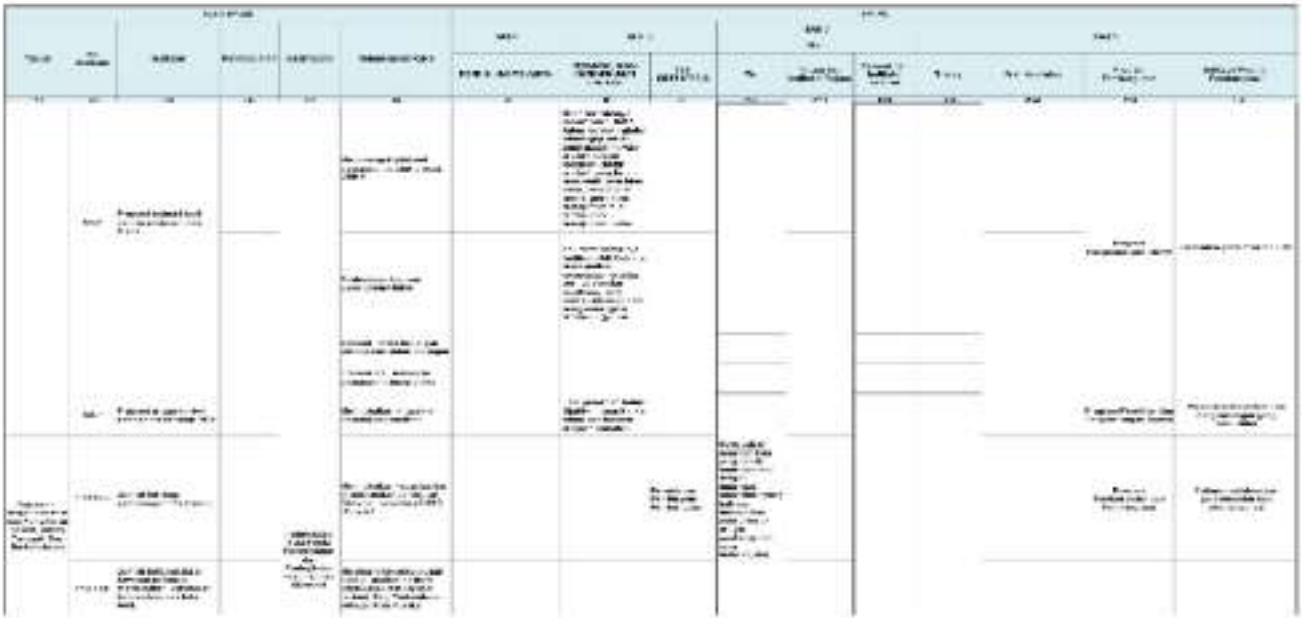


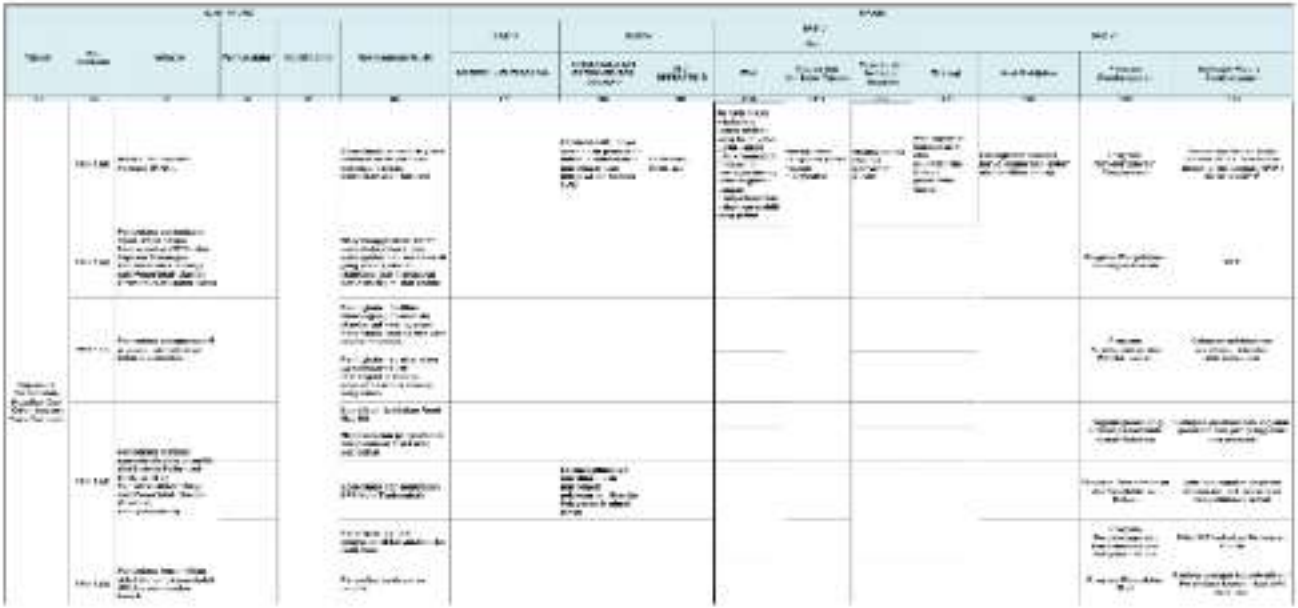


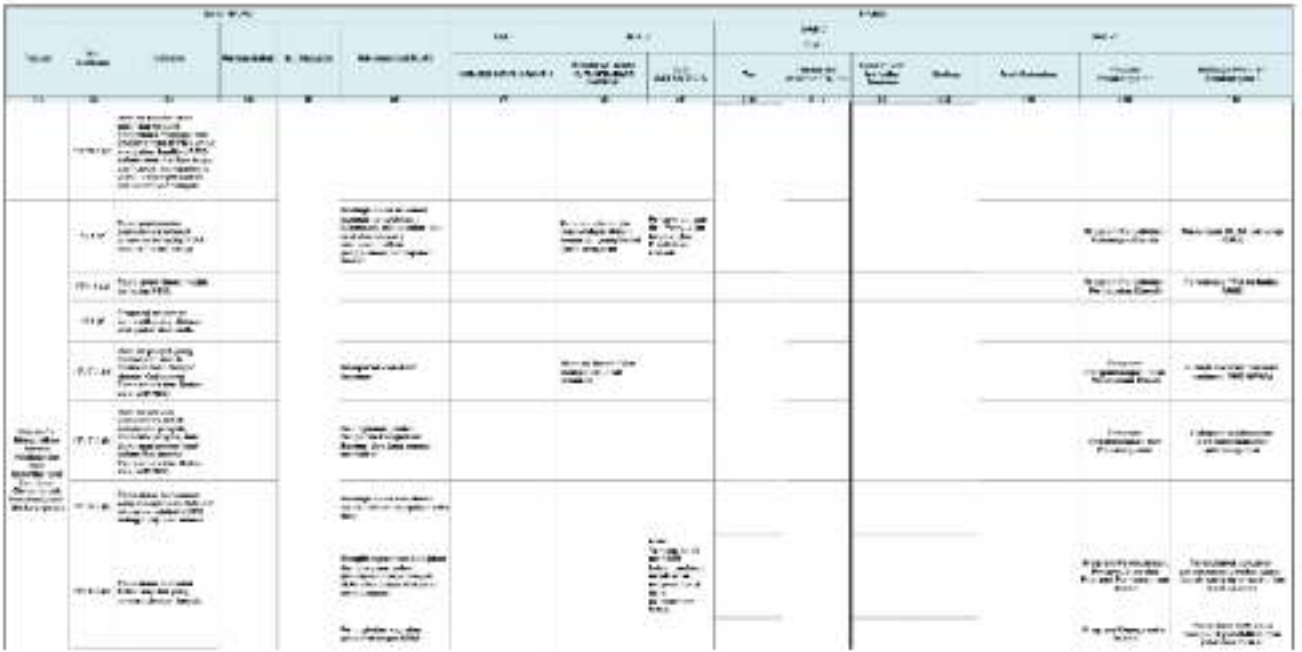














4.2.9. Penelaahan Terhadap RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Luas wilayah Kota Tanjungbalai yang hanya seluas 60,52 km^2, secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan.

Tabel. 4.7. Identifikasi RPJMD Daerah Lainnya

Daerah lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
Kabupaten Asahan	2021-2026	Konektivitas akses menuju kawasan strategis (Pelabuhan Teluk Nibung)	Pembebasan lahan di Daerah Kabuaten Asahan untuk penyelesaian akses menuju jalan lingkar Utara di Kota Tanjungbalai
		Penanganan sedimentasi Sei Asahan dan Sei Silau	Normalisasi alur dan pengerukan pasir Sei Asahan dan Sei Silau
		Pengelolaan persampahan regional	Pembangunan TPA Regional di Kabupaten Asahan untuk pelayanan persampahan Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Jika memungkinkan dapat melayani persampahan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara juga
		Pelayanan system penyediaan air minum (SPAM) Regional	Wacana untuk membangun SPAM Regional untuk pelayanan air minum masyarakat Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan

4.2.10. Isu Strategis Kota Tanjungbalai

Berdasarkan gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan dan hasil identifikasi permasalahan maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Tanjungbalai pada lima tahun yang akan datang, adalah :

4.2.10.1. Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih

optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika aparatur pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Tak kalah penting, hal ini akan mudah tercapai jika diiringi dan sejalan dengan pembangunan keagamaan yang meniliberatkan pembangunan mentalitas aparatur dan masyarakat. Pembangunan keagamaan sangat perlu karena keimanan dan mentalitas yang lemah menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, serta ketersediaan aparatur diiringi peningkatan kapasitasnya untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data melalui optimalisasi penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, maka diperlukan langkah–langkah perbaikan–perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan–pungutan liar terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

4.2.10.2. Revolusi Mental dengan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama dan Kehidupan Berdemokrasi

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan menjadi salah satu agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 dengan salah satu isu strategisnya tentang pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Agama menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Namun, karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas keagamaan tersebut belum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Capaian pembangunan keagamaan di Kota Tanjungbalai tercermin dari jumlah fasilitas rumah/tempat ibadah yang sudah cukup representatif dan cenderung meningkat. Tahun 2015 terdapat sebanyak 187 tempat ibadah di Kota Tanjungbalai, meningkat menjadi sejumlah 203 pada tahun 2017 dan kemungkinan jumlah ini juga semakin meningkat di tahun 2020. Selanjutnya perkembangan aktivitas keagamaan dan komunitas-komunitas keagamaan juga semakin marak. Namun hal ini masih belum menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai ajaran agama semakin membaik.

Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi dan masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di lingkungan dan kelurahan yang belum tersentuh oleh dakwah/kegiatan keagamaan.

Sementara itu kehidupan berdemokrasi sangat penting dalam masyarakat untuk mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Penegakan hukum, toleransi, kerukunan dan pelaksanaan pemilu damai masih menjadi perhatian dan isu strategis ke depan. Kemajemukan dan kerawanan sosial dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan-gesekan antar kelompok masyarakat jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Kehidupan berdemokrasi di Kota Tanjungbalai tercermin dari partisipasi pemilih pada Pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pelaksanaan Pilkada pada 2020, pelaksanaan bantuan hukum dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan perda.

4.2.10.3. Daya Saing Daerah dan Penanaman Modal (Investasi)

Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek dari tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dangan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Hal ini karena daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing daerah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kemampuan ekonomi daerah. Kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi serta memiliki jaminan kemananan untuk berinvestasi. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah adalah tingkat daya beli masyarakat yang diukur dari rata-rata pengeluaran perkapita. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai yang relatif tinggi berdampak pada daya beli masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga tetap terjaga dan terus mengalami pertumbuhan. Potensi pengeluaran perkapita yang terus meningkat memberikan peluang bagi bisnis untuk mengembangkan usahanya di Kota Tanjungbalai.

Jika dilihat perkembangan jumlah pengeluaran perkapita perbulan dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah pengeluaran perkapita perbulan mencapai Rp.890.206,- dimana pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.510.607,- dan bukan makanan sebesar Rp.379.599,-. Sampai pada tahun 2020 pengeluaran rumah tangga perkapita sebulan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.1.030.183,- yang digunakan untuk kelompok makanan sebesar Rp.614.446,- atau sebesar 59,64% dari total pengeluaran rumah tangga dan untuk bukan makanan sebesar Rp.415.737,-. Kondisi ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Tanjungbalai mengalami peningkatan, dimana pengeluaran perkapita perbulan di Kota Tanjungbalai mengalami pertumbuhan sebesar 20,34% hingga tahun 2020 dari tahun 2016. Perkembangan pengeluaran rumah tangga di Kota Tanjungbalai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan
di Kota Tanjungbalai, 2015-2019

Kategori Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	510.607	505.875	567.788	571.837	614.446
Bukan Makanan	379.599	293.793	401.914	371.675	415.737
Jumlah	**890.206**	**799.668**	**969.702**	**943.512**	**1.030.183**

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2020

Selain pengeluaran konsumsi perkapita, kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai tukar petani atau nilai tukar nelayan. Perkembangan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Petani	98,00	99,50	100,50	102,00	102,00
2	Nilai Tukar Nelayan	98,00	98,00	99,00	103,00	103,00

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai Tahun 2020

Jika dilihat dari peranan PDRB (data BPS), lapangan usaha yang paling berpotensi/memiliki peranan paling besar di Kota Tanjungbalai adalah lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,51%, Lapangan usaha Industri Pengolahan (18,75%) dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,44). Hal ini menggambarkan bahwa basis perekonomian Kota Tanjungbalai berada pada lapangan usaha tersebut, sehingga berpeluang untuk dikembangkan sebagai potensi daerah Kota Tanjungbalai, misalnya pengembangan usaha/industri pengolahan yang berbahan baku dari hasil perikanan, pengembangan UMKM yang mengolah produk hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan yang lainnya. Selain itu, letak geografis Kota Tanjungbalai juga merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekspor impor karena didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjungbalai Asahan.

Keamanan suatu daerah merupakan nilai tambah atau peluang bagi daerah untuk masuknya investasi, aspek kemanan dinilai penting mengingat pelaku usaha dan masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu kegiatan usaha didaerah tersebut. Banyaknya konflik dapat menyebabkan pelaku usaha ragu untuk berinvestasi diwilayah tersebut sehingga dapat menurunkan daya saing daerah.

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian suatu daerah. Kegiatan penanaman modal (investasi) memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

Menurut data BPS dan DPMPTSP Kota Tanjungbalai, realisasi penanaman modal di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2015 nilai investasi di Kota Tanjungbalai sebesar Rp.18.418.875.000,00; tahun 2016 sebesar Rp.21.484.150.000,00; tahun 2017 sebesar Rp.35.003.200.000,00 dan menurun pada tahun 2018 hanya sebesar Rp.11.760.000.000,00 dan meningkat menjadi Rp.37.026.501,00 pada tahun 2019. Investasi ini khusus untuk realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan untuk realisasi penanaman modal asing (PMA) di Kota Tanjungbalai tidak ada.

Terkait dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kota Tanjungbalai yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). Jumlah perizinan terbanyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangannya adalah Tanda Daftar perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pada tahun 2015, jumlah SIUP yang diterbitkan DPMPTSP Kota Tanjungbalai sebanyak 203 izin dan TDP sebanyak 202. Kemudian, pada tahun 2016 SIUP dan TDP masing-masing mencapai 205 dan tahun 2017 sebanyak 140 izin. Pada tahun 2018, jumlah izin yang diterbitkan menurun lagi menjadi 126 izin. Pada tahun 2019 jumlah TDP yang diterbitkan sebanyak 175 izin dan SIUP sebanyak 125 izin.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan penting dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai. Strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan tetap menjadi sasaran utama dari kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan beragamnya program/kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kerangka strategi pengurangan kemiskinan telah efektif menekan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan namun penurunannya melambat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,49 persen atau 24.420 jiwa dari total penduduk Kota Tanjungbalai. Tahun 2017 persentase penduduk miskin menurun sedikit menjadi sebesar 14,46 persen atau sejumlah 24.690 jiwa. Sementara Tahun 2018 tingkat kemiskinan meningkat sedikit menjadi 14,64 persen atau sejumlah 25.300 jiwa. dan tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 13,33 persen atau sebanyak 23,540 jiwa. Untuk itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai harus terus berupaya mengurangi penduduk miskin sebagai salah satu upaya dalam mencapai target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

Sementara itu, upaya untuk memperkecil kesenjangan pendapatan antar penduduk terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada lapisan masyarakat bawah. Dari hasil publikasi BPS menunjukkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan Kota Tanjungbalai dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, terjadi penurunan Gini Rasio menjadi 0,278 dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 sebesar 0,373, namun pada tahun 2018, mengalami peningkatan menjadi 0,332 hingga akhirnya mengalami penurunan menjadi 0,272 di tahun 2020. Walaupun Gini Rasio Kota Tanjungbalai berfluktuasi, namun capaian saat ini kondisinya masih dalam kategori rendah (dibawah 0,35).

4.2.10.4. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan penting dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai.

Strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan tetap menjadi sasaran utama dari kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan beragamnya program/kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kerangka strategi pengurangan kemiskinan telah efektif menekan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan namun penurunannya melambat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,49 persen atau 24.420 jiwa dari total penduduk Kota Tanjungbalai. Tahun 2017 persentase penduduk miskin menurun sedikit menjadi sebesar 14,46 persen atau sejumlah 24.690 jiwa. Sementara Tahun 2018 tingkat kemiskinan meningkat sedikit menjadi 14,64 persen atau sejumlah 25.300 jiwa. dan tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 13,33 persen atau sebanyak 23,540 jiwa. Untuk itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai harus terus berupaya mengurangi penduduk miskin sebagai salah satu upaya dalam mencapai target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

Sementara itu, upaya untuk memperkecil kesenjangan pendapatan antar penduduk terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada lapisan masyarakat bawah. Dari hasil publikasi BPS menunjukkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan Kota Tanjungbalai dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, terjadi penurunan Gini Rasio menjadi 0,278 dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 sebesar 0,373, namun pada tahun 2018, mengalami peningkatan menjadi 0,332 hingga akhirnya mengalami penurunan menjadi 0,272 di tahun 2020. Walaupun Gini Rasio Kota Tanjungbalai berfluktuasi, namun capaian saat ini kondisinya masih dalam kategori rendah (dibawah 0,35).

4.2.10.5. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli.

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai terus mengalami peningkatan selama 5 (lima tahun terakhir), namun peningkatannya tidak begitu signifikan. IPM Kota Tanjungbalai pada tahun 2016 sebesar 67,09. Pada tahun 2019, IPM Kota Tanjungbalai mencapai 68,51 dan pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi 68,65 dan capaian ini secara keseluruhan masih di bawah angka Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Namun demikian, meningkatnya indeks pembangunan manusia belum sejalan dengan peningkatan kualitas angkatan kerja yang ada di Kota Tanjungbalai jika dilihat dari tingkat pendidikan formalnya. Tingkat pendidikan formal angkatan kerja yang ada di Kota Tanjungbalai tahun 2020 sebagian besar masih didominasi pada level pendidikan SD sd SMP yakni berkisar 51,92 persen, selebihnya pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK) jumlahnya berada dikisaran 43,65 persen,

sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,22 persen dari total jumlah angkatan kerja yang ada.

4.2.10.6. Penyediaan Infrastruktur

Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dukungan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya adalah infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan energi. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang baik dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah.

Sampai saat ini, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kota Tanjungbalai terus dipacu dan salah satunya adalah infrastruktur jalan, dimana panjang jalan di Kota Tanjungbalai semakin bertambah setiap tahunnya. Namun secara kualitas masih terdapat hambatan untuk menyediakan jalan dengan kualitas baik karena berdasarkan data capaian tahun 2020 untuk jalan dalam kondisi baik masih seluas 278.527 km.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur kelistrikan juga merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Pengembangan industri dan bisnis lainnya sangat tergantung pada listrik. UIW SUMUT UP3 Rantau Prapat ULP Tanjungbalai menyediakan fasilitas listrik untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai. Pada Tahun 2020 sudah seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai sudah seluruhnya menikmati fasilitas listrik. Pada tahun 2019 jumlah pelanggan dengan dengan daya 450 VA sebanyak 10.708 pelanggan, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 10.648 pelanggan. Jumlah pelanggan dengan daya 900VA pada tahun 2019 sebanyak 20.759 pelanggan meningkat menjadi 23.935VA di tahun 2020. Pelanggan dengan daya 1300VA pada tahun 2019 berjumlah 4.110 pelanggan meningkat menjadi 5.438 pelanggan ditahun 2020. Selanjutnya pelanggan dengan daya 2200VA pada tahun 2019 sebanyak 2.641 pelanggan meningkat menjadi 3.249 pelanggan ditahun 2020, pelanggan dengan daya diatas 5500VA pada tahun 2019 sebanyak 1.512 pelanggan meningkat menjadi 1.988 pelanggan pada tahun 2020. Produksi listrik untuk Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 sebesar 157.422 MWh dan menurun di tahun 2020 menjadi 139.642 MWh. Artinya bahwa kebutuhan elektrifitas untuk skala rumah tangga di Kota Tanjungbalai telah cukup memadai dan diharapkan kapasitas yang tersedia juga akan dapat memenuhi kebutuhan usaha masyarakat dan ekonomi lainnya.

Disamping itu, persoalan lain terkait dengan ketersediaan infrastruktur adalah kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Kebutuhan akan air minum bersih dan sehat di Kota Tanjungbalai, mayoritas masih disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Produksi air minum yang dihasilkan PDAM Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, produksi air minum PDAM Kota Tanjungbalai sebanyak 178,6 juta m^3. Pada tahun 2019, produksi air minum meningkat menjadi 211,32 juta m^3 atau tumbuh sebesar 18,3%. Sedangkan air minum yang disalurkan juga mengalami peningkatan dari 144,33 juta m^3 pada tahun 2014 menjadi 149,18 juta m^3 pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan produksinya, terdapat surplus air minum di Kota Tanjungbalai, sehingga sangat berpotensi untuk

meningkatkan penyaluran air minum kepada pelanggan baru baik untuk rumah tangga maupun untuk bisnis.

Terkait posisi geografis Kota Tanjungbalai dilintasi oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan terdapat permasalahan serius yang dihadapi yakni pendangkalan Sei Silau dan Sei Asahan. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya antara lain sebagai prasarana transportasi yang murah, efektif dan efisien. Keberadaan Sungai Silau dan khususnya Sungai Asahan merupakan dataran rendah yang setiap harinya tergenang akibat pasang surutnya air laut. Keberadaan Sungai Asahan merupakan urat nadi perekonomian bagi Kota Tanjungbalai yang berfungsi sebagai alur angkutan barang dan jasa baik dari daerah hinterland; Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Simalungun, Karo, maupun ke luar negeri seperti; Malaysia, Thailand dan Singapura.

Kota Tanjungbalai sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut dalam aktifitasnya masih ditemui hambatan yang sangat mengganggu berkaitan dengan kondisi fisik sungai, sedimentasi yang begitu cepat dan tidak dapat dinormalisasikan secara rutin mengakibatkan terganggunya aktifitas ekonomi masyarakat. Sungai telah dipenuhi oleh sedimen pasir, lumpur dan sampah. Luapan dan genangan yang melebar menyebabkan banjir yang merusak pemukiman pada kelurahan dan desa-desa sepanjang Sungai Asahan, merendam lahan pertanian, industri dan merusak infrastruktur penyokong ekonomi seperti jalan, jembatan dan sekolah (sarana pendidikan).

Diperkirakan setiap tahunnya muka air sungai mengalami kenaikan berkisar 0,3 cm/bulan akibat dari sedimentasi sungai. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan Kota Tanjungbalai ke depan khususnya mengakibatkan banjir yang terjadi secara terus menerus. Hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2013, yaitu dalam memperhitungankan pengerukan jumlah sedimen dan panjang alur yang dibutuhkan agar pelabuhan dapat berfungsi normal berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara dan ukuran kapal 500 DWT dengan kedalaman alur 3,7 m. Maka BBPT merekomendasikan jalur yang harus dikeruk diperkirakan lebarnya 80 m dengan panjang lebih kurang 9,8 km, dari sekitar pelabuhan Teluk Nibung menuju ke pelabuhan Bagan Asahan hingga ke muara Selat Malaka. Volume sedimen yang harus dikeruk ditaksir sekitar 10 juta m^3 pada tahun 2013. Sehingga dengan laju sedimen yang cukup tinggi maka jumlah sedimen yang perlu dikeruk saat ini tentu jauh lebih besar. Hasil dari pengerukan ini dapat digunakan untuk penimbunan, baik untuk keperluan reklamasi maupun penimbunan di darat.

Selanjutnya melilik posisi geografis strategis Kota Tanjungbalai yang berada pada jalur lalu lintas internasional di Selat Malaka yang didukung dengan keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung, maka kondisi pendangkalan ini tentunya akan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas perhubungan dan angkutan penumpang dari dan ke luar negeri (Malaysia, Singapura dan Thailand). Selain itu, Kota Tanjungbalai termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba dimana Kota Tanjungbalai berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang masuknya arus wisatawan mancanegara ke Danau Toba.

Berdasarkan hal ini, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai masih menjadikan persoalan pendangkalan Sungai Silau dan Sungai Asahan sebagai isu strategis yang

harus dipertimbangkan dan diselesaikan 5 (lima) tahun mendatang dan mengedepankan pemanfaatan Pelabuhan Teluk Nibung agar lebih optimal.

4.2.10.7. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya dengan signifikan melalui penciptaan dan pengembangan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah.

Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu bentuk pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah adalah rencana pembangunan *science* dan *technopark*, yang diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat Kota Tanjungbalai dalam memperluas wawasan mengenai perkembangan iptek. Pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan keunggulan komparatif masyarakat Kota Tanjungbalai menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis penting dalam keberlanjutan pembangunan di Kota Tanjungbalai di masa datang.

4.2.10.8. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Kota Tanjungbalai harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kota Tanjungbalai sehingga perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kota Tanjungbalai didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjadi visi jangka menengah daerah yang akan dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.
Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis".

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

1) **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud.

2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km^2 di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.

3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.

5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.

6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga

dapat didefenisikan sebagai suatu komitmen terbaik *stakeholder* baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Idealnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar hidupnya sebagai warga negara. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik yang dapat menumbuhkan nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah dan jajarannya. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan keberpihakan kepada masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman bagi warga untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan pelayanan dasar, ijin berusaha dan ijin lainnya serta pelayanan lain yang dibutuhkan serta warga mudah untuk mengakses berbagai informasi. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik yakni tranparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan partisipasi publik.

Transparansi dimaksudkan bahwa berbagai proses, pelaksanaan, kelembagaan dan informasi pembangunan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan serta berperan aktif dalam kegiatan monitoring pembangunan. Akuntabilitas diartikan sebagai segala proses pengambilan kebijakan oleh stakeholder dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Penegakan hukum dimaknai bahwa kepemerintahan yang baik harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan

rasa keadilan kepada masyarakat dan partisipasi publik adalah pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif di setiap kesempatan.

Di era kini, prinsip-prinsip *good governance* akan dijalankan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai utamanya ketersediaan layanan publik berbasis teknologi dan informasi, dukungan ketersedian sumberdaya aparatur yang professional dan kompeten, ketersediaan kebijakan dan sistem regulasi yang memihak pada kepentingan publik, sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta harmonisasi komunikasi antar pelaku pembangunan. Apabila hal ini telah terpenuhi maka diharapkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan prinsip memberikan pelayanan prima yakni pelayanan mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau akan dapat terwujud.

Misi 2: Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.

Dimensi pembangunan dalam rangka membangun manusia seutuhnya tidak hanya terkait pada pembangunan fisik, semata tetapi juga pembangunan non fisik yakni pembangunan mental spiritual masyarakat. Pembangunan mental spiritual masyarakat efektif dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan (*religius*) sejak dini kepada masyarakat melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab.

Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia yakni masyarakat yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Pembangunan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia akan menjadi agenda pokok pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang secara simultan dilaksanakan dengan agenda pokok pembangunan lainnya. Pembangunan masyarakat yang religius akan lebih dikembangkan kepada bagaimana membangun tatanan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi ummat. Secara konkrit hal ini akan diawali dengan pemantapan pendidikan karakter di bangku sekolah dan di keluarga, menggalakkan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan aparatur yang disertai dengan kebijakan yang mendukung serta fasiltasi/bantuan bagi pembangunan/rehab rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya melalui bantuan hibah.

Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada selanjutnya membentuk pola kemitraan dengan sektor swasta dengan tujuan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan peranannya terhadap fungsi proteksi dan fasilitasi. Peran utama yang dimaksud adalah dukungan kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam

mendorong iklim investasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan ditujukan kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing dimaksud didefenisikan sebagai kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kunci keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangnan industri yang berbasis kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, infrastruktur pendukung, sumberdaya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan.

Misi 4: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelma dalam diri lulusan yang memiliki iman dan takwa dan berbudaya dan berkarakter menuju kemandirian. Artinya bahwa kemampuan intelektual yang diperoleh dari sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era global. Pendidikan yang berkualitas harus terus didukung dengan pendanaan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari segi geografis terlebih dari segi ekonomis. Pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan menjamin bahwa pelayanan pendidikan akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. ke depan tidak ada alasan penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibiltas maupun alasan ekonomis. Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas mutu lulusan yang tentunya akan dapat terwujud apabila ada keterlibatan dari setiap *stakeholders* dan partisipasi aktif masyarakat, orang tua dan pihak swasta untuk terlibat aktif di dunia pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain memfasilitasi untuk mengembangkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan kesehatan akan diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan akan tenaga medis, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian pola hidup bersih dan sehat dan melibatkan stakeholders serta pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan adalah untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara umum ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat.

Misi 5: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pemenuhan infrastuktur dasar dan ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. Pembangunan infrastruktur dewasa ini menghadapi tantangan yang sangat berat terlebih-lebih masalah rendahnya kualitas yang selalu menjadi sorotan publik. Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan memperhitungkan dinamika perkembangan dan persebaran permukiman penduduk dan lingkungannya, luas wilayah, kondisi geografis wilayah dan diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar satu wilayah dengan wilayah di daerah lainnya serta harus memperhatikan atau mengakomodir keberlanjutan program.

Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan pola dan penataan ruang. Oleh karena itu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus sudah mengakomodir perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara baik serta telah mengintegrasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH *public* mapun RTH *private* sehingga cita-cita untuk mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi serta nyaman untuk bermukim bagi warga akan dapat terwujud.

Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan nasional dan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya secara intensif diperlukan upaya untuk terus mengembangkan jejaring, baik ke tingkat nasional, ke Provinsi dan ke masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagai jalan untuk peningkatan perekonomian daerah menuju kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Tanjungbalai akan dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang

Misi 6: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya.

Pembangunan politik merupakan salah satu agenda yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penanaman nilai di tengah-tengah aparatur dan masyarakat. Selanjutnya pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya.

Misi 7: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memperoleh proses kegiatan sosial dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang berpusat pada masyarakat, partisipasi dan bersifat keberlanjutan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan melindungi potensi masyarakat dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan akan dititikberatkan pada upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat serta peningkatan partisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dan pembangunan keluarga dengan tidak meninggalkan kelompok marginal yakni kelompok miskin, perempuan miskin dan disabilitas. Yang paling utama yang akan dilakukan adalah peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi angka ketergantungan masyarakat kepada pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat *mindset* masyarakat tentang pemberdayaan selama ini masih kurang tepat yakni masyarakat akan berdaya apabila difasilitasi pemerintah (tergantung pada bantuan pemerintah).

Diakui bahwa konsep membangun keberdayaan adalah suatu proses yang panjang dan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang diharapkan yakni masyarakat yang berdaya dan mandiri atau masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, memutuskan serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Keberdayaan dan kemandirian masyarakat dibentuk dari individu-individu yang berdaya dan mandiri. Oleh karenanya pembangunan konsep pemberdayaan dibangun dimulai dari penguatan elemen terkecil yakni keluarga dan tetap diperlukan sinergitas dan kerjasama semua elemen. Harapan ke depan jika masyarakat sudah berdaya secara ekonomi, maka diharapkan tatanan kehidupan sosial masyarakat juga akan mulai membaik.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan lebih bersifat operasional dari masing-masing misi serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yakni berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan tujuan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami.

5.3.1. Tujuan

Dari pernyataan-pernyataan misi, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
5. Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.
6. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

5.3.2. Sasaran

Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai maka ditetapkan sasaran untuk pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat
4. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah.
5. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja.
6. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.
7. Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas
8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
9. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
10. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.
11. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

Sasaran-sasaran tersebut di atas, lebih detail menjelaskan bagaimana tujuan dapat dicapai dan merupakan wujud dari apa yang diinginkan dari visi dan misi jangka menengah yang akan berakhir pada tahun 2021. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dari tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikator yang ingin dicapai berikut:

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						Capaian (2020)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Melaksanakan tata kerja pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima	1.1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	B	B	B	B	B	B
				Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat		C	B	B	BB	BB	BB
		1.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP Kota	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
				Nilai evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
				Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil evaluasi pelayanan publik	Predikat	-	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau
2	Membina dan memajukan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang	2.1.	Mewujudkan toleransi kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	Kerifis SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0

	religius dan berakhlaq mulia	2.1.1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban aparatur dan masyarakat	Jumlah kejahatan	Kasus	570	520	480	430	400	380	360
3	Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada berbasis potensi unggulan dalam rangka menuju masyarakat maju dan sejahtera	3.1	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	0,47	3,50	5,75	5,80	5,85	5,90	5,90
				Pendapatan Perkapita	Juta Rp	52,15	58,80	64,68	67,52	72,40	77,70	77,70
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,97	6,30	6,00	5,75	5,50	5,30	5,30
		3.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	Produktivitas total daerah	-	110,64	115,21	119,82	123,41	127,11	132,19	132,19
		3.1.2	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Jumlah investasi	(Rp.000)	34.971.000	37.643.640	38.976.000	40.748.327	41.142.000	42.586.437	42.586.437
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	60,84	66,54	67,76	68,01	68,17	70,83	70,83
4	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan	4.1	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,65	69,79	70,56	70,93	71,50	72,07	72,07
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,69	89,82	90,07	90,22	91,27	91,82	91,82
		4.1.1	Meningkatnya sarana dan akses layanan pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,44	9,59	9,67	9,75	9,83	9,90	9,90

	derajat kesehatan masyarakat		serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	12,54	12,58	12,61	12,64	12,68	12,68
		4.1.2	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,27	63,85	64,14	64,43	64,72	65,01	65,01
5	Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinjutan.	5.1	Meningkatkan penataan kawasan kota yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	Indeks layanan kualitas infrastruktur	Predikat	-	C	CC	CC	B	B	B
		5.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	68,36	70,00	71,50	73,00	74,70	76,00	76,00
		5.1.2	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang diserta dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Persentase luasan RTH publik	Persen	20,33	20,00	20,01	20,02	20,03	20,04	20,04
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,23	69	69	70	72	75	75
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	23,00	21,26	20,07	19,13	17,21	15,48	15,48

6	Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keberagaman suku dan agama yang berlandaskan adat dan budaya	6.1	Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	Presentase Partisipasi pemilu	Persen	-	-	-	85	-	-	-
		6.1.1	Terciptanya kerukunan dan komunikasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	Demonstrasi berakhir rusuh	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
				Persentase penegakan Perda	Persen	68	72	76	78	81	84	84
7	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	7.1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	Angka kemiskinan	Persen	13,33	12,64	12,50	12,36	12,11	11,87	11,87
				Kedalaman Kemiskinan/ Indeks Gini	Poin	0,272	0,268	0,264	0,260	0,263	0,261	0,261
				Indeks Pembangunan Gender	Poin	63,38	63,75	64,25	64,62	65,02	65,38	65,38
		7.1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	Rasio ketergantungan	Rasio	58,00	57,43	57,25	56,86	56,67	56,39	56,39
				Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya

Penjelasan Penetapan Target Indikator Makro Daerah

Ketidakpastian perekonomian global akibat pandemi Covid-19 telah memberikan dampak bagi perekonomian nasional, dan perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari perekonomian Sumatera Utara, perekonomian Kota Tanjungbalai juga menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat perekonomian Kota Tanjungbalai memiliki kontribusi yang kecil yang mendapat pengaruh cukup besar bagi dinamika perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 melambat disebabkan dari dua sisi ekonomi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Pada sisi penawaran atau produksi, adanya pembatasan pemerintah untuk melakukan aktivitas secara fisik di tempat produksi, telah menyebabkan tingkat produksi barang dan jasa pada hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan. Dari 17 lapangan usaha dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), hanya 2 sektor yang diproyeksikan tidak mengalami perlambatan yaitu *lapangan usaha informasi dan komunikasi* dan *lapangan usaha jasa kesehatan dan sosial*.

Instruksi pemerintah untuk jaga jarak sosial (*Social Distancing*) dan menjalankan pekerjaan dari rumah (*Work From Home*) serta tetap berapa di rumah (*Stsy at Home*) memberikan dampak pengurangan aktivitas produktif bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Secara umum, lapangan usaha yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 antara lain adalah pariwisata (akomodasi, restoran, jasa perjalanan wisata), transportasi, perdagangan, dan industri. Sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dalam perekonomiannya, lapangan usaha tersebut merupakan bagian terpenting bagi perekonomian Kota Tanjungbalai.

Dari sisi permintaan, penyebaran Covid-19 memberi dampak terhadap pengurangan konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah dan swasta serta ekspor dan impor. Antisipasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan stimulus fiskal, telah membuat perekonomian menurun tidak terlalu tajam. Ancaman yang cukup besar terjadi melalui penurunan konsumsi rumah tangga akibat pendapatan masyarakat yang berkurang. Konsukensinya, daya beli masyarakat menjadi menurun dan menyebabkan terhentinya sebagian aktivitas ekonomi terutama kegiatan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kondisi tersebut membawa dampak yang besar bagi pengurangan pendapatan mereka. Padahal, sebagian besar roda perekonomian di Kota Tanjungbalai digerakkan oleh UMKM. Kondisi ini tentunya akan sangat berimbas kepada pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas.

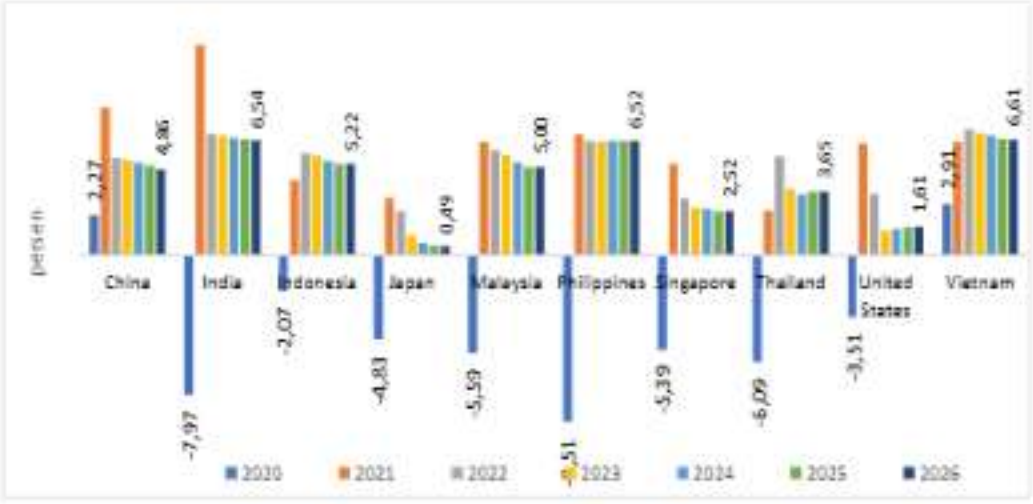
Proyeksi terhadap perkembangan indikator Makroekonomi Kota Tanjungbalai dilakukan melalui penelaahan terhadap proyeksi perkembangan ekonomi internasional yang mempengaruhi Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, proyeksi yang dihasilkan dapat dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional dan regional.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2020 diawali dengan optimisme bahwa akan terjadi perbaikan perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global diyakini akan kembali membaik Ketika mulai membaiknya hubungan Amerika Serikat dan China yang telah menjalankan Perang Dagang sejak tahun 2018.

Namun, optimisme tersebut memudar dengan cepat seiring dengan merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi pada awal 2020, menjadi krisis perekonomian yang memengaruhi kehidupan sosial, kesejahteraan, dan finansial.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia menurun hingga 3,3%. Pemurunan tertinggi terjadi di Negara Maju dan Amerika Latin. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menurun 3,5%, Kawasan Eropa menurun hingga 6,6% dan Amerika Latin anjlok hingga 7,0%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di Amerika Latin disebabkan dampak Pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian negara-negara di Amerika Latin dan menyebabkan terjadinya pengangguran yang sangat besar. ILO (International Labor Organization) mencatat sekitar 30,1 juta orang menganggur di Kawasan Amerika Latin yang kondisi tersebut memperparah perekonomian. Sementara itu, di Kawasan Negara Emerging, pertumbuhan ekonomi hanya menurun sekitar 1,0% pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang menurun juga terjadi di negara-negara ASEAN.



Gambar 5.1.
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara ASEAN Tahun 2020-2026

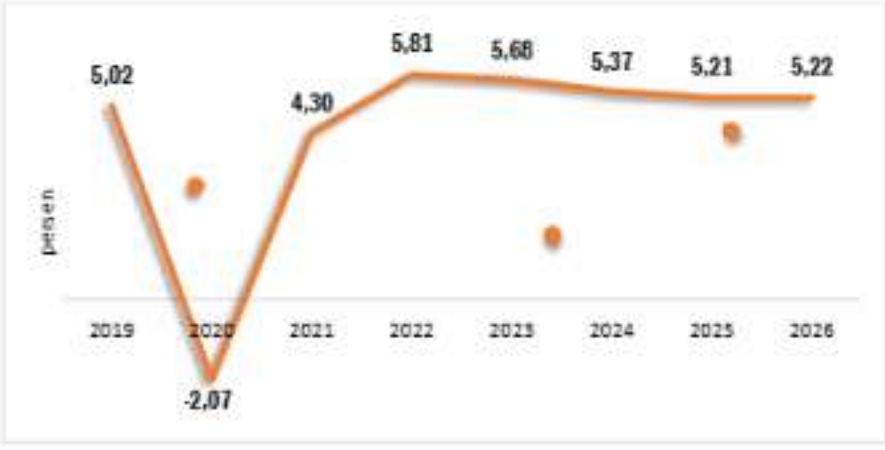
Sumber: IMF

Pada tahun 2020, hampir seluruh negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Namun capaian Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menurun 2,07%. Sementara itu, penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Philipina, sebesar 9,51%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga terjadi di Thailand dan Malaysia serta Singapura. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah negara tersebut untuk melakukan pembatasan ketat atas kegiatan ekonomi (*lockdown*) dan pembatasan pergerakan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang tajam. Sementara itu, keberhasilan pemerintah Vietnam dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 memberikan hasil yang cukup signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi Vietnam yang masih dapat tumbuh sebesar 2,91%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 4,30%. Belum normalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 disebabkan masih belum selesainya permasalahan kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Tahapan vaksinasi terhadap 75,0% warga negara Indonesia untuk mencapai kondisi immunity herds memerlukan waktu yang cukup lama. Angka vaksinasi COVID-19 saat ini di Indonesia rata-rata 58.772 dosis per hari (Bloomberg, 2021). Dengan asumsi tersebut, dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk

mencapai kekebalan kelompok, yang mencakup 75 persen populasi penduduk Indonesia dengan penyuntikkan dua dosis vaksin Covid-19.

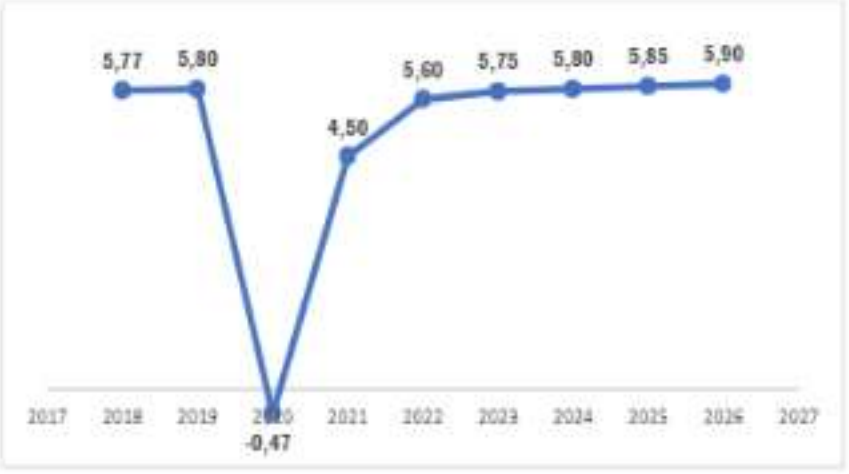
Berdasarkan rencana yang telah disusun, pemberian Vaksin Covid-19 secara bertahap di Indonesia akan selesai pada Maret 2022. Indonesia akan mencapai kondisi immunity herds pada waktu tersebut, sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh dengan cukup tinggi. Proyeksi IMF, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,81% dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berlanjut pada tahun 2023 yakni sebesar 5,68%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia baru kembali menurun mencapai kondisi normal yaitu tumbuh sekitar 5,20% hingga 5,30% pada tahun 2024 hingga 2026.



Gambar 5.2.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 - 2026
Sumber: IMF

Perkembangan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian nasional selanjutnya memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tanjungbalai. Selaras dengan dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai diproyeksikan akan mulai tumbuh mulai tahun 2021. Setelah mengalami penurunan hingga 0,47% pada tahun 2020, diproyeksikan perekonomian Kota Tanjungbalai meningkat menjadi 4,50% pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai semakin membaik pada tahun 2022 dan tumbuh sebesar 5,60% sejalan dengan selesainya tahapan vaksinasi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi semakin menguat pada tahun berikutnya mengingat masyarakat sudah dapat beraktivitas normal yang berdampak terhadap kembalinya perekonomian Kota Tanjungbalai dalam batas normal yaitu tumbuh sebesar 5,75%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai kembali meningkat seiring dengan selesainya pembangunan jalan tol Sumatera dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat. Kondisi tersebut meningkatkan akselerasi pergerakan barang dan jasa dan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian Kota Tanjungbalai. Secara bertahap pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai tumbuh sebesar 5,80% (2024), kemudian meningkat lagi pada periode berikutnya yaitu 5,85% (2025) dan 5,90% (2026).



Gambar 5.3.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjung Balai 2021 - 2026
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi akan berdampak baik terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menekan TPT semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2020 yang menurun sebesar 0,47% memberikan dampak terhadap peningkatan TPT dari 6,82% tahun 2019 menjadi 6,97% tahun 2020.

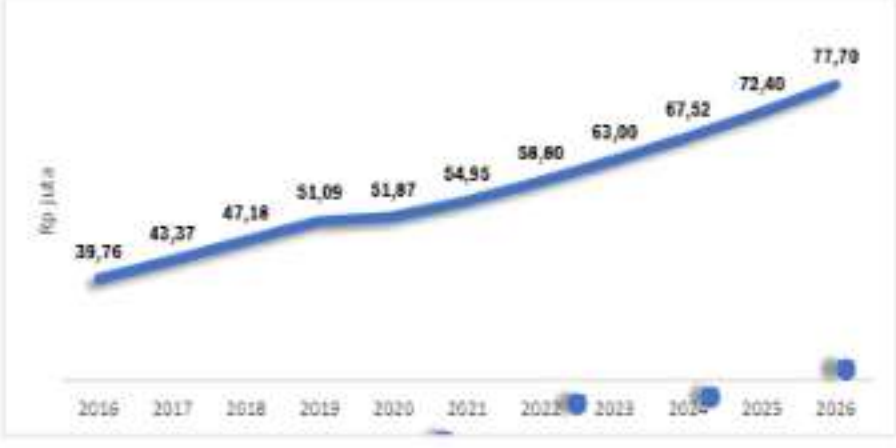
Seiring dengan pulihnya ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2021, maka diproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai akan menurun menjadi 6,70%. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada tahun-tahun berikutnya diharapkan memberi dampak bagi penciptaan lapangan kerja yang semakin besar bagi Angkatan Kerja Kota Tanjungbalai sehingga tingkat pengangguran akan semakin menurun. Diproyeksikan pada tahun 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tanjungbalai menurun menjadi 5,30%.



Gambar 5.4.
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

3. PDRB Per Kapita

Proyeksi pendapatan perkapita dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi PDRB ADHB dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Penduduk Kota Binjai setiap tahun tumbuh sekitar 1,0%. Berdasarkan prakiraan tersebut, maka diproyeksikan Pendapatan Perkapita ADHB Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 sebesar Rp51,87 juta. Capaian tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Perkapita tahun 2019 sebesar Rp51,09 juta. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, pendapatan perkapita Kota Tanjungbalai masih dapat tumbuh sebesar 1,5%.



Gambar 5.5.
Proyeksi Pendapatan Perkapita ADHB Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

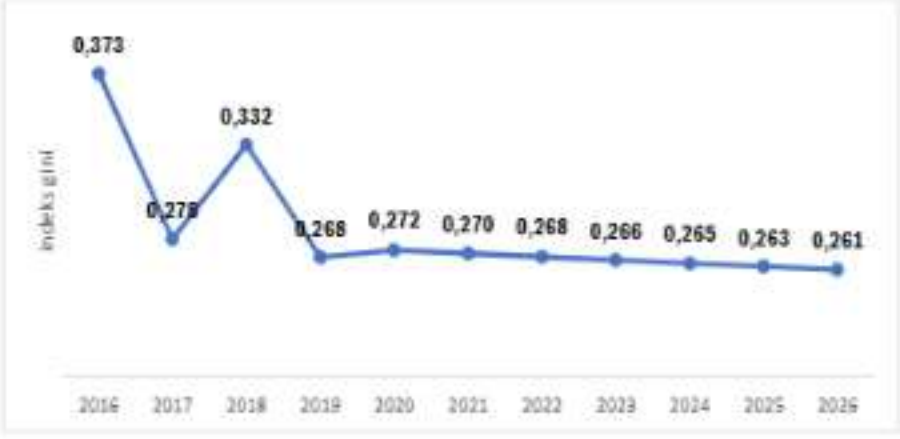
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih tinggi pada tahun 2021, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Perkapita Kota Tanjungbalai yang lebih tinggi lagi. Pada tahun 2021, Pendapatan perkapita Kota Tanjungbalai diproyeksikan mencapai Rp 54,95 juta. Pendapatan perkapita meningkat secara

berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di Kota Tanjungbalai sehingga pada tahun 2026 mencapai Rp77,70 juta.

4. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan (indeks gini) Kota Tanjungbalai tergolong rendah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, indeks gini Kota Tanjungbalai mencapai 0,268. Pada tahun 2020, ketimpangan pendapatan Kota Tanjungbalai mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,270. Peningkatan ketimpangan tersebut disebabkan semakin meningkatnya perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan tinggi di Kota Tanjungbalai.

Pada tahun 2021 diproyeksikan ketimpangan pendapatan masih sekitar 0,270 disebabkan pemulihan ekonomi masih belum berjalan secara optimal dan mulai tahun 2022 hingga tahun 2026 ketimpangan pendapatan akan semakin menurun. Diproyeksikan pada tahun 2026, ketimpangan pendapatan di Kota Tanjungbalai dapat menurun menjadi 0,261. Capaian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Tanjungbalai dalam kelompok rendah.



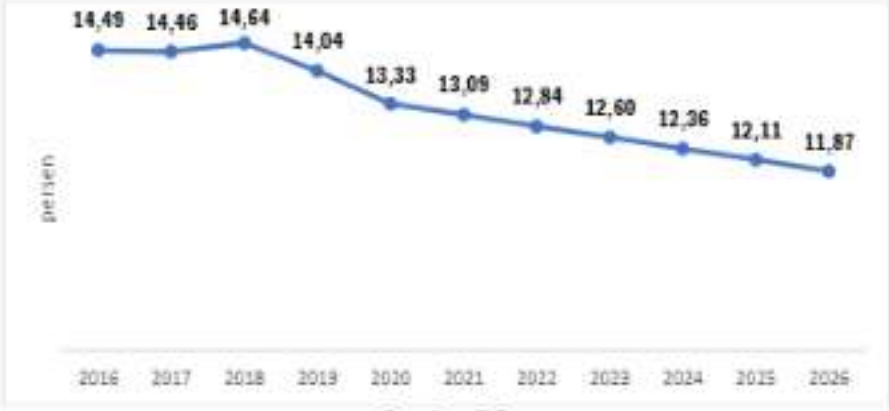
Gambar 5.6.
Proyeksi Perkembangan Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026

Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

5. Angka Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi memberi dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja, dan pada tahap berikutnya meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Sebaliknya, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan tingkat pengangguran meningkat yang selanjutnya meningkatkan persentase penduduk miskin. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbali menurun 0,47% pada tahun 2020, berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Berkurangnya pendapatan masyarakat menyebabkan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai meningkat. Namun, pemerintah dapat melakukan antisipasi dengan memberikan subsidi dan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat serta menjaga kestabilan harga pasar sehingga dapat berdampak terhadap pengurangan persentase penduduk miskin. Kesigapan pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin Ketika terjadi Pandemi Covid-19 berdampak terhadap

pengurangan persentase penduduk miskin sebesar 71 poin atau menurun dari 14,04% (2019) menjadi 13,33% (2020).

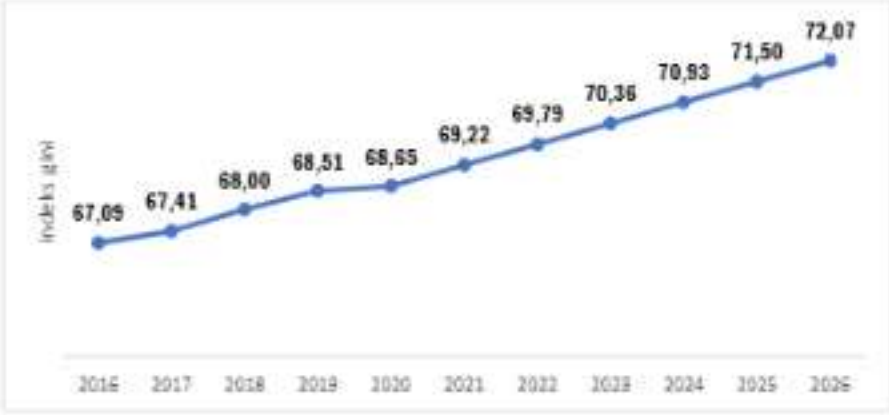


Gambar 5.7.
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

Pemulihan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2021 diproyeksikan memberikan dampak terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% pada tahun 2021, diharapkan dapat menurunkan kemiskinan menjadi 13,33%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya diproyeksikan akan membawa dampak terhadap penurunan persentase kemiskinan hingga mencapai 11,87% pada tahun 2026.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan dapat memberikan dampak yang positip bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tercermin dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).



Gambar 5.8.
Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026

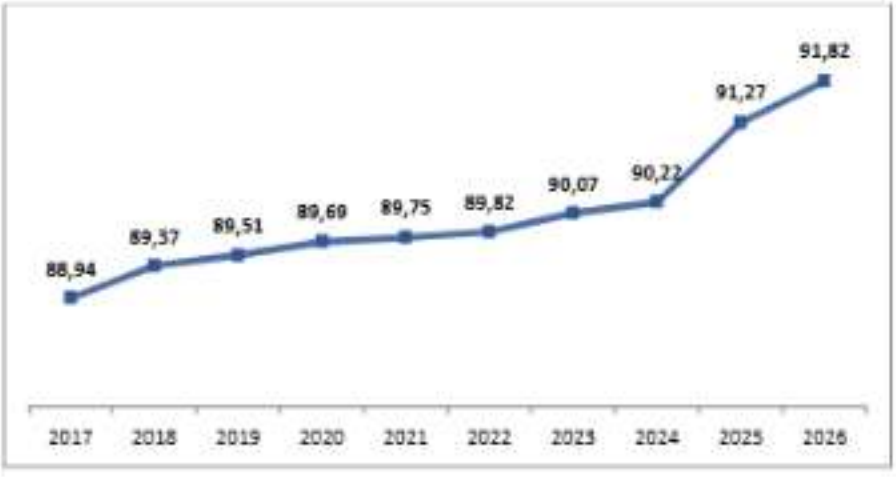
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

Selama periode 2016–2020, kualitas pembangunan manusia di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan capaian, IPM yang dimiliki Kota Tanjungbalai telah berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2016, IPM Kota Tanjungbalai sebesar 67,09 dan terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2020 mencapai 68,65. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari perkembangan masing-masing indikator pembentuknya, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Tanjungbalai telah mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, usia harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 62,09 tahun dan kemudian meningkat menjadi 63,27 tahun pada tahun 2020. Meningkatnya fasilitas kesehatan, teknologi kesehatan dan jumlah tenaga medis yang terus bertambah telah memberikan dorongan bagi peningkatan harapan hidup masyarakat Kota Tanjungbalai. Demikian pula Harapan Lama Sekolah yang menjadi salah satu faktor yang cukup penting di dalam peningkatan IPM. Dengan kebijakan pemerintah daerah yang menggratiskan pembayaran SPP dan dana BOS serta pembagian Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah pusat, mendorong peningkatan harapan masyarakat untuk dapat lebih lama lagi mendapatkan pendidikan. Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai mencapai 12,41 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,50 tahun. Indikator ketiga yang mempengaruhi IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini menunjukkan bagaimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai juga telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2016, Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 9,12 tahun dan kemudian meningkat menjadi 9,44 tahun pada tahun 2020. Untuk indikator pengeluaran perkapita masyarakat Kota Tanjungbalai, secara umum telah terjadi peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya pendapatan per Kapita telah memberikan kemampuan riil konsumsi masyarakat yang diwujudkan dengan pengeluaran perkapita yang juga semakin tinggi. Pada tahun 2016, pengeluaran perkapita masyarakat Kota Tanjungbalai mencapai Rp.10,33 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp.11,13 juta pada tahun 2020. Meningkatnya seluruh komponen yang membentuk IPM juga berdampak terhadap peningkatan Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2016, IPM Kota Tanjungbalai mencapai 67,09 poin lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 68,65 poin. Peningkatan IPM sedikit melambat dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan Pandemi Covid-19. Namun mulai tahun 2021 hingga 2026

terjadi lagi akselerasi peningkatan IPM Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2026 diproyeksikan IPM Kota Tanjungbalai mencapai 72,07 poin.

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan. IPM hanya dapat menggambarkan capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi IPG mampu menggambarkan capaian pembangunan sekaligus mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 5.9.
Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Gender
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Sumber: BPS (diolah), Proyeksi

Pada tahun 2017 capaian IPG Kota Tanjungbalai sebesar 88,94 poin, seiring dengan kenaikan IPM maka IPG Kota Tanjungbalai hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 89,75 poin. Pada tahun 2021 diproyeksikan IPG masih sekitar 89,82 poin disebabkan pandemi Covid-19 sehingga kondisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak belum meningkat secara optimal, tetapi pada tahun 2026 IPG Kota Tanjungbalai diharapkan tumbuh menjadi 91,82 poin.

BAB VI
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, diperlukan strategi yang akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

6.1.1. Strategi untuk pencapaian misi pertama: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mewujudukan misi adalah bahwa semakin tumbuhnya kesadaran dan semangat aparatur untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyakat, dukungan kebijakan mengenai tranparansi dan penerapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan perkembangan teknologi dan informasi. Namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang disebabkan karena masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja dan disiplin aparatur serta masih minimnya inovasi layanan yang diberikan.

Banyak peluang yang bisa diperoleh dalam rangka meningkatkan kinerja misi pertama yakni berbagai penghargaan yang bisa diraih yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan bidang stata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Meski demikian terdapat berbagai ancaman yang menjadi pertimbangan yang harus diantisipasi sejak awal yakni perkembangan kebijakan yang sangat dinamis dan cepat yang disertai dengan penerapan sistem berbasis teknologi harus berimbang dengan peningkatan kapabilitas ASN serta daya saing dengan pemerintah daerah lainnya.
Berdasarkan hal ini maka pilihan strategi yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal;
3. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;

6.1.2. Strategi untuk pencapaian misi kedua: Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Geliat dan semangat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan aparatur tentang bagaimana upaya meningkatkan pemahaman dan semangat beribadah serta pelaksanaan kegiatan keagamaan sejalan dengan semangat mengembalikan Kota Tanjungbalai sebagai kota ulama dan penghasil Qori/Qoriah terbaik, menjadi kekuatan pemerintah kota untuk mewujudnyatakan misi ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga dan maraknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang tumbuh diprakarsai oleh masyarakat. Namun terdapat kelemahan yang masih menjadi kendala yakni masih minimnya keterbatasan tenaga-tenaga penyuluh keagamaan, dai maupun rohaniawan dibanding jumlah masyarakat yang ada, sehingga masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh dakwah/kegiatan keagamaan. Sedangkan peluang yang bisa diraih untuk mewakili keberhasilan misi adalah perolehan penghargaan pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Provinsi, nasional dan internasional serta pemberdayaan ekonomi ummat. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni maraknya kasus narkoba dan kejahatan lainnya, meningkatnya kasus perceraian, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya yang menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan misi ini nantinya.

Bedasarkan pertimbangan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di atas, maka ditetapkan strategi pencapaian misi kedua adalah:

1. Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat;
2. Membina dan menguatkan kecerdasan umat beragama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus kepada serta pembangunan ekonomi ummat;
3. Menguatkan peran pemuka agama/dai/tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga;
4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakat dalam melaksanakan syiar dan kegiatan keagamaan.

6.1.3. Strategi untuk pencapaian misi ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Secara geografis Kota Tanjungbalai memiliki posisi strategis karena berada pada jalur lalu lintas internasional di Selat Malaka. Di samping itu, Tanjungbalai juga dekat dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Posisi ini tentu akan memberikan kesempatan bagi Kota Tanjungbalai untuk mengambil peran dalam pengembangan simpul jasa perdagangan dalam dan luar negeri untuk Provinsi Sumatera Utara. Lokasi strategis Kota Tanjungbalai juga didukung oleh sumberdaya alam utama daerah Hinterlandnya (Kabupaten: Asahan, Batu Bara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan) yang cukup menjanjikan, yakni perikanan, pertanian termasuk buah-buahan dan sayuran, dan perkebunan antara lain kelapa sawit. Kondisi ini merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki Kota Tanjungbalai yang jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat mendorong percepatan pertumbuhan kota terlebih dengan keberadaan pelabuhan Teluk Nibung. Selanjutnya keberadaaan Jalan Lingkar Utara dan lembaga-lembaga pendukung seperti: Perbankan serta Perwakilan lembaga yang ada di daerah, (Bea cukai, Imigrasi dan Karantina) menjadi tambahan kekuatan pendukung. Kekuatan yang dimiliki belum dapat dioptimalkan mengingat masih banyak terdapat kelemahan yakni: Masih rendahnya daya saing SDM ketenagakerjaan, potensi sumberdaya alam belum

dikembangkan secara maksimal, regulasi yang belum mendukung, minimnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan belum optimalnya layanan birokrasi.

Peluang untuk mencapai misi ketiga ini adalah: Ketersediaan kebijakan nasional yang menyatakan bahwa Kota Tanjungbalai sebagai pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kawasan Danau Toba), pasar yang luas yang didukung keberadaaan kawasan Hinterland (Kawasan Kabupaten/Kota di sekitar Tanjungbalai) menjadi pangsa pasar dan kesempatan bagi keberlanjutan pengembangan perekonomian ke depan.

Sementara beberapa ancaman yang bisa menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan misi ketiga utamanya adalah: rendahnya minat inventasi, pendangkalan sungai strategis nasional (sedimentasi pasir Sei Silau dan Sei Asahan) serta ancaman banjir rob maupun banjir kiriman.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di atas, maka pilihan strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi ketiga** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM.
2. Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro;
3. Meningkatkan penggalian sektor pariwisata daerah;
4. Meningkatkan dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
5. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan.

6.1.4. Strategi untuk pencapaian misi keempat: Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau merupakan potensi yang dimiliki pemerintah Kota untuk melaksanakan misi sumberdaya manusia. Hal ini didukung dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk untuk jenjang sekolah dasar yang telah terpenuhi dengan jumlah guru yang juga sudah cukup memadai, jumlah fasilitas kesehatan dasar dan posyandu juga cukup merata di setiap kecamatan. Namun bukan hal yang mudah untuk mewujudnyatakan pembangunan manusia berkualitas mengingat bahwa capaian indeks pembangunan manusia Kota Tanjungbalai yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang masih tertinggal dari capaian Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Meski demikian Kota Tanjungbalai masih punya harapan ke depan mengingat peluang kebijakan revolusi industri dalam peningkatan daya saing daerah serta percepatan pengembangan wilayah Pantai Timur Sumatera menjadi pemicu bagi daerah dalam mengejar keterlinggalan yang ada utamanya dalam meningkatkan daya saing sumberdaya manusia. Upaya ini harus terus menerus dilakukan mengingat kebijakan MEA dan menjadikan ASEAN sebagai pasar ekonomi terbuka. SDM asing yang lebih unggul dapat menjadi ancaman jika kita tidak mengantisipasinya dengan serius.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi keempat** adalah sebagai berikut:

1. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis kewirausahaan berbasis teknologi;
2. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan;

5. Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan;
6. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan kesehatan.

6.1.5. Strategi untuk pencapaian misi kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Strategi pembangunan infrastruktur Kota Tanjungbalai dapat dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT, dimana struktur organisasi perangkat daerah yang lengkap mulai dari perencanaan sampai dengan Perangkat Daerah teknis sebagai pengeksekusi pembangunan infrastruktur merupakan potensi kekuatan yang dimiliki. Sementara beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang harus diminimalisir seperti; Minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, minimnya biaya pemeliharaan infrastruktur yang ada, kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana/alat bidang infrastruktur dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur kurang efisien dan efektif.

Selanjutnya partisipasi masyarakat Kota Tanjungbalai, pengawasan/ penegakkan hukum serta koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur terselenggara dengan baik. Sedangkan banjir yang kerap terjadi di Kota Tanjungbalai menjadi ancaman serius dalam pembangunan infrastruktur harus dapat diatasi secara serius. Infrastruktur seperti jalan aspal/hotmix sangat rentan terhadap genangan air, aspal/hotmix akan mudah rusak dalam waktu singkat sehingga pemerintah Kota Tanjungbalai harus menyediakan anggaran lebih besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastrukutur tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi kelima** adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan
2. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

6.1.6. Strategi untuk pencapaian misi keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya

Kota Tanjungbalai memiliki kekuatan sosial budaya yang kental yakni masyarakat dari berbagai suku, etnis dan agama yang berbeda-beda, bersama-sama menjalani hidup secara berdampingan dengan rukun dan damai dengan suasana yang demokratis. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama utamanya adalah hak dalam mengakses layanan dan informasi pembangunan, hak dalam mengemukakan pendapat serta hak yang sama dalam kedudukan di mata hukum. Selanjutnya memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan dalam rangka pembelaan negara. Sebuah kemajemukan dan kerukunan yang tercipta ditengah-tengah masyarakat dengan budaya yang juga beraneka ragam bisa menjadi peluang yang berdampak positif dan menjadi daya tarik tersendiri serta dapat disinergikan untuk mendukung sektor pariwisata daerah.

Kondisi masyarakat yang heterogen dengan permasalahan yang beragam dapat menyebabkan kerentanan akan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu dilakukan penguatan nilai-nilai secara terus menerus dan kerjasama antar penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Berdasarkan analisis di atas, strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi keenam** adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
3. Pengembangan seni dan budaya lokal.

6.1.6. Strategi untuk pencapaian misi ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga

Persentase penduduk usia produktif Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil sensus Tahun 2020 berjumlah 121.353 atau sebesar 68,94 % dari total penduduk yang berjumlah 176,027 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan rata-rata 2.909 km2 serta tingkat keberagaman yang tinggi, merupakan kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai dasar untuk mewujudkan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah berkolaraborasi dalam peningkatan kemampuannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Menggalang partisipasi, memupuk rasa kebersamaan dan saling memiliki dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik persoalan sosial, ekonomi dan persoalan-persoalan lainnya utamanya yang menyangkut kemiskinan. Diharapkan dengan konsep ini, kelompok-kelompok masyarakat akan dapat lebih berkembang secara mandiri dan dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah

Namun pelaksanaan pemberdayaan menjadi sulit karena masyarakat masih memiliki pendidikan, keterampilan dan tingkat kesadaran yang rendah. Di era kini keberhasilan daerah-daerah lain di Indonesia dalam memberdayakan masyarakatnya dan perhatian serta penghargaan dari Pemerintah Pusat dapat menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Meski demikian pelaksanaan pemberdayaan tidak menjadi mudah manakala perkembangan teknologi lebih mendorong masyarakat lebih bersifat individualistik dan kurang perduli dengan urusan orang lain dan tidak memiliki kesadaran dalam berpartisipasi.

Berdasarkan pertimbangan situasi diatas, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi ketujuh** adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Rangkuman keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tertera pada tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS.					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi Kesatu:	**Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima**				
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

				2	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
Misi Kedua: Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia					
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4	Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat
				5	Membina dan menguatkan kecerdasan ummat bergama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus kepada seluruh serta pemberdayaan ekonomi ummat
				6	Menguatkan peran pemuka agama/dai/ tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga
				7	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ber-kembang di masyarakat dalam melaksanakan syiar dan kegiatan keagamaan
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera					
3	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah	4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	8	Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM

				9	Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro
				10	Meningkatkan penggalian potensi kepariwisataan daerah
		5	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	11	Meningkatkan dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai
				12	Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan
Misi Keempat:	**Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat**				
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	6	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	13	Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan kewirausahaan
				14	Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				15	Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	16	Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan
				17	Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan
				18	Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan Kesehatan
Misi Kelima:	**Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan**				
5	Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas	19	Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan

			infrastruktur publik		
		9	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	20	Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan
Misi Keenam:	**Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya**				
6	Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	10	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	21	Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
				22	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
				23	Pengembangan seni dan budaya lokal.
Misi Ketujuh:	**Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga**				
7	Meningkatkankeberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	11	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	24	Peningkatan keberdayaan masyarakat
				25	Menurunkan angka kemiskinan
				26	Peningkatan kesejahteraan keluarga

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Sementara penekanan tema/fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Kota Tanjungbalai ditetapkan berdasarkan capaian sasaran pembangunan jangka menengah periode sebelumnya agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

1) **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2022)**
Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan pada **pemulihan ekonomi** dan **kehidupan sosial masyarakat** melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM dengan mengunggulkan program ekonomi kreatif dalam rangka mendukung sektor pariwisata serta melakukan **perbaikan kualitas SDM** (Pendidikan, Kesehatan dan ketenagakerjaan) dan upaya **penanggulangan kemiskinan**. Selanjutnya perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik di berbagai bidang dengan dukungan teknologi informasi diarahkan untuk meraih prestasi. Sejalan dengan itu perbaikan dan **pembangunan infrastruktur** juga terus dilakukan dan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan-lingkar sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan/Kawasan strategis dan infrastruktur publik lainnya menuju msyarakat maju dan sejahtera dalam tatanan kehidupan yang religi dan demokratis.

2) **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2023)**
Arah kebijakan tahun kedua masih difokuskan pada **pengembangan ekonomi masyarakat** dan **pembangunan sosial** melalui keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat, melanjutkan **pembangunan infrastruktur pariwisata** daerah yang diharapkan telah berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor UMKM. **Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik** sudah pada tahap pemenuhan SDM berkualitas dengan cakupan system layanan berbasis elektronik hingga tingkat Kelurahan. Di tahun ini juga upaya **penanggulangan kemiskinan** melalui sinergitas program diharapkan telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

3) **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2024)**
Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga sebagai *midle of term* dari rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah **pemantapan pembangunan diberbagai bidang** dengan memperhatikan capaian sasaran tahun-tahun sebelumnya sebagai fokus pembangunan dan akan mengedepankan sektor-sektor yang tertinggal. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Pada tahap ini nilai-nilai pemberdayaan masyarakat diharapkan sudah mulai berkembang dengan baik dan bersinergi antar sektor pembangunan yang memang menjadi perhatian dan akan dikedepankan menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing

4) **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2025)**
Dalam rangka menuju daya saing daerah, maka arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri dalam tatanan masyarakat yang religi. Dukungan pengarusutamaan tata kelola juga telah baik dan semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.

5) **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2026)**
Periodesasi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 telah berakhir pada masa ini, sehingga tahun kelima arah kebijakan pembangunan akan disesuaikan dengan arah kebijakan RPJPD yang baru. Meski demikian pemusatan kebijakan juga masih diarahkan pada pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal dan

terus menerus mengupayakan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat yang tentunya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan penduduk dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dari uraikan arah kebijakan per tahun diatas, dapat disimpulkan bahwa ringkasan arah kebijakan dimaksud meliputi:

1. Pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan pariwisata daerah
2. Pembangunan kulitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan sektor Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan ummat beragama yang religius.
5. Pemenuhan dan pengembangan infrastuktur yang berkelanjutan dalam rangka mendukung daya saing daerah
6. Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat

6.2.1. Fokus Pembangunan

Berdasarkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di atas maka disimpulkan tema/fokus pembangunan Kota Tanjungbalai untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Tema/Fokus Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Tahun	Tema/Fokus Pembangunan
2022	Pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM untuk mendukung sektor pariwisata; Perbaikan kualitas SDM; Penanggulangan kemiskinan; Perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik; Pembangunan infrastruktur pendukung penghubung ke kawasan strategis dan infrastruktur publik lainnya menuju Tanjungbalai maju dan sejahtera.
2023	Pengembangan ekonomi masyarakat terutama peningkatan sektor pariwisata dan pembangunan manusia melalui keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata daerah; Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik serta penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program menuju kesejahteraan masyarakat.
2024	Pemantapan pembangunan diberbagai bidang meliputi: Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing.
2025	Pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi; ketersediaan infrastruktur yang semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan pengarusutamaan tata Kelola, menuju Tanjungbalai maju dan berdaya saing.
2026	Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal; pemenuhan layanan dasar yang berkualitas; Penyediaan infrastuktur dan tata Kelola yang mantap mencapai masyarakat yang maju dan berdaya saing.

6.2.2. Arah Kebijakan Strategi Terkait Pelaksanaan Masing-Masing Misi

Penentuan arah kebijakan dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya penentuan arah kebijakan strategi ini juga ditujukan untuk memetakan dan menyasar ketepatan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang dipilih. Oleh karenanya rumusan arah kebijakan strategi memiliki fokus yang lebih rinci.
Arah kebijakan strategi terkait pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS.			
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
			2. Peningkatan kualitas pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan SPIP
			3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah
			4. Penetapan dan penerapan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
			5. Pengelolaan asset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efisien dan bertanggung jawab
			6. Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan keuangan daerah
			7. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensip , integratif dan aplikatif
			8. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah
		2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN
			2. Peningkatan Profesionalisme ASN
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	3. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan	1. Peningkatan fasilitasi pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi kegiatan kegiatan strategis
			2. Peningkatan fasilitasi pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat strategis

			ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	3. Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan
				4. Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum kepada KDH dan Sekretaris Daerah
				5. Peningkatan fasilitasi bagi pengembangan kapasitas dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah serta pelayanan publik
				6. Peningkatan fasilitasi layanan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian
				7. Peningkatan fasilitasi bagi koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dan urusan pemerintahan lainnya
				8. Peningkatan fasilitasi bagi penyusunan kebijakan Pemerintah Kota pelayanan hukum
				9. Peningkatan fasilitasi bagi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
				10. Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan DPRD
				11. Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil
				12. Fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan
				13. Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan peningkatan kesadaran akan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
				14. Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)
				15. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan bencana
				16. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-bidang pembangunan lainnya

			17. Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
			18. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk berperan aktif dalam mengisi pembangunan
			19. Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di Wilayahnya

Tabel 6.4
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua

Misi Kedua: Membina dan mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	3. Meningkatnya keamanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4. Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat	1. Penyusunan dan pelaksanaan Perwa tentang keagamaan
		5. Membina dan menguatkan kecerdasan ummat beragama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus serta pemberdayaan ekonomi ummat.	1. Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan bertaksi seni, budaya yang religi
			2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama dan pendidikan karakter pada keluarga untuk menyiapkan generasi tangguh beriman dan bertaqwa
			3. Peningkatan Pelayanan Korpri dalam pembinaan profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama.
			4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masjid dan lembaga keagamaan lainnya sebagai pendukung perekonomian ummat
		6. Menguatkan peran pemuka agama/dai/ tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga	1. Peningkatan kapasitas pemuka agama/dai/guru pengajian dalam internalisasi nilai dan norma agama
		7. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan	1. Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB)

		lembaga lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakat dalam melaksanakan ajaran dan kegiatan keagamaan	2. Peningkatan peran tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam pengimplementasian nilai-nilai keagamaan

Tabel 6.5
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah	4. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	8. Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM	1. Fasilitasi pembinaan, bantuan sarana prasarana dan permodalan sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif
			2. Peningkatan Pendidikan dan ketrampilan serta kemampuan berwirausaha bagi masyarakat
			3. Pemanfaatan pengembangan kuantitas dan kualitas produk unggulan sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif dalam rangka mendorong pariwisata daerah
			4. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan perdagangan dan perindustrian dan pusat pusat kegiatan ekonomi lainnya
			5. Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian daerah
			6. Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan
		9. Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro.	1. Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional melalui pengembangan dan penguatan peran koperasi nelayan
			2. Kemitraan dengan Pertanikan untuk peningkatan aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM
			3. Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri
		10. Meningkatkan penggalian potensi	1. Peningkatan dukungan dan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan

		sektor pariwisata daerah	2.	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pariwisata daerah
			3.	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata baru dan pariwisata unggul berbasis budaya, pendidikan dan nilai agama.
			4.	Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah
	5. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	11. Meningkatnya dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai	1.	Peningkatan system layanan perijinan dan penyediaan kemudahan ijin berusaha
			2.	Mendorong terciptanya investasi dan iklim usaha kondusif
			3.	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dan pengembangan dunia usaha
			4.	Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan
			5.	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan pihak lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan dunia usaha
		12. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan	1.	Mengembangkan kegiatan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja
			2.	Meningkatkan kesempatan berusaha
			3.	Meningkatkan Kerjasama dengan pihak dunia usaha/Pihak Ketiga untuk perluasan kesempatan magang kerja

Tabel 6.6
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat

Misi Keempat: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK	6. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	13. Merata sistem manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan kewirausahaan	1. Merata sistem layanan data dan informasi kependidikan dan manajemen sekolah berbasis aplikasi 2. Pengembangan kurikulum Pendidikan karakter, kewirausahaan dan muatan lokal berbasis potensi unggulan 3. Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite sekolah 4. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber 5. Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa 6. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat 7. Pembinaan dan pengembangan Sekolah melalui KKG, K3S dan MKKS.
		14. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan bahan bacaan dan mobiler sekolah yang merata dan berkeadilan 2. Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas, ruang

				UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata usaha
			3.	Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetitif lainnya
		15. Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1.	Pemerataan distribusi guru yang merata dan berkeseusaian antar sekolah
			2.	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
			3.	Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	7. Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	16. Merata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan	1.	Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
			2.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis aplikasi
			3.	Peningkatan dan pemantapan Kinerja BLUD RSUD Dr. T. Mansyur
			4.	Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis
		17. Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan	1.	Peningkatan kualitas penyelanggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata dan berkeadilan
			2.	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan serta pencegahan penanganan Covid-19
			3.	Peningkatan status gizi masyarakat dan penanganan stunting
			4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat
			5.	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular

		16. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan	1.	Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status puskesmas
			2.	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya
			3.	Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non medis melipuli peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan

Tabel 6.7
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
6. Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	19. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/ prasarana perkotaan	1. Peningkatan akses ke kawasan strategis melalui peningkatan sarana dan prasarana jalan lingkar, jalan alternatif dan jembatan 2. Peningkatan sarana prasarana bidang perumahan dan permukiman 3. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air bersih 4. Pengembangan data base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang keciptakaryaan 5. Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transportasi 6. Pengembangan SDA, pengembangan jaringan irigasi dan peningkatan upaya pengendalian banjir 7. Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana serta pengembangan kader tagana 8. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang
	9. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang diawali dengan peningkatan kualitas	20. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan	1. Penganekaragaman kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup 2. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan

	lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim		3.	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai ikon kota
			4.	Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait
			5.	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			6.	Pengendalian perubahan iklim melalui penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan
			7.	Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan

Tabel 6.8
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam

Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
6. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	10. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	21. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelolompok masyarakat	1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan
			2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah
		22. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum	1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya
			2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislatif
			3. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum
			4. Peningkatan kualitas SDM petugas TPKKL
		23. Pengembangan seni dan budaya local	1. Pengembangan budaya sebagai potensi penggerak sektor pariwisata daerah
			2. Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan kegiatan bernuansa kebudayaan.
			3. Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya

Tabel 6.9
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelujuh

Misi Kelujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian	11. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	24. Peningkatan keberdayaan masyarakat	1. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyerap dan meyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat
			2. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama sama
			3. Peningkatan pengetahuan, ketampilan dan sikap masyarakat menuju masyarakat yang mandiri.
			4. Penguatan peran PUG
			5. Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak
		25. Menurunkan angka kemiskinan	1. Penyusunan kebijakan dan penguatan kelembagaan terkait penanggulangan kemiskinan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perempuan miskin dan disabilitas
			3. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk berusaha secara mandiri
			4. Peningkatan koordinasi dan Sinergitas upaya upaya penanggulangan kemiskinan
		26. Peningkatan kesejahteraan keluarga	1. Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung Pembangunan Sosial.
			2. Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungannya
			3. Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial
			4. Peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak
			5. Peningkatan pemberdayaan keluarga

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategis dan arah kebijakan yang ditetapkan. Atau dengan kata lain bahwa program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada kurun 2021-2026 adalah program pembangunan yang mengakomodir isu strategis yang terdiri dari:

1. Peningkatan daya saing daerah
2. Peningkatan penanaman modal (investasi)
3. Pembangunan sumberdaya manusia
4. Penyediaan infrastruktur
5. Reformasi birokrasi
6. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah
8. Pengelolaan pembiayaan pembangunan

Dengan beberapa prioritas pembangunan yang ditekankan pada upaya:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produkvitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif.
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah.
4. Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah
5. Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama
6. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Selain itu program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis untuk mendukung program strategis nasional, provinsi, dan daerah, mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal dan penyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

6.3.1. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Sasaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Telah disebutkan sebelumnya bahwa program pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan untu menjawab visi, misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Uraian program prioritas pembangunan daerah yang mendukung capaian sasaran daerah sebagaimanan tertera pada Tabel berikut:

Tabel 6.18

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
	Program															
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		[illegible]		
						Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran/Hasil (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun Ke-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
				Persentase OPD yang [illegible]	80%	80%		85%		85%		90%		90%				90%		
6	01	02	Program Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan	Persentase [illegible]	100%	90%	28.000	90%	29.000	90%	30.000	90%	31.000	90%	32.000			90%	32.000	Kepala Dinas
7	01	03	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase [illegible]	90,00%	90,00%	1.000.000	90,00%	1.000.000	90,00%	1.000.000	90,00%	1.000.000	90,00%	1.000.000			90,00%	5.000.000	Sekretaris
				Persentase [illegible]	90,00%	90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%				90,00%		
				[illegible]	24 Orang	24 Orang		24 Orang		24 Orang		24 Orang		24 Orang				24 Orang		
				[illegible]	75 Orang	75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang				75 Orang		
8	01	04	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase [illegible]		100%	45.000	100%	47.000	100%	49.000	100%	51.000	100%	53.000			100%	245.000	Sekretaris
				Persentase [illegible]	-	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
9	01	05	Program [illegible]	[illegible]	75%	75%	8.000	75%	8.000	75%	8.000	80%	8.000	80%	8.000			80%	8.000	Sekretaris

Kode			Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun (Tahun 0)	Capaian Sasaran Strategis pada setiap Tahun (Tahun 1 s.d. Tahun 5)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	01	0	Program Pemerintahan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0%	20%	[illegible]	40%	[illegible]	60%	[illegible]	80%	[illegible]	100%	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]
4	11	0	Program Pemenuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah	Cakupan sarana dan prasarana kegiatan operasional perangkat daerah	-	30%	[illegible]	30%	[illegible]	30%	[illegible]	30%	[illegible]	30%	[illegible]	30%	[illegible]	[illegible]
				Persentase fasilitasi kerjasama bidang pengembangan [illegible]		10%		10%		10%		10%		10%		10%		
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana [illegible]		30%		30%		30%		30%		30%		30%		
4	11	0	Program Pemenuhan dan Pengembangan	Persentase pengembangan kegiatan administrasi pemerintahan		10%	[illegible]	10%	[illegible]	10%	[illegible]	10%	[illegible]	10%	[illegible]	10%	[illegible]	[illegible]
				Persentase pengembangan pengelolaan barang milik daerah		10%		10%		10%		10%		10%		10%		
				Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan	-	10%		10%		10%		10%		10%		10%		
8	16	0	Program Pengelolaan Kearsipan	Cakupan Layanan kegiatan arsip Perangkat Daerah	-	40%	[illegible]	40%	[illegible]	40%	[illegible]	40%	[illegible]	40%	[illegible]	40%	[illegible]	[illegible]
4	11	0	Program Pemenuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase pemenuhan dan pengembangan sarana dan prasarana [illegible]	-	50%	[illegible]	50%	[illegible]	50%	[illegible]	50%	[illegible]	50%	[illegible]	50%	[illegible]	[illegible]

Kode			Nomenclature Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Fungsi/ Sub Fungsi	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Fungsi/ Sub Fungsi	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun RPJMD / Tahun Ke	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		[illegible]		[illegible]
				Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	-	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	Nomenklatur Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Hasil/Output	Kondisi Kinerja Awal (2025) / Target RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 3															
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
	Program 6															

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			Nomenklatur Sub Unit Organisasi / Kewenangan Non Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Setelah Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan (Diisi oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab)
						Kondisi Awal		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode	Nomor Urut Tabel dan Program/Kegiatan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun ke-1 (Tahun A)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Perangkat Daerah
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Tanjungpinang dan pemanfaatan hasil pemasaran pariwisata	15%	20%		25%		30%		35%		40%		40%		
7	11	10	Program Pengembangan Kebudayaan	Nilai hasil pemanfaatan kebudayaan	75%	79%	1.100	80%	1.150	82%	1.200	85%	1.250	85%	1.300	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7	11	20	Program Pengembangan Kebudayaan	Pemanfaatan kebudayaan	60%	60%	6.400	65%	6.450	70%	6.500	75%	6.550	75%	6.600	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7	11	30	Program Pengembangan Kebudayaan	Nilai Budaya Tahun	70%	75%	250.000	80%	300.000	85%	350.000	90%	400.000	90%	400.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7	11	40	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian kebudayaan Melayu	20%	25%	200.000	30%	250.000	35%	300.000	40%	350.000	40%	350.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
			Cakupan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Tanjungpinang dan pemanfaatan hasil pemasaran pariwisata	20%	75%		25%		30%		35%		40%		40%	
7	11	50	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pemanfaatan kebudayaan	10%	90%	5.000	95%	5.250	95%	5.500	95%	5.750	95%	5.750	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7	11	60	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian kebudayaan Melayu	20%	30%	8.000	35%	8.250	35%	8.500	35%	8.750	40%	9.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang

Kode			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (pada awal tahun RPJMD) (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Rincian Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					%		%		%		%		%		%		
					%		%		%		%		%		%		
					%		%		%		%		%		%		
					%		%		%		%		%		%		
					%		%		%		%		%		%		
					%		%		%		%		%		%		

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Kode	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		[illegible]		[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Kode			Nomenclature Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
			Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Keterangan (Kondisi Kinerja/Kerangka Pendanaan)
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		MISI KETIGA																
		Mewujudkan aksi masyarakat beriman untuk beragama menjadi masyarakat yang religius dan berakhlak mulia																
		Tujuan 3																
		Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia																
		Sasaran 3																
		Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan agama dan masyarakat																
		Program																
1	01	08	Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Cakupan pembinaan dan pengembangan keagamaan	-	80%	4.057.437	80%	4.751.200	80%	4.927.200	80%	4.940.200	80%	5.105.000	80%	5.105.000	Dinas Kesbang
				Persentase kegiatan keagamaan yang terlaksana	-	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
				Persentase pembinaan pemahaman dan pengamalan agama	-	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		MISI KETIGA																
		Meningkatkan pembinaan/edukasi yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan dalam upaya membudayakan kemandirian menuju masyarakat sejahtera dan sejahtera																
		Tujuan 3																
		Meningkatkan cipta usaha pemberdayaan kualitas produk dan pasar																
		Sasaran 4																
		Meningkatnya produktivitas usaha pemberdayaan masyarakat																
		Program																
2	02	08	Program Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan	55.000.000 Paket	55.000.000 Paket	10.000	55.000.000 Paket	10.000	55.000.000 Paket	10.000	55.000.000 Paket	10.000	55.000.000 Paket	10.000	55.000.000 Paket	10.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan
3	03	08	Program Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan	jumlah peserta pemberdayaan perempuan	125.00 Paket	125.00 Paket	20.000	125.00 Paket	120.000	125.00 Paket	130.000	125.00 Paket	140.000	125.00 Paket	150.000	625.00 Paket	570.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		[illegible]		[illegible]
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	-	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			Nomenklatur Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun ke-)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

(1)		(2)		(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
		Sasaran 1																	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan																	
		Program																	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Kode			Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi akhir		Perangkat Daerah
						Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	Target	[illegible]	
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome/output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kelompok Sasaran												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
	MISI KEMPAT																	
	Meningkatkan sumber daya manusia pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan penegakan disiplin kesehatan masyarakat																	
	Tujuan 4																	
	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau																	
	Sasaran 8																	
	Meningkatnya sarana dan sarana layanan pendidikan serta sarana sarana pendidikan yang baik dan layak pakai																	
	Program																	
1	01 02 Program Pengadaan Pendidikan	Cakupan pendidikan di Kecamatan [X]	-	71,20%	40.017.515	71,20%	40.106.534	72,90%	40.197.972	73,30%	40.245.007	73,80%	40.864.755			73,80%	40.864.755	Dinas Pendidikan
		Angka Kecamatan [X]	-	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
		Angka Kecamatan [X]	-	100%		100%		100%		100%		100%				100%		
		Angka Kecamatan [X]	-	40%		40%		40%		40%		40%				40%		
		Angka Kecamatan [X]	-	90%		90%		90%		90%		90%				90%		
		Jumlah Kecamatan [X] yang terdapat [X]	-	10.227		10.227		10.227		10.227		10.227				10.227		
		Jumlah Kecamatan [X] yang terdapat [X]	-	7.227		7.227		7.227		7.227		7.227				7.227		
		Jumlah Kecamatan [X] yang terdapat [X]	-	4.151		4.151		4.151		4.151		4.151				4.151		
1	01 03	Program Pengembangan Kecamatan	Jumlah Kecamatan [X]	-	50%	30.000	50%	30.000	50%	30.000	50%	30.000	50%	30.000		50%	30.000	Dinas Pendidikan
1	01 04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio [X] terhadap [X] Kecamatan [X]	-	60,00%	20.000	60,00%	21.000	70,00%	25.000	80,00%	30.000	80,00%	30.000		80,00%	30.000	Dinas Pendidikan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				[illegible]	-	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Sasaran 7															
			[illegible]															
			Program															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]															
			[illegible]															
			[illegible]															
			[illegible]															
			[illegible]															
			[illegible]															
			Program															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50%	[illegible]	75%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80%	[illegible]	85%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			Nomenklatur Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (tahun N-1)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Misi			Tujuan/Sasaran Renstra OPD yang Dicapai melalui Program	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Komponen)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kelompok Sasaran											Lokasi (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
			Sasaran 3															
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, merata dan terjangkau, berfokus pada keluarga, kelompok rentan dan lingkungan hidup dan pengelolaan data pelayanan kesehatan															
			Program															
1	3	a	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir, Balita, Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja, Dewasa, Usia Produktif, Pasangan Usia Subur, Lansia, Penderita Penyakit Tertentu dan Penderita Gangguan Jiwa	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, cakupan pelayanan kesehatan balita, cakupan pelayanan kesehatan pra sekolah, cakupan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, cakupan pelayanan kesehatan remaja, cakupan pelayanan kesehatan dewasa, cakupan pelayanan kesehatan usia produktif, cakupan pelayanan kesehatan pasangan usia subur, cakupan pelayanan kesehatan lansia, cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tertentu, cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa	0,00%	0,00%	100.000	0,00%	110.000	0,00%	121.000	0,00%	133.100	0,00%	146.410	0,00%	161.051	Di seluruh wilayah Kab. Jr
2	3	a	Program Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	-	-	-	0,00%	30.000	0,00%	33.000	-	2.000	0,00%	36.300	0,00%	39.930	Di seluruh wilayah Kab. Jr
3	3	a	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Tertentu dan Penanganan Gangguan Jiwa	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tertentu, cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa	0,00%	0,00%	74.000	0,00%	81.400	0,00%	89.540	0,00%	98.494	0,00%	108.343	0,00%	119.177	Di seluruh wilayah Kab. Jr
4	3	a	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Usia Produktif	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	0,00%	0,00%	61.000	0,00%	67.100	0,00%	73.810	0,00%	81.191	0,00%	89.310	0,00%	98.241	Di seluruh wilayah Kab. Jr
5	3	a	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pasangan Usia Subur (Pus)	Pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	0,00%	20.000	0,00%	22.000	0,00%	2.000	0,00%	26.620	0,00%	29.282	Di seluruh wilayah Kab. Jr
6	3	a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Upkp) Dan Kesehatan Lingkungan (Kesling) Serta Pemberdayaan Dan Kemandirian Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat bidang kesehatan	-	0,00%	61.000	0,00%	67.100	-	-	0,00%	81.191	0,00%	89.310	0,00%	98.241	Di seluruh wilayah Kab. Jr

Kode			Nomenklatur Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun ke-0	Capaian Kinerja Program dan Prakiraan Pada Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Kondisi	Target	Kondisi	Target	Kondisi	Target	Kondisi	Target	Kondisi	Target	Kondisi	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun (Tahun A)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Kapasitas Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerha Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	MISI KETUJUH																	
	Mewujudkan kualitas pembangunan manusia untuk dan kekuatan kehidupan sosial masyarakat melalui pengelolaan potensi keluarga																	
	Tujuan 7																	
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis kearifan lokal																	
	Sasaran 19																	
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat																	
	Program																	
2	7 10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Pemberdayaan LPM	-	60%	550.000	70%	594.541	80%	720.000	90%	450.000	100%	481.000	100%	481.000	Dinas PPKB dan PMD	
			Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan PKK	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pemberdayaan KWT aktif		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pemberdayaan posyandu aktif	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan pemberdayaan PHBKBN-dll	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pemeliharaan sarana prasarana pemberdayaan kesejahteraan sosial	-	60%		60%		70%		80%		90%		90%			
			Pemberdayaan pemberian penyuluhan dan keterampilan kerja	-	70%		80%		70%		90%		90%		90%			
			Pemberdayaan pos pelayanan terpadu (Pos	-	70%		80%		70%		90%		90%		90%			

Kode			Nomenklatur Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019	Kode Urusan Pemerintahan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)														Target Kinerja Program pada Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kondisi Awal		Kondisi Akhir												
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)			(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	[illegible]	[illegible]	Program Pemberdayaan Sosial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	Program Rehabilitasi Sosial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Kode	Nomenklatur Sasaran Renstra OPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun ke-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
				dst%	dst%		dst%		dst%			dst%		dst%			dst%	
				dst%	dst%		dst%		dst%			dst%		dst%			dst%	
				dst%	dst%		dst%		dst%			dst%		dst%			dst%	
1	01	01	Program Pendapatan Daerah															DINAS SOSIAL
1	01	02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah															DINAS SOSIAL

6.3.2. Pogram Pembangunan Daerah yang Mendukung Pencapaian SPM

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka kepada Pemerintah daerah wajib memenuhi SPM dimaksud yang terkait dengan pelayanan dasar yang terdiri atas atas urusan: *1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman, dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.*

Perwujudan penerapan SPM diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan target capaian SPM Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11
CAPAIAN dan TARGET SPM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target					Program	Perangkat Daerah Pengampuh
				Realisasi (2020)	Target (2021)	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**Pendidikan**											
1	Pendidikan PAUD	Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	Persen	51,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / SD / MI / SMP / MTs	Persen	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

D	Kesehatan											
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	Persen	92,7%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	51,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	26,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	67,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

		pemeriksaan HIV sekuel stander										
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	95,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang sarnah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**											
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

E	Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	95,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	81,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	91,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP

F	Sosial											
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	48,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	17,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kabkota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabkota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial

6.3.3. Program Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah selain bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah dan mengatasi tantangan isu-isu strategis juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas daerh yang diakomodir sebagian dari janji-janji politik kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Berikut adalah program priroritas daerah Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan dan prirotas daerah.

Tabel 6.12. PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITA/KEGIATAN PRIORITAS		PENJELASAN	RENCANA PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH									
	PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT									
	1	Pengembangan Kampung Tematik, wisata kuliner, heritage, cagar budaya dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menduung wisata air	Penyelesaian legalitas kawasan pariwisata daerah	√	√	√	√	√	Disparpora, Dinas Perkim dan dinas terkait lainnya	APBD
			Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	√	√	√	√	√	Disparpora, Dinas Perkim dan dinas terkait lainnya	APBD, APBD Provinsi dan APBN
	2	Pengembangan UMKM Berbasis Komunitas Menuju Tanjungbalai Kota Kreatif	Pelatihan ketenagakerjaan kerja, pembinaan dan pemberian bantuan kepada UMKM berbasis komunitas terutama yang mengangkat kearifan lokal)	√	√	√	√	√	Dinas UMKM, P3A PMK, Disnaker	Dinas UMKM, P3A PMK, Disnaker
	3	Bantuan kapal, Asuransi, dan alat tangkap nelayan	Penyediaan Bantuan kapal, Asuransi, dan alat tangkap nelayan melalui APBD Kota, Provinsi dan APBN dan sumber-sumber lainnya	√	√	√	√	√	Dinas Perikanan	APBD, APBD Provinsi, APBN

	4	Penerbitan rekomendasi izin usaha, promosi dan pelaksanaan metrologi legal	Rekomendasi penerbitan izin, promosi produk daerah, pelaksanaan TTUP	√	√	√	√	√	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	APBD
	5	Pembuatan peta potensi investasi Kota Tanjungbalai	Tersedianya RUPM, data potensi investasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	APBD
II	**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF**										
III	**PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH**										
IV	**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**										
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT										
	1	Beasiswa Berprestasi	Beasiswa kepada siswa sekolah dasar dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	√	√	√	√	√	Bantuan sosial (Sekretariat Daerah)	APBD, CSR
	2	Peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	Peningkatan kompetensi guru melalui Diklat-diklat fungsional guru yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota maupun secara mandiri	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan	APBD
			Evaluasi distribusi guru per sekolah, per kecamatan berdasarkan kesesuaian kompetensi	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan	APBD
	3	Pengembangan Politeknik	(Meningkatkan kualitas promosi dan Kerjasama dengan Pihak III serta penambahan program studi baru	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan	Hibah (APBD)

4	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Penyusunan DED dan pembangunan/ rehabilitasi dan pemenuhan sarpras RSU Dr Mansyur, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan / RSUD Dr. T. Mansyur	APBD, APBD Provinsi, APBN
		Pencegahan penanggulangan COVID-19 dan Pemenuhan Vaksinasi	√	-	-	-	-	Dinas Kesehatan / RSUD Dr. T. Mansyur	APBD, APBD Provinsi, APBN
		Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan pemugaran IPAL RSUD	√	-	-	-	-	Dinas Kesehatan / RSUD Dr. T. Mansyur	
5	Peningkatan UHC pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai di RSUD Dr Mansyur	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan / RSUD Dr. T. Mansyur	APBD
6	Sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Mengoptimalkan Peran TKPKD	√	√	√	√	√	Bappeda dan stakeholder terkait	APBD
7	Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Verival DTKS dan data penerima bantuan perlindungan sosial lainnya agar lebih tepat sasaran	√	√	√	√	√	Dinas Sosial	APBD
8	Peningkatan kualitas dan pembangunan baru Rumah tidak layak huni	Bantuan rehab/pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni	√	√	√	√	√	Dinas Perkim	APBD, APBD Provinsi, APBN
9	Peningkatan cakupan layanan PMKS	Peningkatan cakupan layanan kepada PMKS	√	√	√	√	√	Dinas Sosial	APBD

	10	Pembangunan perempuan dan anak	Fasilitasi Kota Layak Anak, pembangunan perempuan dan pengarusutamaan gender	√	√	√	√	√	Dinas P3A PMK	APBD
V	**PENGARU SUTAMAAN AKUNTABILITA S TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITA S KEHIDUPAN BERAGAMA**										
	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA TATA KELOLA DAN KUALITA S KEHIDUPAN BERAGAMA										
	1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Updating data PBB, penyesuaian regulasi tentang objek pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	√	√	√	√	√	BPKPAD dan stakeholder lainnya	APBD
	2	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan	Diklat Struktural, Fungsional dan Diklat Teknis lainnya	√	√	√	√	√	BKD	APBD
	3	Peningkatan hot spot/wifi gratis	Peningkatan kapasitas hot spot/wifi gratis untuk masyarakat dan penyediaan perangkat internet bagi Kelurahan se Kota Tanjungbalai	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo dan Kecamatan	APBD
	4	Spiritual Training bagi ASN	Fasilitasi pesantren mental spiritual bagi ASN	√	√	√	√	√	Bagian Kesra Setda	APBD
	5	Peningkatan layanan ketertiban dan ketentiban umum	Peningkatan layanan kebakaran (Pengadaan mobil pemadam kebakaran) dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Tantibum	√	√	√	√	√	Satpol PP	APBD
	6	Peningkatan layanan masyarakat di Kelurahan	Rehab berat Kantor Lurah Sijambi	√	√	√	√	√	Dinas PUPR	APBD

	7	Peningkatan layanan demokrasi	Dukungan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pemilu/pemilukada, bantuan hukum, Pendidikan politik masyarakat	√	√	√	√	√	Badan Kesbangpol, secretariat daerah	APBD
	8	Optimalisasi Perusahaan Umum Daerah	Penataan kelembagaan dan optimalisasi Rencana kerja/ Bisnis plan Perusda	√	√	√	√	√	Bagian Perekonomian	APBD
	9	Pendidikan kader ulama/mubaligh	Pembinaan pendidikan kader ulama/mubaligh kerjasama dengan MUI Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	√	Bagian Kesra dan Setda dan Stakeholder lainnya	Hibah (APBD)
	10	1 Kelurahan 1 Hafida Quran	Membantu/bekerjasama dengan Rumah Quran/ Rumah Tahfidz yang dipelopori masyarakat	√	√	√	√	√	Bagian Kesra dan Stakeholder lainnya	-
			Fasilitasi hibah dari Pemerintah kota untuk pembinaan RT/RQ	√	√	√	√	√	Bagian Kesra Setda	Hibah (APBD)
	11	Panti asuhan Yatim, lansia, disabilitas dan para lansia	Bukan sasaran Program Pemkot dan akan dilakukan evaluasi ulang penerima	√	√	√	√	√	Bagian Kesra Setda	Swadana
	12	Pembangunan masjid agung dan islamic center	Pemantangan lahan pembangunan Masjid Agung seluas ± 14.657 m^2	-	√	√	-	-	Dinas PUPR	APBD, APBD Provinsi, APBN
V	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH**										
	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTUKTUR PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH										
	1	Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan	Peningkatan jalan lingkar Utara dan Jalan Selatan beserta fasilitas sarana prasarana pendukungnya	√	√	√	√	√	Dinas PUPR	APBD, APBD Provinsi, APBN

2	Revitalisasi drainase	Melaksanakan revitalisasi drainase di kawasan perkotaan	√	√	√	√	√	Dinas PUPR dan Dinas Perkim	APBD, APBD Provinsi, APBN
3	Pengendalian banjir dan sedimentasi	Pengembangan infrastruktur bencana (polding revinap) dan pembangunan tanggul/perkuatan talang serta jalan evakuasi daerah bantaran sungai/Edik dan normalisasi sungai	√	√	√	√	√	BPBD dan stakeholder terkait	APBD, APBD Provinsi, APBN dan Sumber Pendanaan lainnya
4	1 Kecamatan 1 WTP (pengelolaan air baku)	Rencana pembangunan WTP VII di Kecamatan Dabuk Bontar Timur	√	√	√	√	√	Dinas Perkim dan Dinas PUPR	APBD, APBD Provinsi, APBN dan Sumber Pendanaan lainnya
5	Lanjutan penataan waterfront city	Pembangunan Street pile	√	√	-	-	-	Dinas PUPR dan stakeholder terkait lainnya	APBD, APBD Provinsi, APBN dan Sumber Pendanaan lainnya
		Lanjutan penataan kawasan waterfront City	-	-	√	√	√	Dinas PUPR dan stakeholder terkait lainnya	APBD, APBD Provinsi, APBN dan Sumber Pendanaan lainnya
6	Penataan permukiman masyarakat	Penataan kawasan permukiman di Kelurahan prioritas Kawasan kumuh	√	√	√	√	√	Dinas Perkim, PUPR, LH	APBD, APBD Provinsi, APBN
7	Pengelolaan persampahan	Review DED pembangunan TPA dan dokumen lingkungan	√	-	-	-	-	Dinas LH	APBD, APBD Provinsi, APBN

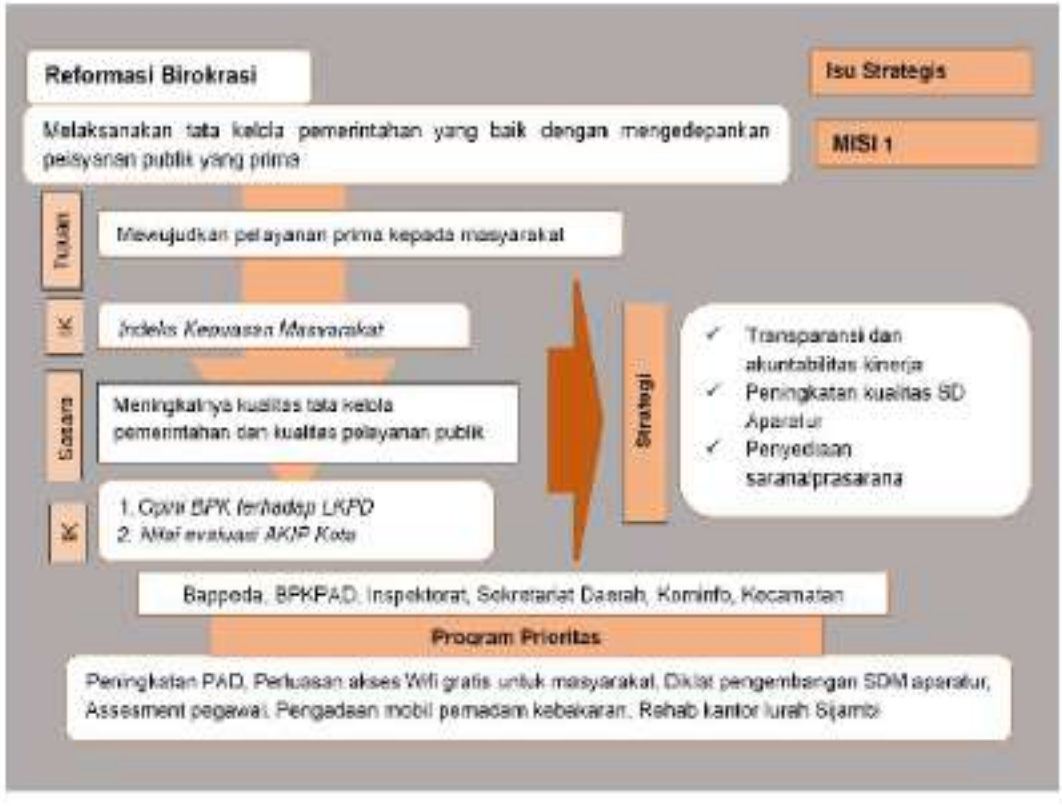
			Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (pagaldaan Truck dan TPA sanitary landfill)	-	√	√	√	√	Dinas LH	APBD, APBD Provinsi, APBN

Sementara untuk program prioritas yang masuk kategori *major project* dan bersifat *multiyear* seperti pembangunan Rumah sakit Type C, pembangunan jalan lingkar, pembangunan *water front city*, pengendalian banjir dan sedimentasi, serta pembangunan WTP VII pendanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme pinjaman daerah, Hibah Luar Negeri serta skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Selanjutnya untuk program yang membutuhkan kerjasama antar daerah seperti penanggulangan sedimentasi, pembangunan TPA Regional, penyelesaian jalan lingkar utara dan lain sebagainya Pemerintah Kota Tanjungbalai akan melakukan kebijakan kerjasama antar daerah dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerinthan Pusat.

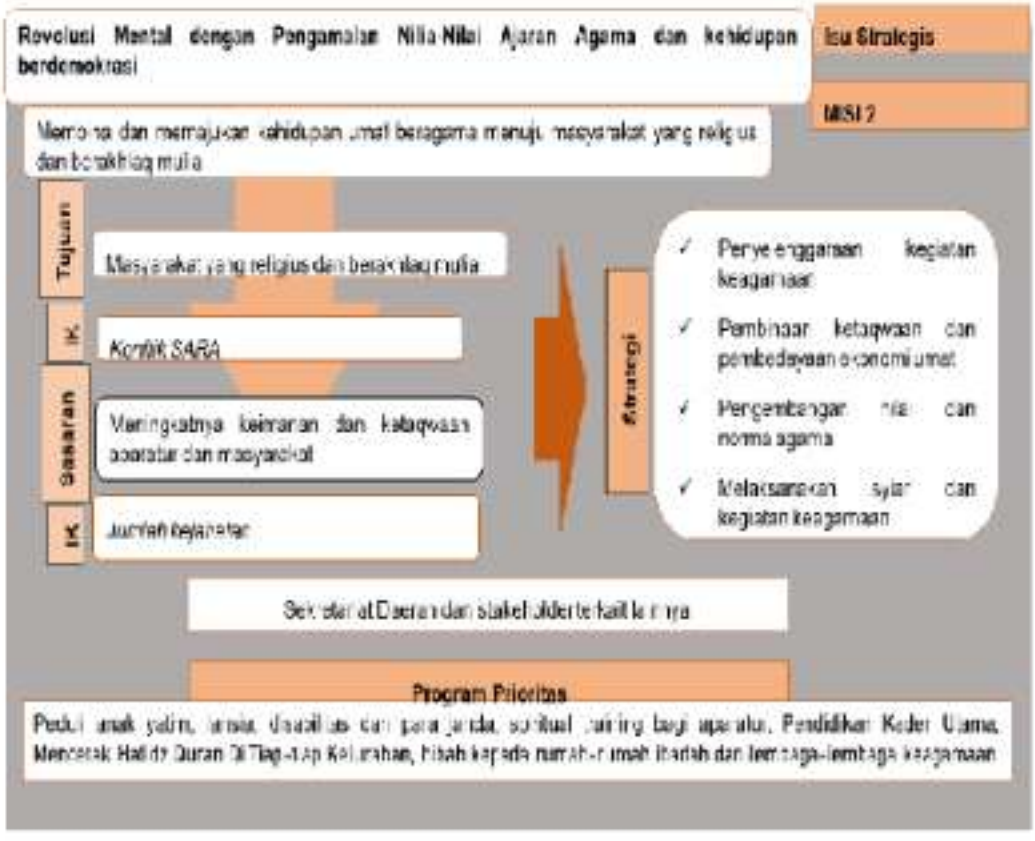
6.4 KERANGKA KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Dalam rangka mewujudkan Misi "Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis sebagaimana tertera pada skema berikut:



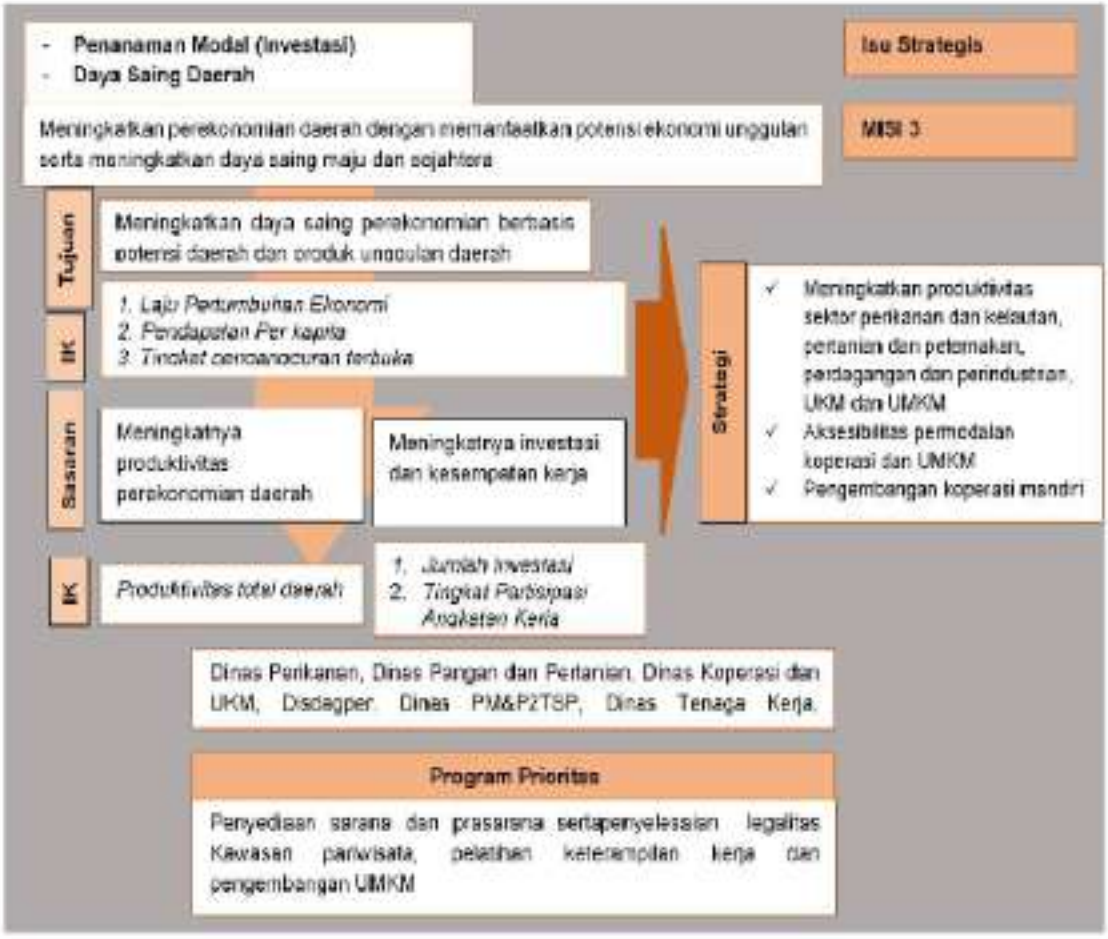
Gambar 6.1.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 1

Dalam rangka mewujudkan Misi "Membina dan memajukan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis dengan skema sebagai berikut:



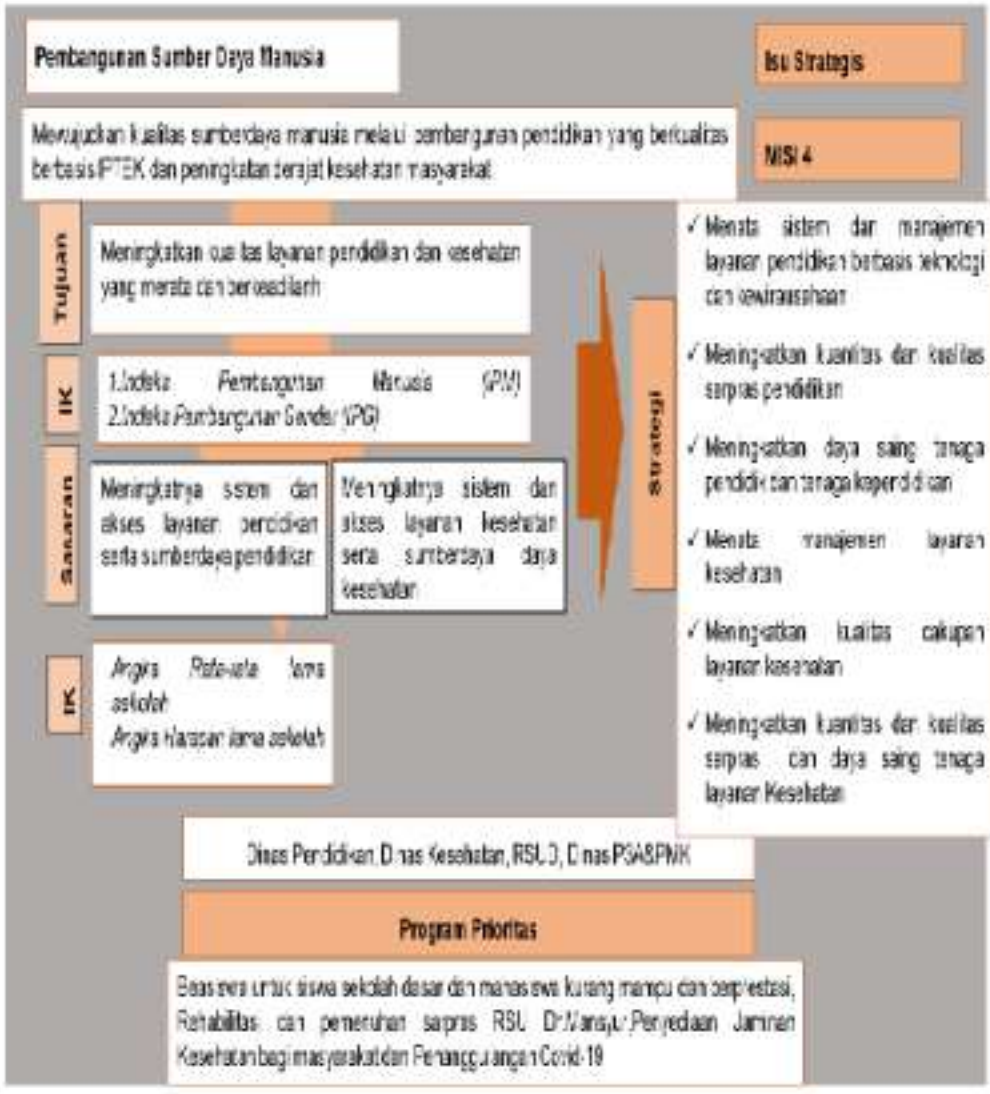
Gambar 6.2.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 2

Dalam rangka mewujudkan Misi "Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing maju dan sejahtera" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis dengan skema sebagaimana tertera pada bagan berikut:



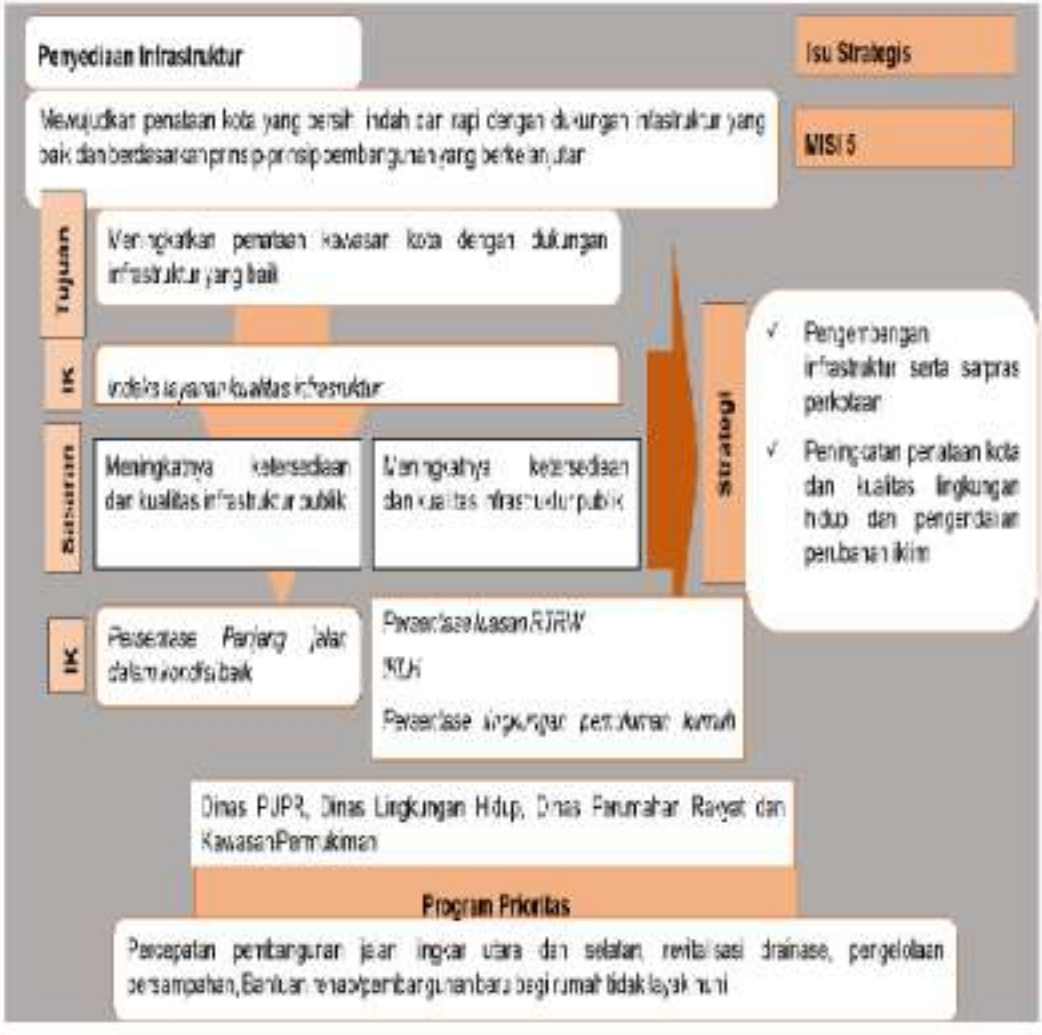
Gambar 6.3.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 3

Dalam rangka mewujudkan Misi "Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis dengan skema sebagai berikut:



Gambar 6.4.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 4

Dalam rangka mewujudkan Misi "Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infasuktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis sebagaimana skema berikut:



Gambar 6.5.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 5

Dalam rangka mewujudkan Misi "Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis sebagaimana tergambar pada skema berikut:



Gambar 6.6.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 6

Dalam rangka mewujudkan Misi "Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga" diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis sebagaimana tertera pada skema berikut:



Gambar 6.7.
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 7

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara eksplisit akan diimplementasikan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengakomodir semua urusan pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, prioritas pelayanan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan mandatory lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja serta pengeluaran perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya. Penentuan pagu indikatif untuk belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ke depan tentunya harus menyesuaikan dengan kapasitas riil keuangan Pemerintah daerah baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer dan mengikuti kaidah sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka Pendanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
	BELANJA	**714.080.312.426,04**	**717.702.134.872,48**	**700.644.006.170,61**	**706.046.886.197,00**	**710.830.022.802,02**
	Belanja Operasi	**557.010.643.836,04**	**560.014.137.241,52**	**511.970.473.936,67**	**524.186.880.406,00**	**538.806.186.014,00**
	- Belanja Pegawai	360.009.451.165,00	367.672.648.160,85	375.230.092.906,73	382.734.664.856,00	390.366.366.753,02
	- Belanja Barang Jasa	201.268.070.275,48	206.569.822.373,13	210.712.616.820,00	214.917.871.197,01	219.287.228.620,00
	- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah	13.876.756.191,56	14.134.241.215,82	14.376.777.142,12	14.634.312.684,99	14.896.998.938,99
	- Belanja Bantuan Sosial	11.208.268.000,00	11.637.633.360,00	11.650.982.027,20	11.870.031.667,74	12.111.581.701,10
	Belanja Modal	**125.406.293.789,00**	**115.459.097.630,64**	**92.238.876.586,94**	**79.499.634.038,69**	**79.599.647.201,09**
	- Belanja Modal	125.406.293.789,00	115.459.097.630,64	92.238.876.586,94	79.499.634.038,69	79.599.647.201,09
	Belanja Tidak Terduga	**2.244.000.000,00**	**2.288.880.000,00**	**2.334.657.600,00**	**2.381.350.752,00**	**2.429.977.787,00**
	- Belanja Tidak Terduga	2.244.000.000,00	2.288.880.000,00	2.334.657.600,00	2.381.350.752,00	2.429.977.787,00
	Belanja Transfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Selanjutnya berdasarkan perhitungan kapasitas ril keuangan di atas, maka dialokasikan program prioritas per urusan pembangunan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan disertai pagu indikatif periode 2021-2026 sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

TABEL 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

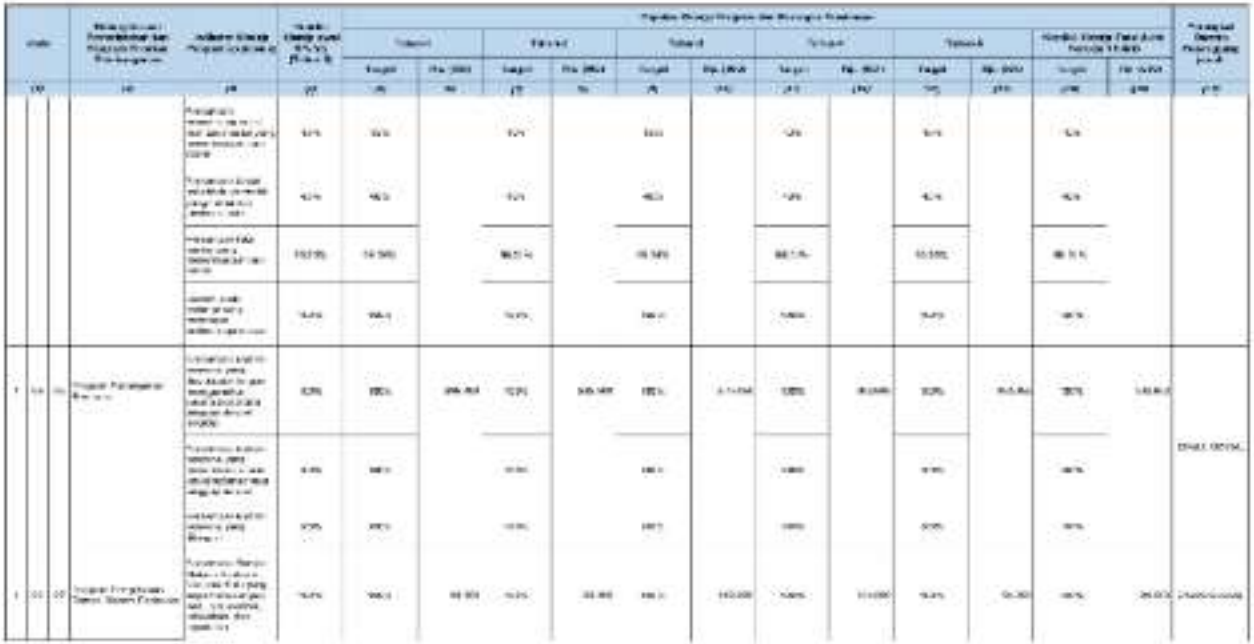
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]																
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pendidikan
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pendidikan
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pendidikan
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Hasil Program (outcome)	Kondisi Hasil saat ini (Th. Awal Perencanaan)	Capaian Hasil Program pada setiap tahun Perubahan											Kondisi Hasil pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)

1.03 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Nomenklatur Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Program (Outcome) Setelah Akhir Periode Renstra PD	Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab Program (Perangkat Daerah Penanggung Jawab)
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		
						Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	1.1	1.1.1																
	1.1	1.1.2																
	1.1	1.1.3																
2	2.1	2.1.1																
1	1.1	1.1.1																

| | | |



Kode			Program (Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Capaian Awal Periode Program	Target dan Pagu Indikatif Program Berdasarkan Program Prioritas											Kondisi Capaian Pada Akhir Periode Program		Program Dalam Perangkat Daerah
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Capaian Pada Akhir Periode Program			
						Target	Rp. (Rib)	Target	Rp. (Rib)	Target	Rp. (Rib)	Target	Rp. (Rib)	Target	Rp. (Rib)	Target	Rp. (Rib)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	08	03	Program Pendidikan Menengah	Persentase Penduduk Berusia 16-18 Tahun yang Sedang Bersekolah	100 %	100%	1.000.000	100 %	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	5.000.000		
2.2 PROGRAM PENUNJANG PENDIDIKAN																			
3	08	03	Program Pemenuhan Sarana Prasarana	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Terpenuhi	80 %	84%	2.000.000	85 %	2.000.000	86%	2.000.000	87%	2.000.000	90 %	2.000.000	90 %	2.000.000		
4	08	03	Program Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Terpenuhi	70 %	75%	1.000.000	80 %	1.000.000	85%	1.000.000	90%	1.000.000	95 %	1.000.000	95 %	5.000.000		
5	08	03	Program Pemenuhan Tenaga Pendidik	Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Standar	80 %	85%	1.000.000	90 %	1.000.000	95%	1.000.000	100%	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	5.000.000		
6	08	03	Program Pemerataan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	85%	90%	10.000.000	95%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000		
				Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah (SMA)	85%	90%		95%		100%		100%		100%		100%			
				Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah (SMK)	85%	90%		95%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Penduduk Usia Pendidikan Menengah yang Menyelesaikan Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	08	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Pendidikan Menengah yang Sesuai Standar	100 %	100%	1.000.000	100 %	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100 %	1.000.000	100 %	5.000.000		

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib/Urusan Pemerintahan Pilihan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Perubahan (Tahun ke)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Prioritas Daerah/Program/Kegiatan
				Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (Rp)	Target	Rp (Rp)	Target	Rp (Rp)	Target	Rp (Rp)	Target	Rp (Rp)	Target	Rp (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]																

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Pembangunan Kelurahan	Indikator Output Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun (Rp. Juta)	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan											Prioritas Daerah/ Prioritas Pembangunan Nasional
						Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun ke-5 (Rp. Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X	XX	XX	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	Persentase Rukun Warga yang mengikuti pemberdayaan	100%	2.501.000	100%	2.650.000	100%	2.810.000	100%	2.979.000	100%	3.158.000	100%	14.098.000	Misi 3 Program Prioritas 1
LURAH BANJAR PANGERAN																	
X	XX	XX	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat					100%	2.810.000							Misi 3 Program Prioritas 1
X	XX	XX	Program Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Pemuda Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Pemuda	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	250.000	Misi 3 Program Prioritas 1
X	XX	XX	Program Peningkatan Partisipasi Perempuan	Persentase Pemberdayaan Perempuan	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	250.000	Misi 3 Program Prioritas 1
X	XX	XX	Program Pengembangan Kerjasama Pihak Ketiga	Persentase Kerjasama Pihak Ketiga	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	50.000	20%	250.000	Misi 3 Program Prioritas 1
X	XX	XX	Program Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Perekonomian	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	5.000.000	Misi 3 Program Prioritas 1
[illegible]																	
X	XX	XX	Program Pengembangan Kerjasama Pihak Ketiga [illegible]	[illegible]	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	5.000.000	[illegible]

Kode			Nomenklatur Pembelanjaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun (Posisi Th)	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan												Prioritas Utama Pembangunan Daerah
						Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi di Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Kondisi	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] BIDANG PERHUBUNGAN																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja saat (CAWB) (Tahun Awal)	Target Kinerja Program dan Kelompok Sasaran pada Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
				Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)			
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	17	02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Persentase Koperasi Berkualitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	17	03	Program Pengembangan Kewirausahaan	Persentase UKM Naik Kelas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendukung	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	17	02	Program Pengembangan Koperasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	17	03	Program Pengembangan Kewirausahaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	17	04	Program Pemberdayaan Koperasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	17	05	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode			Nomenclature Pembangunan dan Program Perangkat Daerah/Kecamatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Perubahan RPJMD	Target dan Realisasi Kinerja Serta Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab Capaian Program (nama)
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode			Nama Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)												Prioritas Daerah/ Pelaksanaan Program/ Kegiatan
					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X	XX	XX															
SUNDANG PERMUSTIKAN																	
KESEJAHTERAAN DAERAH																	

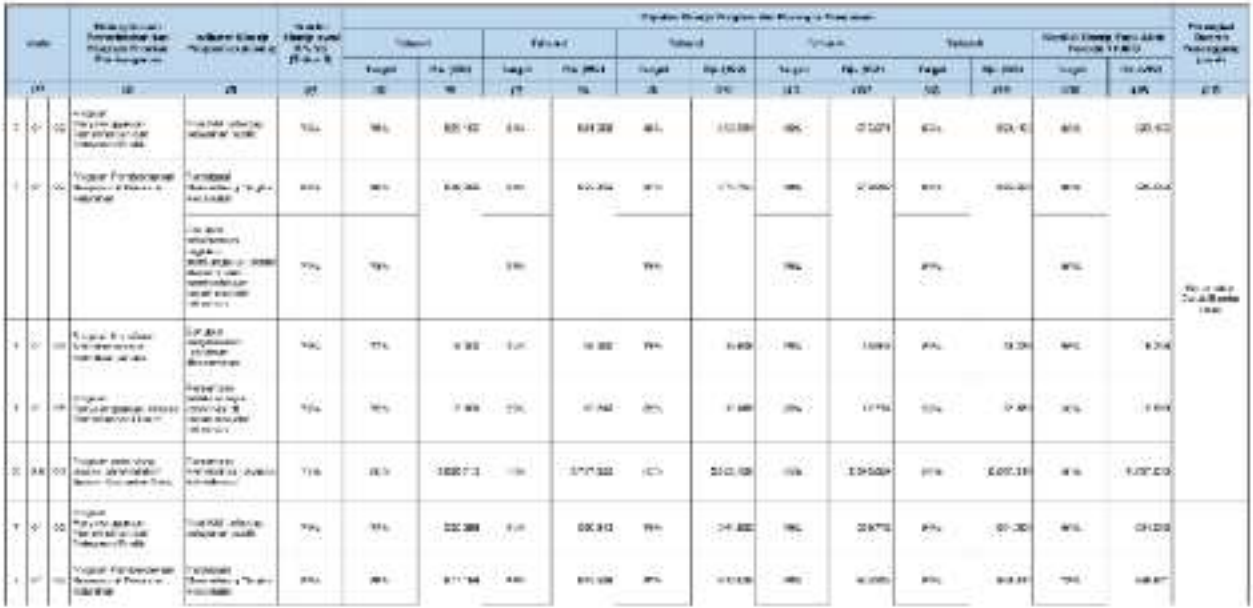
Kode			Program	Indikator	Kondisi Awal	Tahun 1 Target	Tahun 1 Rp	Tahun 2 Target	Tahun 2 Rp	Tahun 3 Target	Tahun 3 Rp	Tahun 4 Target	Tahun 4 Rp	Tahun 5 Target	Tahun 5 Rp	Kondisi Akhir Target	Kondisi Akhir Rp	Perangkat Daerah
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible] SEKRETARIAT DPRD																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		



Kode			Program Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Capaian Awal Periode Rencana (B)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Prakiraan Capaian Pada Akhir Periode Rencana (F)
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana (Tahun ke-5)	
						Target	Rp. (Rb)	Target	Rp. (Rb)	Target	Rp. (Rb)	Target	Rp. (Rb)	Target	Rp. (Rb)	Target	Rp. (Rb)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.2 PENINGKATAN KEMITRAAN																	
2.3 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN																	
2.4 PENINGKATAN KESEHATAN																	

[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] KECAMATAN																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	



[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Hasil Program/Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Hasil Program (outcome)														Prioritas Daerah
					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi di Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah		
					Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)			
(1)			(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
X	X	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX			
X	XX	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	X.XXX.XXX	XX%	XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX			
X	X	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	XX.XXX	XX%	XXX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX			
X	X	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	XX.XXX	XX%	XXX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX	XX%	XX.XXX			
				[illegible]	XX%		XX%		XX%		XX%		XX%		XX%				
X	X	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX			
X	XX	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX	XX%	X.XXX			
X	XX	XX	Program [illegible]	[illegible]	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX	XX%	X.XXX.XXX			

Kode			Nomor Urut Perubahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Capaian Awal (Tahun ...)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Prioritas Utama/ Pendukung/ Lain-lain
						Tahun ...		Tahun ...		Tahun ...		Tahun ...		Tahun ...		Kondisi Akhir di Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. (Mil)	Target	Rp. (Mil)	Target	Rp. (Mil)	Target	Rp. (Mil)	Target	Rp. (Mil)	Target	Rp. (Mil)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Tercapai atau tidaknya sebuah kinerja akan terlihat dari capaian indikator kinerja karena indikator kinerja menjadi sebuah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

8.1. Indikator Kinerja Utama

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tanjungbalai yang menjadi indikator keberhasilan capaian sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026 tertera pada tabel berikut:

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB
3	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	C	B	B	B	B	B
6	Jumlah Kejahatan	Kasus	570	520	480	430	400	380
7	Produktivitas Total Daerah		110,64	115,21	119,82	123,41	127,11	132,19
8	Jumlah investasi	Rp	6,97	6,30	6,00	5,70	5,50	5,30
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,84	66,54	67,76	68,01	69,17	70,83
10	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,44	9,59	9,67	9,75	9,83	9,90
11	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,58	12,60	12,64	12,68	12,68

12	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,27	63,85	64,14	64,43	64,72	65.01
13	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	68,36	70,00	71,50	73,00	74,70	76,00
14	Persentase luasan RTH	Persen	20,33	20,50	20,51	20,52	20,53	20,54
15	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	23,50	21,26	20,07	19,13	17,21	15,49
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,23	66	68	70	72	75
17	Demonstrasi berakhir Ricuh	kasus	0	0	0	0	0	0
18	Persentase penegakan Perda	Persen	66	72	75	78	81	84
19	Rasio ketergantungan	Rasio	58,09	57,43	57,25	56,96	56,67	56,39
20	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya

Sumber: Data diolah

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja yang meliputi aspek kesejahteraan, aspek layanan umum dan aspek daya saing.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode Tahun 2021–2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai secara rinci disajikan pada tabel berikut:

TABEL 6.2

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021 - 2026

NO.	ASPEK/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2020)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	0,07	6,20	6,30	6,30	6,70	6,70	6,70	6,50
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	4,00	3,50	3,60	3,70	3,80	3,60
	B. Pertambangan dan Penggalian			5,00	5,20	5,50	5,60	5,80	5,50
	C. Industri Pengolahan	-	-	5,50	5,40	5,50	6,00	6,00	5,60
	D. Pengadaan Listrik dan Gas			5,00	5,20	5,00	6,00	5,20	5,20
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	-	-	5,20	5,30	5,30	5,40	5,60	5,40
	F. Konstruksi	-	-	5,20	5,00	5,90	5,90	5,60	5,60
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-	6,40	6,30	6,40	6,40	6,40	6,40
	H. Transportasi dan Pergudangan	-	-	6,40	7,00	6,80	6,80	6,70	6,70
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	5,00	5,40	5,50	5,10	5,10	5,10

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun -1	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	3. Informasi dan Komunikasi	-	-	6,80	6,90	6,40	6,60	6,63	6,63
	4. Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	5,20	5,60	5,90	4,00	4,33	4,33
	5. Jasa Properti			5,70	5,80	5,50	5,80	5,63	5,63
	6. Jasa Perusahaan	-	-	5,20	5,30	5,40	5,60	5,63	5,63
	7. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			7,20	7,30	7,30	7,30	7,43	7,43
	8. Jasa Pendidikan	-	-	6,20	6,40	6,60	7,00	7,33	7,33
	9. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			6,20	6,60	6,30	6,20	5,13	5,13
	10. Jasa lainnya	-	-	7,50	7,30	7,30	7,30	7,43	7,43
2.	PDRB ADHB			12.708.903,71	11.080.405,55	12.703.020,69	14.202.300,63	14.911.681,29	14.911.681,29
3.	PDRB ADHK 2010	-	-	6.558.501,20	6.740.829,08	7.135.047,08	7.339.277,43	7.560.914,13	7.560.914,13
4.	ADHB per kapita (Rp. Juta)	62,19	65,79	80,29	96,14	76,47	76,27	62,80	62,80
5.	Indeks (poin)	0,372	0,373	0,378	0,380	0,382	0,383	0,384	0,384
6.	Persentase Penduduk Hidup Garis Kemiskinan	13,09	13,05	12,79	12,53	11,85	11,34	10,86	10,86
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	69,66	69,72	69,79	70,00	70,83	71,4	72,04	72,04

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR/KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9.44	9.62	9.56	9.67	9.78	9.89	9.99	9.99
10.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	63.27	63.62	63.80	64.14	64.49	64.72	65.01	65.01
11.	Pengangguran Terbuka (orang)	6,61%	6,80%	6,70%	6,80%	6,90%	6,80%	6,70%	6,70%
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,61%	6,70%	6,60%	6,60%	6,70%	6,60%	6,50%	6,50%
13.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	18,65%	-	15,00%	16,00%	17,00%	16,00%	15,00%	15,00%
14.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Konsistensi Sistim Pelaporan Pertanggungjawaban terhadap PERDA	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	ASPEK DATA BANK DAERAH								
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita	1.030.185	1.056.797	1.081.662	1.108.201	1.134.710	1.235.914	1.235.914	1.297.709
2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita	40,58	38,64	41,37	41,38	42,41	43,26	41,62	46,12
3.	Konsumsi Non Rumah Tangga	-	113.04	111.55	115.91	119.67	123.41	127.11	132.99

No.	ASPEK/FUNGSI/URUSAN/ UBIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2020)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan								
1.1.	Angka Partisipasi Kasar :								
1.1.1.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	10,03	10,03	59,00	54,00	55,03	59,00	57,68	57,23
1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	101,03	101,03	102,96	103,00	103,05	103,07	103,18	103,13
1.1.3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100,03	100,00	98,37	98,40	98,45	98,61	98,74	98,74
1.2.	Angka Penduduk usia wajib 12 tahun	2.650,03	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.700,03	2.750,00	2.650,03	2.800,23
1.3.	Angka Partisipasi Murni :								
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,03	93,00	93,76	93,80	93,47	93,85	93,74	93,74
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,32	87,32	87,45	87,62	87,84	88,00	88,28	88,28
1.4.	Angka Partisipasi Sekolah :								
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	935,03	936,03	937,08	938,00	939,73	940,00	941,68	941,53
1.4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	344,53	344,53	345,68	346,50	347,53	348,00	349,58	349,53

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2020)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.0.	Angka Putus Sekolah :								
1.0.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
1.0.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10	0,10	0,20	0,20	0,22	0,21	0,20	0,20
1.0.	Fasilitas Pendidikan								
1.0.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik/Layak Baik	80,00	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00	99,00	99,00
1.0.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Baik/Layak Baik	85,00	90,00	90,00	94,00	96,00	97,00	99,00	99,00
1.0.3.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Pendidikan Dan Aksesibilitasnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	50,00	-	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
1.8.	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	50,00	-	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	6	-	5	5	4	3	3	3
2.2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	7	-	7	6	5	5	4	4
2.5.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	10	-	9	8	6	4	3	3

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
2.6	Angka Kematian Neonatus per 1000 Kelahiran Hidup	4	-	4	3	3	1	0	0
2.6	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	239	-	156	108	80	60	42	42
2.6	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7.4	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
2.7	Rasio Puskesmas, Pembantu, Pesta per Satuan Penduduk	0.16	-	0.5	0,4	0,6	0,8	1	1
2.8	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0.01	-	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
2.9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Cakupan pasien JKN	87%	-	90%	85%	90%	95%	100%	100%
2.12	Persentase kecamatan dengan layanan	80%	-	80%	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Pekerjaan Umum								
3.1.1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap	159.627	-	153.759	156.825	159.441	162.749	165.234	165.234
3.1.2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	96,52%	-	97,62%	98,80%	92,00%	93,90%	97,00%	97,62%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
3.1.3.	Persyaratan operasional dan keamanan kapal sesuai peruntukannya di perairan tidak terpenuhi	63,64%	-	66,82%	67,82%	69,00%	72,00%	74,00%	74,00%
3.2.	Pelayaran Rakyat								
3.2.1.	Terselenggaranya trayek pelayaran rakyat yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3.2.2.	Jumlah RTH publik setidaknya 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20,33%	-	20,50%	20,51%	20,52%	20,53%	20,54%	20,54%
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
4.1.	Rasio rumah layak huni	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
4.3	Persentase lokasi permukiman kumuh kewenangan perkotaan	33,62%	33,62%	34,62%	35,62%	36,62%	37,62%	38,62%	38,62%
4.3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	5,71%	5,71%	4,71%	3,71%	2,71%	1,71%	0,71%	0,71%
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,83%	-	0,85%	0,87%	0,88%	0,89%	0,89%	0,89%
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentram, Ketertiban, Kerlindungan	96,29%	-	80%	81%	82%	83%	83%	83%
5.3	Cakupan Pelayanan Bantuan Hukum di Kabupaten/Kota	98,41%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Hasil Daerah Layanan Wajib Kewajiban Kesatuan (WKK)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5.	Persentase Penegakan Perda	80%		80%	82%	84%	82%	83%	83%
6.	Sosial								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	87,87%		92,42%	92,42%	92,98%	92,49%	92,49%	92,49%
6.2.	Rasio Jasa PMKS yang terlayani	97,87%		97,23%	97,23%	97,17%	97,23%	97,23%	97,23%
	Layanan Bidang Wajib Non Dasar								
1.	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka pengajuan Perjanjian Kerja per tahun (Kasus)	92,23		93,03	95,03	95,03	97,00	97,03	97,23
1.2.	Pekerja kasus yang diselesaikan Aduan Perjanjian Perburuh (PP)	90,23		65,03	60,03	65,03	70,00	75,03	75,23
1.3.	Pekerja pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38,23		25,03	30,03	35,03	40,00	45,03	45,23
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	80,23		82,03	85,03	87,03	89,00	91,03	91,23
1.5.	Pemenuhan hak buruh atas perjuangan terhadap ketidakadilan pemerintah daerah	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target [2021]	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.6	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,00	-	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00
1.7	Persentase tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis masyarakat	73,00	-	76,00	79,00	82,00	85,00	88,00	88,00
1.8	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	76,00	-	79,00	82,00	85,00	88,00	91,00	91,00
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2.3	Rasio KDRT	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	70,60%	-	70,20%	75,00%	80,80%	85,00%	90,80%	85,00%
2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	98%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	92%	-	92%	93%	96%	98%	100%	100%
2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	72%	-	72%	82%	90%	92%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
3	Pangan								
3.1	Ketersediaan pangan utama	25,39%	-	25,39%	26,42%	27,46%	28,03%	28,59	28,59
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Nilai pengaduan atas kasus kualitas lingkungan hidup	58,33	-	61,02	61,31	62,29	62,90	63,42	64,31
4.2	Penanganan Pencemaran Sampah	77%	-	70%	70%	70%	71%	70%	70%
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	88,25%	-	89,40%	89,40%	89,40%	89,40%	89,40%	89,40%
5.2	Rasio akta kelahiran	98,63%	-	98,98%	99%	100%	100%	100%	100%
5.3	Rasio penerbitan surat/akta nikah	56,63%	-	56,63%	60%	70%	80%	80%	85%
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan								
6.1	Persentase LPM Berprestasi	30%		80%	70%	80%	90%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,44	-	1,41	1,41	1,40	1,39	1,40	1,40
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,96	-	2,90	2,90	2,85	2,80	2,75	2,75
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,93	-	2,88	2,85	2,85	2,85	2,88	2,80
7.4	Rasio Akseptor KB	66,45	-	66,50	66,55	66,70	66,75	66,80	66,80
7.5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	35/1000		35/1000	34/1000	33/1000	33/1000	32/1000	32/1000
7.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,80	-	16,70	16,60	16,50	16,40	16,30	16,30
7.7	Persentase anak kawin pertama wanita	21,23	-	22,03	22,03	22,03	22,03	23,03	23,03
8	Perhubungan								
8.1	Rasio per kapita	1 : 1863	1 : 1863	1 : 1863	1 : 1863	1 : 1863	1 : 1863	1 : 1863	1 : 1863
8.2	Persentase kepatuhan terhadap KIR angkutan umum	65%	80%	65%	70%	60%	60%	70%	80%
8.3	Pemenangan Pemberantasan	0%	0%	10%	20%	50%	70%	100%	100%
9	Komunikasi dan Informatika								
9.1	Persentase kelancaran informasi publik	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
9.2	Persentase Anggaran Belanja Modal yang [illegible]	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
10.1.	Persentase koperasi aktif	45,21%	-	45,73%	46,15%	46,58%	46,98%	47,37%	47,37%
10.2.	Persentase koperasi sehat	57,95%	-	58,98%	60,00%	60,98%	61,98%	62,95%	62,95%
10.3.	Persentase Usaha Mikro menjadi Wajib Usaha	11,09%	-	11,98%	12,82%	12,25%	12,68%	13,03%	13,03%
11	Penanaman Modal								
11.1.	Jumlah investor	4	-	4	5	5	5	10	10
11.2.	Jumlah nilai investasi	98.951.300	-	15.351.200	13.951.228	13.936.110	13.945.991	15.955.016	13.955.013
11.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	15		15	17	19	20	23	23
11.4.	Nilai IKM	87	-	87	87	87	88	88	88
12	Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja								
12.1.	Persentase koperasi yang [illegible]		-	38%	39%	40%	49%	50%	50%
12.2.	Persentase [illegible]		-	30%	40%	40%	50%	50%	50%
12.3.	Jumlah [illegible]			27.00	29.00	32.00	34.00	36.00	36.00

No.	ASPEK/FOKUS BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
12.4.	Jumlah [illegible]		-	9.09	10,00	11.00	12.00	13.00	13,00
13	Statistik								
13.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
13.2.	Buku Kabupaten dalam angka	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
13.3.	Buku PDRB	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
13.4.	Persentase data statistik sektoral yang Akurat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persandian								
14.1.	Persentase sumberdaya komunikasi informasi dibangun untuk pengamanan informasi		-	50%	60%	50%	70%	100%	100%
15	Kebudayaan								
15.1.	Rasio Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5,00
15.2.	Jumlah cagar budaya yang diberikan nama tersebut		-	-	1,00	1.00	1.00	1.00	1,00
16	Perpustakaan								
16.1.	Jumlah [illegible]	19751 Org		44.950 Org	44.900 Org	44.700 Org	44.500 Org	44.950 Org	44.900 Org

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tangsel (2023)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
16.5	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1.130	-	1.145	1.150	1.158	1.164	1.170	1.170
16.6.	Jumlah pustakawan tenaga teknis dan pental yang memiliki sertifikat	0%	-	60,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%
17	Kearsipan								
17.1.	Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baik	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan Layanan Unggulan Arsip	-	-	3 org	3 org	3 org	5 org	6 org	6 org
1	Pariwisata								
1.2	Kunjungan wisata	9.221	-	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
1.3	PAD sektor pariwisata	990.720.864		800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
2	Pertanian								
2.1	Produktivitas padi atau tanaman pangan unggulan lainnya per hektar	330		299	303	307	307	314	314
2.2	Nilai Tukar Petani	103	-	103	104	105	106	107	107
3	Perdagangan								
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,71	-	22,85	23,10	23,46	23,81	23,97	23,97

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
3.2	Ekspor Garam Pencegangan	-	-	350 Ton	400 Ton	330 Ton	540 Ton	430 Ton	483 Ton
4	**Pertanian**								
4.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	19.44	-	19.73	20.02	20,3	20.59	20,88	22,09
5	**Kelautan dan Perikanan**								
5.1	Produksi perikanan tangkap (ton/th)	32.817,00		32.943,11	33.070,69	33.803,20	33.811,33	34.039,78	31.036,79
5.2	Produksi perikanan budidaya (ton/th)	220,00		229,00	229,09	233,00	237,00	241,00	241,33
5.3	Konsumsi ikan/kapita/tahun	53,75	-	56,00	57,09	58,00	58,01	59,00	60,33
6.3	Nilai tukar nelayan	103,00	-	104,00	104,09	105,00	106,00	106,00	106,33
	Layanan Dasar								
1.	**Perencanaan Pembangunan**								
1.1	Cakupan keterpaduan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disepakati dengan PEMDA/PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Pelaksanaan Konsistensi Program RPJMD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Capaian hasil evaluasi dokumen perencana (RPJMD/RKPD) yang disepakati	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
2.	Keuangan								
2.1	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	1,8	1,8	1,64	1,35	0,64	0,78	0,92	0,45
2.3	Persentase PAD terhadap APBD			18	18	18	18	18	18
2.4	Cakupan aset Daerah yang terinventarisir	90		100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,50	20,50	20	20	20	20	20	20
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,84	10,84	10	10	10	10	10	10
2.7	Pelaporan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan								
3.1	Indeks profesionalitas ASN			71,65 (sedang)	71,90 (sedang)	71,58 (sedang)	71,65 (sedang)	81,90 (Tinggi	81,90 (Tinggi)
4.	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase usaha Badan Hukum kelompok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase terhadap Hukum yang ditangani di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Target (2021)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
5.	Pengawasan								
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	78,46%		80,46%	81,46%	82,46%	83,46%	84,46%	84,46%
5.2	Persentase penanganan pengaduan	48,67%	-	49%	53%	56%	59%	63%	63%
5.3	Jumlah temuan BPK	68	-	38	68	76	68	56	56
6.	Sekretariat Dewan								
6.1	Terkoordinirnya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
6.2	Terkoordinirnya Penyelenggaraan Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Alat-alat Kelengkapan DPRD dan Rencana Tahunan (RAPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
6.3	Terlaksana program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Pelaksanaan dan Dokumen Anggaran Setwan (DPA)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang bersifat strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan utamanya bagi penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu posisi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagai penentu bagi tercapainya arah kebijakan periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yakni mewujudkan Tanjungbalai maju, madani dan berdaya saing. Oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak untuk memahami bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPJMD dijadikan rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh perangkat daerah maupun pihak lain yang berkepentingan.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan landasan hukum yang secara formal dijadikan rujukan utama bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Tanjungbalai yang berisikan isu-isu dan program-program strategis yang hendak dicapai 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD memuat tujuan, sasaran serta target-target sasaran pembangunan yang menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan Kota Tanjungbalai periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Sesuai dengan tujuan kaidah pelaksanaan yakni untuk tercapainya koordinasi dan keberlanjutan program serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahunnya.
2. RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya akan dijabarkan melalui RKPD Kota Tanjungbalai yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
3. Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Walikota.
4. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Tanjungbalai merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
5. RPJMD dimungkinkan dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti:

terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
6. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Tanjungbalai tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

9.2. Pedoman Transisi

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Kepala Daerah yang baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Mengingat masa berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini adalah di tahun 2026, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah saat transisi/ peralihan sampai dengan dilantiknya kepala daerah yang baru, dokumen RPJMD ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun awal di bawah kepemimpinan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. RPMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih;
3. Mengingat masa jabatan Kepala Daerah adalah 2021-2024, maka sisa waktu periode RPJMD masih dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan tahunan selama masa transisi, selama sebelum adanya revisi atau penyesuaian dengan kebijakan yang baru dari Pemerintah.
4. Selanjutnya RKPD masa transisi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas RPJMD periode berikutnya. Dan RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk Menyusun APBD pada masa transisi.

Terakhir berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 050/3499/SJ dan Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa kepada Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyusunan serta penyelasaran dokumen RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan mengisi instrumen penyelarasan sesuai ketentuan Surat Edaran tersebut. Selanjutnya hasil penyelarasan dimaksud menjadi lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan menjadi salah satu pedoman pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun rencana.